



RACHMAT GOBEL

Restorasi
untuk Kesejahteraan
dan Martabat Bangsa

KIPRAH TAHUN KE-3 KINERJA WAKIL KETUA DPR RI/KORINBANG

Editor: Herman Effendi



RACHMAT G O B E L

Restorasi untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa

**KIPRAH TAHUN KE-3
KINERJA WAKIL KETUA DPR RI/KORINBANG**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2023**

RACHMAT GOBEL
RESTORASI UNTUK KESEJAHTERAAN DAN MARTABAT BANGSA
KIPRAH TAHUN KE-3 : KINERJA WAKIL KETUA DPR RI/KORINBANG

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
viii + 420 hlm., 17 x 24 cm

ISBN 978-602-8722-47-6
Cetakan Pertama, Maret 2023

Penulis:

Nining Indra Shaleh (Koordinator)
Nasihin Masha
Budi Jatnika
Rini Koentarti
Hafzur Rahman
Andreas Ambesa
Muh. Adriansah Laitte
T. Eriko Silaban
Rismunandar

Editor:

Herman Effendi

Korektor Naskah:

Nining Indra Shaleh

Foto:

Azka Restu Afdilah

Rancang Sampul dan Tata Letak:

La Ode Atri Sarjani Munanta

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Tlp. 021—571 5697 Faks. 021—571 5421
Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

All rights reserved

Restorasi untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa

“Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terdorong untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri.”

- Manifesto Partai Nasdem -



Ucapan Terima Kasih

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera buat kita semua

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia dan rahmat-Nya, yang telah dilimpahkan kepada kita semua.

Melalui kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, yang telah mendukung dan mempercayakan aspirasinya, serta memberi inspirasi selama kami menjalankan tugas sebagai anggota DPR-RI, pada masa persidangan 2021-2022.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada kader Partai NasDem dan rekan-rekan sejawat di DPR, atas semua kerjasamanya dalam mengemban dan melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota legislatif.

Tidak lupa terima kasih atas dukungan keluarga besar, isteri dan anak-anak, serta teman-teman dan sahabat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penulis, tenaga ahli, staf di DPR-RI, sehingga laporan kegiatan selama satu tahun masa persidangan 2021-2022 bisa diterbitkan dalam bentuk buku "Restorasi untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa".

Kami menyadari, masih banyak kekurangan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota dewan, namun kami bertekad untuk terus berupaya keras meningkatkan pengabdian, demi terwujudnya bangsa Indonesia Yang Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, selalu membimbing langkah kita dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Salam Hormat

Rachmat Gobel

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang
No. Anggota 401



Kata Pengantar

Buku “Restorasi Untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa” merupakan rangkuman gagasan dan laporan kegiatan Rachmat Gobel sebagai anggota DPRI-RI dari Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo yang juga Wakil Ketua DPR-RI Korinbang sepanjang periode Masa Persidangan Tahun 2021-2022.

Frasa “**Restorasi Untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa**” karena inilah yang menjadi spirit Rachmat Gobel dalam menjalankan amanah yang dipikulnya sebagai kader Partai NasDem. Restorasi telah menjadi kata kunci bagi perjuangan Partai NasDem, yaitu memperkuat kembali seluruh pola pikir, kemampuan dari pada filosofis yang memang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, kearifan lokal yang ada, adat istiadat, konstitusi UUD 45, dalam setiap aspek kehidupan baik politik, ekonomi maupun budaya.

Buku ini mengupas bagaimana Rachmat Gobel mengimplementasikan semangat Pergerakan Perubahan Restorasi yang dicetuskan oleh Partai NasDem sejak awal berdiri pada 2011 lalu. Partai NasDem merumuskan gerakan restorasi ini dalam visi “Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.” Ada tiga kata kunci penting dalam visi ini yaitu merdeka, kedaulatan ekonomi, dan martabat budaya.

Buku “Restorasi Untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa” merupakan rangkuman gagasan dan laporan kegiatan Rachmat Gobel sebagai anggota DPRI-RI dari Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo yang juga Wakil Ketua DPR-RI Korinbang sepanjang periode Masa Persidangan Tahun 2021-2022.

Frasa “**Restorasi Untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa**” karena inilah yang menjadi spirit Rachmat Gobel dalam menjalankan amanah yang dipikulnya sebagai kader Partai NasDem. Restorasi telah menjadi kata kunci bagi perjuangan Partai NasDem, yaitu memperkuat kembali seluruh pola pikir, kemampuan dari pada filosofis yang memang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, kearifan lokal yang ada, adat istiadat, konstitusi UUD 45, dalam setiap aspek kehidupan baik politik, ekonomi maupun budaya.

Buku ini mengupas bagaimana Rachmat Gobel mengimplementasikan semangat Pergerakan Perubahan Restorasi yang dicetuskan oleh Partai NasDem sejak awal berdiri pada 2011 lalu. Partai NasDem merumuskan gerakan restorasi ini dalam visi “Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.” Ada tiga kata kunci penting dalam visi ini yaitu merdeka, kedaulatan ekonomi, dan martabat budaya.

Melalui buku ini, masyarakat diharapkan bisa memahami dan menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan bagi Restorasi Indonesia. Mengembalikan roh pembangunan kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

Tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan Rachmat Gobel. Berdialog dengan rakyat dan berbagai kalangan, mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah ekonomi rakyat. Menyerap aspirasi dan persoalan yang dihadapi rakyat untuk dicarikan solusinya, baik melalui berbagai persidangan di DPR-RI, maupun langsung kepada pejabat pemerintah terkait sebagai rekomendasi atau masukan.

Persoalan besar yang dihadapi Indonesia adalah membangun kedaulatan ekonomi rakyat, bukan hanya sebatas meningkatkan aliran investasi. Dalam arti, tujuan investasi jangan hanya sebatas memperluas lapangan kerja dan pertumbuhan, tapi juga harus menjamin berlangsungnya restorasi untuk perkuatan struktur perekonomian nasional. Ini harus tercermin pada upaya memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara kelompok masyarakat. Setiap kebijakan ekonomi pemerintah harus bisa menjamin perbaikan ekosistem ekonomi, mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk mengangkat kesejahteraan dan martabat bangsa.

Ruang lingkung buku ini adalah peran dan perjuangan Rachmat Gobel dalam kegiatan legislasi, anggaran dan pengawasan, diplomsni parlemen dan juga sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI.

Rachmat Gobel yakin, dengan meneladani nilai perjuangan para founding father serta memohon pertolongan kepada Allah Yang Maha Kuasa, cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat akan terwujud. Menjadi bangsa yang bermartabat dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia.

Tim Penyusun



Daftar Isi

v-vii

UCAPAN TERIMA KASIH
KATA PENGANTAR

1-9

BAB 1
PENDAHULUAN

11-32

BAB 2
FUNGSI LEGISLASI

33-46

BAB 3
FUNGSI ANGGARAN

47-82

BAB 4
FUNGSI PENGAWASAN

83-129

BAB 5
PERAN DIPLOMASI DPR RI

131-157

BAB 6
GAGASAN & KOMITMEN

159-206

BAB 7
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
GORONTALO

207-237

BAB 8
LIPUTAN KHUSUS

239-305

BAB 9
MENUJU PEMILU 2024

307-365

BAB 10
KEMBALI MENYAPA KONSTITUEN
DI AKAR RUMPUT

367-415

BAB 11
KALEIDOSKOP

416-420

TIM PENYUSUN BUKU





BAB

PENDAHULUAN

“Membangun Indonesia yang adil dan
Indonesia makmur harus dilakukan
dengan rasa tanggung jawab serta
keberanian menghadapi segala kesukaran.

Pokok kemauan dan
keberanian itu terletak pada
cinta akan kebenaran dan keadilan,
sebagai pembawaan orang berilmu
cinta akan suatu cita-cita besar
yang menjadi penyuluh harapan bangsa.”

- Bung Hatta -

Restorasi Untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa



“..... Restorasi yang kita maksudkan itu adalah memperkuat kembali seluruh pola pikir, kemampuan dari pada filosofis yang memang hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa kita, kearifan lokal yang ada, adat istiadat, konstitusi UUD 45. Kita ingin kembali penguatan semua itu, termasuk ideologi dasar negara kita yaitu Pancasila. Kita ingin perkuat itu, itu yang dimaksud Restorasi Indonesia.....” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidatonya pada Apel Siaga Perubahan Restorasi Indonesia di depan lebih 15.000 kader, 23 Februari 2014, di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

RESTORASI adalah kata kunci bagi pergerakan Partai NasDem yang lahir dari kegelisahan Surya Paloh atas perjalanan situasi dan kondisi bangsa. Gerakan reformasi yang semula diniatkan dan diharapkan sebagai langkah untuk melakukan koreksi terhadap praktik dan kebijakan yang dianggap salah atau tidak tepat pada rezim masa lalu, dalam faktanya tidak berlangsung sebagaimana yang dicita-citakan.



Gerakan reformasi yang diharapkan menghilangkan berbagai praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, dalam kenyataannya tidak terlalu mengembirakan malah marak dan tumbuh subur, merasuk ke dalam kehidupan kemasyarakatan. Demokrasi juga berjalan gamang dan menghasilkan kompetisi yang bersifat transaksional yang berakhir dengan transaksional pragmatis itu sendiri.

“Inilah yang menjadi kesedihan di hati kita semua. Ketika negara lain bergerak maju dan lebih maju lagi, kita mundur. Kita tidak mengalami apresiasi, rasa dihormati, disegani oleh dunia sebagai bangsa yang harusnya besar,” kata Surya Paloh dalam bagian lain pidatonya saat itu.

Restorasi adalah gerakan perubahan yang menatap masa depan dengan landasan cara pikir, nilai filosofi kearifan, adat istiadat yang hidup di tengah bangsa serta konstitusi UUD 45. Gerakan untuk memperkuat kembali jati diri bangsa yang diwariskan para pahlawan, *founding fathers*, semangat berdaulat untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Semangat inilah yang membangkitkan soliditas, kebersamaan, dan gotong royong para *founding father* sehingga mampu memerdekakan bangsa ini, mendobrak belenggu penjajahan yang bercokol lebih dari 3 abad.

Semangat restorasi inilah yang tentunya menjadi salah satu alasan keputusan Rachmat Gobel bergabung dan menjadi bagian kader Parta NasDem pada 2016. Ia meninggalkan dunia bisnis yang sudah digelutinya lebih dari 30 tahun, sejak usia muda ketika menerima tanggung jawab sebagai pewaris grup usaha National Gobel dari ayahnya Thayeb Mohammad Gobel yang wafat pada 1984.

Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia yang diusung Partai NasDem sangat mengena dalam hati dan pikiran Rachmat Gobel. Partai NasDem merumuskan gerakan restorasi ini dalam visi “Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.”

Ada tiga kata kunci penting dalam visi ini yaitu merdeka, kedaulatan ekonomi, dan martabat budaya.

Sejalan dengan amanat partai yang mempercayainya sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinasi Pembangunan dan Industri (Korinbang), mewujudkan visi kedaulatan ekonomi adalah fokus utama dari agenda kerja Rachmat Gobel. Visi ini menjadi landasan baginya dalam menjalankan fungsi politik sebagai anggota dan pimpinan DPR RI, baik itu dalam kegiatan bidang legislasi, pengawasan, termasuk dalam diplomasi parlemen.

Kedaulatan Ekonomi Rakyat

Makna sejati kedaulatan ekonomi adalah bangsa Indonesia memiliki sikap yang mandiri dalam bidang perekonomian, dan mempunyai daya tawar yang kuat sehingga tidak lagi bergantung pada negara lain dalam mencukupi kebutuhan perekonomian bangsa. Kedaulatan ekonomi bagi seluruh rakyat adalah bagian dari tujuan kemerdekaan bangsa ini.

Dalam praktiknya, kedaulatan ekonomi berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan ekonomi sangat terkait dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Partai NasDem, kata Rachmat Gobel, mengartikan kedaulatan ekonomi ini sebagai upaya secara serius memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kemajuan pembangunan ekonomi tanpa upaya meminimalisasi kesenjangan adalah usaha pembangunan yang kontra-produktif. Jangan sampai kedaulatan ekonomi itu hanya milik segelintir orang atau kelompok.

Saat ini, kedaulatan ekonomi rakyat terasa kian dilemahkan, masih sangat banyak kehidupan ekonomi rakyat yang tercecer. Dengan pendapatan per kapita di atas US\$ 4.000 Indonesia memang masuk dalam katagori *middle income country*, namun fakta lain menunjukkan, jumlah penduduk miskin masih tinggi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 26,16 juta orang atau sekitar 9,5% dari total penduduk. Angka itu belum termasuk kelompok rentan miskin yaitu mereka yang sudah di atas garis kemiskinan, namun perekonomiannya belum kuat dalam kelompok pendapatan menengah (*middle income*). Kondisi perekonomian mereka masih sangat rentan untuk turun kembali ke dalam kelompok miskin. Menurut perkiraan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam katagori kelompok ini mencapai 115 juta jiwa atau sekitar 45% dari dari total penduduk.

Meski dari sisi Gini Ratio membaik, namun indikator lain menunjukkan ketimpangan ekonomi masyarakat kian besar. Ekonomi memang tumbuh setiap tahun, namun tidak terdistribusi dengan merata. Menurut laporan World Inequality Report 2022, kelompok masyarakat berpendapatan 10% teratas menguasai 48% dari total pendapatan nasional, naik dari 41,5% dibandingkan dua dekade lalu. Sementara, 50% penduduk dengan pendapatan terbawah hanya menguasai 12,4%, turun dari angka 2001 sebesar 17,1%.



Semua itu membuat ketimpangan penguasaan aset kian mencolok. Kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan rumah tangga secara nasional, sementara 10% penduduk terkaya memiliki 60,2% dari total aset rumah tangga.

Fakta lain yang kian memprihatinkan adalah ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap negara lain karena impor yang terus meningkat. Sepanjang periode 2017-2021 misalnya, impor non-migas naik dari US\$ 132,669 miliar menjadi US\$ 197,107 miliar atau meningkat rata-rata sekitar 10% per tahun, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun. Kenaikan impor tidak hanya di sektor barang industri, tapi juga impor pangan seperti kedelai, gula, susu, bawang putih dan gandum. Menurut data BPS, setiap tahun Indonesia mengimpor sekitar 2 juta-2,5 juta ton kedelai, sekitar 3,5 juta ton bahan baku susu, sekitar 3,5-4 juta ton gula, 500.000 -600.000 ton bawang putih, dan daging sekitar 300.000 ton. Belum termasuk impor sayur dan buah-buahan yang masing-masing sudah mencapai sekitar 1 juta ton dan 800 ribu ton.

Selain gandum, sebetulnya Indonesia mempunyai potensi besar untuk berswasemba pangan. Tapi kenyataannya, potensi ini tidak pernah digarap secara serius. Kebijakan pembangunan selama ini seperti terjebak dalam permainan kelompok yang hanya mengejar keuntungan melalui sektor perdagangan, jauh dari keinginan untuk membangun kemandirian atau kedaulatan ekonomi. Kondisi inilah yang melahirkan begitu banyak ironi dalam kehidupan berbangsa saat ini.

Adalah ironi, di saat negara lain memperkuat ketahanan pangan dan usaha kecil menengahnya dengan memproteksi secara besar-besaran, Indonesia membuka pasar lebar-lebar. Perlu dicatat, gagalnya perundingan Putaran Doha di bawah World Trade Organization (WTO) yang membahas ketidakadilan perdagangan (*unfair trade*) dan ketidakseimbangan (*imbalancing trade*) adalah karena negara maju tidak mau mundur dari sikapnya tentang subsidi yang disalurkan ke sektor pertanian mereka.

Subsidi yang disalurkan negara maju ke sektor pertanian mereka sangat tinggi. Menurut data, saat perundingan putaran Doha berlangsung (2001-2007), besaran subsidi negara tergabung dalam *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* kepada sektor pertanian mereka berkisar 30%-78% dari pendapatan petani. Ini berarti, 30%-78% dari pendapatan petani mereka berasal dari subsidi. Produk pertanian negara maju ini bisa lebih murah bukan karena efisiensi, tapi karena subsidi. Ini tidak adil, karena kebijakan negara maju itu membuat komoditi pertanian dari negara berkembang seperti Indonesia kehilangan daya saing.

Kondisi ini yang perlu disadari semua pihak, harga komoditi di pasar internasional itu tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi, tapi lebih karena faktor subsidi. Oleh karena itu misalnya, tidak mungkin petani kita bisa bersaing tanpa dukungan yang kuat dari kebijakan pemerintah seperti yang dilakukan negara lain, termasuk negara maju. Situasi ini juga yang dimanfaatkan oleh kalangan yang mempunyai mental pencari rente. Dengan alasan harga internasional lebih murah, mereka mendesak agar pemerintah atau pejabat yang mempunyai otoritas untuk melakukan impor dengan alasan produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Risiko terbesar terhadap perekonomian nasional adalah adanya kecenderungan implementasi kebijakan semakin jauh dari amanat konstitusi yaitu membangun kemandirian atau kedaulatan ekonomi bangsa. Inilah arti penting dari semangat restorasi yang diusung Partai NasDem, berjuang secara sungguh-sungguh agar konsep dan arah kebijakan sejalan filosofi dan konstitusi, membangun bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekonomi.

Para pejuang pendiri bangsa telah berkorban begitu besar, harta dan nyawa mereka berikan agar bangsa Indonesia berdaulat, merdeka dari penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun. Mereka telah meninggalkan warisan yang sangat berharga yaitu semangat untuk menunjukkan jati diri bangsa kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar, mempunyai filosofi dan budaya luhur.

“Gerakan Perubahan Restorasi Partai NasDem adalah meneguhkan kembali semangat para pendiri bangsa, mengembalikan dan menjaga agar setiap kebijakan dan implementasinya selalu berada dalam semangat kemandirian dan kedaulatan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuka akses sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat untuk membangun martabat dan kesejahteraan mereka, bukan hanya untuk segelintir orang,” kata Rachmat Gobel.

Itulah yang dilakukan Rachmat Gobel secara sepenuh hati, baik sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo, maupun dalam kedudukannya sebagai

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Turun langsung untuk melihat dan mendengar aspirasi rakyat, mencari solusi dan memperjuangkannya agar bisa terwujud. Terlalu panjang untuk membuat daftar tindakan nyata yang telah dilakukan Rachmat Gobel dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan kebijaksanaan yang adil bagi mereka yang kondisinya kini masih tertinggal.

Ia selalu bersuara lantang dan menyampaikan kritik tajam dalam menghadapi kebijakan yang tidak memberi keadilan terhadap rakyat banyak. Tidak hanya bersuara lantang, Rachmat Gobel juga melakukan tindakan nyata. Tidak sekedar mengkritik, Ia terjun langsung untuk mencari solusi. Langkahnya mendapat apresiasi dari banyak kalangan, tidak hanya dari kalangan pengamat dan tokoh masyarakat, juga dari pejabat pemerintah yang menjadi mitra Komisi DPR di bawah Korinbang.

Visioner dan Passionate

Tidak berlebihan untuk mengatakan, Rachmat Gobel adalah sosok visioner, mempunyai visi yang jelas dan pribadi *passionate*, yang selalu bergairah dan tidak kenal lelah dalam melaksanakan tanggung jawab. Sebagai visioner, pemikirannya selalu mengacu dalam kondisi dan tantangan jangka panjang dan karena itulah Rachmat Gobel sangat memperhatikan tahapan target yang harus dicapai atau *roadmap*.

Sebagai sosok yang penuh *passion*, Ia tidak pernah mengeluh dalam menghadapi tantangan, bahkan secara ikhlas mengorbankan sumber daya milik pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Sosok yang mempunyai *passion* juga selalu tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi, tanpa harus diminta.

Visi Rachmat Gobel terhadap pembangunan Indonesia antara lain terlihat saat Ia duduk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Koordinator Bidang Industri, Teknologi dan Kelautan periode 2004-2008, atau jauh sebelum bergabung dengan Partai NasDem.

Atas inisiatifnya tersebut, Rachmat Gobel akhirnya sukses menyelenggarakan *round table meeting* yang melibatkan hampir semua asosiasi dunia usaha di Indonesia guna mendiskusikan visi masa depan pembangunan industri nasional.

Sebagai Ketua Tim Pengarah, Rachmat Gobel dan tim berhasil merumuskan visi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam buku Visi 2030 & Roadmap Industri Nasional yang diluncurkan pada 2007. Ini menjadi catatan tersendiri, karena bukan hanya melibatkan begitu banyak asosiasi dan membutuhkan waktu berbulan-bulan, tapi ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Kadin Indonesia berupaya keras untuk menginventarisasi dan menganalisis data primer perekonomian dari berbagai sektor.

Visi 2030 & Roadmap Industri Nasional adalah membangun Indonesia menjadi “Negara Industri Maju dan Bangsa Niaga Yang Tangguh, Yang Makmur dalam Keadilan dan Adil dalam Kemakmuran. Buku ini merangkum semua hal strategis yang perlu dilakukan di berbagai sektor ekonomi, termasuk penekanan arti pentingnya membangun ketangguhan ekonomi rakyat, mulai dari masalah pangan, pertanian rakyat dan penguatan UMKM sampai ekonomi kreatif berbasis budaya.

Dari semua itu, mudah dimengerti kenapa Rachmat Gobel berlabuh di Partai NasDem. Semangat Gerakan Perubahan Restorasi Partai NasDem sesuai dengan cita-cita Rachmat Gobel sejak lama. Seperti sering diungkapkan oleh Rachmat Gobel, terjun ke dunia politik adalah bentuk dari kecintaannya terhadap bangsa, melanjutkan perjuangan dan cita-cita pendiri bangsa.

Pencapresan

Dedikasi Rachmat Gobel melalui Partasi NasDem mendapat apresiasi dari internal partai. Setidaknya ini terlihat pada saat pelaksanaan agenda Rakernas Partai NasDem untuk memilih bakal calon presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2024. Menarik, dan sekian nama yang diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), nama Rachmat Gobel muncul dalam lima besar setelah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa dan Erick Thohir. 14 DPW yang menginginkan Rachmat Gobel menjadi bakal calon presiden dari Partai NasDem, ini merupakan dukungan terkuat untuk kader dari internal Partai Nasdem.

“Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya sebagai bakal calon presiden dari Partai NasDem. Dukungan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus menjadi motivasi yang sangat besar bagi saya dalam melaksanakan amanat Ketua Umum yaitu Partai NasDem menjadi pemenang pada Pemilu 2024,” kata Rachmat Gobel. (*)



“Setiap undang-undang haruslah menjadi fondasi yang kuat untuk mempertahankan nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan, baik yang datang dari kondisi dalam negeri maupun global. Untuk itu, dinamika yang harus dibangun dalam tiap pembahasan undang-undang harus mencerminkan semangat restorasi yaitu mengembalikan sekaligus memperkuat nilai-nilai & semangat kebangsaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.”

- Rachmat Gobel -



**FUNGSI
LEGISLASI**

**BAB
2**

Semangat Restorasi dalam Politik Hukum Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat Memegang kekuasaan Membentuk Undang-Undang”. Amanah Undang-Undang Dasar tersebut jelas memberikan wewenang penuh kepada DPR RI sebagai pembentuk Undang-Undang. Dalam mengefektifkan kekuasaan membentuk Undang-Undang tersebut DPR RI memiliki fungsi yang penting yakni Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi/pembentukan Undang-Undang di DPR RI dimulai dari proses: Perencanaan; Penyusunan; Pembahasan; Pengesahan; dan Pengundangan.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menegaskan, kelima proses tahapan tersebut harus dilalui dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab agar dapat menciptakan undang-undang yang responsif, dapat memberi ruang yang luas untuk mendapatkan solusi yang searah dengan amanah konstitusi atau dengan kata lain sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Sebagai lembaga legislatif, adalah kewajiban DPR untuk memastikan bahwa pembahasan berjalan sejalan dengan tahapan yang ada, tapi juga menjaga agar undang-undang yang dilahirkan sesuai dan mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan,

Sebagai payung hukum dari berbagai kebijakan pembangunan bangsa, menurut Rachmat Gobel, setiap undang-undang haruslah menjadi fondasi yang kuat untuk mempertahankan nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan, baik yang datang dari kondisi dalam negeri maupun global. Untuk itu, dinamika yang harus dibangun dalam tiap pembahasan undang-undang harus mencerminkan semangat restorasi yaitu

mengembalikan sekaligus memperkuat nilai-nilai & semangat kebangsaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu konstitusi UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar filosofi kebangsaan, “inilah semangat restorasi yang akan diperjuangkan dan menjadi panduan politik hukum Partai Nasdem dalam setiap pembahasan UU di DPR,’ kata Rachmat Gobel.

Wujud kebijakan yang ditetapkan oleh DPR RI dalam menjalankan hak serta wewenang fungsi legislasi adalah Program Legislasi Nasional 2020-2024.

Dalam hal ini ada 248 Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati. Selain itu juga, terdapat Program Legislasi Nasional Prioritas yang ditetapkan dalam setiap tahunnya.

Pada masa sidang 2021-2022, DPR RI telah menetapkan dan menargetkan 41 Rancangan Undang-Undang Prioritas untuk tahun 2023. Dari 41 RUU Prioritas tersebut, 26 RUU diantaranya berasal dari DPR RI, 12 RUU dari pemerintah dan 3 RUU dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu BALEG juga menetapkan serta 5 daftar RUU kumulatif terbuka, sebagai berikut:

Judul RUU	Inisiator	Keterangan
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan di Komisi I Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR (KOMISI IV)	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 7 Juli 2022 Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	<ul style="list-style-type: none"> Long list Prolegnas DPR
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR (KOMISI VI)	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi di Badan Legislasi Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR (KOMISI VII)	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi RUU Usul DPR di Paripurna 14 Juni 2022 Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR (KOMISI VIII)	<ul style="list-style-type: none"> Masuk dalam Prolegnas RUU Perubahan Ke 4 Tahun 2020-2024 & Prolegnas Perubahan Prioritas Tahun 2022
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR (KOMISI IX)	<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan di Komisi IX; Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR (KOMISI X)	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law), dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law)	DPR (KOMISI XI)	<ul style="list-style-type: none"> Selesai harmonisasi di Badan Legislasi; Luncuran Prolegnas Prioritas 2022; Omnibus Law
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 30 September 2021 Pembicaraan Tk. I di Baleg Daftar Prolegnas Prioritas 2022

Judul RUU	Inisiator	Keterangan
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan di Baleg Daftar Prolegnas Prioritas 2022.
RUU tentang Bahan Kimia	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan di Baleg Daftar Prolegnas Prioritas 2022.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Prolegnas Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023 Omnibus Law.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Kefarmasian	DPR (BALEG DPR RI)	<ul style="list-style-type: none"> Usulan baru Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu Paripurna Persetujuan sebagai RUU Usul DPR; Daftar Prolegnas Prioritas 2022.
RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 30 Juni 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (ANGGOTA)	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III Daftar Prolegnas Prioritas 2022

Judul RUU	Inisiator	Keterangan
RUU tentang Hukum Acara Perdata	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> SurPres sudah disampaikan ke DPR Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Desain Industri	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses permohonan SurPres Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Wabah	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Dalam proses permohonan SurPres Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> SurPres sudah diterima DPR Proses Pendalaman di internal Pemerintah Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Prolegnas Prioritas 2023
RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	<ul style="list-style-type: none"> RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	<ul style="list-style-type: none"> Daftar Prolegnas Prioritas 2022
RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Baru Prolegnas Prioritas 2023

Daftar RUU Kumulatif Terbuka

- RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
- RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
- RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Sementara itu, untuk tahun 2022 semula ditetapkan 41 RUU yang masuk dalam daftar Prolegas Prioritas. Dalam perjalanannya, mempertimbangkan berbagai hal, pada September 2022 BALEG menyepakati untuk mengurangi jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas menjadi 32 RUU.

Dari jumlah itu terdapat 7 (tujuh) yang menjadi fokus utama Rachmat Gobel dan Fraksi Partai NasDem untuk didorong secara maksimal agar dapat dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Undang-Undang, yakni; RUU Perlindungan Data Pribadi; RUU Pendidikan Kedokteran; RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; RUU Masyarakat Hukum Adat; RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Selain 9 (sembilan) RUU tersebut pada tahun 2022 terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menjadi perhatian dari Rachmat Gobel, karena hadirnya Undang-Undang tersebut merubah tatanan Pemerintahan Daerah di Indonesia khususnya penambahan jumlah Provinsi sebanyak 5 Provinsi di Papua, hal ini dikarenakan revisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang berkaitan dengan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat Sidang Paripurna Pembahasan Wilayah DOB Papua di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Dari hasil revisi Undang-Undang tersebut saat ini terdapat 4 (empat) Undang-Undang yang lahir, yakni :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
- Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang baru di tetapkan pada Paripurna DPR RI tanggal 17 November 2022.

Peta Wilayah DOB Papua

Selain keempat Undang-Undang diatas, saat ini DPR RI sedang mempersiapkan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Utara yang saat ini masih berproses di DPR RI dalam tahap sinkronisasi dan harmonisasi di Baleg DPR RI. Pembahasannya selanjutnya menunggu agenda Paripurna untuk diputuskan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.



RUU yang Telah Disahkan Menjadi Undang-Undang

A. RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan Rancangan Undang-Undang usul dari Pemerintah. Fraksi Partai NasDem mengawal dan mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk segera dituntaskan pembahasannya dan kemudian disahkan. Hal ini dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem bukan hanya karena Kementerian Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh kader Partai NasDem namun kebutuhan akan Rancangan Undang-Undang ini sangat mendesak, karena saat ini banyaknya terjadi kebocoran data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data *merchant* Tokopedia yang mencakup gender, lokasi, *user name*, nama lengkap pengguna, alamat e-mail, nomor ponsel, diduga dijual di situs gelap (*dark web*);

Pada akhir Mei 2021, sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, e-mail dijual di situs gelap (*dark web*), diduga bocor ke publik yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi masyarakat;



Untuk itu Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke DPR RI pada tanggal 24 Januari 2020 melalui surat Presiden (supres) Nomor : R-05/Pres/01/2020, dari surat Presiden (supres) tersebut ditindak lanjuti oleh DPR RI pada tanggal 3 Februari 2020 melalui Rapat Konsultasi pengganti Bamus antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi pada masa persidangan II tahun 2019-2020 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan tingkat I antara DPR dan Pemerintah.

Dalam dinamika pembahasan yang terjadi antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah mengalami kebuntuan, khususnya mengenai otoritas lembaga independent pengawas perlindungan data pribadi terjadi ketidak sepemahaman antara fraksi-fraksi yang ikut membahas dengan Pemerintah, dimana Komisi I DPR RI menginginkan lembaga independen pengawas merupakan lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sehingga dalam melaksanakan tugas-pengawasan dapat dilakukan secara objektif namun di lain pihak Kementerian Kominfo menginginkan lembaga pengawas tersebut berada dibawah Kementerian.

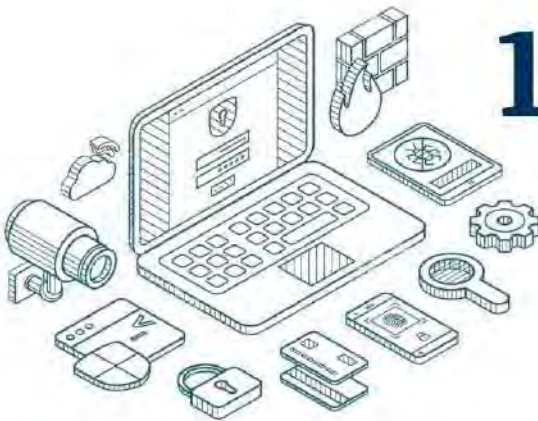
Melihat permasalahan itu Rachmat Gobel selalu melakukan komunikasi politik khususnya dengan Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga merupakan kader NasDem serta Komisi I DPR RI, agar adanya titik temu terkait dengan permasalahan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan karena masyarakat sangat membutuhkan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Perjuangan yang dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem dimana Rachmat Gobel dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ikut terus dalam mendorong serta mengawal Rancangan Undang-Undang tersebut dan akhirnya membuahkan hasil, dimana pada 20 September 2022 Dalam sidang Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang.

Selain dinamika politik, beberapa waktu sebelum pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut Indonesia mengalami kembali kejahatan digital yang cukup masih berupa pembobolan beberapa website Pemerintah serta penyebaran dengan sengaja data pribadi masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab "Hacker Bjorka".

Dalam dunia digital saat ini kehadiran dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data masyarakat, karena tingginya potensi kejahatan yang dilakukan oleh penyimpan data terhadap pemilik data. Selain itu publik juga menilai bahwa semangat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki spirit yang sama dengan Undang-Undang ITE yakni kesadaran atas maraknya kejahatan pada dunia *cyber*.

Rachmat Gobel menegaskan, ada 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yakni :



1 **Katagorisasi Data**

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu data umum dan spesifik. Data umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Sementara itu, data spesifik meliputi informasi kesehatan, data biometrik dan genetika, catatan data biometrik dan genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, serta data lain sesuai peraturan perundang-undangan

2 **Hak-Hak Subjek Data**

Beberapa hak subjek data adalah mendapatkan kejelasan identitas dan dasar kepentingan hukum, mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi, menarik kembali persetujuan pemrosesan data, menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi, mengajukan keberatan atas penggunaan data pribadi, hingga menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data.

3 **Kewajiban Pengendali Data**

Beberapa hak subjek data adalah mendapatkan kejelasan identitas dan dasar kepentingan hukum, mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi, menarik persetujuan pemrosesan data, menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi, mengajukan keberatan atas penggunaan data pribadi, hingga menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data.

4 **Kewenangan Lembaga Perlindungan**

Dalam aturan ini dijelaskan pula bahwa akan dibentuk lembaga perlindungan terkait data pribadi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kewenangan lembaga khusus ini diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 60.

Keempat poin penting diatas menjadi perhatian khusus Rachmat Gobel, hal ini dikarenakan menjadi faktor utama lambatnya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi selama ini. Saat ini, setelah RUU Perlindungan Data Pribadi ditetapkan dan diundangkan menjadi UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, diharapkan semua pihak baik DPR maupun Pemerintah harus menjamin terlaksananya Undang-Undang ini dengan konsekuen.



B. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Priode 2014-2019. Dalam perjalanan panjang pengusulan Rancangan Undang-Undang ini mengalami banyak dinamika diantaranya pernah dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas pada tahun 2020. Dalam pembahasan dan penyusunan pada Badan Legislatif, setidaknya terdapat tiga hal penting dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni:

- Adanya kekosongan payung hukum untuk masalah kekerasan seksual;
- Aparat penegak hukum harus berperspektif korban;
- Undang-undang ini harus berpihak kepada korban.



Dalam mendorong RUU ini untuk segera dibahas dan disahkan seluruh upaya telah dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem, diantaranya mengadakan forum diskusi, Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Forum Denpasar 12 dan difasilitasi oleh Lestari Moerdijat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

Dalam beberapa kali diskusi dengan melibatkan komunitas perempuan, LSM dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia. Semua kalangan menunggu DPR RI untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, sepanjang 2022 terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Dari data ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat menunggu adanya suatu kepastian hukum untuk melindungi korban-korban dari kekerasan seksual baik perempuan maupun anak.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel menegaskan “perlu adanya percepatan pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, di mana saat ini isu kekerasan seksual belum memiliki payung hukum”.

Selain itu Rachmat Gobel juga menegaskan, dalam pembahasan RUU ini perlu ditekankan perspektif perlindungan korban, hal ini penting menjadi perhatian semua fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, karena hukum Indonesia saat ini hanya mengatur tentang penindakan bagi pelaku namun belum ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan kepada korban.



Pada 12 April 2022 Dalam sidang Paripurna DPR RI, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang salah satunya diusulkan oleh Fraksi Partai NasDem, telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini tentu memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual, namun pada saat ini Undang-Undang tersebut belum berjalan secara efektif dikarenakan belum adanya aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan kepastian hukum kepada korban kekerasan seksual saat ini di Indonesia banyak terjadi kekerasan seksual khususnya terhadap wanita. Rachmat Gobel mengharapkan Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana agar Undang-Undang tersebut dapat berjalan secara efektif.

Rancangan Undang-Undang Prioritas Fraksi Partai Nasdem

A. Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran telah diusulkan dari Priode 2014-2019 yang pada awalnya diusulkan oleh anggota Fraksi Partai NasDem (Alm) Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, MM., M.H, dan dilanjutkan pada Priode 2019-2024. Dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang ini Fraksi Partai NasDem mendorong kembali Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

Perjalanan panjang RUU Pendidikan Kedokteran sampai saat ini akhirnya telah menemui titik terang dimana Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran telah ditetapkan menjadi usul inisiatif

dari DPR RI pada 10 Maret 2022, hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah maju yang dilakukan oleh Ketua Panja penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran Badan Legislasi (Willy Aditya) untuk menggandeng semua pihak dalam mensukseskan RUU Pendidikan Kedokteran agar dapat dilakukan pembahasan tingkat I.

Kebutuhan akan kehadiran Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, menjadi suatu keharusan. Masyarakat mengeluhkan mengenai penyebaran dokter, dan biaya pendidikan kedokteran yang mahal. Kedua permasalahan tersebut juga diungkapkan oleh beberapa perwakilan fakultas kedokteran dan dokter-dokter muda yang terdampak buruknya sistem pendidikan kedokteran di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 1 September 2021.

Melihat desakan dan kebutuhan tersebut, Rachmat Gobel akan berupaya maksimal untuk mendorong Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran segera



Senada dengan desakan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menegaskan “bahwa untuk saat ini dunia kedokteran Indonesia tengah menghadapi beragam penyakit generatife dan serangan virus di lain pihak pendekatan kurikulum pendidikan kedokteran sangat kaku untuk mengkoordinasikan kerjasama antara sains tekhnologi berbagai bidang. Kekakuan ini menyebabkan kelambatan antisipasi dokter dalam mengkoordinasikan masing-masing keahlian”.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyerap aspirasi mengenai masa depan kesehatan dan kedokteran di Indonesia dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di ruang pertemuan delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Dalam menyukseskan RUU Pendidikan Kedokteran Rachmat Gobel mengapresiasi serta mendukung Langkah yang dilakukan oleh Willy Aditya dengan menugaskan 3 Tenaga Ahli untuk mendampingi Willy Aditya dalam melakukan belanja masalah terkait dengan Pendidikan Kedokteran di beberapa Provinsi di Indonesia. Sebagai langkah awal dilakukan penjaringan permasalahan di Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan seminar, yaitu; “Humanisme Pendidikan Kedokteran” serta Seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada 9 Juni 2021 dengan tema “Tantangan Globalisasi Pendidikan Kedokteran Indonesia di Era Disruptif ”

Dari dua hasil kegiatan di atas dapat disimpulkan beberapa poin penting, yakni :

- **Fraksi Partai NasDem berkomitmen dan konsisten untuk menghilangkan instrumen-instrumen yang menghambat bagi kemajuan dunia pendidikan kedokteran di Indonesia;**
- **Fraksi Partai NasDem yang diwakili oleh Willy Aditya, akan melakukan list terkait dengan mahasiswa yang di DO (Drop Out) yang difasilitasi oleh DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur dalam hal pendataan, karena tidak lulus ujian kompetensi.**

Dalam rangka mendorong RUU Pendidikan Kedokteran, Rachmat Gobel ikut dalam mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem untuk melaksanakan belanja masalah yang akan dilaksanakan di 10 provinsi di Indonesia.

Setelah berbagai upaya dilakukan oleh Fraksi Partai NasDem dan juga di dukung Rachmat Gobel, perjuangan panjang yang dilakukan akhirnya berbuah hasil dimana pada 10 Maret 2022 telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR pada saat sidang Paripurna. Namun sayangnya sampai saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum memberikan DIM (Daftar Infentaris Masalah) kepada Baleg DPR RI untuk dapat segera di bahas.

Melihat sikap dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tersebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya yang juga merupakan anggota Fraksi Partai NasDem membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia pada 6 September 2022 untuk segera memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar segera menyerahkan DIM (Daftar Infentaris Masalah).

Dalam surat tersebut Willy Aditya menegaskan beberapa hal penting yakni :

- Bahwa telah terjadi tindak pelecehan terhadap dua Lembaga Tinggi Negara, yaitu Lembaga Kepresidenan dan DPR oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek).
- Mendikbud-Ristek melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) Pasal 47 ayat (2) "Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU disertai dengan Daftar Inventaris Masalah bersama dengan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) terhitung sejak surpres di terima pimpinan DPR ". jika dilihat dari Surpres Presiden kepada DPR dengan nomor surat R-55/Pres/12/2021 per tanggal 2 Desember 2021 sampai saat ini daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pendidikan Kedokteran belum dikirimkan oleh Mendikbud-Ristek ke Baleg DPR RI;
- Dalam mendukung Program Nawacita Presiden Jokowi khususnya pada point kedua disebutkan "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka Negara kesatuan" dan point keenam disebutkan "meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia". RUU Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu RUU yang selaras dalam mewujudkan program Nawacita Presiden Jokowi karena RUU Pendidikan Kedokteran berparadigma kesehatan yang terakses, terjangkau serta memanusiakan manusia.

Dalam dinamika pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran seluruh anggota Baleg DPR RI bersepakat meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk segera menyerahkan DIM ke Baleg serta bekerjasama untuk segera melakukan pembahasan. Karena kurang kooperatifnya serta banyak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mendikbud-Ristek, Baleg bersikap untuk tidak memasukkan semua usul RUU yang berasal dari Kemendikbud-Ristek dalam Prolegnas Prioritas untuk 2023. Dimana akibat hal ini berdampak pada RUU Sisdiknas.



Rachmat Gobel sangat menyayangkan kondisi dan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang kooperatif, sehingga berdampak terhadap RUU Sisdiknas sebagai Omnibus Law bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ia menegaskan “kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyerahkan DIM RUU Pendidikan Kedokteran kepada Baleg DPR RI agar segera dapat dilakukan pembahasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan khususnya Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

B. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Fraksi Partai NasDem berhasil mengawal kembali RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah sekitar 18 tahun belum menunjukkan *progress* untuk di bahas dan disahkan. Dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023 Fraksi Partai NasDem berhasil mengawal kembali masuk dalam daftar sebagai urutan prioritas nomor 16.

Kebutuhan akan Undang-Undang ini sangat dibutuhkan bagi ± 5 juta PRT (data ILO, tahun 2021) untuk memberikan kepastian hukum. Kebutuhan akan Rancangan Undang-Undang bukan hanya disuarakan oleh pekerja rumah tangga namun terdapat beberapa LSM di antaranya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang terus gencar menyuarakan agar Rancangan Undang-Undang PRT untuk segera dibahas dan disahkan. Desakan dari publik ini dilandaskan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT dari kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Ketiga hal ini merupakan kasus yang sering dialami oleh PRT, setidaknya berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan telah terjadi 2.300 kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang tahun 2005 sampai 2020.

Proses tersendatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini tidak terlepas dari dinamika politik serta banyaknya distorsi konsep mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal ini tidak bisa di pungkiri karena masih terdapat beberapa fraksi di DPR RI yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan yang berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan tidak fleksibel, banyak aturan-aturan dari Rancangan Undang-Undang tersebut yang membebani pemberi kerja serta kurang sesuai dengan budaya di Indonesia.

Sebagai Wakil Pimpinan DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel akan mengawal serta mendorong anggota Fraksi Partai NasDem yang ada di Badan Legislasi DPR RI untuk menggandeng seluruh fraksi agar segera melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini dilakukan oleh Rachmat Gobel agar Rancangan Undang-Undang ini segera dibahas dan disahkan, pembahasan RUU ini harus diprioritaskan untuk memberikan kepastian hukum kepada ± 5 Juta PRT, selain itu diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan yang sering dialami oleh PRT.

Melihat lebih jauh ke dalam substansi dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rachmat Gobel menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang ini mengatur hal-hal prinsip yang berkesesuaian dengan budaya bangsa Indonesia.

Dalam konteks relasi kerja, Rachmat Gobel berpendapat “relasi kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja serta jasa penyalur atau penyedia pekerja rumah tangga haruslah dibangun berdasarkan asas pro justitia agar memberi perlindungan hukum dan rasa adil terhadap semua pihak”. Dalam hal kultural, Rachmat Gobel berpendapat bahwa “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan Rancangan Undang-Undang yang sosio-kultural (mengedepankan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan kemanusiaan)”.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Rachmat Gobel bersama dengan Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Komisi IX Lisda Hendrajoni, menerima perwakilan dari Organisasi Pendukung Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah (PPRT). Dalam pertemuan ini perwakilan organisasi tersebut menyampaikan beberapa permasalahan terkait dengan lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (PPR), yakni :

Pertama, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) telah diusulkan ke DPR sejak 9 tahun lalu pada tahun 2014, namun hingga kini belum menjadi payung hukum bagi para pekerja rumah tangga, walaupun sudah masuk ke Prolegnas Prioritas, namun nasibnya masih belum jelas.



WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima perwakilan pegiat pembela pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga (PRT) di ruang pertemuan delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

Kedua, pada 1 Juli 2020 tujuh Fraksi di DPR RI menyetujui pembahasan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR dan Fraksi NasDem DPR RI merupakan yang paling konsisten mengawal RUU PPRT ini. Dua fraksi mayoritas di DPR RI, yakni Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDIP (FPDIP) menolak membawa RUU PPRT untuk dibahas di Rapat Paripurna;

Ketiga, beberapa pekerja rumah tangga (PRT) bergabung bersama elemen buruh dan mahasiswa melakukan aksi secara serentak di lima kota Indonesia: Jakarta, Medan, Makassar, Yogyakarta dan Semarang pada Selasa 14 Desember 2021.



Atas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tersebut Organisasi Pendukung Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah juga menuntut 4 hal, yakni:

- Agar Bamus DPR RI mengagendakan pembahasan RUU PPRT hasil pleno Baleg DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat;
- Pimpinan DPR RI segera menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna terdekat;
- Memohon Pimpinan DPR RI memperjuangkan dan mengagendakan RUU PPRT ini dalam Rapat Paripurna Rabu, 15 Desember 2021;
- Hapus diskriminasi dan kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga.

Dengan melihat desakan dan kebutuhan publik serta substansi dari Rancangan Undang-Undang ini yang akan memberikan kepastian hukum dan berkesesuaian dengan budaya Indonesia, Rachmat Gobel menegaskan, sudah seharusnya jalan panjang dan terjal dalam menggoalkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk disahkan menjadi Undang-Undang harus diakhiri.

Hal yang terus dilakukan oleh Rachmat Gobel ini seiring dengan upaya dari Fraksi Partai NasDem yang menugaskan kepada kader-kadernya di Badan Legislasi DPR RI untuk terus berjuang menyuarakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk segera dibahas dan disahkan.

Untuk saat ini RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023, dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023 ini Fraksi Partai NasDem akan memaksimalkan semua upaya untuk memperjuangkan di Badan Musyawarah DPR RI dan Sidang paripurna DPR RI agar Rancangan Undang-Undang ini dapat disahkan menjadi usul isiatif DPR RI dan segera untuk dilakukan pembicaraan tingkat I maupun tingkat II.

C. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2021 urutan Nomor 19 dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu Rancangan Undang-Undang yang menjadi usul dari anggota Fraksi Partai NasDem (Sulaeman L.Hamzah) Dapil Papua.

RUU ini pernah dibahas di DPR RI dari tahun 2014 dengan judul RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA), namun pembahasannya tidak dapat terselesaikan sampai akhir jabatan DPR RI Priode 2009-2014. Pada tahun 2017 dengan substansi yang tidak jauh berbeda Fraksi Partai NasDem mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas. Sebagai pengusul, Fraksi NasDem membentuk Tim Fraksi yang bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan draf RUU dan Naskah Akademik.



Pada Priode 2019-2024, RUU Masyarakat Hukum Adat belum mendapatkan respon baik dari fraksi-fraksi lain yang ada di DPR RI maupun dari Pemerintah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk terus memaksimalkan serta mendorong seluruh pihak untuk duduk bersama dalam rangka mempercepat penyusunan serta pembahasan. Fraksi partai NasDem terus mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat untuk dibahas dan disahkan karena didasari atas kebutuhan “Belum optimalnya perlindungan bagi masyarakat adat dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak keatas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat”.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang juga merupakan kader Partai NasDem Rachmat Gobel terus mendorong serta mengawal pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat ini. Pada berbagai kesempatan, Rachmat Gobel selalu menegaskan bahwa kebutuhan akan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangat penting karena “masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif dari negara”.

D. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk dalam list Prolegnas Prioritas tahun 2023, Rancangan Undang-Undang ini masih dalam tahap harmonisasi di Komisi VIII DPR RI. Komisi VIII DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang ini dikarenakan saat ini tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga dibutuhkan peran aktif Negara dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Secara filosofis dan yuridis, RUU Kesejahteraan Ibu dan anak merupakan penjabaran dari sila “kedua” Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, kemudian penjabaran dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang “menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, selain itu Pasal 28H ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Naskah Akademik dan Draf RUU Kesehatan Ibu dan Anak, terdapat beberapa hal penting yang menjadi fokus perhatian semua pihak termasuk juga Rachmat Gobel, yakni :

- Cuti melahirkan minimal 6 (enam) bulan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dari ibu pekerja/karyawan. Kesehatan ibu yang baru melahirkan sangat berpengaruh kepada kesehatan sang ibu secara jangka panjang sehingga menjadi salah satu upaya penjaminan kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- Pemberian ASI eksklusif sebaiknya diberikan oleh ibu menyusui selama enam bulan pertama umur balita, (Ketentuan mengenai cuti melahirkan bagi pekerja perempuan telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Yang menyatakan bahwa pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti selama 1.5 bulan sebelum melahirkan dan 1.5 bulan setelah melahirkan sesuai dengan perhitungan dokter kandungan atau bidan dimana hal itu tentu mengurangi jangka waktu pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan. Jika hal ini tidak terpenuhi maka akan merugikan perusahaan itu sendiri, dimana kebahagiaan ibu pekerja merupakan investasi bagi perusahaan.
- Beberapa Undang-Undang sektoral yang terdampak dari adanya RUU tentang KIA, Antara lain;
 - Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait lamanya cuti melahirkan bagi ibu pekerja selama maksimal 3 (tiga) bulan;
 - Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait penugasan Pemerintah kepada suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah;

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait pendaftaran pekerja oleh perusahaan ke program jaminan sosial dan terkait dengan kewajiban pembayaran iuran bagi peserta program jaminan sosial.

Dalam dinamikanya, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak banyak dipertanyakan oleh para pengusaha karena adanya Rancangan Undang-Undang ini nantinya dianggap akan memberatkan perusahaan khususnya dalam hal pembebanan biaya jaminan sosial dan kurangnya waktu bekerja bagi karyawan ibu hamil. Para pengusaha banyak mempertanyakan mengenai pembayaran upah pekerja perempuan selama 6 (enam) bulan yang dianggap akan memberatkan bagi pihak perusahaan.

Menanggapi dinamika ini, Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang juga merupakan seorang pelaku usaha meminta dan mengajak semua pihak melihat Rancangan Undang-Undang ini secara menyeluruh baik dalam konteks filosofis, sosiologis maupun yuridisnya.

Hal itu penting dilakukan agar RUU ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Rachmat Gobel menegaskan bahwa dalam membentuk Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini perlu di perhatikan mekanisme pembayaran upah pekerja perempuan yang cuti hamil selama 6 (enam) bulan agar tidak memberatkan bagi pengusaha.



Dimana hal ini perlu kajian yang lebih mendalam (baik dari DPR, Pemerintah, kalangan akademisi, pelaku usaha serta serikat pekerja), selain yang telah dibuat dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan anak, yakni bersumber dari :

- Dana jaminan sosial pekerja.
- Dana *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Khusus bagi perusahaan yang keberatan terhadap perpanjangan cuti menjadi 6 bulan, dimana dalam 3 bulan berikutnya dimungkinkan alternative pembayaran tunjangan diambil dari dana CSR suatu perusahaan.
- Dana jaminan sosial wajib atau dana public, dimana penerapan dana ini dibiayai mandiri oleh perusahaan (seperti di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Srilangka).





Rancangan Undang-Undang di Bawah Koordinasi Industri & Pembangunan (Korinbang)

Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang membawahi Komisi IV, V, VI dan VII, pada tahun 2022 ini terdapat beberapa Rancangan Undang-Undang yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan pembahasan, yakni :

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah menjadi usul DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 7 Juli 2022 saat ini dalam tahap pembicaraan tingkat I di Komisi IV DPR RI.

- **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih pada tahap awal proses pembentukan peraturan perundang-undangan.**
- **RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam tahap harmonisasi di Baleg DPR RI;**
- **RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI pada Paripurna 14 Juni 2022, selanjutnya masuk kedalam tahap pembicaraan tingkat I di Komisi VII.**
- **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, proses di dpr sudah selesai dan telah menjadi Undang-Undang.**

Semua RUU ini menjadi perhatian Rachmat Gobel, bukan hanya sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang yang memiliki tupoksi sebagai koordinator Komisi IV, V, VI dan VII, namun Rachmat Gobel mendorong ketiga Rancangan Undang-Undang ini untuk segera diselesaikan tahap penyusunan untuk segera dilakukan pembahasan dan di sahkan menjadi Undang-Undang, agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)



BAB

3

**FUNGSI
ANGGARAN**

“Secara obyektif harus diakui, potret sosial dan ekonomi bangsa masih belum sepenuhnya mencerminkan semangat kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi kita. Kita perlu kembali melakukan penguatan semangat pembangunan ke arah cita-cita kemerdekaan dan nilai kebangsaan yaitu kemandirian dan kemakmuran bangsa melalui semangat restorasi. Ini harus tercermin dalam postur alokasi pendapatan dan belanja yang disepakati dalam APBN.”

- Rachmat Gobel -

Semangat Restorasi dalam Menetapkan Postur APBN

Pasal 23 Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dari kebijakan anggaran mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembahasan alokasi pada kebijakan anggaran, baik ditingkat pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun di tingkat daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

APBN dan APBD adalah uang rakyat, sehingga sangat penting untuk menyadari bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus tepat sasaran, berkeadilan dan memenuhi rasa kemanusiaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, pembahasan anggaran tidak hanya sekedar soal alokasikan pendapatan dan belanja, namun harus mampu menemukan arah dan prioritas sasaran pembangunan, dalam upaya meningkatkan pembangunan bangsa.

Bagi Rachmat Gobel, baik dalam kedudukannya sebagai kader Partai NasDem dan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, pembahasan anggaran melalui APBN haruslah mampu mencerminkan semangat restorasi, yaitu semangat yang didasari kesadaran atas amanat UUD 1945. Dalam pandangannya, masih terjadinya ketimpangan yang signifikan dalam kehidupan bangsa sampai saat ini adalah cermin bahwa proses pembangunan belum mampu berjalan secara penuh dalam semangat UUD 1945. Ketimpangan antar sektor dan daerah serta pelaku ekonomi terasa masih mencolok.

**“Secara objektif harus diakui, potret sosial dan ekonomi bangsa masih belum sepenuhnya mencerminkan semangat kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi kita. Kita perlu kembali melakukan penguatan semangat pembangunan ke arah cita-cita kemerdekaan dan nilai kebangsaan yaitu kemandirian dan kemakmuran bangsa melalui semangat restorasi. Ini harus tercermin dalam postur alokasi pendapatan dan belanja yang disepakati dalam APBN”,
kata Rachmat Gobel.**

Atas dasar itu dan tantangan pembangunan kedepan, Rachmat Gobel selalu menekankan arti pentingnya alokasi APBN memberikan prioritas pada tiga sektor, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UKM), kemandirian sektor pertanian serta sektor pendidikan.

A. Pembahasan RAPBN 2023

Pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) antara DPR RI dengan Pemerintah Pusat dimulai setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 dalam sidang paripurna DPR, Jumat (20/5/2022).

Pembahasan RAPBN 2023 ini mendapatkan atensi dari Rahmat Gobel terutama dalam memberikan sumbangsih pemikiran terkait arah kebijakan fiskal nasional di masa yang akan datang. Ia menekankan pembasahan rancangan anggaran pemerintah pusat ini agar lebih difokuskan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri dalam negeri, dan meningkatkan kualitas SDM agar pemerintah tidak berpangku pada impor dan pembangunan fisik semata. Hal ini penting untuk melahirkan APBN 2023 yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa saat ini sekaligus memperkuat fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan ke depan.



Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel saat menerima Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (20/5/2022).

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga tantangan ekonomi di masa yang akan datang, yaitu pandemi Covid 19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Untuk itu ia menyampaikan sejumlah langkah yang harus dilakukan, yaitu akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi.

“Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional.”

Selain itu, Rachmat Gobel juga menekankan pentingnya mencapai ekonomi yang berkualitas. Kondisi tersebut merujuk pada ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas. Menurutnya, kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di perdesaan serta masyarakat lapis bawah.

“Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat *climate change*, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina. Lebih lanjut Rachmat Gobel menyatakan, fokus di bidang-bidang itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Khusus di bidang pertanian, sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk non-subsidi. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani. Untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani,” katanya.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem ini mengatakan, di era persaingan global ini yang akan menang adalah negara-negara dan bangsa-bangsa yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat dan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. Ekonomi nasional yang kuat, katanya, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, katanya, kekuatan ekonomi nasional terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negerinya dengan produk-produk yang diproduksinya sendiri.

Rachmat Gobel menegaskan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, Indonesia justru masih melakukan impor untuk barang-barang yang justru sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Padahal, pemerintah telah memiliki regulasi tentang keharusan penggunaan produk dalam negeri tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Hal ini sangat tak memperkuat ekonomi nasional. Padahal itu proyek negara. Ini juga berarti, APBN kita untuk membayar upah buruh negara lain. Jadi sama saja membuat makmur rakyat negara lain dan memperkuat industri negara lain,” katanya.

Untuk membangun SDM berkualitas, kata Rachmat Gobel, kementerian pendidikan dan kebudayaan agar lebih fokus pada manusianya. “Jangan sibuk pada proyek yang sifanya fisik atau sibuk gonta-ganti sistem,” katanya. Dia menegaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sudah sangat besar. Bahkan pada usulan APBN-P 2022, di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak bumi dan subsidi energi yang membengkak, anggaran untuk pendidikan justru ditambah. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sangat peduli pada kualitas SDM.

Memasuki tahun ketiga, Indonesia akhirnya mulai terbiasa mengendalikan dan mengelola krisis kesehatan pandemi covid-19 dengan baik. Kerja keras pemerintah

dan DPR dalam mengorkestrasi kebijakan fiskal maupun moneter mulai membuah hasil seiring dengan peningkatan Pendapatan Domestik Bruno (PDB) yang telah sampai pada level di atas pra pandemi. Dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi tersebut, rancang bangun APBN tahun anggaran 2023 didesain mengikuti tahapan transisi menuju endemi.

Sayangnya tahapan transisi tersebut tidak semulus yang kita bayangkan. Sejumlah resiko eksternal perlu untuk diwaspadai. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat *supply disruption* dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya *cost of fund* dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi.

Resiko tersebut tentu berdampak langsung terhadap postur APBN baik itu dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Meskipun pendapatan baik dari pajak maupun PNBPN juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak pertengahan tahun 2021 namun belanja negara juga meningkat akibat membengkaknya belanja Negara terutama dari sektor subsidi dan kompensasi energi. Di sisi lain, pembiayaan kita juga tertekan akibat semakin ketatnya pembiayaan, kenaikan *yield* obligasi negara dan *trend* pelemahan mata uang.



Pemerintah tidak memiliki opsi selain menerapkan kebijakan konsolidasi fiskal yang bertujuan untuk menurunkan defisit anggaran dan akumulasi utang dengan memaksimalkan penerimaan & melakukan efisiensi belanja. Selain mandat UU No. 2 Tahun 2020 untuk melakukan normalisasi defisit anggaran menjadi 3% terhadap PDB dan berakhirnya dukungan BI melalui skema *burden sharing*, kebijakan konsolidasi fiskal tersebut juga penting sebagai upaya penyehatan kembali kondisi fiskal Indonesia terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan pada masa yang akan datang.



Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 akan ditopang solidnya permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional yang diperkirakan tetap dapat tumbuh positif. Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, pemerintah melalui kebijakan fiskal terus mendukung reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas nasional, melalui strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*) serta memperkuat daya saing nasional di pasar global.

Melalui kebijakan fiskal tahun 2023, pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi supply untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 2023 merupakan titik awal tahun anggaran yang akan kembali ke jalur kaidah fiskal dengan batas defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan ekonomi ke depan.

Setelah melalui proses pembahasan antara DPR dan pemerintah akhirnya disepakati beberapa pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2023 sebagai berikut:

1

Penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp 2.463,02 triliun atau lebih besar Rp. 19,4 triliun dibandingkan dengan usulan sebelumnya sebesar Rp. 2.443,5 triliun. Penerimaan pajak juga ditetapkan sebesar Rp. 1.718,0 triliun. Lalu, belanja negara ditargetkan sebesar Rp. 2.714,16 triliun. Jumlah ini naik Rp. 2,9 triliun dari target penerimaan pajak yang diusulkan dalam RAPBN 2023. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 disepakati sebesar Rp. 441,39 triliun atau naik Rp. 15,13 triliun dari target RAPBN 2023 sebesar Rp. 426,25 triliun. Penerimaan ini berasal dari PNBP migas sebesar Rp. 131,169 triliun; minerba Rp. 54 triliun; kehutanan Rp. 5,1 triliun; perikanan Rp. 3,5 triliun; panas bumi Rp. 2,11 triliun; PNBP lainnya Rp. 113,3 triliun; serta target PNBP kementerian/lembaga Rp. 76,7 triliun.

2

Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2023 disepakati sebesar Rp. 2.246,45 triliun atau meningkat Rp. 16,4 triliun dari usulan RAPBN sebesar Rp. 2.230,02 triliun. Selanjutnya, defisit APBN disepakati sebesar Rp. 598,2 triliun atau 2,84% dari total PDB 2023 Rp. 21.037 triliun.



3

Untuk asumsi makro, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3% seperti dalam rancangan awal RAPBN 2023. Sedangkan laju inflasi disepakati 3,6%, lebih besar dari rancangan awal yaitu 3,3%. Nilai tukar rupiah disepakati Rp 14.800. Tingkat suku bunga SUN-10 tahun 7,9%. asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Oil (ICP)* dipatok di level US\$ 90 per barel. Lalu, asumsi lifting minyak 660 ribu per barel per hari (bph). Terakhir, asumsi lifting gas sebesar 1.100 ribu per barel setara minyak per hari (bsmph).

4

Selain itu, DPR menyepakati beberapa target pembangunan dalam APBN 2023. Target ini tidak berubah dibandingkan dengan RAPBN 2023. Untuk tingkat kemiskinan 7,5 sampai 8,5%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam APBN 2023 disepakati di rentang 5,5 sampai 6,0%. Kemudian, ketimpangan atau gini ratio di rentang 0,376 sampai 0,378. Lalu indeks pembangunan manusia disepakati di rentang 73,31 hingga 73,49. Nilai Tukar Petani disepakati di angka 105 sampai 107. Terakhir, Nilai Tukar Nelayan di rentang 107 sampai 108.

B. Realisasi APBN 2022

Tahun fiskal 2022, perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Disisi lain, perekonomian Indonesia dituntut untuk bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

Oleh karena itu, arsitektur fiskal APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Konsolidasi dan reformasi fiskal, harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan hati-hati. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.


Reformasi fiskal disebut harus terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau *spending better*, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.

Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.

Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Rachmat Gobel menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 cukup realistis dan terlihat hati-hati seperti tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021 dan defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah dibandingkan 2021. “Dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah, kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan non-fiskal yang lebih efektif”.

Rachmat Gobel memaklumi, pemerintah mengerem belanja negara pada 2022 karena kebijakan fiskal tahun depan memang harus diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023.

A black and white photograph of Rachmat Gobel, a man in a dark suit and white shirt, gesturing with his right hand while speaking. The background is slightly blurred, showing what appears to be a meeting or conference setting.

“Anggaran tahun 2022 memang harus lebih bersifat konsolidasi karena itu kebijakan nonfiskal menjadi sangat penting. Ini artinya kreativitas dan kemampuan kementerian dan lembaga melahirkan kebijakan untuk mendorong pergerakan ekonomi menjadi sangat penting. Ini tantangan besar, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi atau kementerian agar sasaran pembangunan 2022 yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” kata Rachmat Gobel.

Meskipun berat, Rachmat Gobel cukup optimistis bahwa sasaran pembangunan bisa tercapai. Namun dengan catatan kementerian mampu lebih bekerja keras untuk menyusun program dan kebijakan agar bisa lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan tersebut. Dengan adanya UU Cipta Kerja, kementerian dan lembaga pemerintah sebetulnya mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam mendorong dinamika ekonomi baik sektor perdagangan, industri, pariwisata dan investasi. Tinggal bagaimana peluang ini bisa diefektifkan dengan koordinasi yang lebih baik dan menghilangkan ego sektoral.

Rachmat Gobel juga menekankan, untuk bisa mencapai sasaran pembangunan tersebut, kementerian dan daerah harus lebih memprioritas belanja negara pada produk dalam negeri yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan menjauhi penggunaan produk impor. Penggunaan produk dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka pengangguran. “Semaksimal mungkin, belanja kementerian dan lembaga harus menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemulihan sektor UMKM. Pemulihan sektor ini akan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan karena faktanya kontribusi terbesar pada PDB dan penyerapan lapangan kerja selama ini ada pada sektor UMKM. “Insentif yang lebih besar perlu dialokasikan untuk UMKM agar mereka bisa kembali bergerak dari keterpurukan selama pandemi Covid-19,” katanya.

Dalam perjalanannya, atensi dari banyak pihak termasuk Rachmat Gobel dijawab dengan kinerja yang cukup memuaskan oleh pemerintah. Kinerja Realisasi belanja negara per Oktober sebesar Rp. 2.351,1 triliun (75,7% dari pagu target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu)) atau tumbuh 14,2% *year on year (yoy)*. Realisasi Belanja K/L Rp. 754,1 triliun (79,7% dari Pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L. Sementara Belanja Non-KL mencapai Rp. 917,7 triliun (67,7% dari Pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.

Peran APBN sebagai *shock absorber* di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp. 15,6 triliun per-akhir Oktober.

Bantuan tambahan ada sebelumnya sembak, BLT Bunga KUR, tersebut di-dan efektif peningkatan

tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu minyak goreng, bantuan Tunai PKL WN, Subsidi dan BLT Desa. Pemberian bantuan tambahan tujuan untuk memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat bawah, serta agar dampak risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.

Sementara itu,

realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai 31 Oktober 2022 mencapai Rp. 679,2 triliun atau 84,4% dari Pagu, tumbuh sebesar 5,7% *year on year (yoy)*. Alokasi PC -PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp. 122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp. 154,76 triliun, dan



penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp. 178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 18 November 2022 mencapai Rp. 280,7 triliun atau 61,6% dari total alokasi sebesar Rp. 455,62 triliun, meliputi: a) Penanganan Kesehatan Rp. 48,6 triliun; b) Perlinmas Rp. 123,0 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp. 109,0 triliun.

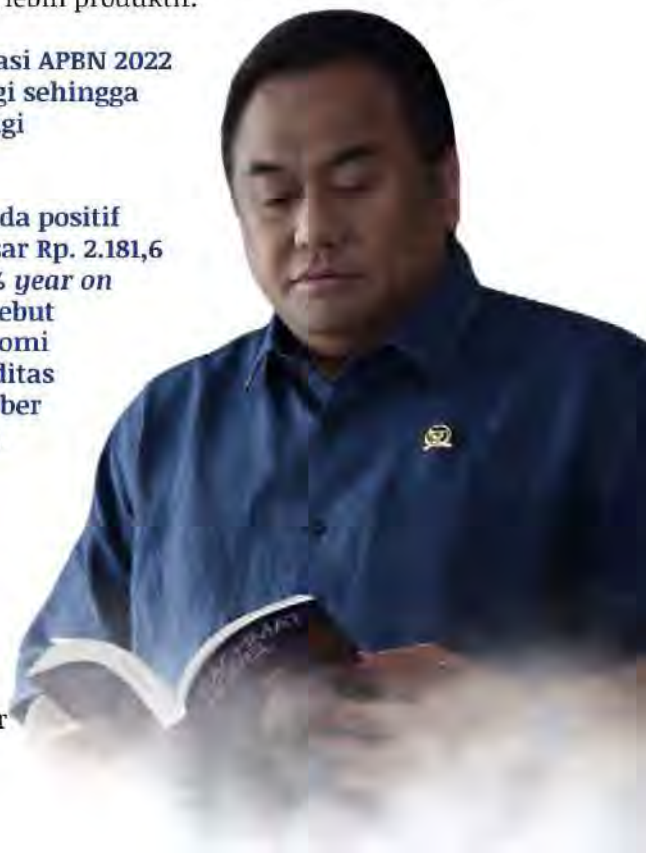
Rachmat Gobel menyayangkan masih rendahnya penyerapan PC-PEN sebesar 61,6%. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah tidak mendeteksi lebih awal rendahnya realisasi anggaran di sektor pemulihan ini. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya permasalahan ini sudah dapat diperkirakan lebih awal sehingga dapat dialokasikan untuk membiayai sektor yang lebih produktif.

“Ini catatan awal dari saya, tentang realisasi APBN 2022 sebaiknya hal seperti ini tidak terulang lagi sehingga pemanfaatan APBN betul-betul optimal bagi kesejahteraan masyarakat”

Di sisi pendapatan juga menunjukkan tanda positif dimana Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp. 2.181,6 triliun atau 96,3% dari Pagu, tumbuh 44,5% *year on year (yoy)*. Pertumbuhan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi masih terjaga dan dukungan harga komoditas masih terbilang cukup tinggi. Hingga Oktober 2022, secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp. 1.448,2 triliun, penerimaan Bea dan Cukai Rp. 256,3 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 476,5 triliun.

Pembiayaan APBN Terjaga namun tetap merespon dinamika pasar keuangan yang *volatile* Realisasi APBN sampai akhir Oktober 2022 mencatat defisit Rp. 169,5 triliun atau terkontraksi 0,91% terhadap PDB. Realisasi pembiayaan utang hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp. 506 triliun atau 53,6% dari target yang ditetapkan. Capaian ini jauh lebih rendah, atau turun 21,7% (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbagai indikator di atas secara umum menggambarkan *underlying* kegiatan ekonomi Indonesia masih cukup impresif. Namun demikian, dinamika perekonomian global masih harus terus diwaspadai akibat eskalasi resiko global seperti lonjakan inflasi, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, potensi krisis utang global serta adanya potensi stagflasi.



C. Pertanggungjawaban APBN 2021

Dalam pembahasan APBN 2021, pemerintah menetapkan tahun fiskal 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan mengambil tema “percepatan ekonomi dan penguatan reformasi”, APBN 2021 diharapkan menjadi instrument utama dalam menyeimbangkan berbagai tujuan seperti mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal. APBN 2021 melalui upaya reformasi strukturalnya diharapkan meletakkan pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

■ Rachmat Gobel bersama Pimpinan DPR RI dalam Sidang Paripurna Pertanggungjawaban APBN 2021 dan Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023

Optimisme tersebut didukung oleh pemulihan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020 seiring penurunan trend kasus dan kematian harian global. Namun pada Juli hingga Agustus, target tersebut mendapatkan tantangan yang cukup besar akibat dampak yang masif dari gelombang baru Covid-19 Varian Delta yang mencapai puncak pada Juli-Agustus 2021.

Hal tersebut diperparah dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpengaruh terhadap volatilitas pasar keuangan global, *confidence*, serta preferensi investor global sehingga mempengaruhi aliran portofolio ke *emerging market* seperti Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya direspon secara cepat dan tepat melalui pembatasan sosial dan peningkatan anggaran alokasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pemerintah menaikkan alokasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menjadi Rp 744,8 triliun atau meningkat 7,1% dibanding Tahun 2020 Rp 695,2 triliun. Peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari respon untuk mengurangi tekanan yang terjadi pada masyarakat dan dunia usaha.



Anggaran kesehatan ditingkatkan untuk menangani dampak pada sektor kesehatan yang cukup berat. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas dan diperpanjang periode penyalurannya untuk menjangkau masyarakat paling rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal bagi dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Sampai dengan akhir 2021, kinerja ekonomi global mencatat perkembangan positif, yang tercermin dari berbagai indikator ekonomi, seperti mobilitas penduduk yang sudah kembali ke zona pertumbuhan positif dan PMI Manufaktur yang sudah kembali ke level ekspansif setelah terkontraksi di Juli dan Agustus.

Dengan berbagai bauran kebijakan dan stimulus fiskal yang kuat, ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,69%. Meskipun jauh dari target sebesar 5% namun level PDB riil tahun 2021 telah melebihi level masa pra-pandemi di tahun 2019 (101,6%). Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 juga terjadi secara inklusif, hal ini tercermin dari berbagai indikator kesejahteraan, yaitu:

- Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,07% menjadi 6,49%.
- Tingkat ketimpangan (rasio gini) menurun dari 0,385 menjadi 0,381.
- Angka kemiskinan menurun dari 10,19% menjadi 9,71%.
- Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 71,94 menjadi 72,29.

Meskipun mendapatkan banyak apresiasi, Rahmat Gobel memiliki beberapa catatan kritis terhadap pertanggung jawaban APBN 2021 seperti tertuang pada beberapa point pandangan umum Fraksi Partai NasDem.

Rahmat Gobel menyoroti melesetnya target realisasi program PEN yang hanya mencapai Rp. 655,14 triliun atau sebesar 87,96% dari alokasi pagu sebesar Rp. 744,7 triliun. Jika ditilik lebih jauh, kontribusi terbesar melesetnya target tersebut diakibatkan rendahnya realisasi kluster dukungan UMKM dan korporasi. Rachmat Gobel memandang bahwa sebaiknya sektor UMKM dan koperasi dipisahkan dengan korporasi agar capaian sasaran yang lebih tajam dan spesifik.

Selain itu, Rachmat Gobel juga menyoroti belanja barang pemerintah pusat yang masih mengandalkan impor. Penekanan tersebut berkaitan dengan isu yang menarik perhatian publik dimana terdapat dugaan penggunaan baja impor pada proyek infrastruktur pemerintah. Sinyalemen tersebut terlihat dari data tahun 2021 yang menunjukkan impor baja naik 22% dan proporsi baja impor pada tahun itu mencapai 43% . Berdasarkan data statistik, impor besi dan baja pada 2017 senilai 7,985 miliar dollar AS. Namun pada 2021 melonjak menjadi 11,957 miliar dollar AS. Dari 2020 ke 2021, melonjak drastis 74,42%.

Kondisi tersebut tentu menjadi permasalahan tersendiri karena berdampak buruk terhadap industri dalam negeri yang selama pandemi Covid-19 mengalami tekanan finansial yang cukup besar. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih di masa yang akan datang untuk memaksimalkan belanja negara untuk produk dalam negeri agar sesuai dengan arahan presiden untuk mengoptimalkan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagai bentuk keberpihakan negara pada industri nasional.

Dan yang terakhir terkait pencapaian dari indikator kesejahteraan sosial dimana Rachmat Gobel mempertanyakan apakah hal itu bersifat genuine atau karena faktor gelontoran bantuan sosial. Rachmat Gobel berharap, telah terjadi perbaikan yang bersifat struktural dan permanen dan bukan karena faktor bantuan sosial dari Program PC-PEN. Untuk itu, pemerintah diharapkan lebih getol dalam mendorong perubahan struktural, dengan lebih giat dan kuat memperbaiki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan koperasi. (*)





4

BAB

FUNGSI
PENGAWASAN

“Nasionalisme di era globalisasi,
terutama di sektor ekonomi.
Dalam konteks ini, para produsen dan
pelaku usaha jangan rakus sebagai kapitalis,
sedangkan bagi masyarakat
diminta untuk
mencintai produk dalam negeri.
Adapun bagi penyelenggara pemerintahan
harus berpihak kepada masyarakat banyak.
Di situ konteks patriotisme
di era globalisasi ini.
Indonesia akan maju, besar, dan kuat
jika rasa kebangsaan itu
diresapi dan diamalkan oleh
seluruh elemen masyarakat,
bukan cuma diteriakkan.”

- Rachmat Gobel -

Restorasi Fungsi Pengawasan; Memperkuat Kembali Arah dan Koordinasi Kebijakan



■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengatakan, globalisasi dan liberalisasi telah membuat rakyat berhadapan langsung dengan gejolak ekonomi global dan ini merupakan tantangan yang semakin berat ke depan. Dan, pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Oleh karena itu, nasionalisme di era globalisasi akan lebih dibutuhkan, terutama di sektor ekonomi. Dalam konteks ini, para produsen dan pelaku usaha jangan rakus sebagai kapitalis, sedangkan bagi masyarakat diminta untuk mencintai produk dalam negeri. Adapun bagi penyelenggara pemerintahan harus berpihak kepada masyarakat banyak. Di situ konteks patriotisme di era globalisasi ini. Indonesia akan maju, besar, dan kuat jika rasa kebangsaan itu diresapi dan dijamin oleh seluruh elemen masyarakat, bukan cuma diteriakkan,” kata Rachmat Gobel.

Dalam semangat itulah Rachmat Gobel menjalankan amanat sebagai wakil rakyat di DPR RI dan sebagai Wakil Ketua bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang). Menjaga agar arah kebijakan yang dijalankan pemerintah sejalan dengan amanat konstitusi dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dan akan datang. Baginya, pemerintah adalah mitra strategis DPR dalam mengawal terwujudnya cita-cita bangsa.

Dari berbagai isu yang muncul di sektor industri dan pembangunan sepanjang 2022, ada sejumlah masalah yang menjadi perhatian utama Rachmat Gobel. Dalam hal fungsi pengawasan DPR, Ia banyak menyoroti isu-isu yang terkait sejumlah komoditi pangan seperti minyak goreng, bawah putih, kedelai dan daging.

A. Pangan Kunci Kemajuan Bangsa

Ada empat faktor yang membuat sektor pangan menjadi perhatian utama Rachmat Gobel, bahkan berteriak lebih lantang dalam soal ini. Pertama, perubahan iklim (*climate change*) yang dipicu pemanasan global (*global warming*). Kedua, perang Rusia melawan Ukraina. Ketiga, pandemi Covid-19. Keempat, jumlah penduduk dunia yang terus meningkat, termasuk Indonesia.

Perubahan iklim telah membuat siklus pergantian musim kian sulit diprediksi. Terkadang musim hujan datang lebih cepat, tapi bisa juga lebih lama. Demikian juga kemarau. *Global warming* juga telah memicu mencairnya es di kutub utara dan selatan, membuat permukaan air laut meningkat. Semua itu tak hanya menimbulkan bencana alam dan munculnya beragam jenis penyakit baru akibat kuman, tapi mengacaukan musim tanam pertanian. Inilah yang berakibat pada masalah ketersediaan pangan karena sering gagal panen akibat kebanjiran, terendam, terlalu banyak air, ataupun karena kekeringan.

Dalam hal perang Rusia-Ukraina, ada banyak pelajaran yang bisa diambil, seperti betapa rapuhnya sektor pangan terhadap perkembangan geopolitik. Seperti diketahui, perang ini telah membuat harga salah satu faktor terpenting dalam pangan (pertanian) yaitu pupuk, melambung tinggi. Pasalnya, Rusia dan sekutunya Belarusia adalah penghasil bahan baku pupuk utama dunia. Negara ini penguasa pasar bahan baku pupuk yaitu kalium, disamping Kanada.

Indonesia mengimpor 100% kalium. Indonesia juga mengimpor 100% fosfat, dari Yordania. Keduanya merupakan bahan baku utama pupuk NPK (nitrogen, phosphate, kalium) yang sangat dibutuhkan bidang usaha pertanian. Perang Rusia-Ukraina berdampak pada ketersediaan dan kenaikan harga kalium di dunia, harganya naik hingga dua kali lipat. Petani Indonesia ikut menjerit akibat kenaikan ini, sementara tanpa pupuk produktivitas akan anjlok.

Di sisi lain, Rusia dan Ukraina adalah penghasil utama gandum, jagung, dan bunga matahari di dunia. Perang kedua negara berdampak terhadap ketersediaan pangan tepung maupun minyak goreng. Inilah salah satu sebab Indonesia pernah terguncang ketersediaan minyak goreng berbahan CPO karena dunia mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng berbahan bunga matahari dan jagung akibat perang tersebut.



Pandemi Covid-19 juga telah memberikan pelajaran yang sangat besar bagi umat manusia. Tiba-tiba semua negara memperketat bahkan ada yang mengunci pintu-pintu masuk dan keluar negara mereka. Pembatasan dan mobilitas manusia dan barang terjadi secara luar biasa. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan berdagang pun dari rumah.

Rachmat Gobel mengamati, datangnya wabah dalam beberapa dekade ini semakin kerap terjadi, seperti virus ebola, SARS, Flu Burung. Puncaknya saat ini adalah Covid-19 yang telah mengguncang berbagai sendi kehidupan masyarakat dunia. “Dan kita tidak tahu akan ada wabah apa lagi di masa depan. Karena itu, masalah pangan menjadi sangat vital bagi suatu bangsa dan negara,” katanya.

Dalam menghadapi situasi pandemi, boleh dikatakan hanya petani yang tetap ke sawah, demikian pula dengan nelayan. Sektor pangan memang tidak boleh berhenti. Walau manusia hanya berada di dalam rumah saat pandemi, tapi perut harus tetap diisi.

Karena itu, secara khusus, saat berkunjung ke Jember dan bertemu dengan para petani, Rachmat Gobel membungkukkan badan kepada para petani. “Ini sebagai rasa hormat dan ungkapan terima kasih kepada petani dan nelayan. Mereka inilah para pejuang bangsa, para pejuang kemanusiaan,” katanya.

Masalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah adalah pertimbangan yang tak kalah penting dalam masalah pangan. Jumlah penduduk dunia pada 2022 ini diperkirakan mencapai 8,5 miliar jiwa, sedangkan jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 275 juta jiwa. Dari jumlah itu, tentu butuh gandum dan beras dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia. Padahal lahan pertanian makin sempit karena digunakan untuk permukiman, perkantoran, dan untuk industri.



■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat berbelanja buah hasil produk lokal



■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rahmat Gobel saat berbincang dengan salah satu pedagang buah

Dengan latar belakang itulah Rachmat Gobel selalu menyampaikan gagasan tentang keharusan Indonesia berdaulat di bidang pangan. Bagi Rachmat Gobel pilihannya adalah “Kedaulatan Pangan”, bukan “Ketahanan Pangan”. Keduanya memiliki konsep berbeda. “Kedaulatan itu berarti kita bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan ketahanan pangan kita tak perlu memenuhi kebutuhannya sendiri tapi juga bisa melakukan impor. Jadi konsekuensinya berbeda. Dengan empat latar belakang tadi, maka pilihannya adalah kedaulatan pangan,” katanya.

Menurut Rachmat Gobel, tak ada negara besar di dunia yang pangan pokoknya tergantung kepada bangsa dan negara lain. Mulai dari zaman Mesir kuno, Romawi, Majapahit, hingga di era modern ini. “Soviet runtuh karena tak mampu menyediakan roti untuk rakyatnya. Saddam Husein jatuh karena tak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya,” katanya.

Belajar dari kesalahan itu, kini Rusia membangun pertanian dan kebutuhan pangannya dengan baik. Kini Rusia dan negara-negara satelitnya menjadi pemasok kebutuhan pangan untuk masyarakat Eropa. Hal itulah yang kini kemudian dijadikan senjata oleh Rusia dalam menekan Eropa dan Amerika Serikat dalam perang melawan Ukraina.

Indonesia sendiri selalu ramai mewacanakan pembukaan lahan pertanian 1 juta hektar maupun pembentukan *food estate*. Intinya adalah perlunya lahan pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu problem bagi negara dengan jumlah penduduk besar adalah kemampuan menyediakan pangan. Hal ini pernah menimpa Tiongkok (1958), India (1943), dan Ethiopia (1984) yang menderita dihantam kelaparan. Jutaan orang meninggal. Dunia akan mengalami kesulitan untuk membantu negara dengan jumlah penduduk besar jika dihantam bencana kelaparan akibat gagal dalam membangun pertanian.

B. Perlindungan untuk Rakyat

Pangan secara keseluruhan memang menjadi fokus perhatian Rachmat Gobel. Ia mengatakan, Indonesia telah menjadi bagian dari globalisasi sehingga sangat rentan dari fluktuasi pasar internasional. Padahal masih banyak jumlah penduduk miskin dan rentan miskin. “Dalam situasi itu, rakyat sangat membutuhkan perlindungan dan jaminan dari negara dalam menghadapi gejolak pangan dunia,” katanya, Kamis, 7 April 2022.

Saat itu, rakyat menjerit oleh naiknya harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, daging, telur, gula, sayuran, kacang kedelai, dan lain-lain. Hanya harga beras yang relatif masih bisa dijaga. “Semua sudah naik jauh sebelum Ramadhan,” kata Rachmat Gobel. Namun naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas diperkirakan akan menaikkan harga dan tarif semua hal. Apalagi pemerintah juga menaikkan pajak. “Memang pemerintah kemudian memberikan bantuan langsung tunai (BLT), tapi ini bukan solusi. Ini hanya ibarat menambal kebocoran saja. Yang dibutuhkan adalah solusi permanen bagaimana rakyat terlindungi,” katanya.

Rachmat Gobel menyatakan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada akhir 2021 berkurang lagi (26,5 juta orang atau 9,71%), setelah sempat naik pada akhir 2020 (27,55 juta orang atau 10,19%) karena pandemi. Namun demikian, katanya, penduduk yang rentan miskin masih sangat besar yaitu mencapai 66,7%. Batas garis kemiskinan sesuai kriteria BPS berdasarkan perhitungan September 2021 adalah pengeluaran di bawah Rp 486.168 per kapita per bulan. “Karena itu, kenaikan harga kebutuhan pokok akan sangat memukul penduduk miskin dan penduduk rentan miskin,” katanya.

Tentang masalah pangan ini, kata Rachmat Gobel, negara telah memiliki sejumlah lembaga yang harus menjadi penyangganya. Lembaga tersebut adalah Badan Pangan Nasional, Bulog, ID Food, dan SugarCo. ID Food merupakan holding company bidang pangan yang menaungi sejumlah BUMN yaitu Rajawali Nusantara Indonesia, Garam, Sang Hyang Seri, Perusahaan Perdagangan Indonesia, Berdikari, dan Perikanan Indonesia. Sedangkan SugarCo merupakan *holding company* untuk delapan PTPN yang memiliki pabrik gula.

Sesuai peraturan pemerintah, dari sembilan bahan pokok, hanya beras yang dijaga khusus oleh Bulog. “Dijaga harga dan ketersediaannya,”. Namun sesuai Peraturan Presiden, Bulog juga mendapat tambahan tugas untuk menjaga harga dan ketersediaan kedelai dan jagung. Adapun Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk pada 2021 hanya bertugas di level kebijakan. “Semuanya BUMN, kecuali Badan Pangan Nasional yang menjadi lembaga yang langsung berada di bawah Presiden.

“Dalam rangka mencari solusi permanen untuk melindungi rakyat dari gejolak harga dan ketersediaan pangan untuk rakyat tersebut kita perlu duduk bersama dengan lembaga-lembaga tersebut. Apakah mereka sudah bekerja dengan benar? Apakah perlu pengaturan ulang? Itulah di antara pertanyaan yang harus dijawab,” kata Rachmat Gobel.

Ia mengingatkan, beban dunia semakin berat karena jumlah penduduknya terus meningkat. Sementara perubahan iklim telah membuat suplai pangan menjadi sesuatu yang rentan oleh terpaan cuaca. Pada sisi lain, terjadi persaingan penggunaan produk pertanian antara untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan bahan baku energi.

“Jadi isunya bukan lagi opsi memilih antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, tapi harus kedaulatan pangan. Setelah itu, kita harus memberikan perlindungan dan jaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga. Untuk hal kedua ini, Badan Pangan Nasional dan BUMN pangan sudah saatnya mengkaji ulang rumusan kebijakannya. Dunia sedang bergerak menuju ke kepentingan nasional masing-masing sambil terus menjaga keharmonisan dan kedamaian global,” katanya.

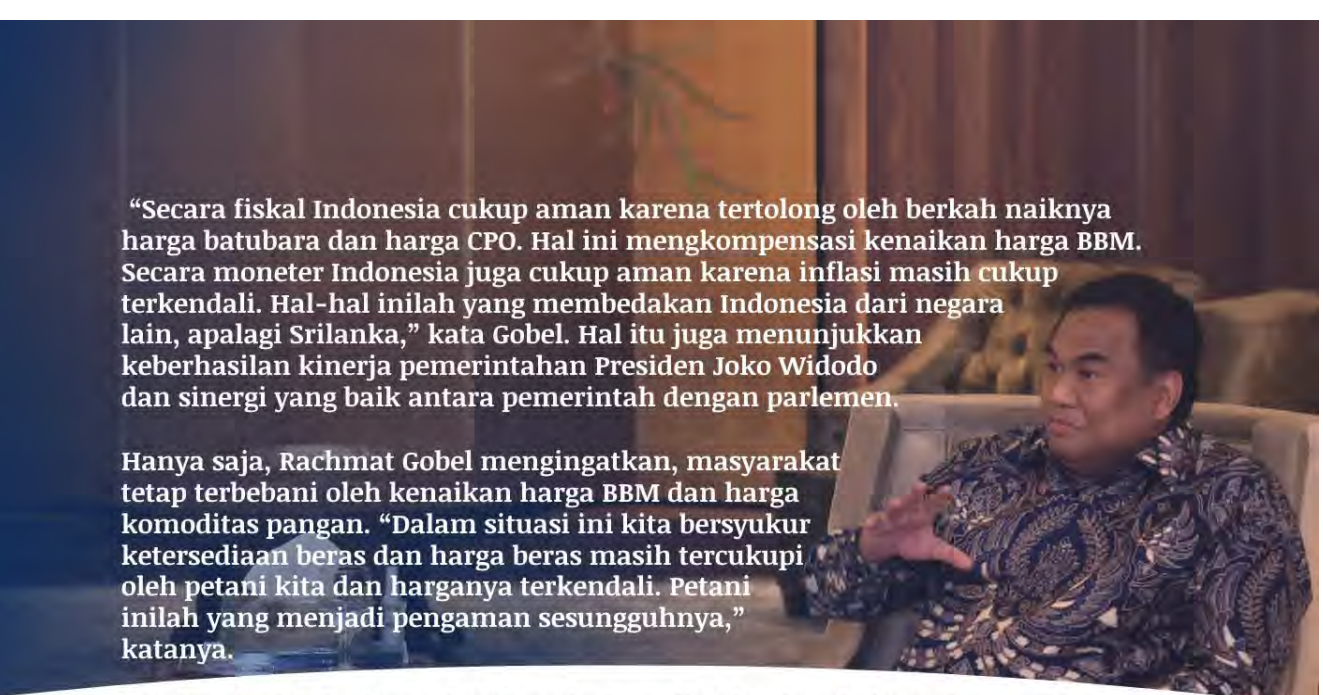
Rachmat Gobel mengingatkan, tidak boleh ada yang membiarkan rakyat menghadapi sendiri situasi ini. “Semua harus hadir. Kita tidak bisa cuma bilang: inilah kenyataan globalisasi. Kita harus mendampingi dan memeluk rakyat agar rakyat terlindungi,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Rapat Paripurna Pembahasan RUU APBN 2023



Pada kesempatan lain, Rachmat Gobel mendukung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global akibat pandemi Covid 19 dan konflik Rusia-Ukraina. “Tapi dalam jangka menengah dan panjang kita harus waspada terhadap masalah pangan kita. Juga efisiensi anggaran, serta efektivitas dan penguatan koordinasi antar lembaga dan kementerian.

Rachmat Gobel mendukung pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memberikan keterangan tentang kondisi ekonomi Indonesia dengan fakta-fakta yang optimistik. Hal itu menjawab kegelisahan publik akibat krisis ekonomi yang berujung pada krisis politik di Srilanka. Pemberitaan sebelumnya juga menunjukkan ada sejumlah negara yang berpotensi terkena resesi. Pandemi Covid 19 yang disusul konflik Rusia-Ukraina serta iklim kemarau basah juga mengakibatkan melejitnya harga-harga pangan dan energi, bahkan harga sayuran pun ikut melejit.

A photograph of Rachmat Gobel, an Indonesian politician, sitting in a chair and speaking. He is wearing a patterned batik shirt. The background is slightly blurred, showing an indoor setting with a plant.

“Secara fiskal Indonesia cukup aman karena tertolong oleh berkah naiknya harga batubara dan harga CPO. Hal ini mengkompensasi kenaikan harga BBM. Secara moneter Indonesia juga cukup aman karena inflasi masih cukup terkendali. Hal-hal inilah yang membedakan Indonesia dari negara lain, apalagi Srilanka,” kata Gobel. Hal itu juga menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan parlemen.

Hanya saja, Rachmat Gobel mengingatkan, masyarakat tetap terbebani oleh kenaikan harga BBM dan harga komoditas pangan. “Dalam situasi ini kita bersyukur ketersediaan beras dan harga beras masih tercukupi oleh petani kita dan harganya terkendali. Petani inilah yang menjadi pengaman sesungguhnya,” katanya.

Namun, lanjut Rachmat Gobel, perlu juga diperhatikan bahwa harga cabe, tomat, sayur-mayur, daging, telur, minyak goreng, dan susu sudah melejit karena panen yang terganggu oleh kemarau yang basah serta karena kondisi global. *Climate change* ini akan terus mengganggu di masa depan. Jadi perlu inovasi dalam bercocok tanam serta gotong-royong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging, telur, cabe, tomat, dan sayur-sayuran lainnya.

Tentang pangan ini, Gobel mengajak pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menguatkan sejumlah komoditi yang masih bisa dipenuhi dari dalam negeri jika diupayakan secara sungguh-sungguh seperti daging, susu, dan kacang kedelai. Untuk kacang kedelai, Indonesia pernah mandiri di masa lalu. Namun karena salah kebijakan dan tiadanya perlindungan, kini Indonesia sudah tergantung pada impor. “Data 2021 produksi dalam negeri kedelai hanya 213.548 ton. Sedangkan impornya mencapai 2.489.690 ton. Jadi 95% impor. Padahal pada 2016 petani kita masih mampu menyediakan 1.391.300 ton, tapi kemudian menurun terus.

Kondisi ketergantungan terhadap impor juga terjadi pada daging, susu, mentega dan telur. “Pada 2017 impor susu, mentega, dan telur senilai US\$ 990 juta, tapi pada 2021 sudah naik menjadi US\$ 1,394 miliar. Sedangkan impor daging pada 2017 senilai US\$ 590 juta, namun pada 2021 menjadi US\$ 965 juta dollar AS,” kata Rachmat Gobel.

Untuk produk-produk pangan ini, sebetulnya Indonesia masih bisa mengusahakan untuk memenuhinya dari dalam negeri. “Yang dibutuhkan adalah kesungguhan, perlindungan, dan koordinasi. Jadi bebanya bukan hanya ke kementerian pertanian saja tapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lain.

Hal yang paling parah, kata Rachmat Gobel, adalah impor gandum. “Pada 2017 nilainya US\$ 2,927 miliar, pada 2021 sudah melonjak ke US\$ 4,074 miliar. Khusus untuk gandum ini, tanah Indonesia memang tidak cocok untuk tanaman ini. “Untuk itu kita harus melakukan diversifikasi. Kita punya tepung sagu, tepung singkong, tepung jagung, tepung talas, dan lain-lain. Jadi yang diperlukan adalah gerakan nasional mengurangi ketergantungan pangan yang berbahan gandum.

Sebagai contoh, kata Rachmat Gobel, di Kabupaten Meranti, Riau, ada mie dari bahan sagu. “Rasanya enak. Jadi saatnya kita beralih seperti Vietnam membuat mie dari beras dan Jepang membuat mie dari soba. Demikian juga untuk kue-kue, sudah saatnya mengandalkan tepung yang berbahan lokal. “Hal seperti ini harus menjadi gerakan nasional.

“Saya sangat peduli soal pangan karena pangan itu soal ketahanan nasional. Banyak pemerintahan jatuh dan suatu negara roboh karena tak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya. Kini kita merasakannya setelah ada gejolak politik global. Kita beruntung bisa menjaga beras walaupun sempat akan diganggu oleh petualang yang ingin cari duit cepat dengan rencana impor satu juta ton beras. Alhamdulillah pemerintah dan parlemen berhasil menggagalkannya dan terbukti kita tak butuh impor. Jika itu terjadi maka petani akan kapok menanam padi seperti petani kapok menanam kedelai karena tak ada perlindungan dari negara.

Rachmat Gobel mengatakan, APBN Indonesia telah meningkat dengan pesat dan kemampuan fiskal semakin kuat. Yang dibutuhkan adalah efisiensi agar dana itu termanfaatkan secara optimal. Ini antara lain mensyaratkan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang semakin kuat sehingga suatu program tidak dibebankan ke satu kementerian atau lembaga saja. “Di sini butuh figur-figur pemimpin yang kuat. Jangan semua menggantung pada Presiden. Kita sangat beruntung memiliki Pak Jokowi yang memiliki kepemimpinan yang kuat, namun masalah Indonesia itu banyak, jadi para pembantunya harus bisa menjadi penopang yang baik.

Ia sangat mendukung dan mendorong diversifikasi bahan baku pangan berbasis komoditas lokal, melalui inovasi dan kreativitas. Ia mengapresiasi inovasi yang dilakukan sejumlah kalangan seperti Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang memproduksi mie instan menggunakan bahan baku singkong dengan merek Mie Haji. “Rasanya enak, lembut, dan juga sehat. Nyaman di perut,” katanya di DPR, Selasa, 26 Juli 2022.


“Selama ini publik lebih mengenal mie berbahan baku gandum. Di tengah perubahan iklim dan konflik Rusia-Ukraina, suplai gandum sangat terganggu dan inovasi mie berbahan lokal ini menjadi bermakna strategis. Penggunaan bahan baku lokal bagus untuk petani, memiliki dampak pada ekonomi nasional, positif bagi pemerataan ekonomi dan membantu UMKM untuk memasok beragam bahan pendukung lainnya. Saya harap ini bisa ditiru oleh produsen mie instan lain agar beralih ke penggunaan bahan baku lokal.

Rachmat Gobel mengatakan, ke depan pangan akan menghadapi masalah akibat perubahan iklim dan juga akibat konflik global. Saat ini saja, harga-harga kebutuhan pangan melonjak akibat kekurangan pasokan karena gagal panen dan kesulitan distribusi akibat konflik antarnegara. Karena itu, kemandirian penyediaan bahan pangan merupakan suatu keharusan. “Masalah kedaulatan pangan merupakan masalah strategis yang harus menjadi kepedulian kita semua.

Indonesia adalah negeri pengonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan data *World Instant Noodles Association*, pada 2021 konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 13,27 miliar bungkus. Sedangkan berdasarkan data BPS, secara rata-rata dalam setahun tiap penduduk Indonesia mengonsumsi 48 bungkus mi instan. Hal ini menunjukkan pangsa pasar mi instan di Indonesia sangat besar.

Pada kesempatan itu Rachmat Gobel menyarankan untuk menyertakan koperasi agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi sebagai investor. “Biasakan libatkan masyarakat dalam bentuk koperasi. Selain itu, ia menyatakan, agar tumbuh perlahan saja dan tidak terburu-buru. Dalam pandangannya, persoalan komoditi pangan tidak sebatas bagaimana mengatur suplai dan permintaan, atau sekadar mekanisme ekonomi, tapi juga perlu penyelesaian politik dan pendekatan yang menyeluruh. Di era liberalisasi dan globalisasi, harga sangat berfluktuasi sehingga rakyat sangat memerlukan perlindungan, apalagi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan rentan miskin.

“Jadi perlu perlindungan untuk rakyat. Seperti kita lihat dalam kasus minyak goreng, ini adalah ironi. Ibarat ayam terkapar di lumbung padi. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia tapi hingga kini rakyat kita harus antre untuk mendapatkan minyak goreng. Ini bukan soal masalah rebus atau goreng, tapi ini masalah kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap penduduknya sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Jadi kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan di sektor pangan tidak boleh bersifat tambal sulam. Seperti terjadi pada melejitnya harga kebutuhan pokok pada saat Ramadhan dan Lebaran 2022 lalu, pemerintah memang mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT), kata Rachmat Gobel ini bukan solusi. “Memang untuk membantu rakyat menghadapi lonjakan harga pemerintah memberikan BLT, tapi ini bukan solusi. Ini hanya ibarat menambal kebocoran saja. Yang dibutuhkan adalah solusi permanen bagaimana rakyat terlindungi.



Rachmat Gobel menyatakan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada akhir 2021 berkurang lagi (26,5 juta orang atau 9,71%), setelah sempat naik pada akhir 2020 (27,55 juta orang atau 10,19%) karena pandemi. Namun demikian, katanya, penduduk yang rentan miskin masih sangat besar yaitu mencapai 66,7%. Batas garis kemiskinan sesuai kriteria BPS berdasarkan perhitungan September 2021 adalah pengeluaran di bawah Rp 486.168 per kapita per bulan. “Karena itu, kenaikan harga kebutuhan pokok akan sangat memukul penduduk miskin dan penduduk rentan miskin.

C. Minyak Goreng dan CPO

Dalam hal komoditi pangan, negara harus selalu hadir dalam membantu rakyat agar mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan mudah. Inilah amanat konstitusi seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab.

Rachmat Gobel menekankan, kasus seperti yang terjadi pada awal Januari 2022 yaitu melejitnya harga dan kelangkaan minyak goreng tidak boleh lagi terjadi. Pada Rabu, 3 Januari 2022, sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel sudah mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan tentang kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok sejak dua bulan sebelumnya, termasuk soal minyak goreng.

Saat itu Ia memberikan keterangan kepada pers tentang kondisi tersebut. Rachmat Gobel mengingatkan kementerian perdagangan agar bisa mengendalikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat. “Jangan dibiarkan harga terus melambung. Hidup rakyat kecil lagi susah. Tapi harga telur, minyak goreng, bawang, cabe, sayur, daging ayam, dan lain-lain malah naik ke langit.

Seperti diberitakan di berbagai media, harga barang kebutuhan sehari-hari terus naik sejak Desember 2021, seperti harga minyak goreng, telur, dan bawang. “Padahal Indonesia itu sumber minyak goreng dunia. Kan aneh jika kita tak bisa mengendalikannya. Bawang pun sudah dibanjiri impor. Berarti ada mekanisme yang tidak bekerja,” kata politisi dari Partai Nasdem ini.

Rachmat Gobel mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 dan masih terjadi hingga saat itu, paling berdampak terhadap rakyat kecil. Hal itu bisa dilihat pada situasi di pasar-pasar, di supermarket, jumlah kucuran kredit untuk usaha mikro, maupun pada tutupnya usaha mikro. “Banyak orang kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Jika situasi ini ditambah dengan beban kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari maka mereka bisa gepeng,” katanya dalam keterangan pers ketika itu. Karena itu, Rachmat Gobel menyarankan agar Kementerian Perdagangan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengendalikan harga, misalnya dengan Kemantan dan Kemenkop dan UKM. “Ini soal personal *approach*, keterampilan manajerial, dan kepemimpinan saja. Jika hal itu dilakukan maka masalah harga barang kebutuhan rakyat bisa diatasi dengan baik.

Rachmat Gobel juga menyatakan, pada 2022 sejumlah tarif dan harga sejumlah kebutuhan juga diinformasikan akan naik seperti harga gas LPG, tarif listrik, tarif tol, cukai rokok, bahkan ada rencana menghapus premium dan pertalite. “Semua itu pasti akan berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi jika tak ada upaya serius dan permanen dalam pengendalian harga, maka rakyat kecil tak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Karena itu, Rachmat Gobel menyarankan agar Permendag tersebut untuk diperbaiki dengan memperkuat aspek koordinasi dengan kementerian terkait. “Semua hal saling terkait. Jadi jangan jalan sendiri saja.

Lebih lanjut Rachmat Gobel mengatakan bahwa pemerintah agar mewaspadai laju inflasi. Menurutnya, laju inflasi 2021 cukup terkendali, namun dorongan terhadap kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir ini harus diwaspadai agar tidak terus berlanjut. Ini penting agar tidak semakin memberatkan ekonomi sebagian besar masyarakat yang masih sepenuhnya pulih.

“Secara umum laju inflasi tahun lalu memang cukup terkendali, namun kalau dilihat lebih rinci ada yang harus diwaspadai, yaitu terjadi kenaikan inflasi yang signifikan pada kelompok makanan dan minuman sampai saat ini. Trend ini harus dikendalikan agar tidak terus berlanjut,” katanya.

BPS mengumumkan, inflasi tahunan atau *year on year (yoy)* pada Desember 2021 tercatat 1,87%. Kontribusi terbesar berasal dari kenaikan harga pada kelompok makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 3,20%. Kenaikan ini terutama sangat dirasakan dalam dua bulan terakhir, di mana Indeks Harga Konsumen (IHK) di kelompok makanan dan minuman ini, masing-masing naik 0,84% pada November dan 1,61% pada Desember.

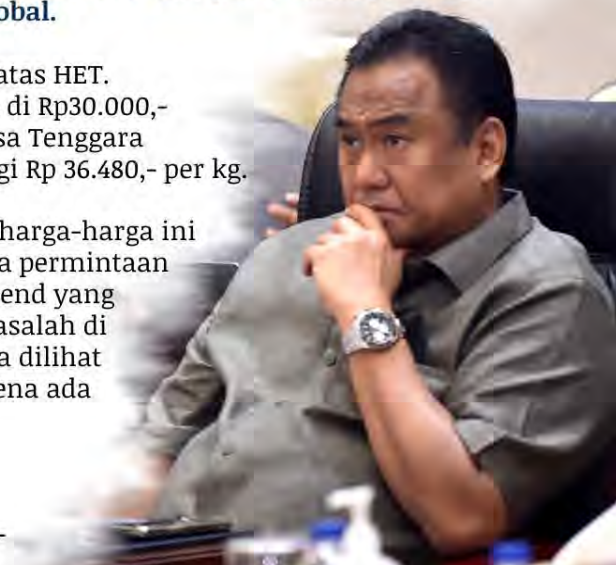
Menurut BPS, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi dalam dua bulan terakhir adalah cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, cabe merah, ikan segar, beras, bayam, kangkung, bawang merah. Dari pantauan sejumlah media di pasar-pasar di sejumlah daerah, harga komoditas makanan dan minuman itu masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah.

Seperti dikutip kantor berita Antara dari data panel harga pangan laman Logistik Pangan Kementerian Pertanian, rata-rata harga cabe rawit merah rata-rata masih Rp 85.000,- per kg, jauh dari HET yaitu Rp 32.000,- per kg. Bahkan di sejumlah daerah seperti Kalimantan Barat harga cabe rawit masih berada di Rp 123.450,- per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana per 3 Januari 2022 rata-rata berada di kisaran Rp 19.000,- per liter di seluruh provinsi Indonesia. Harga ini 25% lebih tinggi di atas HET sebesar Rp 11.000,- per liter. Kenaikan harga minyak goreng kemasan sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2021 menyusul naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO di tingkat global.

Selain itu, harga telur juga masih 10%-20% di atas HET. Secara nasional rata-rata telur saat ini berada di Rp30.000,- per kg. Bahkan di sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Timur harga komoditas ini masih sangat tinggi Rp 36.480,- per kg.

Menurut Rachmat Gobel, meskipun kenaikan harga-harga ini bisa diartikan sebagai indikator meningkatnya permintaan akibat membaiknya perekonomian, namun trend yang tengah berlangsung juga mengindikasikan masalah di sektor suplai. Kenaikan harga tidak bisa hanya dilihat dari meningkatnya permintaan, tapi juga karena ada masalah di sisi suplai atau distribusi.



Kalau kenaikan harga akibat peningkatan permintaan pada akhir tahun, kenaikan harga normalnya sekitar 10%-15% dan ini berlangsung dalam waktu yang singkat. “Kalau dilihat dari data, kenaikan harga komoditas pangan dan minuman sudah jauh sekali dari HET dan sudah berlangsung cukup lama, sekitar 2 bulan bahkan lebih,” katanya.

Saat itu Ia juga mengingatkan, tiga bulan mendatang masyarakat juga akan merayakan hari besar keagamaan yaitu puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Jika kenaikan harga saat ini tidak bisa segera dikendalikan, bisa dibayangkan harga komoditas pangan akan semakin melejit dan ini tentu semakin memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap seperti karyawan dan pegawai negeri sipil.

“Kenaikan upah tahun ini kan tidak besar, kalau harga-harga bahan pokok tidak turun, tentu akan memberatkan masyarakat pekerja. Selain itu, katanya, kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari juga bisa dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan impor. “Padahal intinya pada masalah koordinasi dan kemauan para pemangku kepentingan untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Rachmat Gobel.

Apa yang disampaikannya itu, tidak direspon dengan baik oleh Kementerian Perdagangan. Kondisi di pasar justru makin mengkhawatirkan. Harga minyak goreng terus melambung. Komoditi ini juga makin sulit dicari. Masyarakat harus antri untuk mendapatkan minyak goreng. Hal ini tentu ironis, karena Indonesia adalah penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Bahkan, sebelum perang Rusia-Ukraina, pengusaha CPO dan minyak goreng merengek kepada pemerintah untuk dibantu. Ini karena mereka mengalami kesulitan untuk menembus pasar Eropa. Negara di kawasan ini menilai usaha pertanian kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan dan mengancam habitat orang utan. Karena itu, pada 2021, pemerintah membantu pengusaha sawit untuk melakukan lobi parlemen Uni Eropa. Di sisi lain, pemerintah juga mengucurkan dana bernilai triliunan untuk subsidi biodiesel berbahan baku CPO. Dengan demikian, produk CPO Indonesia bisa disalurkan untuk pembuatan biodiesel.

Namun setelah dunia menyerap CPO dan minyak goreng Indonesia akibat embargo minyak goreng dari Rusia yang berbahan baku bunga matahari dan harga melambung, justru pengusaha sawit tidak membantu rakyat Indonesia. Permintaan yang melonjak di pasar global dan diikuti melambungnya harga CPO dan minyak goreng membuat pengusaha sawit memilih ekspor dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga dalam negeri pun ikut melonjak drastis. Karena itu, Kementerian Perdagangan membuat berbagai langkah namun tetap tak efektif.

Pada pertengahan Februari 2022, untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan mulai menerapkan mekanisme kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)* sebesar 20% atau kewajiban eksportir CPO dan turunannya untuk memasok ke pasar dalam negeri. Seluruh eksportir yang akan mengespor wajib memasok atau mengalokasikan 20% dari volume eksportnya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga Rp 9.300 per kg untuk CPO dan harga RBD Palm Olein Rp 10.300 per kg.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah Rp 11.500,- per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500,- per liter dan kemasan premium Rp 14.000,- per liter.

Namun di lapangan, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tidak teratasi secara maksimal. Meski harga mulai turun, namun dibandingkan dengan Malaysia harga minyak goreng di Indonesia masih jauh lebih tinggi. Di negara tetangga ini, HET terendah hanya Rp 8.500,- per liter. Dikaitkan dengan daya beli dan kapasitas produksi, perbedaan HET yang cukup mencolok ini memang menjadi ironis karena pendapatan per kapita Malaysia jauh lebih tinggi, namun pemerintahnya bersedia memberikan subsidi yang lebih besar .

Karena itu, Rachmat Gobel kembali membuat pernyataan dengan mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) dalam stabilisasi harga sejumlah komoditi strategis di pasar dalam negeri, seperti minyak sawit atau CPO. Perlu langkah yang lebih strategis dan bersifat jangka panjang untuk membangun manajemen stok nasional yang andal.

“Kalau stok nasional kuat, bagaimanapun gejolak harga internasional tentu akan bisa diatasi dengan baik sehingga tidak mengganggu stabilitas harga di pasar dalam negeri seperti yang terjadi dalam satu tahun terakhir ini,”

Tidak hanya memberatkan masyarakat, kenaikan harga minyak goreng ini juga telah membebani kinerja perekonomian secara keseluruhan. Bisa dikatakan, sekitar 17% dari laju inflasi pada 2021 akibat kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng terutama dirasakan membebani kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

Lonjakan harga CPO tersebut dipicu kekhawatiran terhadap suplai ke pasar global karena terjadinya masalah produksi di negara produsen utama yaitu Indonesia dan Malaysia yang menguasai sekitar 80% pasar dunia. Akibat cuaca dan kekurangan tenaga untuk panen, produksi CPO Malaysia pada 2021 lalu hanya mencapai sekitar 18 juta ton atau turun sekitar 5% yaitu dari tahun sebelumnya 19 juta ton. Sedangkan produksi Indonesia turun tipis 0,31% dari 51,63 juta ton menjadi 51,3 juta ton. Akibat penurunan produksi, pasokan CPO Malaysia ke pasar global turun sekitar 10% dari 17,39 juta ton pada 2020 menjadi 15,56 juta ton pada 2021. Sementara ekspor Indonesia relatif stabil 34,2 juta ton pada 2021 dari tahun 2020 sebesar 34 juta ton.



Menurut Rachmat Gobel, ke depan posisi komoditi CPO akan semakin strategis, tidak hanya untuk menyuplai kebutuhan pangan tapi juga energi. Ini berarti, pembentukan harga komoditi ini juga akan semakin kompleks, tidak hanya memperhitungkan *demand* dan *supply* pangan, tapi juga untuk kebutuhan untuk *bioenergy* baik dalam bentuk *biofuels* maupun *biodiesel*.

Menurut perkiraan International Energy Agency (IEA), dalam periode 2021-2026 permintaan terhadap *bioenergy* akan meningkat sekitar 28% atau sekitar 41 miliar liter sehingga menjadi 186 miliar liter. Bahkan untuk menyesuaikan dengan target Net Zero Emissions 2050, perlu dukungan *bioenergy* empat kali lipat dari posisi saat ini.

“Jadi bukan untuk konsumsi saja, kebutuhan untuk *bioenergy* juga akan naik tinggi. Akan terjadi *trade off* antara kepentingan pangan dan energi. Untuk itu perlu manajemen stok yang kuat untuk menghadapi semua itu agar kepentingan nasional terhadap setiap sektor dan kelompok masyarakat tetap bisa terjaga dengan baik.

Rachmat Gobel sebetulnya tak begitu setuju dengan mekanisme subsidi. “Terbukti harga minyak goreng di warung-warung tetap tinggi. Mereka tak mendapat bagian subsidi. Jadi sebetulnya subsidinya untuk siapa?” katanya. Apalagi para produsen itu sudah banyak mendapatkan insentif dari pemerintah, khususnya di masa-masa sulit seperti di masa pandemi ini. Karena itu, Rachmat Gobel mengingatkan bahwa penentuan harga itu mestinya dibebankan kepada produsen. “Pemerintah cukup mematoknya. Lalu mereka yang bertanggung jawab terhadap keseragaman harga. Saya kan juga pelaku industri, jadi paham bagaimana agar harga di seluruh Indonesia bisa seragam. Justru di saat seperti ini, nasionalisme itu akan mendapat bentuknya yang nyata. “Nasionalisme di era globalisasi akan lebih dibutuhkan di sektor ekonomi. Dari produsen dan pelaku usaha agar jangan rakus sebagai kapitalis, sedangkan bagi masyarakat agar mencintai produk dalam negeri. Adapun bagi penyelenggara pemerintahan harus berpihak kepada masyarakat banyak. Di situ konteks patriotisme di era globalisasi ini. Indonesia akan maju, besar, dan kuat jika rasa kebangsaan itu diresapi dan dijamin oleh seluruh elemen masyarakat, Bukan cuma diteriakkan.

Kinerja Industri CPO 2021 dan Perkiraan 2022



Jenis	2021	2022
Produksi CPO	49,71 juta ton	51,01 juta ton
Produksi Biodiesel	9,3-9,4 juta ton	10,15 juta ton
Insentif Biodiesel	Rp 51,86 triliun	

*Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2022

*Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2022

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel memanggil para pimpinan komisi DPR RI terkait ke ruang kerjanya. Mereka membahas langkah apa yang bisa dilakukan parlemen untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut. Mereka bersepakat untuk membuat rapat gabungan. Karena itu, pada Selasa, 15 Februari 2022, Rachmat Gobel membuat pernyataan kepada pers.

Menurutnya, Pimpinan DPR RI telah sepakat untuk menggelar rapat gabungan tiga komisi dengan empat Kementerian untuk mencari solusi persoalan pangan yang selalu membelit Indonesia. Sebagai catatan, sebagai Korinbang Rachmat Gobel mengkoordinasi Komisi IV, V, VI, dan VII. Khusus soal pangan ini Ia mengadakan rapat gabungan Komisi IV, VI, dan VII. Sedangkan kementerian yang akan diundang adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.

“Kita harus menyelesaikan secara terintegratif dan komprehensif sehingga tidak ada lagi ego sektoral. DPR RI harus mengambil prakarsa karena masalah pangan ini tak hanya menggerogoti APBN tapi juga menjadi masalah ketahanan nasional dan merugikan rakyat kecil,



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat berdiskusi dengan Pimpinan Komisi VI terkait pangan dan kelangkaan minyak goreng

Indonesia berkali-kali menghadapi persoalan pangan, seperti saat ini soal minyak goreng yang langka dan mahal, juga harga kacang kedelai yang terus naik. Setiap musim panen dan musim tanam petani juga menghadapi masalah pupuk subsidi yang mahal dan langka serta harga gabah yang anjlok. “Kita butuh solusi yang permanen agar kita tak hanya memiliki ketahanan pangan tapi jika bisa kita harus berdaulat di bidang pangan. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, perubahan iklim telah membuat cuaca berubah-ubah sehingga mengganggu pertanian. Kedua, jumlah penduduk dunia yang terus meningkat sehingga konsumsi pangan terus bertambah. Ketiga, pergeseran dari energi fosil ke

energi ramah lingkungan yang di antaranya bersumber dari bahan pangan. Keempat, globalisasi telah membuat dunia mudah terdisrupsi oleh beragam faktor. “Ke depan masalah pangan akan menjadi kian strategis, bukan lagi soal perut semata.

Melalui rapat gabungan ini, kata Rachmat Gobel, DPR RI ingin mendapat penjelasan dari tiap-tiap kementerian bagaimana duduk perkaranya dan apa strateginya dalam menghadapi semua situasi ini. “Kita tidak ingin ada lempar-lemparan tanggung jawab antara satu kementerian dan kementerian yang lain.

Rachmat Gobel juga mengingatkan, sebagian besar masyarakat Indonesia berada di sektor pangan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, dan industri kuliner. “Jadi ini menyangkut lapangan kerja yang besar dan lapangan usaha yang luas. Selain itu, masih banyak penduduk miskin dan penduduk rentan miskin. Sehingga jika masalah kebutuhan pokok terganggu, bisa berakibat terpuruknya masyarakat miskin dan bertambahnya jumlah orang miskin. Karena itu, ia mewanti-wanti agar jangan main-main dengan masalah pangan. “Perlu solusi berdasarkan hati nurani dan sistematis. Bukan sekadar impor dan impor. Impor itu instrumen, bukan strategi dan solusi.

Akhirnya, mulai Kamis, 17 Maret 2022, pemerintah mencabut ketentuan HET dan menyerahkan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar, sedangkan untuk minyak goreng curah dikenakan HET Rp14.000 per liter. Setelah pengumuman itu, tiba-tiba minyak goreng hadir berlimpah di minimarket dan supermarket dengan harga sekitar Rp 22.000 hingga Rp 24.000 per liter.

“Kondisi ini menunjukkan negara kalah dan didikte oleh situasi. Indonesia adalah negara penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Jadi tidak ada masalah dengan produksi. Yang jadi masalah adalah meningkatnya permintaan dunia sehingga harga naik. Pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal daripada menjual ke dalam negeri dengan harga yang diatur pemerintah. Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi bukan ditimbun ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi.

Sebelum ada gejolak harga, minyak goreng kemasan di tingkat konsumen dijual di angka sekitar Rp 9.000 per liter. Kini harga berkisar antara Rp 22.000 hingga Rp 24.000 per liter. “Hampir tiga kali lipat kenaikannya. Ini keuntungan yang berlimpah dan berlebihan.

Rachmat Gobel mengatakan, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Saat ini, di masa pandemi, masyarakat sedang menderita. Data-data statistik menunjukkan angka kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, dan kesenjangan kaya-miskin melebar. Dengan melejitnya harga minyak goreng berarti seperti jatuh tertimpa tangga pula. Secara sosial-ekonomi ini juga berarti tersedotnya uang dari bawah ke atas. Ini akan sangat membahayakan bagi ketahanan nasional.

Lebih lanjut Rachmat Gobel menyatakan, produsen harus diajak untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan barang di pasar dan juga dalam menentukan harga. “Minyak goreng itu masuk ke dalam barang strategis, bukan seperti barang-barang kebutuhan sekunder maupun tersier seperti kendaraan dan elektronika. Sehingga industri pangan bahan pokok bukan sekadar dilihat dari sisi investasi tapi bagian dari partisipasi dalam pembangunan. Jadi harga bahan pokok, termasuk minyak goreng, jangan dilepas ke pasar.

Rachmat Gobel mengatakan, “Negara harus berpihak dan melindungi rakyat. Negara harus mencegah pemiskinan. Negara harus memakmurkan warganya. Jadi bukan melakukan hal yang sebaliknya.” Lebih lanjut wakil rakyat dari Partai Nasdem ini menyatakan, masalah harga minyak goreng ini hanya butuh keberanian, ketegasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan pendekatan kemanusiaan pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO. “Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong.

“Pencabutan HET minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil disorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha.



Pada Senin, 21 Maret 2022, Rachmat Gobel menyatakan tak ada mafia minyak goreng. “Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan. Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga dan juga masalah dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng.

Hal itu ia sampaikan saat diwawancara wartawan di sela-sela mengikuti pertemuan *Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-144 di Bali. Wartawan sudah menunggu Gobel usai ia menerima delegasi parlemen dari Jepang. “Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia.

Rachmat Gobel mengatakan, Kementerian Perdagangan itu seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO dan minyak goreng. Indonesia adalah negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Menurutnya, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu. “Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun. Jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga naik terus menyerah.

Apalagi Presiden punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa.

Lebih lanjut Rachmat Gobel meminta agar pemerintah bisa melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab. “Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Jadi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya.

Menurutnya, pemerintah banyak memiliki instrumen untuk bisa melibatkan pengusaha dalam membangun ketahanan nasional. “Masalah pangan ini bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional. Jika tak terkendali masalahnya bisa menjadi politis,” kata Rachmat Gobel. Karena itu, masalah pangan tak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Perdagangan. “Banyak kementerian dan lembaga lain yang terlibat seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan sebagainya.



D. Komoditas Bawang Putih



Pada 2021 Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan menerima kunjungan Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto. Dirjen mengadakan tentang banjir impor bawang putih oleh Kementerian Perdagangan, padahal Kementerian Pertanian sedang memiliki program tentang kemandirian komoditi ini. Menurut Dirjen, Indonesia bisa mandiri bawang

putih. Hal itu pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, Kementerian Pertanian sedang membangun sentra-sentra pertanian bawang putih di seluruh Indonesia, yang iklim dan tanahnya cocok untuk bertanam bawang putih.

Karena itu, pada Rabu, 22 Desember 2022, Rachmat Gobel menyampaikan kepada pers tentang pentingnya melindungi petani bawang putih dari produk impor. Rachmat Gobel mengaku prihatin terhadap nasib petani bawang putih. Harga anjlok karena pasar Indonesia dibanjiri impor bawang putih. “Kita harus melindungi petani bawang putih dari banjir impor. Selain itu kita juga harus berpihak pada tujuan kemandirian bawang putih. Untuk itu kita perlu mengaturnya agar tujuan itu tercapai.

Rachmat Gobel mengemukakan hal itu menanggapi keluhan petani tentang anjloknya harga bawang putih akibat impor. Petani mengeluhkan hal itu kepada Presiden Jokowi saat berdialog dengan petani bawang putih di Temanggung, Jawa Tengah. Setiap tahun Indonesia mengimpor bawang putih sekitar 500 ribu ton per tahun, hampir 100% dari Tiongkok. Sedangkan produksi bawang putih dari dalam negeri sekitar 90 ribu ton per tahun.

“Berdasarkan data, Indonesia pernah swasembada bawang putih pada tahun 1994. Jadi sebetulnya kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri”

Hanya saja, lanjutnya, seperti yang terjadi pada produk pertanian dan peternakan lainnya, Indonesia selalu gagal menata importasinya. Padahal, kedudukan petani Indonesia lemah karena keterbatasan lahan dan juga karena faktor kemiskinan. Selain itu, posisi tawar petani juga lemah sehingga tak mendapat perlindungan. “Yang terjadi kemudian adalah muncul importir yang nakal dengan menghancurkan harga. Maka terjadi seperti dalam hukum perang: hancurkan, duduki, lalu kuasai,” katanya.

Sebagai ilustrasi, Rachmat Gobel menerangkan, akibat proses yang seperti itu, maka petani akan rugi dan akhirnya kapok menanam lagi. “Saat Indonesia bisa swasembada bawang putih, ada sekitar 100 kabupaten yang menjadi sentra bawang putih. Sekarang cuma ada di Lombok Timur, Magelang, Temanggung, dan Karanganyar.

“Pemerintah menggelontorkan dana APBN untuk itu. Sehingga mulai muncul petani bawang putih di Humbahas, Solok, Bandung Barat, Cianjur, Majalengka, Garut, Tegal, Malang, Banyuwangi, Probolinggo, Bantaeng, Malino, Minahasa Selatan, dan banyak lagi. Tapi dengan impor yang tak terkendali program ini bisa hancur lebur. Dana APBN yang digelontorkan menjadi sia-sia. Ibarat ada yang menanam, tapi juga ada yang membinasakan. Kita harus duduk bersama, menata bersama.

Sayangnya, kata Rachmat Gobel, di tengah upaya itu terbit Permendag No 20 Tahun 2021 yang terbit pada 1 April 2021. Dalam Permendag ini ada aturan yang menghapuskan rekomendasi teknis dari kementerian terkait dan cukup izin dari Kemendag. “Bawang putih masuk di dalamnya yang tak butuh rekomendasi teknis dari kementan. Ini tentu bisa mengacaukan program swasembada, karena besaran impor bisa tak terkoordinasikan dengan produksi petani kita sendiri.

Karena itu, Rachmat Gobel mengingatkan untuk merevisi kembali Permendag No 20 Tahun 2021 tersebut. “Permendag ini sangat tidak memihak pada kemampuan dalam negeri. Hanya menguntungkan importir saja. Ini sama sekali tak menghormati daya kreasi. Bertani itu proses budaya yang dalam, penuh nilai-nilai dan kearifan lokal. Beda dengan importir, cukup modal duit dan selebar izin.

E. Kacang Kedelai

Pada Rabu, 16 Februari 2022, pengurus Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (KOPTI)/Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (GAKOPTINDO) menemui Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang), Rachmat Gobel di ruang kerjanya di DPR RI. Mereka dipimpin Aep Syaefudin. Aep mengatakan, kebutuhan kedelai nasional adalah 3 juta ton, yaitu 1 juta ton untuk pembuatan tahu dan 2 juta ton untuk pembuatan tempe. Dari 3 juta ton itu, 300 ribu ton berasal dari kedelai lokal. Kedelai lokal lebih bagus, lebih enak, dan lebih bergizi.

Menurutnya, saat ini ada 20 perusahaan importir kedelai, dua di antaranya menguasai 60% volume impor. Ia juga menerangkan, harga kedelai per kg sudah mencapai Rp 11.300 Padahal 2-3 bulan sebelumnya masih Rp 9.000 per kg. Ia juga menjelaskan bahwa harga patokan pemerintah adalah Rp 8.500. Saat ini ada sekitar 170 ribu pengrajin tahu dan tempe seluruh Indonesia dengan tenaga kerja mencapai 1,5 juta orang. Aep berharap Indonesia bisa swasembada kedelai, namun petani selalu frustrasi karena saat mereka menanam harga kedelai langsung dijatuhkan.

Menanggapi hal itu, Rachmat Gobel, meminta Kementerian Perdagangan bisa menstabilkan harga kacang kedelai. Hal ini untuk memberi ketenangan pada masyarakat maupun pada pengrajin tahu dan tempe. Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri.

Saat ini harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional, khususnya di Amerika Serikat. Produsen terbesar kacang kedelai di dunia adalah Amerika Serikat dan China. Pada 2020, harga kacang kedelai di tingkat konsumen masih sekitar Rp 8.500 per kilogram. Namun pada 2021 sudah naik menjadi Rp 9.500,- per kg hingga Rp 10 ribu per kg.

Kini, harga kacang kedelai sudah berada di atas Rp 11 ribu per kg. Akibat kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus tersebut, jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin yang kecil. Padahal pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.



Rachmat Gobel mengatakan, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki oleh masyarakat bawah dengan mudah. Karena itu, fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, semua pihak, khususnya pemerintah untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik.



Lebih lanjut dikatakan, masalah kacang kedelai ini harus dicarikan solusi yang lebih permanen. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Saat ini, sekitar 80% kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor. Karena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga maupun oleh situasi perdagangan internasional.

Selain itu, menurut Rachmat Gobel, Kementerian Perdagangan juga harus bisa mengatur stabilitas harga di dalam negeri. Pada sisi lain, walaupun kedelai tanaman ini merupakan tanaman *subtropis*, namun tanaman ini masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Jadi harus ada koordinasi agar keran impor diatur dengan kemampuan Kementerian Pertanian dalam menyediakan kacang kedelai dari petani. Jangan sampai pasar kebanjiran produk impor yang kemudian bikin kapok petani untuk menanam kedelai.

Ia juga menekankan, agar Kementerian Pertanian bekerja keras dan memiliki program yang sistematis agar Indonesia bisa berswasembada kacang kedelai. “Manfaatkan teknologi dan kuatkan riset,” katanya. Ia menyatakan, di masa lalu, penguasa kacang kedelai dunia hanyalah Amerika Serikat, namun kini sudah muncul para pesaing baru. Indonesia juga sudah menjadi eksportir edamame. Hal itu membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai. “Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” .



F. Komoditas Daging

Indonesia adalah negeri yang subur dan luas. Indonesia juga dikenal sebagai negeri agraris. Namun ternyata, untuk memenuhi konsumsi daging dan susu masih impor. Pada Kamis, 9 Juni 2022, Rachmat Gobel menerima Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau. Mereka mengeluhkan akibat impor kerbau dari India, kini Indonesia terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Karena itu Ia meminta pemerintah untuk segera menanggulangi penyakit kuku dan mulut (PMK) yang kini sedang melanda hewan ternak milik rakyat. Bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, kematian satu ternak sudah merupakan kiamat tersendiri.

Hal itu ia sampaikan saat menerima dua orang perwakilan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kebau Indonesia (PPSKI), drh Nanang Purus Subendro (ketua umum) dan Yudi Arif (bendahara umum). Berdasarkan keterangan keduanya, dalam sebulan ini sudah 20 provinsi yang terpapar PMK. “Jika satu sapi saja terpapar maka satu kandang dipastikan terpapar semuanya,” kata Nanang. Akibat serangan PMK ini, terjadi panic selling, harga sapi turun drastis yang sangat merugikan petani. Nanang mengatakan, jumlah peternak sekitar 5 juta orang dengan populasi sapi 18 juta ekor dan populasi kerbau 1,1 juta ekor. Menurutnya, PMK tak hanya bisa menyerang sapi dan kerbau tapi juga bisa menyerang domba, dan kambing.

Rachmat Gobel mengatakan, bagi peternak sapi dan kerbau rumahan, hewan ternak merupakan harta terbesar. Biasanya akan dijual saat ada hajatan atau untuk keperluan sekolah anaknya. Karena itu wabah PMK ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan keluarga.



Selain itu, Rachmat Gobel mengingatkan, kepemilikan hewan ternak sapi atau kerbau merupakan indikator tersendiri dalam mengukur kemiskinan masyarakat. Sehingga jika hewan ternaknya mati atau harganya jatuh maka keluarga peternak tersebut menjadi langsung jatuh miskin. Jadi jangan meremehkan masalah ini.

Serangan PMK, kata Rachmat Gobel, juga sangat memukul upaya pemerintah untuk mengejar kedaulatan penyediaan pangan daging. Dari 12 bahan pokok pangan strategis, penyediaan daging sapi masih berwarna merah. Serangan PMK ini tentu akan makin menyulitkan upaya kedaulatan pangan daging sapi.

Rachmat Gobel mengingatkan, Indonesia telah bebas PMK sejak 1990. Sedangkan kasus pertama terjadi pada 1886. Sehingga butuh lebih dari satu abad untuk bebas PMK. Kejadian ini merupakan bentuk kesembronoan dalam tata laksana impor dari negara yang masih belum bebas PMK. Harus ada evaluasi serius mengapa ini bisa terjadi.

Wakil rakyat dari Partai NasDem ini meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh seperti halnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ini sama-sama serangan virus. Persebarannya juga sudah sangat meluas. Dan ini menyangkut nasib peternak dan juga soal kedaulatan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia.

Untuk itu Rachmat Gobel mengusulkan agar, pertama, pemerintah menyediakan anggaran untuk pemberian ganti rugi kepada peternak yang ternaknya terinfeksi PMK. Kedua, segera melakukan vaksinasi massal terhadap ternak. Ketiga, Bulog dan Badan Pangan Nasional segera menciptakan mekanisme penampungan daging dari ternak yang terinfeksi PMK. Keempat, lakukan pemusnahan terhadap ternak yang terinfeksi PMK. Kelima, hentikan impor dari negara yang belum terbebas PMK. Jika dianggap perlu, keenam, segera tetapkan wabah PMK ini sebagai kejadian luar biasa (*)





Mendorong Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan sebagai Episentrum dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Wilayah perbatasan negara memiliki nilai yang strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia dalam berbagai dimensi kedaulatan, pertahanan, keamanan dan ekonomi. Dalam mewujudkan nilai strategis itu, Presiden telah menetapkan instruksinya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Pada inpres tersebut menitik beratkan pada sektor ekonomi di tiga wilayah perbatasan dan program pembangunan yang akan berakhir Desember 2022.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang juga ditugaskan sebagai Ketua Tim Pengawasan Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, melihat bahwa saat ini kesadaran publik akan pentingnya penataan dan optimalisasi potensi kawasan perbatasan semakin tinggi. Dengan disusunnya *design* pembangunan di wilayah perbatasan, akan berdampak besar terhadap bangsa dan negara, baik dari segi keamanan, hubungan bilateral dan dapat meningkatkan perekonomian wilayah perbatasan tersebut.

Penyelesaian pembangunan batas wilayah membawa dampak positif dan kemajuan masyarakat sekitar wilayah perbatasan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di ketiga wilayah perbatasan tersebut. Disini kita melihat wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara perlu menjadi perhatian utama demi memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang ada di sekitar PLBN dengan dipertegas adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tersebut.



Tahun 2022 ini Timwas Perbatasan DPR RI telah melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel sekaligus sebagai Ketua Timwas Perbatasan DPR RI pada bulan Agustus 2022.

Timwas Perbatasan DPR RI dalam pengawasannya ke wilayah Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat fokus kepada pembangunan infrastruktur, ekonomi, perdagangan & kesejahteraan rakyat dikarenakan wilayah perbatasan darat tersebut memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan pendatang/ wisatawan ke Indonesia. Pengelolaan perbatasan negara penting dan strategis karena menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu wilayah perbatasan sebagai wujud pertahanan dan keamanan negara dengan memanfaatkan pendayagunaan sumber daya dan pemerataan pembangunan. Hal ini dapat membangun daya saing warga masyarakat perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi negara tetangga dan membangun halaman belakang menjadi beranda depan NKRI, sebagai Nawa Cita ke-3 tergambar pula dengan jelas

membangun ekonomi dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Inilah yang menjadi pokok perhatian utama pemerintah RI dan didukung penuh oleh DPR RI melalui Timwas Perbatasan DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Gobel.

A. Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2022

Pada Agustus 2022, Tim Pengawasan (Timwas) Perbatasan DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Gobel melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Agustus 2022.

Ini merupakan tugas konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan sesuai Inpres No.1 Tahun 2021 yang berakhir pada Desember 2022 ini.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Inpres tersebut Menko Perekonomian pada Juli 2021 telah melaporkan progres Semester 1 Pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden.

Dalam laporan tersebut ada beberapa poin sebagai berikut :

- Dari 60 program kegiatan, terdapat 2 program telah selesai 3,33%, 42 program on progress (70%) dan 16 program masih tertunda (26,67%);
- Beberapa program kegiatan mengalami kendala dan masih tertunda, dikarenakan adanya realokasi dan refocusing penganggaran untuk penanganan kegiatan pandemic Covid-19 baik anggaran pemerintah Pusat maupun Daerah;
- Pembiayaan program kegiatan dilaksanakan melalui APBN K/L TA 2021 dan 2022. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP);
- Salah satu kegiatan pada Inpres No.1 Tahun 2021 yang telah selesai yaitu Pembangunan Jalan pada Ruas Jalan Fulur-Nualain-Henes di Kabupaten Belu, NTT (yang sudah dikunjungi oleh Timwas DPR RI tahun 2021).

Dari sejumlah poin itu ada beberapa program yang belum terselesaikan. Untuk itu Timwas Perbatasan DPR RI tergerak melakukan kunjungan pengawasan ke wilayah perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam mempercepat penyelesaian wilayah perbatasan tersebut, presiden juga menginstruksikan khusus kepada beberapa menteri diantaranya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, mengoordinasikan percepatan penerbitan izin, pemanfaatan ruang, lokasi, dan pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Sedangkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan percepatan penyelesaian permasalahan lahan yang berkaitan dengan status kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

B. Instruksi Khusus Kepada Kepala Daerah

Dalam pelaksanaan Inpres Nomor I Tahun 2021 Instruksi khusus juga diberikan kepada beberapa kepala daerah baik gubernur dan bupati di wilayah percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, dan Skouw di Papua.

Para gubernur di wilayah tersebut diinstruksikan untuk memfasilitasi penyiapan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya, dan menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja terkait.

■ *Rahmat Gobel saat diskusi bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam rangka menjalankan tugas sebagai ketua tim pengawas pembangunan perbatasan*



Sedangkan instruksi khusus lainnya diberikan kepada bupati Sambas, Belu, dan walikota Jayapura. Ketiganya diminta untuk menyediakan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya, dan menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja terkait. Beberapa pokok program/kegiatan antara lain: (a) Pertanian sentra produksi tanaman lada di Aruk; (b) Pengembangan industri pengolahan kelapa di kawasan industri Semparuk, Aruk; Pembangunan kawasan peternakan terpadu Somis Laloran, NTT; (c) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Tasifeto Timur, Motaain; (d) Pengadaan benih padi hibrida di Skouw; (e) Pembangunan jalan poros kampung Mosso, Skouw.

C. Profil Wilayah Kawasan Perbatasan Negara di Aruk

Aruk terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sambas luas nya mencapai 2. 672,71 km2, terdiri atas 4 Kecamatan yakni Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Galing. Potensi Kabupaten Sambas adalah holtikultura, tanaman pangan, budidaya kelautan dan budidaya perikanan serta pariwisata.

Aruk berpotensi menjadi salah satu pintu ekspor utama Indonesia ke sejumlah negara ASEAN, terutama Malaysia. Menurut data, ekspor Indonesia ke Malaysia pada 2019 mencapai US\$ 8.946,6 juta. Sejak 2018 Indonesia surplus berasal dari sektor non-migas, dengan tingkat pertumbuhan ekspor 5,99% (2015-2019). Terdapat ekspor dari sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang bias dimanfaatkan melalui daerah perbatasan ini.

Progress Report

Terdapat 33 kegiatan dengan status on progress di wilayah kawasan perbatasan di Aruk, yaitu 8 di Kementerian PUPR, 5 di Kementerian Perindustrian, 4 di Kementerian Perdagangan, 3 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 1 di Kementerian Perhubungan, 1 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, 7 di Kementerian Pertanian, 2 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 2 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kegiatan Dengan Status Outputnya Tidak Sesuai Target

Sebanyak empat kegiatan yang outputnya tidak sesuai target, yakni 1 di Kementerian Perindustrian, 1 di



*Sumber: BPS, diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemendag RI; 2020.

Kementerian Perhubungan, 1 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta 1 di Kementerian Pertanian.

Kegiatan Dengan Status Selesai

Ada 11 kegiatan, 4 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 4 di Kementerian Pertanian, dan 1 di Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Timwas Perbatasan DPR RI dipimpin Rachmat Gobel tiba di kawasan Pos Lintas Batas Negara Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (12/8/2022).

Kegiatan Dengan Status Tidak Terlaksana

Sebanyak 12 kegiatan terdapat di 6 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 1 di Kementerian Pertanian, 1 di Kementerian Kelautan dan Pertanian, 1 di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 1 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kegiatan Dengan Status Tidak Terlaksana

Sebanyak 12 kegiatan terdapat di 6 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 1 di Kementerian Pertanian, 1 di Kementerian Kelautan dan Pertanian, 1 di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan 1 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk di kawasan Motaain, ada dua kegiatan dengan status selesai yaitu pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Motaain dan penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes. Sedangkan di Skouw, pembangunan sistem penyediaan air minum dan pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan sepanjang 2.400 meter sudah tuntas dilaksanakan.

D. Profil Wilayah Kawasan Perbatasan Negara di Motaain

Kawasan Motaain ini berada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Kabupaten Belu mencapai 917,98 Km². Potensinya adalah pertanian dan perkebunan, peternakan, dan industri.

Terdiri atas 10 Kecamatan yakni Kecamatan Atambua Kota, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lakmanen, dan Kecamatan Lakmanen Selatan.

Motaain ini merupakan salah satu pintu ekspor Indonesia Timor Leste dengan komoditas utama semen portland, sepeda motor, cerutu dan rokok, minyak kelapa dan olahannya. Sejak tahun 2015 Indonesia menjadi negara terbesar untuk ekspor barang tersebut ke Timor Leste.



**Sumber: BPS, diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemendag RI; 2020.*

Dikarenakan Timwas Perbatasan DPR RI belum melakukan kunjungan ke wilayah kawasan perbatasan negara di Skouw, Papua maka belum dapat memberikan laporan detail mengenai profil wilayah kawasan perbatasan negara di Skouw.

Namun ada beberapa catatan dari tim mengenai potensi yang ada di Skouw dari data yang diterima dari BNPP yaitu: Holtikultura, Tanaman Pangan, Peternakan, Industri. Neraca perdagangan komoditas utama ekspor Indonesia 2019 adalah: Pupuk, Sabun/Pembersih, Tembakau Lahan, Makaroni, Mie, Minyak Kelapa Sawit, Peralatan Listrik, Wadah dari Logam, Tepung Terigu, Besi/Baja, Susu dan sejenisnya.

Sedangkan komoditas utama impor Indonesia 2019: Biji Coklat, Vanili, CPO, Kopra, Minyak biji-bijian/Tumbuhan, Minyak Mentah Kelapa Sawit, Benih Kelapa Sawit, Produk Nabati.



*Kunjungan Timwas Perbatasan DPR RI
di PLBN Motaain, Belu, Nusa Tenggara Timur, November 2021*

E. Kunjungan ke Kota Pontianak dan PLBN Aruk, Kalimantan Barat

Pada 11-14 Agustus 2022 Wakil Ketua DPR RI/Korinbang beserta beberapa orang Tim Pengawasan DPR RI melakukan kunjungan ke Kota Pontianak dan PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam kunjungan kerja ke Aruk, Tim Pengawas Perbatasan DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Gobel, memiliki beberapa agenda antara lain melakukan kunjungan kepada Gubernur Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur, kota Pontianak, diskusi mengenai perkembangan wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia di kantor PLBN Aruk, dan meninjau langsung PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, Ketua Timwas Perbatasan didampingi anggota yaitu Jacki Uly dari Fraksi NasDem, Yessy Melania Fraksi NasDem, dan Cornelis Fraksi PDIP sedangkan gubernur Kalimantan Barat didampingi jajaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Ada beberapa poin penting dalam arahan Rachmat Gobel sebagai Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR RI. Ia mengatakan kunjungan ke provinsi Kalimantan Barat selain silaturahmi ke pemerintah provinsi, juga untuk mengunjungi Pos Lintas Batas Negara di Aruk. Melihat pelaksanaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di kawasan perbatasan sesuai dengan program kegiatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Rachmat Gobel juga menyampaikan harapannya akan adanya kemajuan pembangunan ekonomi yang nyata dari Pemprov Kalimantan Barat untuk turut serta mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ia meminta agar Pemprov Kalimantan Barat serius memajukan ekonomi perbatasan di Aruk, Sambas, Kalimantan Barat. Pemprov Kalimantan Barat turut aktif meningkatkan pembangunan infrastruktur maupun penguatan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Sambas, Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmadji, S.H., M.Hum menyatakan dukungannya atas kunjungan Timwas Perbatasan DPR RI dan akan turut mengawasi dan mendorong pembangunan ekonomi kawasan perbatasan di Aruk, Sambas, Kalimantan Barat.

■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat diskusi bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



Pertemuan Dengan BNPP dan Pemda Kabupaten Sambas

Dalam kegiatan berikutnya, Rachmat Gobel mengadakan pertemuan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Ferry Madagaskar di kantor PLBN Aruk, Kalimantan Barat, Jumat 12 Agustus 2022. Turut pula hadir para kepala dinas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut Rachmat Gobel, mengatakan Timwas Perbatasan akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sebagai salah satu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok Indonesia.

Ia menekankan, guna mewujudkan harapan ini, semua pihak baik BNPP, pemda Sambas, dan kementerian terkait harus salin kerja sama dan komunikasi yang terus menerus agar dapat menyelesaikan kendala di lapangan. Rachmat Gobel juga mengatakan sebagai Ketua Timwas Perbatasan, ia bersedia menjembatani komunikasi antara pemda di daerah perbatasan dengan beberapa kementerian terkait, agar kendala yang ada dapat diatasi dan pembangunan yang terhambat dapat kembali berlanjut. Segala permasalahan yang ada akan segera disampaikan dan dibawa kepada DPR RI.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagascar memaparkan dan melaporkan beberapa proyek pembangunan di PLBN Aruk, baik yang telah selesai, on progress dan yang belum selesai. Kendala yang dihadapi adalah seringnya terjadi penumpukan produksi khususnya ketika waktu panen pada tanaman jeruk. Untuk jalur transportasi usaha tani kurang memadai, karena tidak ada akses mobil ke lokasi dan harus menggunakan sampan untuk menyeberangi sungai.

Di bagian lain penjelasannya, Sekda Sambas Ferry Madagascar menjelaskan kendala pembangunan Gudang/Depo non-SRG yang sudah mulai proses pekerjaannya sejak 6 Juli 2022 lalu yang direncanakan selesai 2 Desember 2022. Kendalanya adalah Kementerian Perdagangan hanya mengalokasikan konstruksi bangunan gudang sedangkan kelengkapan peralatan gudang tersebut belum diakomodir karena belum terdapat listrik.

Memanfaatkan pertemuan dengan Rachmat Gobel, Sekda Sambas, Ferry Madagascar menyampaikan aspirasi masyarakat diantaranya meminta dibangun rumah sakit rujukan di Kabupaten Sambas, karena banyak orang Sambas dan Kalimantan Barat yang melintasi PLBN Aruk untuk pergi berobat ke Kuching, Malaysia.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rahmat Gobel saat diskusi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Sambas

Meninjau Pos PLBN Aruk

Usai pertemuan dengan pimpinan BNPP, Sekda Kabupaten Sambas, dan pejabat terkait, Rachmat Gobel sebagai Ketua Timwas Perbatasan menyempatkan diri meninjau langsung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Jumat 12 Agustus 2022. Aruk merupakan perbatasan langsung Indonesia – Malaysia. Dalam peninjauan tersebut Rachmat Gobel mendapat penjelasan langsung tentang kemajuan pembangunan PLBN Aruk dan zona penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dari pejabat terkait Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan.

Beberapa pernyataan penting yang dapat dirangkum antar lain adalah Rachmat Gobel menggaris bawahi bahwa pentingnya penguatan tata niaga melalui PLBN Aruk, khususnya terkait tata niaga ekspor-impor, dan pengembangan secara menyeluruh kawasan PLBN Aruk sehingga dapat menggerakkan roda pembangunan ekonomi sekitarnya.

Ia menekankan bahwa kawasan PLBN Aruk merupakan salah satu gerbang terdepan wajah Indonesia harus menjadi pusat pengembangan kawasan perbatasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk itu beberapa sarana dan prasarana yang masih dalam tahap pembangunan seperti gudang, pasar, maupun jembatan semuanya harus akuntabel dan transparan.

Sebagai Ketua Timwas Perbatasan, Rachmat Gobel mengharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di kawasan perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat merupakan salah satu wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok Indonesia. Ia menambahkan wilayah perbatasan selain sebagai sentra perekonomian, turut memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dari hasil kunjungan ke Aruk dan Motaain dan laporan pembangunan di Skouw yang dilakukan oleh Tim Perbatasan Wilayah DPR RI, dapat ditarik kesimpulan:

- Agar Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagai episentrum pengembangan kawasan perbatasan negara dan juga pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- Masih adanya kesenjangan pembangunan yang besar antara daerah perbatasan dan non perbatasan, terutama masalah infrastruktur listrik, air bersih, jaringan komunikasi, dan ketersediaan transportasi yang kurang memadai;
- Masalah kesejahteraan sosial yang masih ditemui, terutama kemiskinan yang menjadi permasalahan yang dominan pada masyarakat di perbatasan;
- Masalah keamanan perlu menjadi prioritas, karena wilayah perbatasan kerap dijadikan penyelundupan, pintu masuk teroris, dan konflik di zona ekonomi eksklusif;
- Transportasi dan infrastruktur perlu ditingkatkan menjadi lebih baik, karena wilayah perbatasan Indonesia merupakan wajah Indonesia terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara-negara sahabat.

Dari hasil kunjungan yang dilakukan baik itu di Motaain, Aruk dan pelaksanaan pembangunan di Skouw, Rachmat Gobel merekomendasikan “untuk pembangunan perbatasan yakni memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No. 1 tahun 2021. Model pembangunan kawasan Aruk, Motaain dan Skouw sebagaimana dalam Inpres ini diharapkan bisa menjadi Role Model bagi pembangunan wilayah perbatasan lainnya. Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan jangan sampai mengabaikan faktor keamanan. Pelibatan masyarakat harus diutamakan untuk meningkatkan nasionalisme bagi masyarakat di wilayah perbatasan”.

F. Kunjungan ke Perbatasan Papua New Guinea

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama sejumlah anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat pada 5 Februari 2023 melakukan kunjungan kerja ke parlemen Papua New Guinea di Port Moresby. Agenda pertemuan dengan parlemen ini antara lain membahas isu yang terkait dengan persoalan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Papua New Guinea yaitu PLBN Skow di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Marauke, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.

Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel yang juga Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR RI menekankan agar Parlemen Papua New Guinea mendorong pemerintahnya untuk membangun PLBN agar mobilitas dari kedua negara bisa berjalan lebih lancar. Seperti diketahui, Indonesia telah membangun berbagai fasilitas di PLBN Skow di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Marauke, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel untuk kenyamanan dan keamanan bagi pelintas batas dari kedua negara.

Pentingnya pembangunan PLBN di Papua New Guinea menurut Rachmat Gobel bukan hanya sebatas memastikan keamanan di wilayah perbatasan masing-masing Negara, namun juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar perbatasan baik masyarakat yang ada di Papua maupun Papua New Guinea.

“Peningkatan standar PLBN bukan hanya berdampak pada isu keamanan, tapi juga terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rachmat Gobel.

■ *Rombongan delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Goble bertemu dengan Deputy Speaker Parlemen Papua New Guinea Koni K Iguan MP beserta jajaran*



Pentingnya pembangunan PLBN di Papua New Guinea menurut Rachmat Gobel bukan hanya sebatas memastikan keamanan di wilayah perbatasan masing-masing Negara, namun juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar perbatasan baik masyarakat yang ada di Papua maupun Papua New Guinea.

■ *Penyerahan cinderamata dan foto bersama Wakil Pimpinan DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel beserta delegasi kepada Deputy Speaker Parlemen Papua New Guinea Koni K Iguan MP beserta jajaran*





P20
INDONESIA
2022 PARLIAMENTARY

**PERAN
DIPLOMASI
DPR RI**

5
BAB

“Harus diakui bahwa apa yang kita capai dalam pembangunan ekonomi saat ini masih belum sepenuhnya mewujudkan amanat dari konstitusi. Struktur perekonomian belum dapat memberi peluang yang sama bagi rakyat luas untuk mewujudkan potensi ekonomi mereka sehingga berbagai ketimpangan masih sangat terasa. Inilah arti pentingnya semangat restorasi yaitu mengembalikan dan memperkuat arahan agenda dan kebijakan pembangunan, termasuk melalui diplomasi kerjasama ekonomi - agar selalu jalan dengan amanat konstitusi.”

- Rachmat Gobel -

Diplomasi untuk Memperkuat Restorasi Struktur Perekonomian Nasional

Seperti diamanatkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dalam kerangka representasi aspirasi rakyat, DPR RI mempunyai kewajiban menjalankan peran diplomasi untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Tidak hanya sebatas pada soal perdamaian, keamanan, tapi juga dalam peningkatan kerjasama ekonomi di berbagai sektor untuk memperkuat perekonomian nasional. Baik pada *level government to government (G to G)*, *business to business (B to B)* maupun *people to people (P to P)*.

Peran diplomasi DPR RI ini semakin dibutuhkan di era pasca pandemi Covid-19 dalam rangka menghasilkan legislasi maupun pengawasan yang lebih berkualitas dalam menghadapi kondisi global yang kian dinamis. Guna mewujudkan hal ini, DPR RI menekankan bahwa Indonesia harus bisa memperjuangkan kepentingan nasional (*national interest*) di panggung dunia, sekaligus memperjuangkan kepentingan negara berkembang lainnya di forum-forum internasional.

Menurut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, salah satu tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah memperkuat fondasi atau struktur perekonomian nasional yang mampu memberi ruang yang luas bagi terwujudnya *national interest* yang menjadi amanat konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, bagi Rachmat Gobel, setiap agenda kerja lembaga negara haruslah mampu untuk menjawab tantangan ini, termasuk dalam agenda diplomasi dengan berbagai negara sahabat.

Sebagai kader Partai NasDem, Rachmat Gobel meyakini bahwa tantangan tersebut hanya bisa dihadapi dengan memperkuat semangat restorasi. Semangat untuk mengembalikan dan memperkuat arah dan implementasi kebijakan ekonomi yang betul-betul bisa menjamin terwujudnya kepentingan nasional yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

"Harus diakui bahwa apa yang kita capai dalam pembangunan ekonomi sampai saat ini masih belum sepenuhnya mewujudkan amanat dari konstitusi. Struktur perekonomian belum dapat memberi peluang yang sama bagi rakyat luas untuk mewujudkan potensi ekonomi mereka sehingga berbagai ketimpangan masih sangat terasa. Inilah arti pentingnya semangat restorasi yaitu mengembalikan dan memperkuat arahan agenda dan kebijakan pembangunan, termasuk melalui diplomasi kerjasama ekonomi— agar selalu sejalan dengan amanat konstitusi," kata Rachmat Gobel.



Dalam menjalankan peran diplomasi DPR RI, Rachmat Gobel telah melakukan muhibah ke berbagai negara sahabat dan menghadiri berbagai forum internasional. Sepanjang tahun 2022, Rachmat Gobel memimpin delegasi DPR RI melakukan kunjungan ke Iran, Qatar, Turki dan Jepang. Selain itu juga menghadiri sejumlah forum seperti *World Conference on Early Childhood Care and Education* di Uzbekistan, sidang *Inter Parliamentary Union (IPU)*, pertemuan *Parliamentary 20 (P20)*, disamping melakukan pertemuan dengan sejumlah delegasi negara sahabat seperti Dubes dan Parlemen Korea Selatan, Dubes Uzbekistan dan PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob.

A. Kunjungan Muhibah ke Iran

Kunjungan Kerja Muhibah DPR RI ke Iran berlangsung 5-9 Mei 2022. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel delegasi juga mengikutsertakan Ketua Komisi VI Faisol Riza dari Fraksi PKB, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dari Fraksi NasDem, Wakil Ketua Komisi VI Martin Y. Manurung dari Fraksi NasDem, Anggota Komisi XI Hary Gunawan dari Fraksi Gerindra, Anggota Komisi XI Charles Meikyansyah dari Fraksi NasDem, Anggota Komisi XI Fauzy H. Amro dari Fraksi NasDem. Delegasi ini didampingi oleh pejabat dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian ESDM RI dan Duta Besar RI untuk Iran Ronny Prasetyo Yuliantoro.

Dalam kunjungan ini, delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan dengan Parlemen Iran (Majlis Permusyawaratan Iran), Kelompok Persahabatan Parlemen Iran – Indonesia, Menteri Industri, Pertambangan dan Perdagangan Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Iran, Direktur Perusahaan Telemedicine, Meditech Iran, Sekjen *Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC)*, *Deputy Minister of Petroleum/CEO National Iranian Oil Company (NIOC)*.

Pertemuan Parlemen dan Grup Kerja Sama Bilateral Iran–Indonesia

Dalam kunjungan ke Parlemen Iran ini delegasi DPR RI diterima oleh Wakil Ketua Majlis Iran, Y.M. Mr. Abdolreza Mesri dan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Iran – Indonesia Y.M. Mr. Mohammad Mehdi Zahedi secara terpisah. Adapun hasil pokok-pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut antara lain :

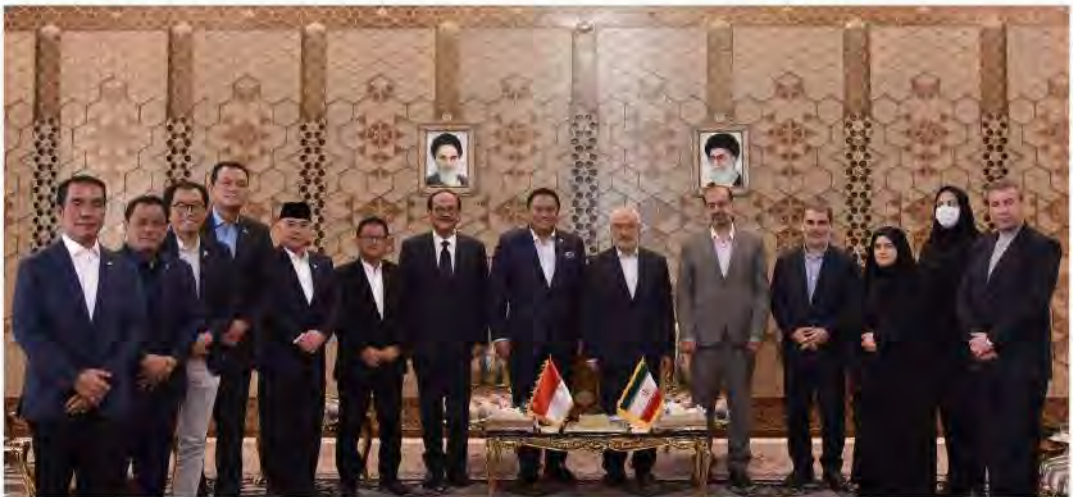
- **Indonesia-Iran adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi besar untuk menjalin hubungan kerja sama di berbagai bidang;**
- **Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di segala bidang, tidak hanya pada tataran Pemerintah dan Parlemen, tetapi juga *people to people contact*;**
- **Mencatat berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan kerja sama ekonomi antara lain mekanisme pembayaran dalam bidang perdagangan;**



- Kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti *ways and means* yang telah diidentifikasi untuk pengembangan kerja sama ekonomi kedua negara antara lain penjajakan mekanisme barter antara sawit dan ban (Indonesia), dengan minyak dan gas (Iran) serta fasilitasi transaksi pembayaran bagi kalangan bisnis kedua negara melalui pembukaan *escrow account*.

Majlis Iran berharap agar hasil pembicaraan antara kunjungan muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ini dapat ditindak lanjuti oleh kedua negara terkait dengan bidang Kesehatan, Teknologi, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan kemungkinan pembukaan penerbangan langsung antara kedua negara Iran dan Indonesia.

Dalam pertemuan informal jamuan makan siang, Mr. Mehdi Zahedi (Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia) menyampaikan permintaan dukungan tentang pengurangan hukuman bagi narapidana Iran di Indonesia, khususnya yang terlibat masalah narkoba.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel beserta Rombongan Berfoto Bersama dengan Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia

Pertemuan dengan Menteri Industri, Pertambangan dan Perdagangan Iran

Pertemuan dengan Menteri Pertambangan dan Perdagangan Iran (IPP) Mr. Seyed Reza Fatemi Amin berlangsung pada 7 Mei 2022 di Kantor Kementerian IPP, Teheran. Dalam sambutannya, sebagai pimpinan delegasi DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan, bahwa saat berkunjung ke Iran tahun 2016, Presiden RI Jokowi dan Presiden Iran berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral hingga US \$20 milyar, namun target tersebut belum terpenuhi.

Selain itu juga disampaikan ketertarikan akan sektor *energy storage* yang sedang dikembangkan Iran dengan menggunakan *nanotechnology*, mengharapkan kedua pihak dapat mengeksplorasi potensi kerja sama di bidang ini dan juga menyampaikan undangan investasi Iran untuk bidang hulu migas di Indonesia.

Menanggapi sambutan Rachmat Gobel tersebut, Menteri Seyed Reza Fatemi Amin mengatakan bahwa Presiden Iran Embrahim Raisi telah menyatakan keinginannya mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Seyed juga mengusulkan pembentukan “Komite Bersama” untuk membahas berbagai upaya peningkatan perdagangan untuk mencapai target kedua negara dan juga untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Iran, Raisi ke Indonesia. Dalam komite bersama tersebut Menteri IPP akan menunjuk wakilnya sebagai Ketua Tim dari pihak Iran, dan menawarkan keahlian/layanan teknis Iran terutama di bidang pembuatan bendungan untuk dilakukan di Indonesia. Menjelaskan adanya mekanisme non-konvensional barter antara layanan teknis dan barang, namun perlu pembahasan lebih detail mengenai hambatan karena tidak adanya surat jaminan dan transfer uang.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Rombongan Melaksanakan Pertemuan dengan Menteri Pertambangan dan Perdagangan Iran (IPP) Mr. Seyed Reza Fatemi Amin

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang menyambut baik usulan pembentukan komite bersama tersebut, dan mengharapkan hasil konkrit yang dapat mendorong perdagangan dan investasi kedua negara. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang menunjuk Ketua Komisi VII DPR RI sebagai Ketua Tim dari pihak Indonesia untuk komite bersama dimaksud, sedangkan dari Pemerintah akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Dalam pertemuan tersebut, juga hadir Anggota Majelis Iran Mojtaba Rezakhah (salah satu delegasi Iran pada Sidang IPU bulan Maret 2022 di Bali) yang menyampaikan bahwa kedua pihak perlu menyepakati program bersama untuk mencapai target perdagangan bilateral Iran. Mengekspor teknologi atau karpet, mengimpor ban mobil atau minyak sawit dari Indonesia. Kedua negara tersebut perlu mengeksplorasi potensi industri halal, untuk menembus pasar global.

Karena masih banyak yang belum dibicarakan dalam forum tersebut, atas permintaan pihak Iran, pertemuan ini perlu dilanjutkan dengan pertemuan informal makan malam pada 8 Mei 2022. Dalam pertemuann ini delegasi Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi Duta Besar RI untuk Iran dan jajaran dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian ESDM RI, sedangkan Kementerian IPP Iran didampingi oleh Anggota Majelis Iran dan dari pihak NIOC.

Kedua pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor untuk memperkuat kerja sama bilateral yaitu : a) Mengintensifkan *business-to-business contact*; b) Menurunkan tarif bea masuk dari kedua pihak; dan c) Menemukan mekanisme transfer uang untuk *bypass* sanksi.

Menteri IPP Iran dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa Iran siap menurunkan tarif untuk produk Indonesia dan harapkan negosiasi PTA dapat selesai dalam 1-2 bulan ke depan. Untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Iran, Iran menawarkan pelabuhan Chabahar dan jalur utara selatan yang memudahkan akses produk Indonesia ke Iran dan sekitarnya, tapi juga ke Kaukasus dengan cepat dan murah. Iran bekerja sama dengan Rusia untuk memperluas jalur ini. Juga disampaikan, Iran memiliki kapasitas tinggi dalam bidang farmasi/obat-obatan, pembuatan traktor, alat-alat kesehatan, peralatan rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia dan negara ini juga mengundang investasi Indonesia untuk membangun lokomotif di Iran untuk dipasarkan ke negara-negara sekitar.

Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai pentingnya menyelesaikan negosiasi *Preferential Trade Agreement (PTA)* untuk meningkatkan perdagangan kedua negara seperti terkait dengan transaksi pembayaran karena adanya sanksi ekonomi terhadap Iran. Indonesia juga investor Iran untuk memanfaatkan/menggunakan industri/pabrik yang tersedia di Indonesia. Kerja sama juga dapat dilakukan pada sektor produk halal.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel Menyerahkan Cenderamata kepada Mr. Seyed Reza Fatemi Amin Sesuai Pertemuan

Pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Diplomasi Ekonomi

Delegasi DPR RI pada 7 Mei 2022 juga melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Mr. Mehdi Safari, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Teheran. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa pokok-pokok yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran antara lain:

- **Walaupun belum bisa disebut hubungan strategis, Indonesia dan Iran memiliki hubungan yang baik, Iran ingin meningkatkan hubungan baik tersebut terutama perdagangan bilateral;**
- **Iran tertarik untuk impor biji besi dan bauksit dari Indonesia dan mengundang investasi dari Indonesia untuk sektor pertambangan yang sangat mudah dilakukan di Iran;**
- **Iran memiliki keunggulan di bidang teknologi terutama nanoteknologi dan bioteknologi;**
- **Lebih dari 95% produksi di Iran menggunakan bioteknologi, dan Iran juga unggul dalam produksi peralatan medis seperti *robotic surgery*. Oleh karena itu Iran ingin terus mengembangkan sektor-sektor ini dan bersedia melakukan *transfer of technology* dengan Indonesia;**
- **Indonesia dapat menggunakan pelabuhan Chabahar dan jalur Utara-Selatan untuk mengakses tidak hanya pasar Iran, tetapi juga negara tetangga dan bahkan wilayah Kaukasus.**

Pimpinan delegasi DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan usulan kerja sama untuk membangun bersama Rumah Sakit Persahabatan Indonesia-Iran di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari Iran, termasuk teknologi nano. Rumah sakit ini dapat menjadi sarana mempromosikan teknologi Iran bidang medis dan farmasi/obat-obatan kepada masyarakat Indonesia. Sarana untuk menjalin kerja sama teknis, terutama pelatihan tenaga medis kesehatan Indonesia. Investasi rumah sakit adalah wujud dari *people to people contact* antara masyarakat kedua bangsa. Dalam kaitan ini, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang mengundang investasi Iran di Indonesia, tetapi juga di wilayah Asia Tenggara.

Menanggapi pertemuan dengan Delegasi DPR RI yang dipimpin Rachmat Gobel, Mr. Mehdi Safari mengatakan bahwa menyambut baik atas ide pembangunan rumah sakit bersama. Kementerian Luar Negeri Iran juga menawarkan untuk bersama-sama membahas lebih detail cara-cara konvensional maupun tidak konvensional untuk impor minyak mentah Iran. Menawarkan investasi bersama di Iran untuk memfasilitasi pengiriman minyak mentah Iran langsung ke Indonesia tanpa melalui negara ketiga. Mr. Mehdi Safari juga mengusulkan kerja sama antara *technology park* antar kedua negara serta pelatihan dan alih teknologi berbagai bidang. Indonesia memiliki bahan-bahan mentah yang dibutuhkan Iran dan sebaliknya Iran memiliki teknologi yang dibutuhkan Indonesia, maka menawarkan mekanisme perdagangan tanpa mata uang dollar atau bisa barter.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Diplomasi Ekonomi Mr. Mehdi Safari

Pimpinan delegasi DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan usulan kerja sama untuk membangun bersama Rumah Sakit Persahabatan Indonesia-Iran di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari Iran, termasuk teknologi nano, serta kemungkinan kerjasama lainnya.

Pertemuan dengan Telemedicine, Meditech Iran

Dalam kunjungan muhibah ke Iran, delegasi DPR RI juga mengagendakan pertemuan dengan *Meditech Iran* yaitu perusahaan yang memproduksi berbagai alat-alat *telemedicine*. Tujuan pertemuan tersebut untuk mendorong kerjasama di bidang kesehatan. Delegasi disambut langsung oleh Direktur *Meditech* Mr. Madjid Sabaghi.

Kerjasama Indonesia-Iran di bidang *telemedicine* sangat berpeluang untuk direalisasi karena tidak dikenakan sanksi embargo. Di era pandemi Covid-19, penggunaan *telemedicine* sebagai alternatif fasilitas pengobatan sangat dibutuhkan, khususnya bagi wilayah yang sulit terjangkau transportasi umum. Hal ini sangat bermanfaat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Mr. Madjid Sabaghi menyampaikan bahwa *Meditech* telah memiliki lisensi dan *approval* dari Eropa untuk produk *telemedicine* dan memiliki kapasitas produksi sebanyak 10.000 alat tiap tahunnya. Teknologi yang digunakan tidak kalah dengan produksi negara Eropa lainnya, dengan harga yang jauh lebih terjangkau oleh Indonesia. *Meditech* telah mengadakan kerja sama di bidang *telemedicine* dengan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kesehatan RI dan PT Indofarma.

Bentuk kerjasama awal tersebut dengan mendirikan *pilot project telemedicine* di Indonesia pada 10 fasilitas pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dalam jangka panjang, kerja sama tersebut akan terfokus pada alih teknologi dan pendirian lini produksi alat *telemedicine* di Indonesia.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Pertemuan dengan Pihak Telemedicine, Meditech Iran

Selain alat *telemedicine*, *Meditech* juga memperkenalkan alat kejut jantung *portable* yang bisa dibawa kemana saja dan mudah dioperasikan oleh orang awam. Alat tersebut sangat bermanfaat sebagai bagian dari pertolongan pertama pada kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat-tempat umum, sebagai antisipasi serangan jantung yang terjadi pada masyarakat. Dalam pertemuan itu juga Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan bahwa industri utama yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia saat ini adalah pertanian dan kesehatan. Melalui teknologi kesehatan yang dimiliki, Iran memiliki peluang besar untuk melakukan investasi produksi alat kesehatan di Indonesia, dengan potensi perluasan pasar di wilayah regional ASEAN.

Rachmat Gobel menekankan bahwa industri yang didirikan harus menggunakan bahan baku lokal sehingga memenuhi persyaratan investasi dari pemerintah tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang digunakan dalam proses produksi. Agar investasi tidak mulai dengan membangun pabrik baru di Indonesia yang membutuhkan biaya besar.

Rachmat Gobel menyarankan supaya pihak *Meditech* Iran memanfaatkan industri atau pabrik yang sudah ada di Indonesia melalui pola ODM (*Original Design Manufacturer*). Melalui pola ini, industri/pabrik di Indonesia yang akan melakukan proses produksinya, sehingga akan terjadi proses *sharing capacity* dan inklusi teknologi. Sedangkan pihak *Meditech* Iran dapat melakukan pemasaran di tingkat internasional.



Pertemuan dengan Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC)

Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) berlangsung pada 6 Mei 2022. Kedatangan delegasi yang dipimpin Rachmat Gobel ini disambut oleh Prof. Saeed Sarkar sebagai Sekjen INIC. Pertemuan ini membicarakan beberapa hal seperti perkembangan teknologi nano di Iran serta potensi kerja sama pengembangan nanoteknologi di bidang energi, pertanian, konstruksi, manufaktur, industri dan lingkungan hidup. Disamping itu juga membahas perkembangan riset di masing-masing negara.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyampaikan bahwa Iran telah berhasil dalam membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan industri untuk kepentingan negerinya. Kunjungan Delegasi Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang bertujuan untuk mendorong kerja sama dan alih teknologi nano antara Iran dan Indonesia.

Sementara itu Prof. Saeed Sarkar menyampaikan bahwa teknologi nano di Iran telah berkembang secara pesat dalam kurun waktu 20 tahun. Pada tahun 2021, Iran merupakan negara ke-4 di dunia dibidang nanoteknologi berdasarkan *International Scientific Indexing (ISI)* dan sudah melakukan produksi baik material maupun produk nano. Terdapat 324 perusahaan di bidang nanoteknologi yang memproduksi lebih dari 11.000 produk. Juga disebutkan bahwa Iran telah mampu memproduksi dan ekspor ke 40 negara lebih produk nanoteknologi di berbagai sektor, antara lain kesehatan, obat-obatan, energi, pertanian, dan konstruksi. Pengembangan nanoteknologi di Iran dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur riset.

Prof. Saeed Sarkar juga menekankan kesiapan INIC untuk kerja sama investasi bersama dan alih teknologi tidak hanya disektor kesehatan saja yang telah berjalan, namun juga disektor lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa lembaganya juga telah memiliki kerja sama konkrit dengan Indonesia seperti pendirian pusat Bedah Robotik di RS. Hasan Sadikin, Bandung dan RS. Sardjito, Yogyakarta yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dengan Sekjen INIC sepakat untuk :

- **Memperluas kerja sama *joint investment* dan alih teknologi di bidang kesehatan, energi termasuk migas yang berkaitan dengan teknologi *enhanced oil recovery (EOR)* untuk peningkatan produksi sumur-**



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat melihat langsung perkembangan produk nanoteknologi didampingi Prof. Saeed Sarkar dari Komite Inovasi Teknologi Nano Iran

tua dan energi terbarukan serta nano teknologi untuk pertanian dan air bersih di kampung nelayan;

- Mendorong kerja sama pengembangan sumber daya manusia riset dan inovasi dibidang nanoteknologi melalui pertukaran staf pengajar dan mahasiswa *joint research* dan lain-lain;



Delegasi DPR RI Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/Korinbang, Rachmat Gobel saat Pertemuan dengan SG Iran Nanotechnology Innovation Council yang dipimpin oleh Prof. Saeed Sarkar.

Pembicaraan dengan INIC, dilanjutkan dengan pertemuan informal bilateral pada 7 Mei 2022, dengan hasil kesepakatan:

- Segera merealisasikan rencana kerja sama, yang diusulkan kepada pihak Iran untuk mendirikan sebuah Rumah Sakit Persahabatan (swasta) Iran – Indonesia di Indonesia sebagai semacam tempat promosi alat kesehatan dan obat-obatan Iran serta tempat pelatihan untuk tenaga medis Indonesia;
- Dalam kurun waktu 2-3 minggu setelah pertemuan ini, pihak INIC akan mempersiapkan delegasi para ahli dari berbagai perusahaan untuk berkunjung ke Indonesia guna menjajaki kerja sama dimaksud sesuai dengan kebutuhan pihak Indonesia, termasuk di bidang migas. Oleh karena itu, INIC mengharapkan agar Wakil Ketua DPR RI /Korinbang mengirimkan undangan kepada INIC berkunjung ke Indonesia dan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Indonesia.

Pertemuan dengan CEO National Iranian Oil Company (NIOC)

Delegasi Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang mengadakan pertemuan dengan *Deputy Minister of Petroleum/CEO National Iranian Oil Company (NIOC)*, Mr. Mosen Khojasteh Mehr dan jajaran pada 7 Mei 2022 didampingi oleh Duta Besar RI untuk Iran.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

- Kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia–Iran sebelumnya antara lain pembelian LPG antara Pertamina dan NIOC, peninjauan kerja sama pembangunan kilang di Indonesia, dan pengelolaan ladang minyak di Iran;
- Mencatat sanksi unilateral AS sebagai hambatan utama dalam mendorong kerja sama dengan Iran, khususnya disektor migas;
- Menegaskan dukungan parlemen untuk kembali mendorong kerja sama di bidang migas, Kunjungan Delegasi Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang merupakan bentuk komitmen dukungan terhadap kebijakan pemerintah ;
- Mendorong pembentukan “Komite Bersama” untuk mencari *ways and means* kerja sama di bidang migas.



Mengenai kapasitas dan potensi migas, CEO NIOC Mr. Mosen Khojasteh Mehr mengatakan bahwa Iran memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia dan gas terbesar kedua di dunia. Negara ini menargetkan peningkatan kapasitas produksi gas sebesar 1,5 miliar meter kubik per hari, dan minyak mentah sampai dengan 5,7 juta barel per hari pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi sampai dengan US\$ 160 miliar. Investasi itu diharapkan datang dari berbagai negara mitra, termasuk Indonesia dan Iran siap kerja sama baik disektor hulu maupun hilir.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel memimpin Pertemuan dengan CEO National Iranian Oil Company (NIOC), Mr. Mosen Khojasteh Mehr untuk Menjajagi Peluang Kerjasama Perdagangan Minyak

Terkait dengan peninjauan kerja sama investasi Pertamina di ladang minyak Mansouri dan Ab Teymour disebutkan, NIOC dan Pertamina telah melakukan komunikasi terkait peninjauan kembali kerjasama tersebut.

Namun masalah ini belum dapat ditanda tangani karena keluarnya Amerika Serikat (AS) dari *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* dan penerapan kembali sanksi unilateral AS. Pihak NIOC menyampaikan kesiapannya untuk menandatangani kesepakatan tersebut pada kesempatan pertama belum dapat ditanda tangani karena keluarnya Amerika Serikat (AS) dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi unilateral AS. NIOC menyampaikan kesiapannya untuk menandatangani kesepakatan tersebut pada kesempatan pertama.

Terkait usulan pembentukan “Komite Bersama”, NIOC menyampaikan kesiapannya untuk melakukan pertemuan pada waktu yang ditentukan kedua negara (Indonesia-Iran) untuk menetapkan komite ini. NIOC menekankan agar pihak Indonesia tidak menjadikan sanksi sebagai hambatan. Meskipun dibawah sanksi NIOC masih dapat melakukan ekspor migas. Perusahaan minyak Iran ini mengharapkan adanya tindak lanjut konkrit dari hasil pertemuan dengan delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Gobel.



CEO National Iranian Oil Company (NIOC), Mr. Mosen Khojasteh Mehr menyambut baik yang disampaikan oleh Rachmat Gobel dan berharap akan ada tindak lanjut konkrit dari hasil pertemuan tersebut

Adapun hasil pembicaraan lain yang berkembang sebagai isu nasional atau global antara lain seperti diungkapkan oleh pimpinan delegasi Rachmat Gobel adalah peninjauan pembelian minyak mentah dan LPG dari Iran serta investasi infrastruktur LNG di Indonesia. Disampaikan kepada NIOC bahwa Indonesia memproduksi minyak hanya 700 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi dalam negeri 1,4 juta barel per hari.

Kekurangannya kebutuhan pasokan migas bisa diimpor dari negara Iran dengan harga yang kompetitif. Delegasi Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang juga mengundang pihak Iran untuk menjajaki investasi peremajaan blok migas di Indonesia.

Diusulkan pula peninjauan melalui kerja sama mekanisme barter dengan produk ekspor Indonesia, seperti minyak sawit dan karet. NIOC menyambut baik apa yang disampaikan Rachmat Gobel tersebut dan menyampaikan kesiapannya untuk menindaklanjuti kerja sama yang diusulkan.

Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Iran

Selain dengan lembaga pemerintah dan badan usaha Iran, delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Iran Ronny Prasetyo Yuliantoro beserta jajarannya di kantor KBRI di Teheran. Dalam kesempatan ini Rachmat Gobel menegaskan, kunjungan delegasi DPR RI ini adalah tindak lanjut pertemuan dengan Delegasi Parlemen Iran pada Konferensi IPU di Bali bulan Maret 2022. Pertemuan di Bali antara lain membicarakan pemulihan perekonomian setelah pandemi covid-19 serta meningkatkan kerja sama bidang ekonomi dan budaya untuk memberikan semangat silaturahmi Indonesia-Iran yang mempunyai kesamaan penduduk mayoritas muslim.



Kegiatan Rombongan Wakil Ketua DPR/Korinbang Rachmat Gobel Bersama Duta Besar RI untuk Iran Ronny Prasetyo Yuliantoro bersama Pegawai KBRI di Teheran

Tujuan kunjungan ini ingin melihat Iran lebih dekat, walaupun dalam tekanan embargo ekonomi tapi mempunyai kemampuan serta kemandirian membangun teknologi. Semangat untuk membangun teknologi dan manufaktur tersebut ada nilai lainnya yaitu membangun SDM yang berkualitas, hal ini dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia dalam pengembangan SDM, sains dan teknologi. Dari kunjungan tersebut ada beberapa poin yang perlu untuk ditindak lanjuti yaitu :

- Kunjungan Delegasi Muhibah DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan didampingi oleh Ketua Komisi VI, VII dan Anggota DPR RI serta Duta Besar RI untuk Iran, selain itu juga mengikut sertakan dari Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian ESDM RI berjalan dengan baik. Hal ini merupakan *gesture* positif dan komitmen Indonesia untuk menjaga *engagement* serta mendorong peningkatan hubungan bilateral kedua negara Indonesia-Iran. Tidak saja di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi, termasuk kerja sama teknologi, meskipun Iran di bawah sanksi unilateral Amerika Serikat.
- Dalam rangkaian pertemuan tersebut, pihak Iran juga telah menunjukkan kesiapannya untuk menjalin/memperkuat kerja sama di berbagai bidang khususnya *joint investment* dan kerja sama alih teknologi. Untuk itu, Indonesia perlu *ways and means* pengembangan kerja sama Indonesia-Iran.
- Berkenaan dengan hal tersebut dan guna mempertahankan momentum yang baik, Delegasi Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian terkait antara lain melalui mekanisme bilateral yang telah dimiliki, termasuk Sidang Komisi Bersama Ekonomi Perdagangan RI – Iran dan *working group* teknis sektoral dibawahnya.

B. Kunjungan Muhibah Ke Qatar

Setelah melakukan ke Iran, delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melanjutkan kunjungan muhibah ke Qatar pada 10-11 Mei 2022 dengan anggota delegasi yang tetap sama dengan kunjungan ke Iran. Selama di Qatar, delegasi didampingi oleh Duta Besar RI untuk Qatar Ridwan Hassan.

Rachmat Gobel bersama anggota delegasi melakukan kunjungan kehormatan ke Majelis Syura Qatar (Parlemen) dan diterima oleh *Deputy Speaker of The Shura Council State of Qatar*, Y.M. Mrs. Dr. Hamda Bint Hassan Al Sulaiti di Gedung Parlemen Qatar pada tanggal 11 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa pokok-pokok pembahasan ke kedua negara Indonesia-Qatar antara lain; (a) Hubungan kerja sama dan diplomasi kedua negara perlu ditingkatkan; (b) Masalah penanganan pengungsi Afganistan; (c) Penyelesaian konflik Palestina Israel; (d) Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia bersama Qatar sepaham untuk mendorong terjadinya perdamaian dunia; (e) Kerjasama ekonomi dan investasi bagi kedua negara.

Selain membahas isu perdamaian dunia tersebut, delegasi DPR RI juga membicarakan hubungan kerja sama kedua negara yang sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini Qatar telah merencanakan investasi ke Indonesia dalam sektor pariwisata dan kerja sama di bidang perdagangan kedua negara, khususnya di sektor minyak dan gas. Indonesia termasuk pengimpor besar *Liquid Petroleum Gas (LPG)* yang diproduksi oleh Qatar.



Rachmat Gobel bersama anggota delegasi melakukan kunjungan kehormatan ke Majlis Syura Qatar (Parlemen) dan diterima oleh Deputy Speaker of The Shura Council State of Qatar, Y.M. Mrs. Dr. Hamda Bint Hassan Al Sulaiti

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengajak Qatar untuk berinvestasi di bidang pertanian dan pangan di Indonesia. Ajakan kepada Qatar untuk berinvestasi dilatar belakangnya oleh situasi dunia yang terdampak oleh *climate change* atau perubahan iklim, adanya pandemi covid-19, juga ancaman krisis pangan serta resesi ekonomi yang melanda hampir seluruh dunia memicu meningkatnya kebutuhan energi global.

Rachmat Gobel juga menyampaikan bahwa di tengah situasi ini, sektor pertanian dan pangan merupakan hal yang strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Karena itu, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang mengundang Pemerintah Qatar untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel juga mengatakan beberapa hal, antara lain adalah;

- **Investasi di bidang pertanian dan pangan akan memberikan dampak yang luas bagi kedua negara, karena akan menyerap tenaga kerja yang besar dan menyejahterakan masyarakat. Bagi Indonesia, hal ini juga penting dalam mengurangi kemiskinan, serta bagian dari misi kemanusiaan yang sangat penting untuk membangun perdamaian dunia.**
- **Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi memiliki program pertanian dan pangan, ditandai dengan dibangunnya *food estate* sejumlah wilayah di Indonesia yang bersinergi dengan program peningkatan ekonomi dari wilayah pinggiran yang berbasis pada wilayah desa.**

Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel juga menilai, investasi di bidang pertanian. Hal ini sangat tepat dilakukan setelah dunia dilanda pandemi Covid-19, dan ini akan menjadi momentum kebangkitan perekonomian yang selama ini sedang menurun.

Namun, pembangunan pertanian dan pangan ini harus terintegrasi dalam industri pangan dan bersifat modern. Agar tercipta ekosistem pangan yang berkelanjutan. Untuk menjamin investasi, Indonesia telah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi.

Dalam pembicaraan tersebut, juga disampaikan bahwa Qatar sebaiknya juga terus berinvestasi di bidang pariwisata. Ini juga melibatkan banyak tenaga kerja, dan menggerakkan UMKM.

Wakil Ketua Majelis Syura Qatar Mrs. Hamda menyampaikan bahwa negaranya telah berinvestasi di Indonesia, di bidang telekomunikasi dan pariwisata. Indonesia adalah negara besar dan memiliki tanah yang luas, serta lahan yang subur. Selain itu, Indonesia juga negeri yang indah, dengan potensi pariwisata yang cocok menjadi tujuan investasi Qatar.

Dalam pertemuan itu, Mrs. Hamda juga menyampaikan aspirasi masyarakat Qatar, yang menginginkan kemudahan untuk datang ke Indonesia untuk menyukseskan pariwisata Indonesia. Akhir-akhir ini, Indonesia menjadi destinasi wisata favorit bagi warga Qatar.



Rachmat Gobel dan Rombongan Muhibah bersama Majelis Syura (Parlemen) Qatar

Selain itu, Hamda menyampaikan agar Indonesia bisa membantu perdamaian di Afghanistan. Sehingga, warga Afghanistan yang mengungsi di banyak negara bisa pulang kembali ke negaranya. Pemerintah Qatar juga meminta dukungan Indonesia, untuk kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyampaikan bahwa;

- Pemerintah Indonesia telah memasukkan Qatar ke dalam negara yang masuk dalam daftar *visa on arrival*.
- Indonesia dan Qatar sangat intensif bekerja sama dalam membangun perdamaian di Afghanistan.
- Pelajar dan mahasiswa Indonesia di Qatar, juga sangat terlibat aktif dalam mendukung berbagai kegiatan Piala Dunia Qatar 2022.

Kunjungan Delegasi Muhibah DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ke Qatar pada tanggal 10-11 Mei 2022 berjalan dengan lancar dan baik.

Kerja sama Indonesia – Qatar guna mendorong investasi Qatar di Indonesia seperti pariwisata dan migas. Hasil pertemuan di Qatar tersebut, ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada lembaga/ Kementerian RI terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kerjasama perekonomian Indonesia dengan Qatar.

*Rachmat Gobel dan Deputy Speaker of The Shura Council State of Qatar,
Y.M. Mrs. Dr. Hamda Bint Hassan Al Sulaiti*



C. Kunjungan Kerja ke Jepang

Kunjungan kerja delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/ Korinbang, Rachmat Gobel ke Jepang dilaksanakan 1-7 Agustus 2022. Ikut sertakan dalam kunjungan ke negara Matahari Terbit ini adalah perwakilan dari beberapa Komisi-komisi di DPR RI yaitu Ketua dan Anggota Komisi IV Sudin (Fraksi PDI Perjuangan) dan Alien Muis (Fraksi Partai Golkar), Anggota Komisi VI yaitu Abdul Hakim Bafagih (Fraksi PAN) dan Subardi (Fraksi Partai NasDem) serta Anggota Komisi XI yaitu Charles Meikyansyah (Fraksi Partai NasDem dan Kamrussamad (Fraksi Partai Gerindra).

Agenda kunjungan adalah melakukan pertemuan dengan Kementerian, Parlemen, Kepala Daerah, Kedutaan Indonesia serta pelaku usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat Asean di Jepang dan mengikuti *Forestry Investment Dialogues*. Pertemuan dilakukan dengan anggota parlemen Jepang yaitu Fukuda Junior, Ohno Keitaro dan Taido Tanose, Wakil Menteri Pertanian Jepang Takebe Arata. Sedangkan pertemuan dengan Kepala Daerah dilakukan dengan Walikota Kota Hokota.

Forestry Investment Dialogues 2022

Acara *Forestry Investment Dialogues 2022*, yang diadakan di ruang Serba Guna KBRI Tokyo pada 1 Agustus 2022. Selain dengan sejumlah anggota dewan, Rachmat Gobel sebagai pimpinan delegasi juga didampingi oleh Dubes RI Heri Akhmadi dan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah investor/pelaku usaha di sektor kehutanan Jepang, akademisi dari *Kyoto University*, *Asean-Japan Center*, serta beberapa peserta lainnya. Dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menjadi *Keynote Speaker*.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Rombongan saat Dialog Peluang Investasi Carbon Credit di Indonesia Bersama Pengusaha Jepang

Dalam acara ini terdapat beberapa hal penting yang dibicarakan, yakni :

- Rachmat Gobel mengajak para investor Jepang untuk berinvestasi di sektor kehutanan khususnya melalui mekanisme *carbon trade*.
- Rachmat Gobel menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia, yakni sekitar 95,6 juta Ha. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia itu, Jepang bisa ikut berpartisipasi bagi pengembangan hutan berkelanjutan.
- Dalam rangka upaya mencapai target *Folu Net Sink 2030* sebagaimana yang tertuang dalam *Paris Agreement*, Indonesia menargetkan pada tahun 2030 tercapai *net-zero emission* gas Co2 hingga 29%, namun jika ada bantuan dari pihak Internasional maka akan mencapai 41%. Untuk mencapai hal ini perlu adanya kerja sama dari sektor swasta khususnya para pengusaha di Jepang untuk berinvestasi dalam *carbon trade* di Indonesia.
- Rachmat Gobel menegaskan bahwa isu mengenai *carbon trade* harus dibahas secara bersama melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian lainnya yang terkait dan selain itu di DPR RI juga harus saling berkoordinasi baik di Komisi IV, VI serta XI. Kerja sama di antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia tujuannya adalah membuat konsep bersama agar isu *carbon trade* dengan menggandeng investor Internasional khususnya Jepang dapat terwujud dengan baik.
- Rachmat Gobel juga menginformasikan bagi pelaku usaha Jepang yang ingin berinvestasi di Indonesia dipastikan akan mendapatkan beberapa kemudahan-kemudahan karena Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja di mana dalam Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan bagi para investor.

Dalam mendukung kerja sama ini Dubes RI untuk Jepang meminta dukungan diplomasi dari Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Dialog ini dilakukan tidak hanya semata untuk mengajak para pelaku usaha sektor kehutanan di Jepang untuk berinvestasi di Indonesia khususnya *carbon trade*, yang menjadi permasalahan di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Jepang. Hal ini lah yang mendorong delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan gas rumah kaca. Dari hasil dialog yang dilakukan pada acara ini, para peserta khususnya para pelaku usaha/investor menginginkan adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai kerja sama Indonesia-Jepang terkait dengan *carbon trade*.

Dialog Bersama dengan KBRI Tokyo

Setelah menghadiri *Forestry Investment Dialogues 2022*, Rachmat Gobel bersama seluruh delegasi mengadakan dialog serta makan malam bersama dengan Duta Besar Indonesia Heri Akhmadi dan seluruh staf KBRI di Wisma KBRI, yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2022. Dialog ini dengan pembahasan peluang dan tantangan ekspor dan impor Indonesia-Jepang di sektor produk pertanian.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam acara Dialog Bersama dengan KBRI Tokyo

Beberapa hal penting yang dipaparkan serta dibicarakan antara KBRI dengan delegasi DPR RI, antara lain adalah:

- Jepang menduduki peringkat ke-2 sebagai Negara tujuan ekspor produk pertanian dari Indonesia, ekspor pertanian Indonesia ke Jepang didominasi oleh produk ekspor hasil-hasil perkebunan (*palm karnel shell/PKS* dan kopi arabica/robusta) dengan nilai ekspor pada periode Januari-Mei 2022 mencapai US\$ 176,16 juta (naik 11,53% YoY);
- Neraca perdagangan Indonesia-Jepang pada Januari-Mei 2022 mengalami surplus sebesar US\$ 2,79 miliar, serta diikuti juga dengan kinerja ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2022 juga berkembang dengan sangat baik dibanding kurun waktu 5 tahun sebelumnya yakni sebesar US\$ 1,76 miliar;
- Transformasi bauran energi Jepang membuka peluang ekspor produk pertanian dan kehutanan sumber *bioenergy*, transformasi energi ini dilakukan oleh Jepang salah satunya akibat ledakan nuklir yang terjadi di Fukushima pada 2011, produk yang dibutuhkan Jepang dari Indonesia khususnya untuk ekspor produk pertanian dan kehutanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi seperti *palm kernel shell*, *wood pellet* dan lainnya.

Delegasi DPR RI menyambut baik paparan KBRI Tokyo dalam perkembangan nilai ekspor serta beberapa peluang produk lainnya untuk diekspor ke Jepang, dalam pertemuan dialog tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki strategi khusus untuk meningkatkan produk ekspornya, yaitu :

- Jepang merupakan sebuah Negara yang memiliki standar tinggi, oleh karena itu perlu ada peningkatan kapasitas dan penguatan eksportir produk pertanian dan kehutanan Indonesia yang akan melakukan ekspor ke Jepang khususnya dalam hal asistensi sertifikasi produk.

- Perlu juga dilakukan fasilitasi pelaku usaha termasuk UMKM agar produk yang dijual memiliki nilai tambah (*value-added*) khususnya pengembangan desain dan kemasan produk.

Jika kedua hal ini dilakukan oleh eksportir di Indonesia, menurut Rachmat Gobel, maka dipastikan akan terjadinya peningkatan yang signifikan dalam hal ekspor Indonesia ke Jepang, dan dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama dari semua pihak.

Pertemuan dengan Walikota Hokota

Pada 3 Agustus Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/Korinbang Rachmat Gobel melanjutkan kunjungan kerja ke Kota Hokota yang diterima langsung oleh Walikota Kishida Kazuo, kemudian melihat secara langsung pertanian yang ada di kota ini. Ikut serta dalam kunjungan ke Hokota Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi. Pada acara tersebut delegasi DPR RI mendengar langsung berbagai penjelasan dari Walikota sebagai penanggung jawab promosi produk pertanian kota Hokota.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dalam acara dialog bersama Walikota Hokota Kishida Kazuo membahas potensi kerja sama sektor pertanian dengan Indonesia

Dalam acara ini terdapat beberapa hal penting yang dipaparkan oleh Walikota Kota Hokota, yakni :

- Pertemuan ini dapat menjadi salah satu momentum dalam memperlancar hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang, khususnya sektor pertanian yang saat ini sedang berkembang pesat di Kota Hokota.
- Di Kota Hokota terdapat 543 orang dari Indonesia yang melakukan magang di sektor pertanian di Kota Hokota.

- Kota Hokota merupakan salah satu kota penghasil sayur dengan kualitas terbaik di Jepang, dengan jenis penghasil produk yang terkenal seperti melon, ubi, dan stroberi.
- Dalam pembangunan pertanian di Kota Hokota, penelitian secara berkesinambungan menjadi salah satu syarat penting demi terciptanya buah atau produk pertanian yang dicintai konsumen.
- Dari pemaparan di atas, delegasi DPR RI melakukan dialog dengan Walikota Kota Hokota terkait dengan isu-isu penting, yakni :
- Delegasi DPR RI menawarkan kepada Pemerintahan Kota Hokota untuk melakukan kerja sama di bidang pertanian di mana Pemerintah Kota Hokota menyediakan lahan 10 ha untuk dikelola oleh investor pertanian dari Indonesia, sedangkan Indonesia akan menyediakan lahan 100 ha untuk dikelola oleh investor pertanian dari Jepang, pengelolaan lahan di Indonesia nantinya akan diproyeksikan di Provinsi Lampung;
- Delegasi mengharapkan perluasan kerja sama di sektor pertanian, antara Hokota dengan Indonesia di mana diharapkan produksi pertanian tersebut dikembangkan dan diproduksi di Indonesia.

Dalam pertemuan ini Rachmat Gobel mengaskan bahwa hubungan kerja sama Indonesia-Jepang harus didorong dengan menggunakan paradigma *people to people* dan sekaligus membangun sumber daya manusia melalui sektor pertanian. Hal ini penting dilakukan oleh kedua Negara agar dapat mewujudkan ketahanan pangan di masing-masing Negara.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel beserta rombongan dalam Kunjungan langsung ke kawasan pertanian kota Hokota dan bertemu dengan petani. Beberapa diantaranya adalah pekerja migran yang berasal dari Bali, Indonesia



Pertemuan dengan Parlemen Jepang

Kegiatan terakhir dari Delegasi DPR RI yakni melakukan pertemuan dengan anggota parlemen Jepang beserta Wakil Menteri Pertanian Jepang di gedung Parlemen Jepang pada 3 Agustus 2022. Delegasi DPR RI disambut oleh anggota Parlemen Jepang (Tatsuo Fukuda, Ohno Keitaro dan Taido Tanose), Wakil Menteri Pertanian Jepang (Takebe Arata).



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat melakukan pertemuan dengan Anggota Parlemen Jepang beserta Wakil Menteri Pertanian Jepang

Dialog tersebut untuk mendiskusikan beberapa isu penting di sektor pertanian serta menindaklanjuti hasil kegiatan *Forestry Investment Dialogues 2022* serta kunjungan ke Kota Hokota. Dalam pertemuan ini terdapat beberapa isu yang dibicarakan, yakni :

- **Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Gobel menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah mengeluarkan Permentan Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan Ke Dalam Wilayah NKRI dari Cemaran Radio Aktif. Dengan adanya Permentan ini Indonesia telah memberikan izin terhadap produk-produk dari Fukushima, pasca bocornya reaktor nuklir.**
- **Membicarakan tawaran dari Delegasi DPR RI terkait dengan keinginan investor pertanian Indonesia untuk mengelola lahan pertanian di Kota Hokota sebesar 10 ha dengan timbal balik Indonesia khususnya di daerah Lampung memberikan 100 Ha lahan untuk dikelola oleh investor pertanian Jepang.**
- **Kerja sama Indonesia-Jepang di sektor pertanian dapat menjawab mengenai permasalahan perubahan iklim yang saat ini menjadi permasalahan seluruh dunia;**

- Delegasi DPR RI mengajak pengusaha Jepang untuk berinvestasi di Indonesia khususnya investasi *carbon trade* di Indonesia.

Parlemen Jepang menyambut baik beberapa isu yang dibawa oleh Delegasi DPR RI tersebut, tanggapan anggota Parlemen Jepang dan Wakil Menteri Pertanian, yakni :

- Saat ini kondisi ketidakpastian global sangat susah untuk diprediksi, sehingga hal ini mempengaruhi perekonomian di berbagai Negara.
- Dalam kerja sama antara Indonesia-Jepang yang paling penting bukan hubungan sepihak namun sama-sama mendapat keuntungan khususnya di produk-produk pertanian yang akan menghasilkan barang yang berkualitas.
- Parlemen Jepang saat ini juga sedang melakukan beberapa pembahasan mengenai peluang investasi di IKN Kalimantan.
- Akan melakukan pembahasan secara lebih detail di Internal Kementerian Pertanian Jepang khusus terkait dengan kerja sama pengelolaan lahan antara Kota Hokota dengan Indonesia.

Secara umum, kunjungan dan pertemuan Delegasi DPR dengan pihak terkait di Jepang telah berjalan dengan baik dan lancar serta kedua belah pihak berharap dapat saling bekerja sama dengan baik khususnya di bidang investasi dan pertanian, sekaligus ingin mendorong langkah dan komitmen untuk peningkatan kerja sama di berbagai bidang demi kemanfaatan bersama.

Kedua belah pihak berharap perlu adanya kerja sama dan dukungan pemangku kepentingan terkait dari kedua Negara serta diharapkan kerja sama kedua belah pihak tidak hanya sebatas kerja sama investasi namun juga kerjasama yang dilandasi pada *people to people*, serta kedua belah pihak bersepakat untuk saling mendalami berbagai isu yang dibicarakan di atas agar dapat segera di implementasikan.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berdialog dengan Anggota Parlemen Jepang Tatsuo Fukuda untuk Menindaklanjuti Hasil Kegiatan Forestry Investment Dialogues 2022

D. Menghadiri Resepsi Diplomatik Peringatan 77 Tahun Indonesia di Ankara, Turki



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat bertemu dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki Mustafa Varank pada acara Resepsi Diplomatik Peringatan 77 Tahun Indonesia di Ankara, Turki

Dalam rangka menghadiri undangan Duta Besar RI untuk Turki pada Acara Resepsi Diplomatik Turki pada 14 September 2022, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel didampingi oleh Anggota DPR RI yaitu Y. Jacky Uly (Anggota Komisi II/ F. Partai NasDem), Muhammad Farhan (Anggota Komisi I/ F. Partai NasDem), Nurul Arifin (Anggota Komisi I/F. Partai Golkar) dan Muhammad Syafruddin (Anggota Komisi IV/F. Partai PAN). Disamping itu juga didampingi oleh Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal.

Resepsi Diplomatik dalam rangka peringatan 77th Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI Turki di Ankara ini dihadiri para Duta Besar dan Diplomat seluruh perwakilan negara sahabat yang ada di Turki. Selain itu juga dihadiri oleh Menteri Industri dan Teknologi Turki, Mr. Mustafa Varank. Kehadiran Rachmat Gobel dalam acara tersebut sebagai *keynote speech* untuk membuka sekaligus memberikan sambutan.

Dalam Sambutannya Rachmat Gobel mengajak para diplomat dari seluruh dunia bersatu membangun perdamaian dunia untuk mensejahterakan dan memakmurkan bangsa. Selain itu juga untuk menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan segar. Melalui diplomasi budaya dan diplomasi komunitas, maka tujuan perdamaian lebih mudah terwujud. Pada resepsi Diplomatik di KBRI Ankara Turki, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menekankan keseriusannya mendorong kerja sama yang lebih luas antara Indonesia – Turki antara lain :



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat jamuan Resepsi Diplomatik Peringatan 77 Tahun Indonesia di Ankara, Turki

- Turki memiliki kemajuan teknologi yang tinggi dan bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, diantaranya kerja sama elektronik, kesehatan dan bidang pertahanan;
- Tidak hanya *government to government (G to G)*, tetapi bagaimana Parlemen (DPR RI) melakukan komunikasi dengan diplomasi *people to people (P to P)* dan ini perlu kita lakukan komunikasi terpusat, sehingga bisa membangun kepercayaan yang lebih baik dalam *bussines* maupun diplomasi Parlemen.
- Pertemuan duta besar dan diplomat negara sahabat menjadikan hubungan kerja sama tersebut dari *G to G*, menjadi *P to P* dan juga beralih ke *heart to heart*.

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang menyampaikan bahwa DPR RI mendorong diplomasi Indonesia dan dunia dengan pendekatan berbasis masyarakat atau kerja sama berbasis *people to people (P to P)*, selain itu Indonesia dan Turki memiliki peluang kerja sama strategis seperti di bidang industri, kesehatan dan pertahanan. Namun terjalannya kerja sama tersebut perlu didahului dengan komunikasi yang membangun kepercayaan antar negara. Pada acara resepsi tersebut Rachmat Gobel juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Industri dan Teknologi Turki Mr. Mustafa Varank didampingi oleh Jajaran Pejabat Kementerian Industri dan Teknologi Turki serta Duta Besar RI untuk Turki Muhammad Iqbal.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa pokok-pokok pembicaraan yaitu: (a) Kerjasama perdagangan yang selama ini masih tertunda dengan belum ditandatangani CEPA-Indonesia-Turki; (b) Dampak perang Rusia dengan Ukraina, terkait dengan pasokan minyak/gas dunia; (c) Kerja sama pengembangan teknologi, industri dan sumber daya manusia Indonesia – Turki.

Delegasi Parlemen Indonesia dalam kunjungan ke Ankara, Turki menyatakan akan mendorong peningkatan kerja sama bilateral Indonesia – Turki dalam berbagai sektor strategis salah satunya perdagangan komunitas tani. Nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Turki mencapai US\$ 2 miliar dalam tahun 2021. Pemerintah Indonesia dan Turki menargetkan nilai perdagangan kedua negara dapat mencapai US\$ 10 miliar yang akan di tempuh melalui kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif.

Anggota Komisi IV Muhammad Syarifuddin sebagai Anggota Delegasi DPR RI menyatakan, Indonesia memiliki berbagai produk pertanian yang diunggulkan meski sedang di terpa krisis pangan global. Produk-produk tersebut misalnya komoditas kopi, kakao, sawit hingga karet. Menurutnya, DPR RI turut melakukan diplomasi parlemen sekaligus mendorong pemerintah agar kerja sama di bidang pertanian sehingga produktivitas para petani dapat mengalami peningkatan. Anggota delegasi yang lain Muhammad Farhan dari Komisi I DPRI menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo diagendakan bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada November 2022 yang akan datang. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi puncak dari berbagai kerja sama perdagangan antar kedua negara. .



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki Mustafa Varank dan Kepala Industri Pertahanan Turki Prof. Dr Ismail Demir, Ketua Asosiasi Kontraktor Pertahanan, Ismail Demir, Duta Besar RI -Turki Lalu Muhammad Iqbal, Konsul Jenderal RI untuk Istanbul, Imami As'ari dalam Acara Peringatan 77th Kemerdekaan Indonesia di KBRI Ankara-Turki

Mengenai kehadiran Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dalam acara Resepsi Diplomatik ini, Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal mengatakan sangat positif terhadap upaya meningkatkan kerja sama Indonesia-Turki. Dubes RI menyampaikan, diplomasi parlemen adalah salah satu cara untuk meningkatkan hubungan bilateral antar negara. *Parliamentary Diplomacy* dilakukan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk internasional. DPR RI diharapkan terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun kerja sama dengan Turki karena hal ini penting dilakukan karena Turki adalah salah satu negara potensial dalam pengembangan ekonomi ke depan.

Dalam kunjungan ke Ankara, Turki pada 12-16 September 2022 ada beberapa hal yang menjadi perhatian Delegasi DPR RI antara lain:

- Mendorong kerja sama yang lebih luas antara Indonesia – Turki dalam bidang industri, teknologi, kesehatan, pertanian dan pertahanan;
- DPR RI mendorong komunikasi diplomasi tidak hanya G to G, tetapi juga diplomasi *people to people (P to P)* dan dilakukan dengan komunikasi terpusat, sehingga bisa membangun kepercayaan yang lebih baik dalam bisnis maupun diplomasi Parlemen.
- Pertemuan Para Dubes dan Diplomatik negara sahabat menjadikan hubungan kerja sama dari *G to G*, menjadi *P to P* dan juga beralih ke *heart to heart*.
- Beberapa pokok pembicaraan pertemuan dengan Menteri Industri dan Teknologi Turki antara lain kerja sama perdagangan yang selama ini masih tertunda dengan belum ditandatanganinya CEPA- Indonesia-Turki, dampak perang Rusia dengan Ukraina terkait dengan pasokan minyak/gas dunia dan kerja sama pengembangan teknologi, industri dan sumber daya manusia Indonesia – Turki.
- DPR RI turut melakukan diplomasi parlemen sekaligus mendorong pemerintah agar kerja sama di bidang pertanian dapat mengalami peningkatan.
- Diharapkan pertemuan Presiden RI dengan Presiden Turki rencana bulan November 2022 ini menjadi puncak dari semua kerja sama ekonomi. Khususnya penerapan perjanjian umum untuk perdagangan beberapa komoditi yang di ekspor dari Indonesia ke Turki bisa bebas bea.
- *Parliamentary Diplomacy* dilakukan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk internasional. DPR RI terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun kerja sama dengan Turki, hal ini penting dilakukan karena Turki merupakan salah satu negara potensial dalam pengembangan ekonomi ke depan.

E. Menghadiri World Conference on Early Childhood Care & Education di Uzbekistan

Pada Selasa, 15 November 2022, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, mendapat undangan dari pemerintah Uzbekistan untuk menghadiri konferensi tentang Pendidikan Anak Usia Dini (*World Conference on Early Childhood Care and Education*) di Uzbekistan. Konferensi ini merupakan kerja sama UNESCO dan pemerintah Uzbekistan yang berlangsung di ibukota Tashkent. Secara keseluruhan acara berlangsung sejak 14 November dan berakhir 16 November 2022. Namun acara inti dan pembukaan berlangsung pada 15 November 2022. Acara dibuka Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dan dihadiri Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay. Konferensi ini diikuti 400 peserta dari 150 negara.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi tiga Anggota DPR RI, yaitu Ratih Megasari Singkaru (Anggota Komisi X), Ary Egahni Ben Bahat (Anggota Komisi III), dan Tina Nur Alam (Anggota Komisi X). Hadir pula Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan Prof Sunaryo Kartadinata. Pada kesempatan itu, Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Rachmat Gobel memanfaatkan kunjungan tersebut dengan mengadakan pertemuan bilateral. Pertama, bertemu Deputy Perdana Menteri yang juga Menteri Pariwisata Aziz Abdulkharovich Abdulkhakimov. Kedua, ia bertemu dengan Menteri Pendidikan Umum Bakhtiyor Saidov.

Pendidikan anak usia dini saat ini, merupakan perhatian UNESCO dan PBB. Karena masih ada 200 juta anak di seluruh dunia di bawah usia 6 tahun yang belum menikmati pendidikan anak usia dini. Dalam forum ini, sejumlah perwakilan negara menyampaikan pengalamannya dalam mengembangkan pendidikan usia dini. Selain itu, juga tampil dua pembicara yang mewakili LSM yang bergerak di bidang pendidikan usia dini atau usia pra-sekolah.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menghadiri World Conference on Early Childhood Care dan Education



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan delegasi DPR RI saat Menghadiri World Conference on Early Childhood Care dan Education



World Conference on Early Childhood Care dan Education dibuka secara resmi oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev

Menteri Pendidikan Umum Bakhtiyor Saidov, saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, menyampaikan harapan agar ada kerja sama konkret Indonesia dan Uzbekistan dalam mengembangkan Pendidikan. Rachmat Gobel mengatakan, untuk mempererat hubungan Indonesia dan Uzbekistan perlu didirikan sekolah persahabatan kedua negara. “Di Uzbekistan didirikan sekolah Indonesia, di Indonesia didirikan sekolah Uzbekistan. Di masing-masing negara itu terdapat materi persahabatan kedua negara,” katanya.

Usulan Rachmat Gobel itu untuk menjawab permintaan Bakhtiyor Saidov tentang hal apa yang bisa dilakukan agar Uzbekistan bisa belajar tentang sistem pendidikan di Indonesia. “Kami sudah mempelajari sistem pendidikan di Indonesia, sehingga kami bisa belajar,” kata Bakhtiyor.

Rachmat Gobel mengatakan, majunya suatu negara bukan ditentukan seberapa banyak kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki. “Majunya suatu negara ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia,” katanya. Saat ini, Indonesia sedang mengejar Visi 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun. Mereka yang kini masih kanak-kanak dan remaja, pada saat itu sudah mulai memiliki peran.

Sekolah Persahabatan Indonesia-Uzbekistan

Menteri Pendidikan Umum Bakhtiyor Saidov, saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, menyampaikan harapan agar ada kerja sama konkret Indonesia dan Uzbekistan dalam mengembangkan Pendidikan. Rachmat Gobel mengatakan, untuk mempererat hubungan Indonesia dan Uzbekistan perlu didirikan sekolah persahabatan kedua negara. "Di Uzbekistan didirikan sekolah Indonesia, di Indonesia didirikan sekolah Uzbekistan. Di masing-masing negara itu terdapat materi persahabatan kedua negara," katanya.

Usulan Rachmat Gobel itu untuk menjawab permintaan Bakhtiyor Saidov tentang hal apa yang bisa dilakukan agar Uzbekistan bisa belajar tentang sistem pendidikan di Indonesia. "Kami sudah mempelajari sistem pendidikan di Indonesia, sehingga kami bisa belajar," kata Bakhtiyor.

Rachmat Gobel mengatakan, majunya suatu negara bukan ditentukan seberapa banyak kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki. "Majunya suatu negara ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia," katanya. Saat ini, Indonesia sedang mengejar Visi 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun. Mereka yang kini masih kanak-kanak dan remaja, pada saat itu sudah mulai memiliki peran.

Usai pertemuan, Rachmat Gobel menyatakan, pendidikan yang inklusif, merata, dan terjangkau merupakan ciri dari suatu masyarakat yang beradab. "Jika pun kiamat terjadi esok hari, tak ada alasan untuk berhenti membangun sekolah. Jika ada satu anak tak bisa sekolah, bagaimana mungkin suatu negeri bisa mengaku beradab? Jika semua anak bisa sekolah, bagaimana mungkin suatu negeri bisa tak maju? Pemerintah dan parlemen harus berdiri tegak dengan taruhan apapun untuk membangun pendidikan".



Rachmat Gobel mengatakan, semua bangsa di dunia harus bersama-sama membangun optimisme, bukan pesimisme, dalam membangun peradaban bagi generasi di masa depan. "Kita harus mewariskan semangat dan cita-cita mulia. Pendidikan adalah kunci. Ia menjadi dasar bagi membangun kemajuan dan kemakmuran bersama dan bagi keberlanjutan semesta. Pendidikan merupakan basis kemajuan suatu bangsa. Menurutnya, tak ada bangsa maju yang pendidikannya tertinggal. Karena itu membangun pendidikan merupakan suatu keharusan".

Pada kesempatan itu, Rachmat Gobel bercerita pengalaman Indonesia dalam membangun pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh penduduk. Hal itu bermula dari lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973. Saat itu, pemerintah membangun gedung-gedung Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia, karena itu kemudian dikenal sebagai SD Inpres. Ada 61 ribu SD Inpres yang didirikan.

Hal itu kemudian diteliti oleh tiga peneliti dari MIT, Universitas Harvard, Amerika Serikat, yaitu Esther Duflo, Abhijit Banerje, dan Michael Kramer. Pada 2019, ketiganya mendapat hadiah Nobel di bidang ekonomi berkat penelitiannya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pendidikan yang baik bisa mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi.

Pada 2022, kata Rachmat Gobel, jumlah SD sudah mencapai 174.992. Sedangkan jumlah sekolah TK mencapai 121.973. Adapun rasio guru dengan murid untuk tingkat SD adalah 1 guru untuk 15 murid. Sedangkan untuk TK adalah satu guru untuk 10 murid. Adapun jumlah murid per kelas untuk tingkat SD adalah 22 orang. Bahkan kini, katanya, Indonesia melangkah lebih jauh dengan membangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap desa di seluruh Indonesia.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menyerahkan cenderamata dengan Menteri Pendidikan Umum Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov.

Rachmat Gobel mengatakan, setiap negara harus membangun kerja sama di bidang pendidikan. “Kita hidup di planet yang sama, menghirup udara yang sama, dan kita manusia yang sama. Fenomena *climate change*, ancaman krisis pangan global, dan pandemi Covid-19 makin menyadarkan kita bahwa kita itu hakikatnya satu. Banyak hal yang bisa dilakukan bersama.

Kita bisa melakukan pertukaran pelajar dan guru, melakukan riset bersama, pelatihan bersama, bertukar pengalaman dalam membangun kesejahteraan guru, kerja sama pendidikan bahasa, kerja sama pendidikan kejuruan, kerja sama membangun digital *platform* dalam dunia pendidikan; kerja sama mengembangkan asesmen pelajar, dan kerja sama mengembangkan konsep pendidikan di pedesaan,” katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan tentang pentingnya filosofi dalam memajukan suatu bangsa. “Yaitu *people before the product*. Inilah yang kata orang Jepang disebut sebagai *hitozukuri* dahulu sebelum *monozukuri*. Dalam konsep yang seperti ini, penekanannya bukan hanya pada kemampuan membuat barang tapi pada filosofi dan *state of mind* di balik pembuatan barang tersebut. Produk menjadi sebuah persembahan yang keluar dari sebuah karakter suatu bangsa. Sebelum kita berbicara tentang produk maka kita terlebih dahulu berbicara tentang manusianya oleh karena itu investasi terbaik adalah investasi di bidang pendidikan, apalagi pendidikan usia dini,” kata Rachmat Gobel.

F. Menghadiri Konferensi Internasional

Sepanjang tahun 2022, sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel telah menghadiri 2 konferensi internasional yang terkait dengan kegiatan parlemen dunia yaitu menghadiri *Inter Parliamentary Union (IPU)* di Bali dan *Parliamentary 20 (P2)* yang diikuti parlemen dari 20 negara anggota G 20.

Pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali



DPR RI sebagai tuan rumah Penyelenggaraan 144th *Inter-Parliamentary Union (IPU)* di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 yang dibuka oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani yang dihadiri oleh 115 negara. IPU ke-144 mengambil tema "*Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change*". Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia, sebagai isu utama Perubahan iklim dan pandemi Covid-19.

IPU dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Forum parlemen dunia ini juga dinilai akan memberi kontribusi yang baik bagi Indonesia sebagai presidensi KTT G20. *Event* ini merupakan kegiatan (internasional) pertama yang dilaksanakan di Bali di tahun 2022 sehingga mempunyai dampak yang baik untuk menuju pelaksanaan G20 pada November 2022 pertemuan kepala negara dan merupakan momentum yang tepat untuk pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali.

Resolusi Penting Deklarasi Nusa Dua Hasil Sidang Ke-144 IPU terdapat 961 pandangan dan menghasilkan sejumlah resolusi. Forum parlemen berskala internasional yang bertajuk '*Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change*' pada akhirnya menghasilkan Deklarasi Nusa Dua. Pertemuan menghasilkan Deklarasi Nusa Dua yang mencerminkan usaha mobilisasi aksi parlemen untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan tema yang dibahas.

Majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menyepakati dua resolusi dan satu *emergency item* atau daftar masalah mendesak terkait penyelesaian konflik Ukraina dan Rusia. Dua Resolusi tersebut yaitu Pertama, Resolusi di *Standing Committee on Peace and Security*, menekankan kembali pentingnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam PBB serta peran parlemen dalam mempromosikan rekonsiliasi, dan stabilitas di wilayah konflik Kedua, Resolusi di *Standing Committee on Sustainable Development* mengajak parlemen untuk terus meningkatkan peran teknologi komunikasi dan informasi di dunia Pendidikan.

Selain resolusi juga disepakati adanya penambahan *emergency item*, dilakukan dalam rangka memberikan solusi mendesak atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang juga tergabung dalam anggota IPU. *Emergency item* telah menyepakati dokumen yang menggarisbawahi peran dialog dan diplomasi parlemen. Kita menyerukan mediasi dan penyelesaian perang di Ukraina. Resolusi ini juga merekomendasikan pembentukan *task force* (*gugus tugas*) untuk implementasi dan tindak lanjut pada resolusi perdamaian dari *standing committee on peace*.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Pembukaan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali pada 20 Maret 2022

Juga disepakati dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US\$ 100 miliar harus segera dipenuhi. Terkait penanganan pandemi Covid-19, perlu adanya keadilan distribusi vaksin, terdapat dorongan untuk memperkuat kesiapan (*preparedness*) setiap negara untuk menghadapi pandemi di masa depan.

Dalam IPU ke 144 di Bali ini, Rachmat Gobel juga memanfaatkan forum ini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah delegasi parlemen dari negara sahabat seperti **Jepang, Turki dan Iran**. Dalam pertemuan bilateral Rachmat Gobel dengan delegasi Parlemen Jepang topik pembicaraan antara lain peningkatan perekonomian pasca pandemi Covid-19, kerja sama infrastruktur, pembangunan Sarana dan Prasarana pada IKN, kerjasama informasi dan teknologi, pengembangan pertanian, pariwisata, energi terbarukan dan industri kecil dan menengah.

Dalam IPU ke 144 di Bali ini, Rachmat Gobel juga memanfaatkan forum ini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah delegasi parlemen dari negara sahabat seperti **Jepang, Turki dan Iran**. Dalam pertemuan bilateral Rachmat Gobel dengan delegasi Parlemen Jepang topik pembicaraan antara lain peningkatan perekonomian pasca pandemic Covid-19, kerja sama infrastruktur, pembangunan Sarana dan Prasarana pada IKN, kerjasama informasi dan teknologi, pengembangan pertanian, pariwisata, energi terbarukan dan industri kecil dan menengah.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat pertemuan dengan delegasi Parlemen Jepang, Turki dan Iran pada acara Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali.

Kemudian dalam pertemuan **bilateral dengan delegasi parlemen Turki**, Rachmat Gobel antara lain membahas soal peningkatan kerja sama perekonomian, Tindak lanjut Kunjungan Muhibah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang ke Turki, kerja sama pertanian, pariwisata dan transportasi serta kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). **Dengan delegasi Parlemen Iran**, Rachmat Gobel menekankan pembicaraan bilateral dalam topik peningkatan perekonomian pasca pandemi covid-19, peningkatan kerja sama dibidang teknologi, kesehatan, infrastruktur, energi dan pertanian. Dalam kesempatan ini, parlemen Iran mengundang Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel untuk berkunjung ke negaranya.

Gelaran *The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20 Speaker's Summit)* Indonesia mengambil tema "*Stronger Parliament for Sustainable Recovery*". Tema tersebut, menurut Ketua DPR RI Puan Maharani disusun sejalan dengan tema *Presidency G20 Indonesia "Recover Stronger, Recover Together"*. "P20 dibentuk sebagai salah satu *Engagement Group G20* guna membawa elemen demokrasi dan memperkuat akuntabilitas agenda G20," Pembukaan Pelaksanaan *P20 Speaker's Summit* yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mewakili Parlemen Indonesia saat Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU)



Menghadiri Parliamentary 20 (P20) di Jakarta

Parlemen memiliki kesempatan untuk menyampaikan perspektif dari aspirasi rakyat yang menginginkan adanya harapan baru atau *new hope* dalam mengelola tata dunia yang lebih humanis, ramah, nyaman dan sejahtera bagi semua orang. Dalam mewujudkan komitmen parlemen tersebut, perlu mengedepankan tiga hal, yaitu komitmen membangun kemajuan bersama, membangun nilai global yang mempromosikan perdamaian, toleransi dan solidaritas dalam persaudaraan dunia, serta komitmen dalam agenda kerja bersama antar negara yang nyata. Komitmen antar negara untuk kemajuan bersama, menjadi harapan baru, sebagai aspirasi rakyat yang semakin menghendaki dunia memiliki wajah yang humanis. *'No one left behind'* inilah semangat untuk kemajuan bersama.

Dalam P20 tersebut, Ketua DPR RI juga mengajak seluruh delegasi, dapat bersama merumuskan komitmen penting khususnya dalam kerangka pemulihan global, pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dan mengatasi berbagai tantangan global. Rumusan komitmen bersama adalah penting, akan tetapi tindakan nyata, sekecil apapun, menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat dalam mencapai tujuan. Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunda.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Pimpinan DPR RI dalam Kegiatan P20

Dalam P20 tersebut, Ketua DPR RI juga mengajak seluruh delegasi, dapat bersama merumuskan komitmen penting khususnya dalam kerangka pemulihan global, pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dan mengatasi berbagai tantangan global. Rumusan komitmen bersama adalah penting, akan tetapi tindakan nyata, sekecil apapun, menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat dalam mencapai tujuan. Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunda.

Dalam pertemuan P20 tersebut, beberapa isu strategis yang perlu diangkat adalah, mitigasi risiko gejolak perekonomian global yang dapat berkepanjangan, sehingga diperlukan respon kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas pasar komoditas global, menjaga rantai pasok pangan ke pasar global, dan memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian dunia yang terbuka, dan adil. Selanjutnya, mengakselerasi implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ekonomi hijau, mempercepat transisi energi bersih dan terbarukan yang harus segera dilakukan, mengatasi kesenjangan pendanaan bagi negara berkembang dalam menjalankan agenda global, serta memperkuat Inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.

Disela agenda P20 di Gedung DPR RI pada 6 Oktober 2022 tersebut, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel melakukan pertemuan bilateral dengan *Vice President of European Parliament* Nicola Getrund Ruth Beer. Pertemuan ini membahas banyak hal, diantaranya mengenai perubahan iklim (*climate change*) dan Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel mendiskusikan tentang kerja sama antara Indonesia-Uni Eropa, baik itu pada sektor perdagangan, investasi, dan industri. Di samping itu juga kita mendiskusikan perlu ada pembahasan bersama antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Uni Eropa tentang krisis pangan dunia dan juga krisis energi, dan juga masalah *climate change*.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima Vice President of European Parliament Nicola Getrund Ruth Beer dalam Rangkaian Kegiatan P 20

Sebagai informasi, Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia – UE pada tahun 2021 tercatat sebesar US\$ 29,03 miliar, terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar US\$ 23,26 miliar. Sementara itu, pada periode Januari-Juli 2022, nilai perdagangan tercatat sebesar US\$ 18,59 miliar atau meningkat 20% dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni US\$ 15,52 miliar.

Untuk itu, pertemuan ini juga membahas mengenai Perundingan *IEU – CEPA* sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia dan seluruh negara anggota Uni Eropa. Dalam pertemuan ini Rachmat Gobel bersama Anggota DPR RI akan menindaklanjuti pertemuan selanjutnya untuk membahas isu-isu itu sendiri. Dalam pertemuan itu kita akan membahas semua isu-isu yang perlu dibahas, untuk memecahkan hambatan-hambatan apa saja yang ada selama ini. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mengatakan, ke depan parlemen akan lebih aktif untuk melakukan dialog-dialog antara parlemen Indonesia dengan parlemen Uni Eropa untuk mendukung kerja sama bilateral lainnya melalui diplomasi parlemen.



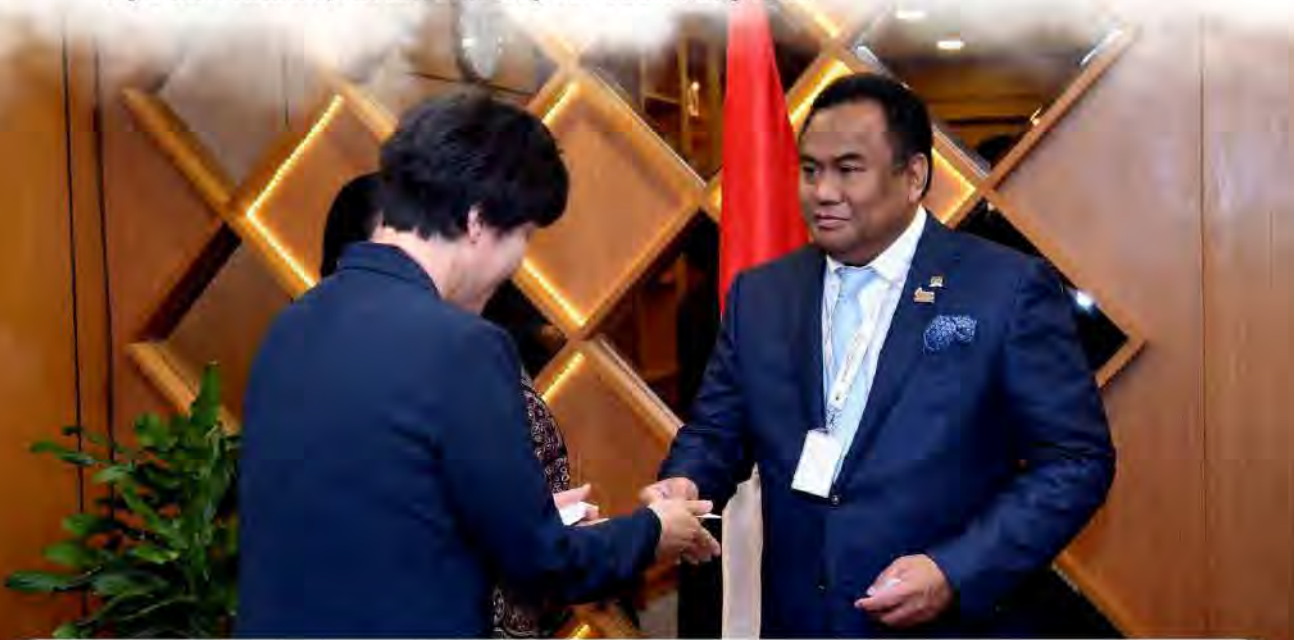
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat bertukar cenderamata usai pertemuan bilateral dengan Vice President of European Parliament Nicola Getrund Ruth Beer

G. Menerima Duta Besar dan Delegasi Negara Sahabat

Selain melalui kunjungan muhibah ke sejumlah negara, dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen Rachmat Gobel sepanjang 2022 juga menerima utusan dan duta besar negara sahabat seperti melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Dubes Korea Selatan pada 21 Februari 2022, menerima Delegasi Parlemen GKSB Korea Selatan, menerima Duta Besar Uzbekistan dan Gubernur Bukhara, Uzbekistan serta melakukan pertemuan dengan PM Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob.

Menerima Kunjungan Wakil Menteri Perdagangan dan Dubes Korea Selatan

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan (Korsel) H.E. Mr. Yoonjung CHUN dan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia H.E.Mr. Tae-sung PARK untuk membicarakan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Korea Selatan (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA*). Wakil Menteri Perdagangan Korsel didampingi oleh *Director of East Asia FTA Bureau*, MOTIE Mr. KIM Jong Ju, *Deputy Director of East Asia FTA Bureau*, MOTIE Mr. KIM Minseop dan *Legislative Attache, Korean Embassy* Mr. YOON Sung-min.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Menerima Kunjungan dari Korea Selatan

Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel, membahas kerja sama bilateral sebagai upaya meningkatkan investasi dan juga kerja sama di sektor ekonomi lainnya. Rachmat Gobel menyarankan dan berharap investasi kerja sama Korsel – Indonesia tidak hanya di sektor padat modal, padat teknologi untuk jangka panjang, tetapi bagaimana juga bisa mengembangkan kerja sama di sektor pertanian atau pangan di Indonesia. Dikarenakan sektor pangan banyak menyerap lapangan kerja para petani, sehingga dengan teknologi yang dimiliki dapat meningkatkan hasil pangan dalam negeri dan juga dapat mengakomodir kebutuhan pangan dunia.

Kerja sama pangan ini sudah terjalin dengan baik, namun masih dalam skala kecil. Sehingga dengan kerjasama teknologi kemampuan tersebut dapat meningkatkan produksi dalam negeri dan hasilnya lebih baik, bisa memenuhi kebutuhan pasar dunia. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita perlu perkuat kerja sama bilateral antar kedua negara Indonesia-Korsel.



Menerima Delegasi Parlemen GKSB Korea Selatan

Pada 4 Juli 2022, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima Delegasi Parlemen GKSB Korea Selatan didampingi Anggota DPR RI dari Komisi XI tanggal 4 Juli 2022 antara lain Mr. Yun Hojung, *Member of the Korea-Indonesia Parliamentary Friendship Group*; Mr. Deo Samseog, *Member of the Korea-Indonesia Parliamentary Friendship Group*; Ms. Choi, *Soyoung Program Coordinator*; Mr. Park, *Taesung Ambassador of ROK* dan Mr. Yoon, *Sungmin Legislative Attache*. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin pembicaraan antara lain;

- Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi/budaya/sosial/politik dan hubungan bilateral *people to people*.
- Terkait mobil listrik "Ioniq" (produksi Hyundai produksi pertama di Asia Tenggara) akan digunakan sebagai mobil resmi untuk PP KTT G20 dan mobil para pejabat Indonesia serta mempromosikan mobil listrik (ioniq) produksi Hyundai kepada negara-negara G20.
- Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan mobil listrik Hyundai sebagai *leader* dalam penggunaan mobil listrik. Saat ini Korsel juga akan membangun industri baterai. Industri ini merupakan industri masa depan yang dirintis Korsel dan Indonesia. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang strategis untuk mendukung pengembangan industri tersebut segera di terbitkan. Industri ini juga sangat membantu program *climate change* yang sedang disiapkan oleh Indonesia.
- Beberapa perusahaan Korsel yang berminat untuk melakukan investasi bidang nikel di Indonesia.
- Hyundai yang telah membantu dan melakukan investasi besar untuk suksesnya kegiatan G20 dengan memproduksi mobil elektrik Ioniq.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Rachmat Gobel juga menekankan bahwa;

- **Pembangunan industri baterai juga akan membantu pembangunan listrik di daerah urban dan rural untuk mengurangi energi dari fosil.**
- **Untuk pengembangan industri mobil listrik di Indonesia, Korsel juga perlu mempersiapkan *charger station*nya. Untuk itu Korsel segera membantu percepatan pembangunannya melalui pembangunan pilot project di berbagai daerah, sekaligus untuk mensosialisasikan program mobil listrik kepada masyarakat dan merubah kebiasaan masyarakat.**
- **Dalam kesempatan pertemuan tersebut Rachmat Gobel juga menyampaikan keinginan kerja sama di bidang pertanian, terutama untuk pengembangan produk jahe Indonesia, seperti pengembangan produk ginseng dari Korsel yang sudah menjadi produk global. Diharapkan Korsel dapat mengembangkan *pilot project* pengembangan jahe, menjadi produk global untuk membantu para petani Indonesia.**

Sementara itu dalam pertemuan tersebut Mr.Yun Hojun menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- **Selain kerja sama dalam bidang ekonomi/politik dan kebudayaan, antara Indonesia-Korsel perlu juga mengembangkan kerja sama bidang pertahanan. Ada kesamaan antara Indonesia-Korsel. Dalam catatan sejarah Indonesia dan Korsel tidak pernah melakukan ekspansi ke negara lain. Indonesia sangat mencintai perdamaian . Pembangunan industri pertahanan merupakan wujud dari perdamaian karena perlu kerja sama pengembangan alutsista untuk kawasan Indo - Pasifik.**



- Indonesia dan Korsel mempunyai hubungan kemitraan yang strategis, tetapi juga punya hubungan kekeluargaan/persahabatan – suksesnya hubungan Indonesia-Korsel perlu dukungan Wakil Ketua DPR RI Bapak Rachmat Gobel. Semoga terus sukses memimpin Indonesia.
- Agar Indonesia - Korsel terus mengkampanyekan perdamaian. Terkait penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia melalui kepemimpinan G20, diharapkan Indonesia dapat mendamaikan konflik Ukraina dan Rusia.

Mr. Yun Hojun juga mengatakan bahwa sangat mengharapkan kedatangan Rachmat Gobel di Korsel, untuk mempelajari pembangunan bidang pertanian termasuk gingseng yang sangat berguna bagi kesehatan (herbal). Terhadap undangan ini, Rachmat Gobel menyampaikan bahwa akan melakukan kunjungan ke Korsel, menunggu ditanda tangannya IK-CEPA (*Indonesia-Korsel Comprehensive Economic Partnership Agreement*).



Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat foto bersama setelah menerima kunjungan dari Korea Selatan

Menerima Gubernur Bukhara dan Duta Besar Uzbekistan

Pada 13 Oktober 2022, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima kunjungan Duta Besar Uzbekistan Mr. Ulugbek Rozukulov dan Gubernur Bukhara, Uzbekistan Mr. Botir K. Zarirov bertempat di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat bertemu Duta Besar Uzbekistan Mr. Ulugbek Rozukulov dan Gubernur Bukhara, Uzbekistan, Botir K. Zarirov

Selain upaya peningkatan kerja sama kedua negara, dalam pertemuan tersebut secara khusus Duta Besar Uzbekistan dan Gubernur Bukhara menyampaikan undangan pemerintah Uzbekistan untuk Rachmat Gobel dan Ketua DPR RI Puan Maharani agar dapat hadir dalam peresmian Makam Imam Bukhari, di Bukhara. Untuk lebih mempererat hubungan *people to people* kedua negara, Uzbekistan diharapkan, rombongan Rachmat Gobel nantinya juga mengikutsertakan para ulama dan tokoh masyarakat Indonesia seperti dari Dewan Masjid, Dewan Dakwah, Syarikat Islam dan para ulama lainnya.

Mengenai undangan tersebut Rachmat Gobel mengatakan, akan menyampaikannya ke Ketua DPR RI. Ia juga meminta agar Uzbekistan menyediakan penerbangan khusus agar memudahkan rombongan dari Indonesia. Uzbekistan merupakan negara yang sangat penting, sangat terkenal dengan produk kerajinan tangannya dan penghasil kapas yang sangat terkenal.

Rachmat Gobel akan mendorong kerja sama perdagangan Indonesia – Uzbekistan melalui Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Untuk itu perlu dilaksanakan seminar untuk para pengusaha Indonesia agar melakukan investasi di Uzbekistan (energi, perdagangan dan pariwisata). Seminar tersebut untuk disiapkan oleh Kedutaan Besar Uzbekistan untuk Indonesia;

Sebagai sesama negara yang penduduknya mayoritas Islam, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang juga mendorong untuk meningkatkan wisata ziarah antar kedua negara dan pertukaran ulama. Pihak Uzbekistan juga menawarkan kepada para pengusaha Indonesia untuk melakukan investasi di Bukhara. Disediakan lahan 200 ha untuk kegiatan ziarah tourism Islam seperti untuk pembangunan hotel dan sarana pendukung lainnya.



Foto bersama dan penyerahan cinderamata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Duta Besar Uzbekistan Mr. Ulugbek Rozukulov dan Gubernur Bukhara, Uzbekistan, Botir K. Zariyov

**“Ketahanan pangan harus menjadi
isu sentral pembangunan ke depan
yang sama sekali tidak boleh terabaikan
sebagai wujud tanggung jawab
dalam proses pembangunan bangsa.”**

- Bung Hatta -



**GAGASAN DAN
KOMITMEN**



Semangat Restorasi dalam Ketahanan Pangan & Pembangunan Pertanian

Isu ketahanan pangan telah menjadi agenda utama bagi setiap negara. Berbagai kendala terus menghantui suplai pangan, terutama akibat pemanasan global dan perubahan iklim (*climate change*), sementara jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. *Global Report on Food Crisis* yang dirilis oleh *Food Security Information Network* pada tahun 2019 menunjukkan, lebih dari 113 juta penduduk dunia yang melingkupi 53 negara menghadapi krisis pangan.

Angka ini terus bertambah seiring dengan pandemi Covid-19 dan semakin parahnya dampak krisis iklim dan konflik Rusia-Ukraina. *World Food Programme (WFP)* sebuah organisasi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan, jumlah penduduk dunia yang menghadapi kerawanan pangan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pandemi Covid-19, dari semula 135 juta orang menjadi 345 juta orang.

Tanpa solusi yang berarti dari sisi suplai, masalah ketahanan pangan ini semakin genting karena jumlah penduduk dunia akan terus bertambah. PBB memperkirakan, jumlah penduduk dunia akan mencapai 8 miliar orang pada 2022, kemudian naik menjadi 8,5 miliar jiwa pada 2030 dan di tahun 2050 mencapai 9,7 miliar .

Sementara itu organisasi pangan dan pertanian dunia di bawah PBB yaitu *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyebutkan, pada 2050 setiap individu rata-rata akan mengkonsumsi sekitar 14% lebih banyak kalori di banding tingkat konsumsi saat ini. Ini berarti permintaan pangan juga akan meningkat drastis. Menurut lembaga ini, pada 2050 jumlah kebutuhan pangan akan lebih besar sekitar 70% dibandingkan saat ini.



Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar—ke empat terbesar di dunia—pemenuhan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting. Diperkirakan, pada 2030 saja jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 300 juta jiwa, dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah yang cukup dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik, yang mudah diakses oleh setiap orang agar masyarakat yakin bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Oleh karena itu, menurut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, ketahanan pangan harus menjadi isu sentral pembangunan ke depan yang sama sekali tidak boleh terabaikan. Sebagai wujud tanggung jawab dalam proses pembangunan bangsa, sebagai anggota legislatif dari Partai NasDem, Rachmat Gobel telah menunjukkan komitmennya dalam isu sentral ini, baik itu dalam bentuk berbagai gagasan maupun tindak nyata di lapangan.

A. Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Fondasi Pembangunan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi semua manusia sehingga harus bisa dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan asasi manusia, dan ini juga telah diamanatkan oleh konstitusi seperti tertuang pada pasal 27 UUD 1945. Pengertian Ketahanan Pangan seperti diatur dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan adalah adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.



Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat acara community farmer community Gorontalo

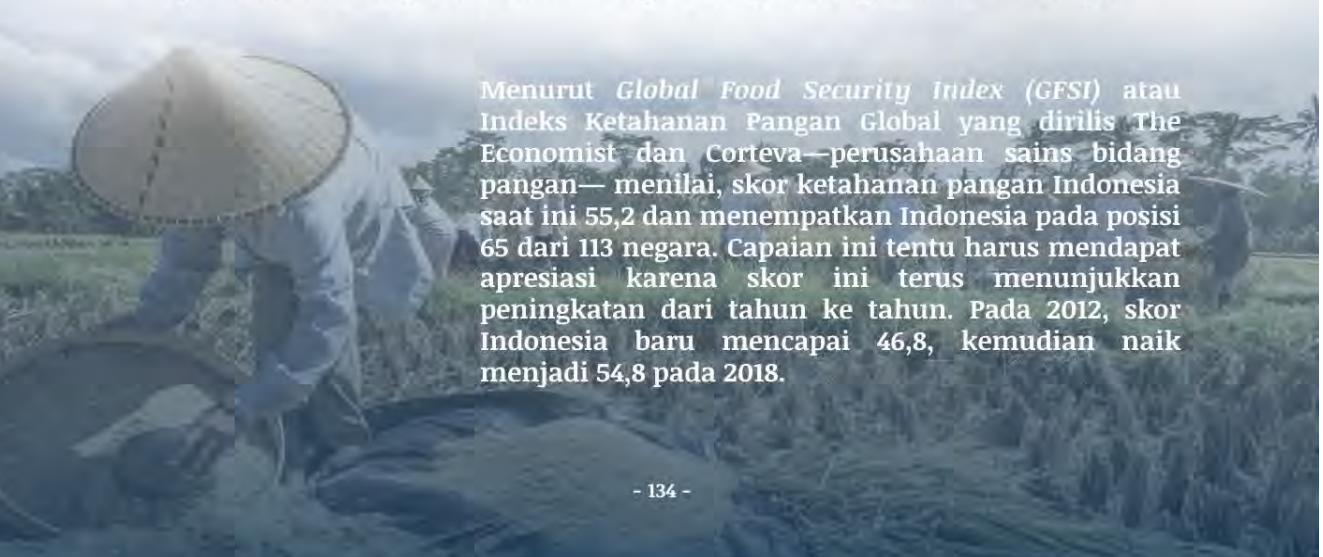
Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang pengertian ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaiannya dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan Sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Menurut Rachmat Gobel, ketahanan pangan adalah fondasi pembangunan bangsa. Ketiadaan jaminan akan stok pangan atau ketersediaan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan, dapat menciptakan ketidak-stabilan sosial, ekonomi dan politik. Gangguan terhadap ketahanan pangan bisa memicu munculnya berbagai gejolak sosial dan politik. Bahkan kondisi pangan yang kritis ini dapat membahayakan stabilitas nasional secara keseluruhan.

Bagi Rachmat Gobel, baik dalam posisinya sebagai kader Partai NasDem maupun dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, isu ketahanan pangan ini telah menjadi pusat perhatiannya sejak lama dan menjadi salah satu isu utama dalam agenda kerjanya. Jauh sebelum bergabung dalam NasDem, sektor ketahanan pangan ini telah mendapat perhatiannya, ini antara lain terlihat dari aktivitasnya dalam pengembangan agro industri.

Dalam jangka panjang maupun menengah, berbagai masalah yang terkait pangan menjadi hal yang harus diperhatikan, termasuk kaitan efisiensi anggaran, efektivitas dan penguatan koordinasi antar lembaga dan kementerian. Saat ini, meski masyarakat tengah terbebani oleh kenaikan harga BBM dan harga komoditas pangan, tetapi untungnya masih di dukung oleh ketersediaan pangan (beras) di kalangan petani serta harganya pun masih terkendali. “Inilah yang menjadi pengaman sesungguhnya”, ungkap Rachmat Gobel.

Pengalaman telah membuktikan, gangguan pada ketahanan pangan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas politik dan ekonomi nasional. Untuk itulah, pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor.



Menurut *Global Food Security Index (GFSI)* atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva—perusahaan sains bidang pangan—menilai, skor ketahanan pangan Indonesia saat ini 55,2 dan menempatkan Indonesia pada posisi 65 dari 113 negara. Capaian ini tentu harus mendapat apresiasi karena skor ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2012, skor Indonesia baru mencapai 46,8, kemudian naik menjadi 54,8 pada 2018.



Namun, menurut Rachmat Gobel, dengan capaian itu bukan berarti bisa disimpulkan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional sedang baik-baik saja. Pasalnya, di sisi lain sampai saat ini masyarakat masih menghadapi kian melejitnya harga komoditi pangan seperti cabe, tomat, sayur-mayur, daging, telur, minyak goreng, dan susu, karena panen yang terganggu oleh climate change. Kondisi akan terus mengganggu di masa depan sehingga diperlukan inovasi dalam bercocok tanam, serta gotong-royong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daging, telur, cabe, tomat, dan sayur-sayuran lainnya.

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Karakteristik komoditinya juga mudah rusak. Produksi pangan juga menghadapi masalah luas lahan petani yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen. Semua itu membutuhkan intervensi agar target kebijakan ketahanan pangan bisa tercapai.

Selain dari sisi produksi, menurut Rachmat Gobel, masalah lainnya adalah di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasarana distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal dibandingkan distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal dari Australia ke Jakarta atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta).

Dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasok yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen menjadi besar. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan masih merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran).

Yang juga sangat disayangkan adalah terjadinya fenomena substitusi pangan pokok dari komoditi pangan lokal ke bahan pangan impor. Misalnya daging, susu, dan kacang kedelai. Untuk kacang kedelai, Indonesia pernah mandiri di masa lalu. Namun, karena salah kebijakan dan tidak adanya perlindungan, Indonesia kini tergantung pada impor.

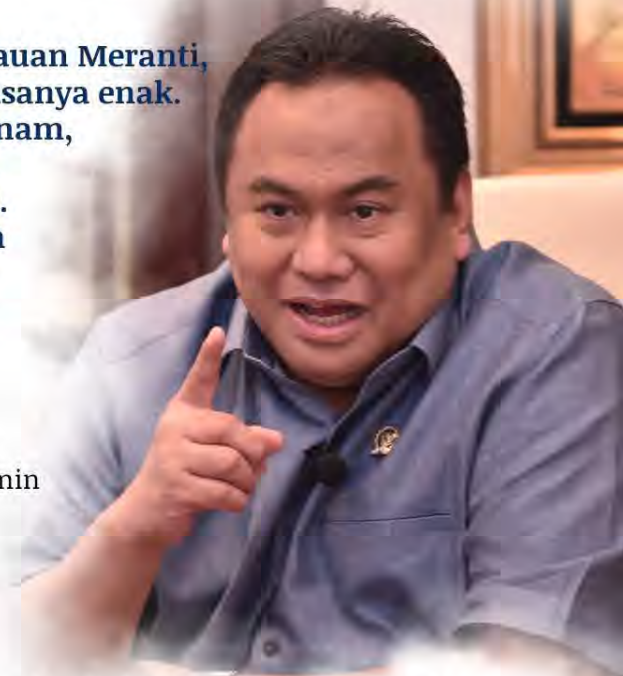
Data Kementerian Pertanian Tahun 2021 menyebutkan, produksi dalam negeri kedelai hanya 213.548 ton, sedangkan impornya mencapai 2.489.690 ton atau 95% dari kebutuhan nasional. Padahal, pada 2016, petani masih mampu menyediakan 1.391.300 ton, tapi kemudian, menurun terus. Kondisi ketergantungan terhadap impor juga terjadi pada daging dan susu/mentega/telur. Pada 2017 impor susu, mentega, dan telur mencapai US\$ 990 juta, naik menjadi US\$ 1,394 miliar pada 2021. Sedangkan impor daging pada 2017 ada di angka US\$ 590 juta, dan pada 2021 sudah mencapai US\$ 965 juta.

Dengan berbagai masalah itu, kebijakan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek ini harus sejalan, tidak bertolak belakang. Menurut Rachmat Gobel, pemerintah dan seluruh masyarakat harus saling membahu untuk menguatkan sejumlah komoditi yang masih bisa dipenuhi dari dalam negeri. Untuk komoditi daging, susu, dan kacang kedelai misalnya, jika diupayakan secara sungguh-sungguh Indonesia juga akan bisa mencapai kemandirian.

Untuk komoditi seperti gandum, struktur tanah Indonesia memang tidak cocok untuk tanaman ini. Namun, tetap harus melakukan diversifikasi. Indonesia punya tepung sagu, tepung singkong, tepung jagung, tepung talas, dan lain-lain. Jadi, yang diperlukan adalah gerakan nasional mengurangi ketergantungan pangan yang berbahan dasar gandum.

**“Sebagai contoh, di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, ada mie dari bahan sagu dan rasanya enak. Jadi, saatnya kita beralih seperti Vietnam, yang membuat mie dari beras. Serta Jepang, yang membuat mie dari soba. Demikian juga untuk kue-kue. Sudah saatnya mengandalkan tepung yang berbahan lokal. Hal seperti itu harus menjadi gerakan nasional,”
kata Rachmat Gobel.**

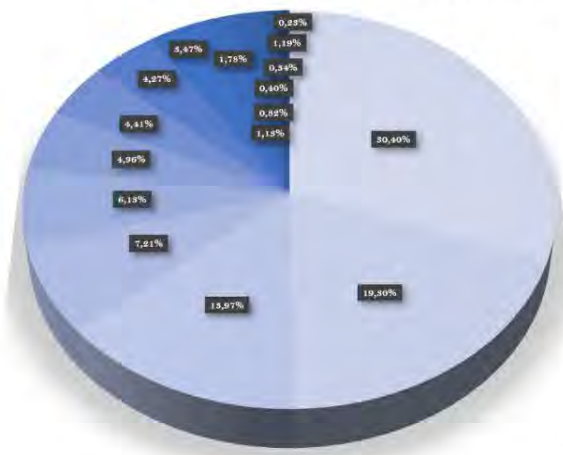
Sebagai negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia harusnya dapat menjamin kebutuhan masyarakat dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Respon cepat pemerintah dan keberlanjutan ketersediaan pangan merupakan hal yang sangat vital. Meskipun ketahanan pangan Indonesia sampai hari ini masih stabil, akan tetapi dampak dari krisis pangan dunia sudah dirasakan dan tidak bisa dikesampingkan. Setiap negara, harus siap menghadapi kemungkinan krisis pangan akut yang diperkirakan sebentar lagi akan melanda dunia.



Peningkatan risiko ketahanan pangan terlihat jelas pada wabah pandemi Covid-19 yang membuat telah membuat ancaman krisis pangan menjadi semakin nyata. Pandemi telah membuat rantai distribusi terhambat disegala lini tak terkecuali pangan. Ancaman krisis pangan kini semakin nyata akibat ketidakseimbangan atau pasokan dengan kebutuhan konsumsi. Kondisi ini telah menjalar ke beberapa negara, khususnya bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Memperbaiki sistem pertanian adalah solusi yang tepat untuk menjamin tercapainya swadaya pangan. Dalam arti luas sektor pertanian ini mencakup pertanian, peternakan, dan perikanan dan ini merupakan tumpuan dalam pembangunan dan ketahanan pangan. Banyak sumber pangan nasional yang harus dikembangkan, khususnya dengan melindungi lahan produktif dan membuka lahan baru. Sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang sangat luas, menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor mana yang cocok untuk setiap daerahnya. Misalnya saja, tanaman yang dikembangkan di pulau Kalimantan tentu akan sangat berbeda dengan yang akan di tanam di Sulawesi.

Jumlah Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Per Februari 2022



Sektor	Jumlah Pekerja
Pertanian-Kehutanan-Peternakan	40.635.997
Perdagangan	25.800.553
Industri Manufaktur	18.671.926
Akomodasi-Makanan-Minuman	9.635.433
Konstruksi	8.188.425
Jasa Pendidikan	6.626.638
Jasa Lainnya	5.892.267
Transportasi Pergudangan	5.710.510
Administrasi pemerintahan	4.633.405
Jasa kesehatan	2.384.745
Tambang dan galian	1.587.978
Jasa keuangan	1.512.007
Informasi dan komunikasi	1.097.558
Pengadaan air	534.247
Real estate	450.519
Pengadaan listrik dan gas	309.484
Total	133.671.692

*sumber : BPS, 2022

Lebih dari itu, pengembangan sektor pertanian bagi Indonesia bukan hanya sebatas soal ketahanan pangan ataupun kemandirian pangan, tapi juga menyangkut soal ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak. Data menunjukkan, sebagian besar perekonomian masyarakat masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Ini antara lain terlihat dari data tenaga kerja yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dimana sekitar 40,63% tenaga kerja diserap oleh sektor ini atau sekitar 30,40% dari total pekerja secara nasional. Angka ini jauh di atas sektor perdagangan yang menyerap 25,80 juta pekerja atau 19,30% dan industri manufaktur 18,67 juta atau 13,97%.



Di sisi lain, data menunjukkan bahwa produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah, nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja diserap oleh sektor ini. Menurut BPS, kontribusi nilai tambah sektor ini terhadap total PDB hanya sekitar 13%, jauh di bawah sektor lainnya seperti industri manufaktur sekitar 20%. Padahal jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian jauh lebih besar (30,40%) dibandingkan industri manufaktur (13,97%). Oleh karena itu, tidak heran jika kantong kemiskinan terbesar ada di sektor pertanian yang mencakup 46,30% dari total rumah tangga miskin secara nasional.

Data-data tersebut sekaligus menunjukkan, kinerja sektor pertanian sebagai soko guru pembangunan nasional masih jauh dari harapan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi ke depan, memacu pembangunan sektor pertanian.

“Kita tidak akan bisa berbicara tentang soal pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya jika rakyat masih kelaparan dimana-mana. Sudah selayaknya visi besar Indonesia dengan segala julukannya sebagai negara agraris maupun negara maritim mampu membangun agroindustri untuk mensejahtera rakyat secara luas dan menjadi lumbung pangan dunia,”
kata Rachmat Gobel.



B. Mengembangkan Semangat Restorasi

Potensi sektor pertanian atau agribisnis Indonesia sangat besar. Indonesia mempunyai luas daratan 188,2 juta ha, dimana menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 94 juta ha diantaranya berpotensi menjadi lahan pertanian, terdiri dari 25,4 juta ha untuk lahan basah (sawah) dan 68,6 juta ha untuk lahan kering. Sebagai negara kepulauan, luas lautan Indonesia mencapai 5.8 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.00 km yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia.

Pusat Penelitian Biologi Lembaga Pengetahuan Indonesia mengatakan, letak geografis Indonesia di kawasan tropis juga telah memberi anugerah yang besar. Menurut lembaga ini, daratan Indonesia adalah kawasan dengan kekayaan biodiversitas terrestrial tertinggi kedua di dunia. Jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, maka Indonesia menjadi yang pertama.

Namun semua potensi itu belum termanfaatkan secara maksimal. Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menjadi salah satu bukti. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, malah bisa disebut memprihatinkan. Bagaimana tidak, dengan segala potensi yang ada, Indonesia belum bisa menjadikannya sebagai daya saing yang kuat di bidang agribisnis. Ini membuat kesejahteraan petani dan nelayan jauh dari harapan, bahkan sektor pertanian menjadi kantong terbesar kemiskinan.

Diakui atau tidak, kondisi tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwa kebijakan pembangunan selama ini belum mampu memberdayakan potensi sektor pertanian secara maksimal. Paradigma pembangunan pertanian selama ini belum melahirkan kebijakan yang efektif untuk mensejahterakan petani dan nelayan, bahkan membuat kelompok masyarakat ini semakin tertinggal dibandingkan mereka yang bekerja atau bergerak di sektor ekonomi lainnya.

Kajian tentang masalah yang dihadapi sektor pertanian sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, praktisi maupun akademisi. Dari berbagai kajian tersebut, secara umum bisa disimpulkan bahwa pokok masalah pembangunan sektor pertanian terkait dalam soal permodalan, lahan makin menyusut, teknologi pertanian yang tertinggal, persoalan pupuk, dan soal pemasaran serta tataniaga.

Namun dalam pandangan Rachmat Gobel, masalah yang dihadapi sektor pertanian tidak hanya sebatas hal tersebut. Selain masih kurangnya sinergi sebagai dampak lemahnya koordinasi di tingkat kebijakan atau pemerintah, paradigma pembangunan pertanian saat ini juga semakin jauh dari nilai-nilai budaya masyarakat agraris. Padahal sesungguhnya nilai-nilai budaya agraris inilah yang merupakan dasar kehidupan bangsa Indonesia yang paling hakiki seperti semangat gotong royong, kemandirian dan perkenomian yang bertumpu pada ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, menurut Rachmat Gobel, kebijakan di sektor pertanian membutuhkan semangat restorasi yaitu mengedepankan perkenomian rakyat, menempatkan petani sebagai subyek serta memperkuat kembali nilai-nilai budaya agraris seperti semangat gotong royong dan kemandirian.

Berkaca kepada negara-negara yang telah berhasil membangun sektor pertanian mereka, kunci keberhasilannya tidak sebatas pada upaya peningkatan produktivitas melalui modernisasi, namun juga upaya memberi perhatian lebih besar kepada kelompok petani, termasuk memberikan proteksi yang tinggi.

Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat acara penyerahan traktor di Gorontalo



Sebut saja Jepang misalnya, meski sudah menjadi negara industri maju, namun negara sukura ini tidak pernah meninggalkan sektor pertanian dan budaya agraris. Bahkan Jepang termasuk negara yang sangat protektif untuk petani mereka. Begitu juga Amerika Serikat dan berbagai negara di kawasan Eropa.

Sulit untuk mengharapkan, upaya mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju pada 2045 akan bisa tercapai jika tidak didukung oleh sektor pertanian dan petani yang tangguh. Pengalaman negara maju tersebut menunjukkan hal ini. Bagaimana mungkin bisa membangun industri berbasis teknologi yang tinggi, sementara dalam hal ketahanan pangan Indonesia tertinggal.

Perlu disadari, kebutuhan manusia mengkonsumsi makanan tidak akan tergantikan dan ini datangnya dari sektor pertanian. Oleh karena, mereka yang terlibat di sektor pertanian atau pangan adalah para pejuang untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Namun dalam realita sehari-hari, akibat kinerja pembangunan yang tidak bertumbuh seperti yang diharapkan, kesejahteraan petani semakin tertinggal. Kondisi ini juga telah membuat profesi petani semakin tidak menarik, bahkan kian ditinggalkan.

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah, nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja diserap oleh sektor ini. Menurut BPS, kontribusi nilai tambah sektor ini terhadap total PDB hanya sekitar 13%, jauh di bawah sektor lainnya seperti industri manufaktur sekitar 20%. Padahal jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian jauh lebih besar (30,40%) dibandingkan industri manufaktur (13,97%). Oleh karena itu, tidak heran jika kantong kemiskinan terbesar ada di sektor pertanian yang mencakup 46,30% dari total rumah tangga miskin secara nasional.

“Petani itu adalah para pejuang yang harus terus didukung. Tanpa petani, bangsa Indonesia akan kehilangan martabat dan derajatnya. Bayangkan jika petani tidak ada, kita harus impor, kita harus disuapin dari luar Negeri. Kita tidak mau begitu. Kita harus bangun pertanian kita,” ungkap Rachmat Gobel dalam berbagai kesempatan.



Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat meninjau mesin penggilingan padi di Gorontalo

Itulah yang antara lain menjadi dasar komitmen Rachmat Gobel dalam memperjuangkan pembangunan ekonomi rakyat, khususnya petani, nelayan dan pelaku usaha kecil. Komitmen yang telah melahirkan berbagai gagasan dan aksi nyata di lapangan. Dengan membangun sinergi dan menggalang berbagai dukungan baik melalui instansi pemerintah, pelaku usaha termasuk BUMN, bahkan dalam misi diplomasi parlemen ke berbagai negara, Rachmat Gobel telah menggalakkan berbagai program pembangunan sektor pertanian. Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan ini tidak sebatas di daerah pemilihannya di Gorontalo, tapi juga di berbagai daerah lain baik di Jawa maupun luar Jawa.

C. Tingkatkan Produktivitas Pertanian dengan IPTEK

Ketertinggalan sektor pertanian Indonesia terlihat nyata pada rendahnya produktivitas dan ini menjadi tantangan utama ke depan. Selain terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan dukungan permodalan, rendahnya produktivitas terkait dengan penerapan aspek teknologi di sektor pertanian. Sebagian besar pengelolaan usaha tani masih sangat tradisional, jauh dari sentuhan teknologi terkini. Aspek peningkatan kualitas SDM, permodalan dan teknologi saling terkait dan sangat penting.




“Artinya secara singkat, upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah berbicara tentang aspek teknologi budidaya yang didalamnya melibatkan sumber daya manusianya yaitu petani, lahan, bibit, pupuk dan teknologi dan dukungan finansial,” kata Rachmat Gobel.

Menurut Rachmat Gobel, dalam aspek teknologi perlu banyak terobosan dan inovasi baru. Diperlukan pula upaya keras untuk merangkul masyarakat petani agar lebih melek teknologi dan menumbuhkan semangat kemandirian petani. Pengembangan teknologi budidaya, bibit unggul dan teknologi pasca panen, merupakan salah satu yang perlu dilakukan.

Meskipun riset dan penelitian pada sektor pertanian cukup berkembang, namun dampaknya belum dirasakan secara optimal oleh kalangan petani. Pasalnya, memang tidak mudah bagi petani untuk menerapkan hasil riset dan penelitian tersebut. Di samping terkendala oleh wawasan dan pengetahuan, untuk menerapkan hasil riset dan penelitian itu petani juga membutuhkan biaya tambahan.

Dukungan finansial atau permodalan bagi petani menjadi sangat penting agar mereka terdorong untuk menerapkan teknologi terbaru dari hasil riset dan penelitian. Oleh karena itu pola implementasi kebijakan keberpihakan pemerintah selama ini perlu lebih diperluas. Dalam hal subsidi misalnya, alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi harus diperbesar sampai pada tataran implementasinya ditingkat petani. Dalam memberikan bantuan berupa traktor misalnya, jangan hanya sampai pada tingkat pengadaan saja, tapi juga harus dipikirkan pemeliharaan atau *maintenance*.

Begitu juga dalam hal riset dan penelitian, sejak awal sudah harus dipikirkan bagaimana implementasinya di tingkat petani dan dukungan apa saja yang diperlukan. Pemerintah harus mampu meningkatkan harkat dan martabat petani dengan menunjukkan keberpihakan yang lebih besar melalui efektivitas kebijakan pembangunan.



■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbung
Rachmat Gobel saat penyerahan mesin
penggilingan padi di Gorontalo

D. Regenerasi: Membangun Ekosistem Petani Milenial

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pemuda yang bekerja di sektor pertanian terus menurun dalam beberapa dekade terakhir. Pada 2011, tercatat ada 29,18% pemuda yang bekerja di sektor ini, angkanya merosot menjadi sebesar 19,18% pada 2021. Rata-rata usia petani saat ini di atas 45 tahun. Maka dari itu, bagi Rachmat Gobel, regenerasi petani menjadi tantangan tersendiri dan harus dilakukan sebagai upaya menjaga bagian penting dalam produksi sektor pertanian.

Selain usia tua, mayoritas pendidikan petani juga diisi oleh lulusan sekolah dasar. Sedangkan profesi petani bukan hanya mengandalkan fisik saja, namun juga membutuhkan kemampuan menyerap pengetahuan dan teknologi. Menyoalkan petani pada zaman sekarang harus mampu menggaet generasi milenial sebagai pelanjut pembangunan bangsa. Tantangannya adalah bagaimana caranya agar bertani menjadi sebuah profesi yang digandrungi atau diminati oleh kaum milenial.

Menjadi tugas penting pemangku kebijakan untuk membangun ekosistem pertanian agar para milenial tertarik untuk menjadi petani. Dengan mengajak mereka melihat perspektif masa depan sambil menjadikan dunia pertanian menarik untuk ditekuni sebagai profesi yang atraktif.

Pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional, perkembangan sektor strategis ini harus dijaga. Memberi wawasan yang luas kepada generasi milenial tentang arti strategis sektor pertanian ini menjadi sangat penting. Sektor ini bukan sekedar soal penyerap tenaga kerja, lebih dari itu, kata Rachmat Gobel, pertanian dan para petani merupakan penjaga harkat dan martabat bangsa. Bahkan di tengah pandemi ini, petani tetap memberi makan kita sebagai bangsa sehingga tidak mengemis ke bangsa lain.

“Akibat perubahan iklim dan terus bertambahnya penduduk dunia, masa depan dunia bisa terancam oleh krisis pangan. Indonesia dengan lahan yang luas dan subur harus bisa berkontribusi masalah global ini dengan menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Pemikiran strategis seperti itu penting untuk dipahami oleh generasi milenial Indonesia,” ucap Rachmat Gobel.

Pemikiran strategis tentang pentingnya dunia pertanian harus disampaikan dan dipahami milenial. Untuk itu penguatan kelembagaan petani seperti koperasi saat ini sangat diperlukan, mengingat petani menghadapi kesulitan permodalan dan keterbatasan sentuhan teknologi pertanian seperti traktor dan mesin pengering gabah. Menurut Rachmat Gobel, petani Indonesia umumnya masih butuh bantuan permodalan untuk bisa bertani secara modern. Maka perbaikan semua lini itu akan berpengaruh juga terhadap minat petani muda untuk terjun menjadi petani sesungguhnya.




E. Mengendalikan Laju Konversi Lahan

Rachmat Gobel mengatakan, manusia bisa saja memproduksi tablet sebagai pengganti makanan. Tapi, kebiasaan manusia mengonsumsi makanan tidak bisa digantikan. Makan tidak sekadar mengenyangkan perut, tapi sudah menjadi bagian dari ritual hidup manusia. Makan bersama menjadi tanda dan penguat persahabatan. Perjamuan sudah menjadi budaya dan ukuran peradaban. Kondisi ini menegaskan pentingnya pangan bagi kehidupan manusia.

Lebih lanjut Rachmat Gobel menuturkan, isu ketersediaan pangan yang berkualitas akan terus membayangi kehidupan manusia sampai kapanpun. Disinilah pentingnya peran petani dan sektor pertanian. Selama petani tidak sejahtera, sektor pertanian akan tertinggal dan selama itu pula pasokan dan risiko ketahanan pangan akan menjadi masalah. Itu sebabnya, negara-negara maju memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani (NTP) ditingkatkan agar tetap ada orang yang bersedia dan bangga menjadi petani.

Sebagai negara tropis yang subur ini, Indonesia belum mampu menyediakan semua kebutuhan pangan yang menjadi makanan pokok masyarakat. Bukan saja kedelai dan bawang, tapi juga beras dan jagung. Pasar buah dalam negeri mulai dikuasai buah impor. Bukan saja masalah kedaulatan pangan, melainkan juga ketahanan pangan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Kesejahteraan petani lebih menyedihkan tidak selalu selaras dengan indikator pembangunan sektor pertanian. Mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Setelah 77 tahun merdeka, kini saatnya sektor pertanian dibangun dengan lebih serius dan sistematis. Setelah 77 tahun merdeka, kini saatnya petani hidup sejahtera.



Oleh karena itu, bagi Rachmat Gobel yang dibangun tidak hanya pertanian, tapi juga petani. Jika hanya sektor pertanian yang dibangun, yang makmur hanya para petani berdasari, yakni pengusaha menengah dan besar yang terjun ke sektor pertanian. Petani akan kian termarginalisasi, bahkan “tertendang” keluar sektor pertanian akibat ketiadaan lahan. Saat ini saja banyak petani tanpa lahan.

Kalau pun memiliki, umumnya petani di Indonesia hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha. Petani perlu dipandang sebagai pelaku usaha meski umumnya mereka masuk kategori pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Bantuan untuk petani harus memperhatikan dengan seksama eksistensi mereka sebagai pelaku bisnis, agar nasib petani Indonesia akan berubah. Mereka akan hidup sejahtera dan sektor pertanian akan mengalami kemajuan besar.

Laju konversi lahan pertanian perlu dikendalikan karena merupakan faktor esensial bagi kemajuan Indonesia, mengingat sektor pertanian ini adalah ujung tombak dan fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Negara Indonesia adalah negara besar, maka untuk bisa mewujudkan NKRI yang kuat, sektor pertanian harus menjadi pondasi yang kuat. Untuk mendukung hal itu, Rachmat Gobel mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) terlibat dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian karena hal ini bukan hanya tugas Kementerian Pertanian atau Pemerintah Pusat saja, daerah juga harus memiliki pemikiran yang sama. Pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi harus ikut terlibat. Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang sama dalam mewujudkannya.

Meningkatnya laju konversi lahan terjadi karena masyarakat belum melihat bertani sebagai usaha yang menguntungkan. Jika dikelola secara profesional, pertanian bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Banyak yang menjual lahan pertaniannya karena menganggap pertanian itu keuntungannya kecil. Sebetulnya keuntungan dari usaha pertanian tidak kalah dengan sektor usaha yang lain jika dikelola dengan benar.

Rachmat Gobel, meminta agar perlawanan alih fungsi lahan dilakukan dengan cara sinergi dan pro-aktifnya dan disini peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan harus optimal. Meski diakuinya bahwa konversi lahan pertanian sulit dihindari, menurut Rachmat Gobel yang terpenting adalah menjaga agar tidak sampai menjadi kontraproduktif pada upaya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Berdasarkan data BPS, dalam dua tahun terakhir luas areal panen padi yaitu dari 2018-2020 luas areal panen padi menyusut dari 11,377 juta Ha menjadi 10,677 juta Ha. Penyusutan ini antara lain disebabkan adanya konversi lahan. Kebutuhan konversi lahan ke depannya akan semakin besar, tidak hanya untuk memenuhi lahan industri tapi juga untuk perumahan rakyat. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian pangan & kebijakan pemerintah membuka lahan baru dengan membangun *food estate* menjadi langkah strategis dan prioritas utama.



F. Keberpihakan dalam Kebijakan Anggaran

Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Indonesia sebesar Rp 95 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Nilai tersebut lebih besar 0,9% dibandingkan outlook Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 94,1 triliun. Adapun pembangunan bidang ketahanan pangan pada 2023 diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan. Salah satu kebijakan dalam pembangunan tersebut adalah memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Kita perlu mengapresiasi APBN Indonesia, yang terus meningkat dengan pesat. Kemampuan fiskal juga kian memadai, namun efisiensi pengelolaannya masih harus lebih ditingkatkan agar dana itu termanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, pemerintah juga harus menguatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

“Suatu program tidak dibebankan ke satu kementerian atau lembaga saja. Di sini butuh figur-figur pemimpin yang kuat. Jangan semua menggantung pada Presiden, tetapi, para pembantu presiden juga harus bisa menjadi penopang yang baik”, kata Rachmat Gobel.

Dalam penyusunan APBN, komitmen Rachmat Gobel sebagai wakil rakyat sudah sangat jelas bahwa sebagian besar porsi alokasi anggaran harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat UMKM, industri dalam negeri, dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). APBN bukan hanya fokus untuk yang sifatnya fisik maupun untuk impor. APBN harus mendorong ekonomi yang berkualitas, yang merupakan momentum yang baik pasca pandemi Covid-19.

Ekonomi berkualitas yang dimaksud adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas. Kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Semua bidang usaha itu melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di pedesaan serta masyarakat lapis bawah, terutama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, selain menjaga nilai tukar petani, peningkatan produktivitasnya juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, fokus pembangunan terhadap berbagai bidang usaha tersebut semakin penting karena akan memberi dampak besar terhadap pemerataan ekonomi. Khusus di bidang pertanian, sudah saatnya pula beralih ke pupuk nonsubsidi dan mengalihkan anggaran subsidiya untuk peningkatan kemampuan teknologi atau kegiatan yang memberi dampak lebih besar terhadap pertumbuhan nilai tambah petani. Ini akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani. Untuk modalnya sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga menguatkan koperasi petani.

Di era persaingan global yang akan menang adalah negara-negara yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. Ekonomi nasional yang kuat bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas, tapi pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negerinya dengan produk-produk yang diproduksi sendiri.

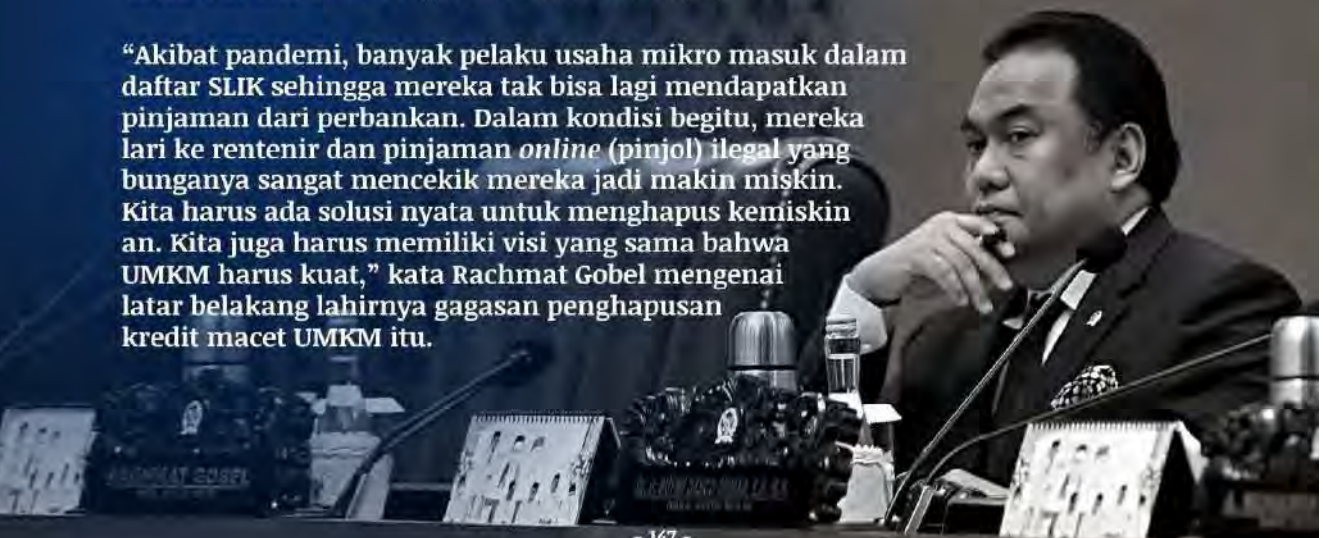
Bagi negeri dan bangsa yang mengandalkan kekayaan alamnya dan hanya berpikir jangka pendek dengan menggali dan mengeksploitasi SDA untuk kemudian menjualnya, hanya akan melahirkan perekonomian tradisional. Tak akan ada upaya membangun kecanggihan apapun dan ekonomi semacam ini tak akan menghasilkan peradaban. Hanya menghasilkan orang-orang kaya yang tercerabut dari akar bangsanya sendiri. Indonesia tidak didirikan untuk menjadi negeri dan bangsa semacam itu, jelas Rachmat Gobel.

Dalam rangka membantu petani dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Rachmat Gobel pernah mengusulkan agar kredit macet mereka dengan nilai di bawah Rp 10 juta diputihkan saja. Usulan ini disampaikan ketika banyak petani dan UMKM tidak mampu membayar kewajiban cicilan kredit saat pandemi Covid-19 merebak. “Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi Covid-19 ini banyak usaha yang tutup sehingga tak bisa bayar pinjaman,” kata Rachmat Gobel.

Gagasan itu ia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso saat menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani Gorontalo yang mendapat bantuan dari perbankan. Rachmat Gobel mengatakan, hal itu juga menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR.

Akibat kredit macet itu, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).

“Akibat pandemi, banyak pelaku usaha mikro masuk dalam daftar SLIK sehingga mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan. Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik mereka jadi makin miskin. Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat,” kata Rachmat Gobel mengenai latar belakang lahirnya gagasan penghapusan kredit macet UMKM itu.



G. Mendorong Investasi Sektor Pertanian Melalui Kerjasama Dengan Luar Negeri

Bagi Rachmat Gobel, peranan investasi sektor pertanian menjadi sangat penting mengingat potensi dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat besar. Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menarik lebih banyak perdagangan dan penanaman modal, serta untuk berintegrasi lebih lanjut ke dalam perekonomian global. Melalui diplomasi parlemen (DPR RI), Rachmat Gobel berupaya keras mendorong kerjasama investasi sektor pertanian atau agribisnis ini dengan sejumlah negara.

Setiap kunjungan muhibah yang ia lakukan ke berbagai negara, di samping isu kerjasama industri, teknologi dan pendidikan, membicarakan topik peluang agribisnis selalu menjadi agenda utamanya. Rachmat Gobel menyayangkan, selama ini perhatian pemerintah terhadap promosi investasi asing untuk sektor agribisnis lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Sepanjang 2015-2019, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor ini hanya sekitar 3%-7% dari total realisasi PMA. Itupun mayoritas PMA ini di bidang kelapa sawit, yang memang dipandang lebih menguntungkan dibandingkan sub-sektor lainnya.

Rachmat Gobel mengakui, masih banyak masalah untuk investasi di sektor pertanian seperti lahan—termasuk konflik agraria—ketersediaan infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Jawa juga masih merupakan hal yang penting. Lahan luas yang dibutuhkan untuk bisnis pertanian berskala besar hanya tersedia di luar Jawa, namun dukungan infrastruktur belum seperti di Jawa sehingga dianggap kurang menguntungkan.

“Meskipun beberapa investor bersedia untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mereka, namun biayanya terlalu besar dibandingkan hasil panen. Pendapatan yang diperoleh tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur,” kata Rachmat Gobel.

Tawaran kerjasama investasi di bidang pertanian antara lain dibicarakan saat Rachmat Gobel memimpin delegasi DPR-RI ke Turki, Uzbekistan, Belarusia, Jepang dan Qatar. Penjajakan kerjasama antara dalam pembangunan pabrik pupuk berkualitas tinggi, penyediaan alat pertanian modern, pemasaran komoditi pertanian. Tawaran ini mendapat sambutan antusias dan telah disampaikan Rachmat Gobel ke instansi terkait, untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pada Agustus 2022 lalu misalnya, dalam kunjungan kerjanya bersama sejumlah anggota DPR ke Jepang, Rachmat Gobel telah menjajaki kerjasama dengan pemerintah Kota Hokota, di Prefektur Ibaraki. Hokota dikenal berhasil mengembangkan sektor pertaniannya sehingga menjadi pemasok utama sayuran dan produk hortikultura di Jepang.

Produk unggulannya adalah melon ibaraki, strawberi, dan ubi jalar. Sekitar 60 tahun sebelumnya, Hokota adalah kota yang miskin dengan infrastruktur yang buruk. Namun kemudian mereka membangun sektor pertaniannya dan berhasil mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat dan memajukan kota Hokota.

Dalam mewujudkan kerja sama antara Indonesia-Jepang Rachmat Gobel menjelaskan, hubungan kedua negara bukan hanya sebatas hubungan *government to government* namun juga harus dibangun kerja sama *people to people*. Ini penting agar kerja sama antara dua negara sahabat ini dapat terjalin secara berkesinambungan.

Peringatan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang, menurut Rachmat Gobel, harus bisa menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian. Jepang memiliki keunggulan dalam teknologi, pendanaan, dan pengalaman, Indonesia memiliki lahan yang luas, iklim yang bersahabat, tanah yang subur, dan jumlah penduduk yang banyak. “Jadi kedua bangsa dan kedua negara memiliki keunggulan masing-masing dan saling menguatkan serta saling mengisi,” ungkap Rachmat Gobel.

Selain mengutamakan kualitas, investasi Jepang juga memiliki komitmen tinggi terhadap isu lingkungan, selalu mengutamakan efisiensi dan produktivitas dalam membangun daya saing. Lebih dari itu, lanjutnya, jika melihat investasinya di Indonesia, Jepang tidak hanya bertindak sebagai pemodal semata, namun juga telah melakukan transformasi teknologi dalam industri nasional.

Dalam membangun industrinya, bangsa Jepang mengenal prinsip *Monozukuri* dan *Hitozukuri*. Transfer teknologi bukan hanya bicara bagaimana menciptakan barang yang berkualitas, tetapi juga bagaimana si manusianya mampu memahami tentang teknologi tersebut. Ada proses dan tahapan yang harus dilewati untuk bisa disebut sebagai transformasi teknologi. Pertama adalah *transfer of job* (pekerjaan), *transfer of know how* (pemahaman), dan baru kemudian terjadilah transfer teknologi.



Jadi, Investasi Jepang di Indonesia telah memberikan nilai tambah yang lebih, tidak sekedar meningkatkan investasi asing atau FDI (*foreign direct investment*) dan penyerapan tenaga kerja. Negara ini juga telah memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan alih teknologi. Bahkan kini sudah terjadi proses transformasi teknologi di berbagai industri yang kian berkembang dan mendorong laju roda perekonomian nasional.

Rachmat Gobel juga tertarik untuk mengembangkan kerja sama melalui konsep *Factory Farm* yang telah berhasil dikembangkan oleh perusahaan Jepang seperti Chateraise. Melalui konsep ini, Chateraise berhasil menggalang kolaborasi dengan petani dan peternak di wilayah sekitar pabrik ini. Perusahaan ini memberi dukungan teknologi dan pemasaran kepada petani dan peternak untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Konsep *Factory Farm* menjadi sangat penting, karena salah satu masalah yang dihadapi perekonomian nasional adalah semakin besar dan tertinggalnya kemampuan petani, peternak, usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambah.

Melalui konsep *Factory Farm*, Chateriraise melakukan kolaborasi dengan Indonesia dan diharapkan mampu membantu petani dan peternak serta usaha mikro dan kecil yang ada disekitar wilayah pabrik perusahaan ini. Kolaborasi untuk meningkatkan nilai tambah dengan menghasilkan produk bahan baku yang berkualitas dan berstandar nasional, bahkan global.



Disamping itu, pengalaman Chateraise dalam membangun konsep *Farm Factory* bisa menjadi inspirasi bagi pelaku industri makanan dan minuman nasional untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan petani, peternak dan usaha mikro dan kecil. Dan yang sangat penting untuk disadari, salah satu tantangan bangsa ini ke depan adalah mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.

“Itu hanya bisa terwujud jika struktur industri makanan dan minuman nasional mempunyai fondasi yang kuat. Kondisi itu hanya bisa dicapai jika industri makanan dan minuman didukung oleh petani, peternak serta usaha mikro dan kecil yang tangguh, mampu menghasilkan produk yang berkualitas.”

Sementara itu, dalam kunjungan ke Turki, Rachmat Gobel menjajaki peluang kerja sama pengadaan pupuk berkualitas yang sangat dibutuhkan Indonesia. Turki adalah penghasil utama boron dunia yang merupakan elemen sangat penting dalam nutrisi tanaman. Untuk mewujudkan kerja sama ini, Rachmat Gobel berbicara langsung dengan kementerian teknologi Turki dan Dewan Direksi Emiden, badan usaha milik pemerintah Turki yang menguasai produksi dan perdagangan boron dunia.

Dalam kunjungan ke Uzbekistan, selain menjajaki peluang kerja sama dalam industri pupuk, Rachmat Gobel juga membicarakan peningkatan perdagangan komoditas pertanian berupa perjanjian resiprokal dalam lalu lintas produk pertanian kedua negara. Perjanjian ini akan berdampak positif bagi pengembangan industri agro ke depan.

Untuk kerja sama industri pupuk, selain membicarakannya dengan kementerian perindustrian, Rachmat Gobel juga melakukan pertemuan dengan direksi Uzbekistan Uzkimyosnoat, perusahaan milik pemerintah Uzbekistan yang mengurus industri kimia dan pupuk. Seperti diketahui, Uzbekistan menjadi salah satu negara mitra penting bagi Indonesia. Negara ini adalah salah satu pemasok dan produsen terbesar kalium klorida (KCl) terbesar dunia, bahan baku pupuk dan bahan penolong di industri makanan, minuman, dan medis. Indonesia bukan merupakan negara produsen KCl.

Dalam kunjungan ke Belarusia, selain kerja sama industri pupuk juga membicarakan kerja sama dalam industri peralatan alat pertanian. Negara pecahan Uni Soviet ini dikenal sebagai salah satu produsen terbesar potassium. Sementara, Indonesia tidak memiliki tambang potassium sehingga harus mengimpor sepenuhnya. Setiap tahun, Indonesia tidak kurang dari 698 ribu ton mengimpor bahan baku pupuk majemuk ini dari Belarusia. Rachmat Gobel meluangkan waktu untuk melihat langsung penambangan potasium yang kedalamannya mencapai 1.000 m. Namun untuk keamanan, Rachmat Gobel dan rombongan hanya sampai di kedalaman 575 m.

Untuk melihat kemajuan industri peralatan pertanian Belarusia, Rachmat Gobel melakukan pertemuan dan mengunjungi Belaruskii Avtomobilnyi Zavod (BelAZ), traktor dan *dump truck*. Perusahaan ini memproduksi 27 jenis traktor, mulai dari yang berkekuatan 9 PK hingga 359 PK. Rachmat Gobel juga menawarkan kerjasama dalam industri pupuk dan alat pertanian dengan Belarusia.

“Seiring dengan menghadapi peningkatan risiko ketahanan pangan ke depan, sedini mungkin Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang mempunyai keunggulan di bidang industri pupuk, alat pertanian dan industri pengolahan makanan. Kerja sama ini akan sangat berdampak positif dalam pembangunan sektor pertanian di dalam negeri, dan juga memberi akses pasar yang lebih luas bagi ekspor Indonesia maupun dalam memenuhi kebutuhan impor”.

Mengenai kunjungannya ke Qatar, Rachmat Gobel mengatakan, misinya lebih ditekankan untuk membawa investor negara ini menanamkan modalnya untuk bidang usaha pertanian di Indonesia. Sebagai negara negara kaya, Qatar membutuhkan sarana investasi, dan sektor pertanian Indonesia sangat memberi peluang untuk ini.

H. Masalah Subsidi Pupuk dan Solusinya

Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan, anggaran subsidi pupuk konsisten naik sejak 2014 hingga 2019. Pada 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 21,04 triliun. Hingga 2019, anggarannya telah naik menjadi Rp 34,3 triliun. Dengan begitu, dalam kurun waktu lima tahun itu, pemerintah telah menggelontorkan subsidi pupuk sekitar Rp 175 triliun.

Rachmat Gobel mengatakan, masalah pupuk subsidi harus ditinjau secara total, dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian dan pendistribusian pupuk subsidi secara merata. Berbagai upaya dan skema distribusi telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.

Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total. Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini ada di masing-masing tingkatan, hingga tingkat provinsi. Persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian.

Menurut Rachmat Gobel, diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan jajaran kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Jadi, penyelesaian masalah pupuk ini menurutnya, bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja, juga penyelesaian permasalahan pertanian wajib dilakukan secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Di satu sisi, produksi pupuk bersubsidi dilakukan oleh BUMN sehingga berada di bawah Kementerian BUMN, semetara dalam persoalan urusan alokasi subsidi atau fiskal keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan. Persoalan pupuk juga berkaitan dengan Kementerian ESDM karena terkait suplai gas dan sebagainya. Jadi, menyelesaikan masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara total. Itu yang harus kita pikirkan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR/Korinbang telah mengundang kementerian terkait dan komisi terkait di DPR untuk mengadakan rapat gabungan, melakukan konsultasi dan mendiskusikan isu-isu terkini soal masalah pupuk subsidi. Inisiatif ini mendapat sambutan antusias, karena dalam sejarah baru di bawah koordinasi Rachmat Gobel ini rapat konsultasi gabungan ini bisa terlaksana. Tujuannya, agar secara bersama-sama bisa memecahkan persoalan masalah klasik tentang pupuk ini.

Di sisi lain, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) meminta, ke depan petani harus mulai membiasakan menggunakan pupuk nonsubsidi, karena menurutnya kalau pupuk nonsubsidi dapat meningkatkan hasil pertanian. Atas inisiatifnya, Rachmat Gobel telah melakukan uji coba penggunaan non subsidi di sejumlah daerah Gorontalo, Sumba, dan juga Jember. Hasilnya meningkat hingga dua kali lipat. Kedepannya petani harus membiasakan menggunakan pupuk non subsidi, karena dalam jangka panjang akan dibangun industrinya.

Di Gorontalo, Rachmat Gobel telah melakukan pengembangan pertanian dengan penggunaan pupuk nonsubsidi bahkan telah sukses dilakukan dengan produktivitas tanaman 10 ton per Ha, selanjutnya akan terus diperluas lagi, baik pada lahan kering untuk jagung maupun lahan basah untuk padi.

Pupuk nonsubsidi produksi pupuk hasil PT Pupuk Indonesia, petani yang telah mencobanya mendapatkan hasil sangat baik, bahkan bisa menjauhkan hama. Dalam konsep penggunaan pupuk nonsubsidi ini tidak ada uang pemerintah, kinerja PT Pupuk Indonesia juga akan lebih sehat. Pada akhirnya, pemerintah bisa mengurangi anggaran untuk subsidi, hasil produksi para petani juga baik.

■ *Wakil Ketua DPR/Korinbang RI Rahmat Gobel saat rapat bersama Wakil Ketua Komisi IV Rusdi Masse Mappasessu dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman membahas ketersediaan pupuk nonsubsidi.*



“Selain di Gorontalo, telah dilakukan pengembangan demplot atau proyek percontohan pertanian nonsubsidi di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, bahkan akan memasuki masa panen raya. Kita perlu mendorong agar pengembangan lumbung pangan (*food estate*) yang salah satu yang potensial adalah di Sumba Tengah ini,” kata Rachmat Gobel.

Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Subsidi pupuk hanya untuk pupuk NPK dan urea dengan alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 25.27 triliun dalam RAPBN 2023. Alokasi pupuk bersubsidi difokuskan pada 2 jenis pupuk yakni pupuk Urea dan NPK, dan 9 jenis komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu dari sebelumnya 70 komoditas berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas strategis pertanian.

Pada tahun 2023 pemerintah akan melakukan penerapan skema Subsidi Langsung Pupuk (SLP) kepada petani melalui kartu tani/e-kartu tani (kartu tani digital) biometrik secara bertahap. Adapun subsidi pupuk diberikan agar petani dapat melakukan usaha dengan biaya terjangkau sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam hal ini petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, di luar petani peternakan dan perikanan budidaya, yang telah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam e-RDKK.

Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi. Kebijakan ini diharapkan akan terus dijalankan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2024, Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.

I. Optimalisasi Food Estate sebagai Lumbung Pangan Nasional

Mengutip dari Litbang Kementerian Pertanian, *food estate* adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern.

Konsep dasar *food estate* diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan. *Food estate* diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat/lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan *food estate* didasari tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pangan nasional sehingga dapat menjadi cadangan dan penyimpanan pangan serta distribusi pangan dalam menghadapi krisis pangan. *Food estate* ini juga mengupayakan peningkatan produksi pangan sehingga mengurangi impor komoditas bahan pangan. Keberadaan *food estate* sebagai respons pemerintah tentunya tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu singkat. Proyek *food estate* merupakan program untuk tujuan jangka panjang yang turut memperhatikan aspek keberlanjutan.

Menurut Rachmat Gobel, setiap negara memiliki pola adaptasi tersendiri dalam menghadapi ancaman krisis. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara produsen pangan yang besar di dunia. Seluruh program agrikultur yang dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya memiliki output yang hampir sama yaitu mencapai ketahanan pangan nasional. Kendati demikian, proyek besar memiliki tanggung jawab yang besar pula kepada rakyat. Masih terdapat peluang bahwa proyek *food estate* akan diubah atau ditinggalkan seperti proyek-proyek terdahulu. Hal ini disebabkan karena minimnya perencanaan serta pengaruh faktor eksternal dan internal lain seperti perubahan kondisi ekonomi akibat resesi atau kondisi lainnya.

Sementara itu, aspek keberlanjutan dan penggunaan teknologi dinilai merupakan tantangan terbesar untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam *food estate* itu sendiri. Hal ini dikarenakan menjaga kelangsungan suatu kebijakan memerlukan keseriusan pemerintah dan rakyat yang saling bersinergi.

■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, saat meninjau kebun hidroponik di Kabupaten Bone Bolango



Rachmat Gobel mendukung penuh pengembangan *food estate*. Namun ia juga memberi catatan agar dalam pelaksanaannya pengembangan proyek ini memberikan nilai tambah lebih terhadap petani rakyat, bukan hanya menguntungkan investor besar yang terlibat di dalamnya. Pada prinsipnya, pembangunan demplot yang diinsiasi oleh Rachmat Gobel di sejumlah daerah, tidaklah berbeda jauh dengan konsep *food estate* yang berskala kecil.

Melalui demplot, Rachmat Gobel mendorong kelompok tani yang terlibat untuk menjalankan usaha agribisnis secara terintegrasi yang didukung oleh berbagai lembaga terkait seperti industri pupuk, perbankan, termasuk Bank Indonesia dan OJK serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain di Gorontalo, telah dilakukan pengembangan demplot atau proyek percontohan pertanian nonsubsidi di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, bahkan akan memasuki masa panen raya. “Kita perlu mendorong optimalisasi pengembangan lumbung pangan (*food estate*) yang salah satu yang potensial adalah di Sumba Tengah ini,” kata Rachmat Gobel.

J. Memperbaiki Grand Design Sektor Perikanan



■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, saat meninjau festival kuliner Ikan Tuna di Gorontalo

Menurut Rachmat Gobel, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia mempunyai potensi perikanan sampai 67 ton per tahun. Namun ini belum tergarap secara optimal dan memberi manfaat seluas-luas bagi perekonomian dan ketahanan pangan nasional, termasuk pada tingkat kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan. Dikatakan, sampai saat ini industri pengolahan ikan masih terpaksa impor untuk memenuhi bahan bakunya. Untuk itu perlu perbaikan grand design kebijakan pengembangan sektor perikanan agar memberikan kontribusi signifikan dan ini mengharuskan pemerintah memperkuat rancangan besar (grand design) pengembangan sektor ini.

Rachmat mengingatkan, potensi produksi lestari dari hasil tangkapan maksimum (Maximum Sustainable Yield/MSY) mencapai 10 juta ton per tahun, di mana potensi tangkap laut sekitar 9 juta ton dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 1 juta ton per tahun. Sisanya, sekitar 57 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik laut (*marineculture*), perairan payau (tambak), maupun perairan tawar (darat).

Dengan potensi tersebut, sektor perikanan harus bisa menjadi salah satu tumpuan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, baik melalui proses peningkatan nilai tambah hasil produksi nelayan maupun lewat penyerapan lapangan kerja. Namun dari pengamatan dan data, sektor ini masih banyak masalah sehingga potensi ekonominya, salah satunya adalah ketidakmampuan melakukan kegiatan perikanan yang lestari.

Kondisi dan peraturan yang ada belum mendorong sepenuhnya pelaku di sektor ini untuk taat asas dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan zonasi tata ruang. Dampaknya, terjadi pencemaran lingkungan di kawasan lindung dan melanggar batasan zona penangkapan ikan.

Hal itu terjadi antara lain karena zonasi pelaku perikanan dan nelayan masih terkonsentrasi khususnya di Jawa. Oleh karena itu, harus ada kebijakan migrasi bagi pelaku sektor perikanan dari zona jenuh ke wilayah yang lebih luas dan besar potensi tangkapnya. Tidak mudah, namun harus dilakukan dengan kebijakan yang taktis dan strategis. Artinya, migrasi dilakukan dengan mengeliminir potensi konflik etnis dan kelompok.

Sebagai gambaran misalnya, memindahkan nelayan dan pelaku industri perikanan di Jawa ke daerah tangkap yang luas dengan potensi ikan yang besar di wilayah Sulawesi, seperti mendorong mereka ke kawasan perairan Majene, Tual, dan Gorontalo, atau ke wilayah Sulawesi lainnya. Dalam melakukan itu, ujar Rachmat Gobel, butuh kesabaran aparat, SDM pendamping, serta pembangunan industri ikutan dan teknologi di wilayah tersebut. Polanya bisa dilakukan dengan langkah pembagian tugas yang tegas, agar nelayan atau pelaku ekonomi maritim tidak kembali lagi ke zona jenuh, karena miskinnya fasilitas pendukung.

Lebih lanjut menurut Rachmat Gobel, perlu juga ditekankan, salah satu kendala pengembangan sektor perikanan adalah lemahnya keberadaan fungsi penyangga baik produksi maupun pemasaran. dengan bekerjasama dengan berbagai stakeholder, pemerintah mempunyai peluang besar untuk memperkuat fungsi penyangga ini. Tidak perlu ada kekhawatiran untuk memperkuat fungsi ini. Intinya, dari sisi hulu pemerintah bisa menyediakan sarana produksi, seperti alat tangkap ramah lingkungan, BBM, dan mesin kapal dengan jumlah yang memadai, serta sesuai karakteristik wilayah. Semua itu harus disediakan dengan pendanaan dari lembaga terkait dengan harga jula yang terjangkau. Di sisi hilir, fungsi penyangga ini harus menjamain pemasaran bagi hasil tangkap nelayan untuk bisa mengembalikan modal dan biaya hidup layak. Fungsi penyangga ini sangat penting agar harga ikan tidak terlalu fluktuatif, yakni disaat paceklik produksi tangkap harga melambung dan saat panen harga hancur. (*)



“Dengan berbagai potensi ekonomi dan keunggulan warisan leluhur, rakyat Gorontalo harus sejahtera. Mengedepankan semangat restorasi, kita harus bertekad membawa Gorontalo dari saat ini menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia, menjadi salah satu daerah termakmur.”

- Rachmat Gobel -

MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN
GORONTALO

BAB

7



Restorasi untuk Visi 2051 bagi Kemakmuran Rakyat Gorontalo

Salah satu konsep pembangunan yang diinisiasi oleh Rachmat Gobel untuk Gorontalo adalah meluncurkan Visi 2051: **Dari Daerah 5 Termiskin Menjadi Daerah 5 Termakmur**. Melibat para akedemisi, tokoh masyarakat adat dan agama serta lembaga swadaya masyarakat, visi ini menjadi dasar berbagai program yang dikembangkan Rachmat Gobel dalam membangun ekonomi kerakyatan di Gorontalo. Visi ini tentu tidak terlepas dari semangat restorasi yang dicanangkan Partai NasDem yang juga telah lama melekat pada dirinya.

“Dengan berbagai potensi ekonomi dan keunggulan budaya warisan leluhur, rakyat Gorontalo harus sejahtera. Mengedepankan semangat restorasi, kita harus bertekad membawa Gorontalo dari saat ini menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia, menjadi salah satu daerah termakmur. Potensi Gorontalo sangat besar,” kata Rachmat Gobel di berbagai kesempatan saat melakukan kunjungan kerja atau reses ke daerah asalnya ini.

Dalam catatan sejarah, sejak abad ke 15 Gorontalo telah menjadi salah satu wilayah termaju di kawasan Sulawesi. Hidup dalam filosofi *adati hula-hula'a to sara'a, sa'a hula-hula'a to kuru'ani* (Adat bersendikan syariat, syariat bersendian Al-Quran), Gorontalo tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tapi juga menjadi pusat pendidikan. Filosofi ini dan tatanan budayanya inilah yang membuat Gorontalo dikenal dengan julukan Serambi Madinah. Masyarakat madani yang hidup dalam perilaku adat istiadat yang bekemajuan dan penuh toleransi.



Letaknya yang strategis dan berbagai kemajuan dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, telah mendorong pemerintahan kolonial Belanda memilih Gorontalo sebagai salah satu pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo, meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol ToliToli dan, Donggala dan Bolaang Mongondow.

Melihat catatan secara tersebut, boleh dikatakan **Visi Dari 5 Daerah Termiskin Menjadi 5 Daerah Termakmur** yang diusung oleh Rachmat Gobel bukanlah suatu hal yang berlebihan ataupun utopis. Posisi yang strategis, lahan yang masih luas, potensi budaya yang kondusif menjadi modal yang kuat bagi masyarakat Gorontalo untuk berkembang pesat. Tinggal bagaimana merancang kebijakan dan program pembangunan yang efektif, inilah yang tengah diupayakan dan digalakkan oleh Rachmat Gobel. Hal ini sesuai dengan potensi yang dimiliki Gorontalo, yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Gorontalo kaya dengan pangan dan rempah-rempah,” kata Rachmat Gobel.

Bersandar pada potensi yang ada, Rachmat Gobel mengatakan, untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan Gorontalo harus fokus pada pemberdayaan sektor agribisnis, UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tiga hal ini yang menjadi agenda utama program kerjanya untuk mendorong pembangunan ekonomi rakyat di Gorontalo.

Sejumlah langkah telah dilakukan. Menggandeng berbagai pihak, Rachmat Gobel berupaya mendorong munculnya sinergi untuk membangun kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Baik melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akedemisi, LSM dan kalangan muda atau milineal.

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Provinsi Gorontalo. Menurut data BPS Gorontalo, dari Rp 43,896 triliun pendapatan domestik bruto (PDRB) pada 2021, sekitar Rp 17,085 triliun (39%) di antaranya berasal dari kontribusi sektor pertanian. Kontribusi terbesar di sektor pertanian ini berasal dari bidang usaha tanaman pangan Rp 8, 996 triliun (53%) dan perikanan Rp 4,177 triliun dari bidang usaha perikanan. Sektor pertanian ini menyerap 173.913 pekerja atau sekitar 30% dari lapangan kerja di Gorontalo.

Untuk mengembangkan pusat inovasi agrobisnis di Gorontalo, Rachmat Gobel dalam beberapa tahun terakhir membangun program demplot atau demonstration plot yang merupakan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani. Demplot ini telah menjadi tempat percontohan paling membanggakan bagi petani Gorontalo. Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan sebagai kebutuhan hidup harus tersedia cukup dan ini bisa terlaksana jika program-program yang disusun efektif bagi rakyat.

Pusat inovasi yang pertama dibangun adalah Demplot PT Rajatani Agro Nusantara dan kini terus berkembang. Dari berbagai demplot komoditas pertanian seperti jagung, cabai, dan tomat dapat menghasilkan panen hingga dua kali lipat. Melalui proyek ini diharapkan petani dan kelompok tani mampu membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan usaha mereka.

■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam acara penanaman padi di Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo



Demplot bertujuan memperlihatkan secara nyata tentang cara dan hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. Melalui demplot, kelompok tani dan anggotanya juga bisa saling membantu untuk membangun sinergi dalam memenuhi kebutuhan produksi maupun dalam memasarkan hasil tani mereka.

Pengembangan demplot juga dimaksudkan untuk membangun semangat kemandirian bagi petani, tidak lagi tergantung pada subsidi. Sesungguhnya, dengan manajemen dan pengelolaan yang baik, mulai dari proses tanam, produksi sampai pemasaran, usaha tani akan memberi keuntungan dan petani akan mandiri. Itulah antara lain kenapa melalui demplot Rachmat Gobel lebih mengedepankan penggunaan pupuk non-subsidi.

“Pengembangan demplot adalah upaya mewujudkan Visi 2051. Ini juga bagian dari implementasi politik pembangunan NasDem sebagai partai yang mengusung semangat restorasi. Melalui politik pembangunan, kader Partai NasDem harus melakukan praktik politik yang memberi manfaat pada masyarakat melalui pembangunan. Visi 2051 Gorontalo adalah poros pada pembangunan melalui sektor pangan dan tanaman herbal. Hal ini sesuai dengan potensi yang dimiliki Gorontalo, yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Gorontalo kaya dengan pangan dan rempah-rempah,” kata Rachmat Gobel.

Lebih lanjut Rachmat Gobel mengatakan, ke depan kelompok pertanian diharapkan bisa mendapatkan pupuk serta keperluan pertanian yang nonsubsidi agar kualitasnya bagus. Selama ini petani hanya mengandalkan pupuk yang subsidi jika ini mengalami keterlambatan maka hasilnya pun akan kurang bagus.

Untuk jangka menengah, pihaknya bersama Kementerian Pertanian sedang membahas pengolahan jagung dan beras. Nanti akan ada mesin pengolahan yang sudah dipersiapkan dari Kementan RI yang akan segera dikirim ke Gorontalo. Prinsipnya, hasil pertanian maksimal 5 jam harus segera dikeringkan. Kalau tidak, kualitas dan harganya jatuh. Karena itulah hasil beras kita kualitasnya selalu medium, tidak pernah naik ke premium.

A. Membangun Melalui Koperasi

Sebagai bagian dari implementasi semangat restorasi, Rachmat Gobel juga berupaya agar pengembangan lembaga koperasi menjadi perhatian semua pihak, baik di pemerintahan, lembaga keuangan dan pelaku ekonomi itu sendiri. Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi seperti diamanatkan oleh founding fathers Indonesia dalam konstitusi UUD 1945. Koperasi memiliki nilai dan prinsip yang sejalan dengan Pancasila.

Dalam semangat restorasi, konsep koperasi yang digagas oleh Rachmat Gobel di Gorontalo tidak hanya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan koperasi hanya sebatas lembaga ekonomi, namun juga sekaligus untuk memperkuat semangat gotong royong yang juga salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia.

Prinsip gotong royong akan memudahkan pelaku ekonomi rakyat (petani, nelayan, UMKM) untuk bersinergi membangun daya saing yang kuat terhadap pelaku ekonomi lainnya. Koperasi juga akan menjadi wadah untuk melakukan transfer berbagai keahlian, pengetahuan dan teknologi, berbagi informasi yang sangat dibutuhkan untuk bisa tampil sebagai petani, nelayan dan pelaku UMKM yang berkualitas dan memiliki daya saing.

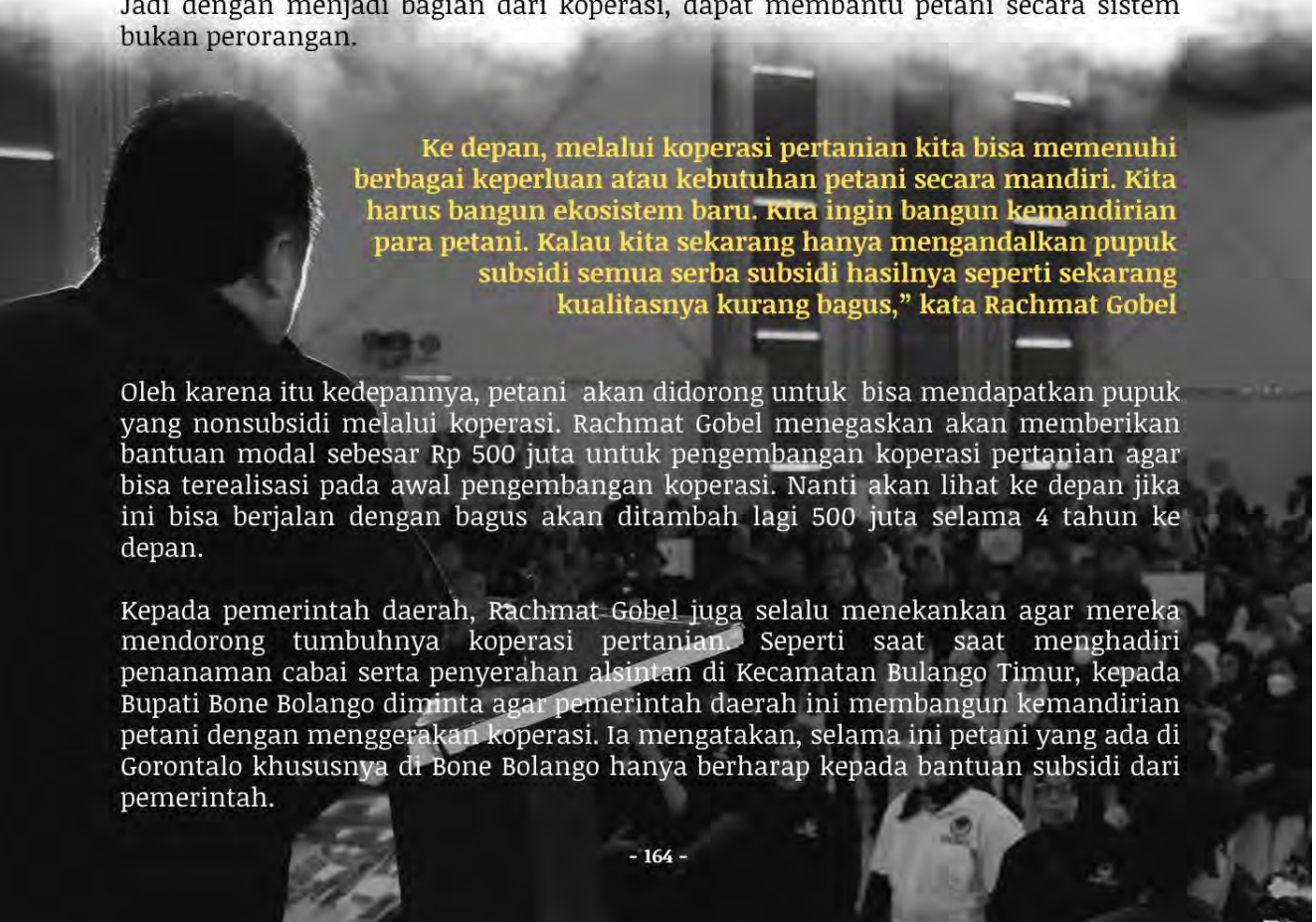
Di Gorontalo, Rachmat Gobel selain turun langsung menginisiasi pembentukan koperasi, Rachmat Gobel juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi dan pengembangan lembaga ini. Kementerian ini sangat mendukung program pengembangan koperasi yang digagas Rachmat Gobel. Selain untuk memperkuat ketahanan pangan, jika dikelola dengan baik, koperasi berpotensi besar untuk menumbuhkan petani dan UMKM menjadi pelaku ekonomi yang berkualitas.

Sejak 2019 lalu Rachmat Gobel telah mendirikan Koperasi Kesejahteraan Rakyat Gorontalo (KKRG). Dalam pendirian koperasi ini, sebagai modal awal, Ia mengeluarkan uang pribadinya sebesar Rp 500 juta. Desember 2019, pengukuhan kepengurusan KKRK dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. KKRK akan membangun jaringan usaha di seluruh daerah tingkat II Gorontalo, dan akan bekerjasama dengan koperasi lain serta petani dan pelaku UMKM.

Rachmat Gobel mendorong para petani Gorontalo bisa bergabung dalam wadah koperasi petani, supaya kehidupan dan kesejahteraannya jadi lebih terjamin. Melalui koperasi, kata Rachmat Gobel, petani akan terbantu menjual hasil pertanian dengan harga menguntungkan. Selain itu, koperasi juga dapat petani dalam memenuhi keperluan pupuk, bibit, termasuk alat dan mesin pertanian yang diperlukan.

Sesungguhnya, menurut Rachmat Gobel, petani adalah pejuang yang mengangkat harkat derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Koperasi yang didirikannya adalah sebagai bentuk perhatian dan pengabdian untuk membantu perjuangan para petani ini, seperti dalam pengadaan pupuk, dan bibit serta menjadi tempat untuk menyimpan hasil pertanian.

Keberadaan koperasi juga dapat membantu petani dan mengatur keuangan. Membantu ketika ada petani membutuhkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jadi dengan menjadi bagian dari koperasi, dapat membantu petani secara sistem bukan perorangan.



Ke depan, melalui koperasi pertanian kita bisa memenuhi berbagai keperluan atau kebutuhan petani secara mandiri. Kita harus bangun ekosistem baru. Kita ingin bangun kemandirian para petani. Kalau kita sekarang hanya mengandalkan pupuk subsidi semua serba subsidi hasilnya seperti sekarang kualitasnya kurang bagus,” kata Rachmat Gobel

Oleh karena itu kedepannya, petani akan didorong untuk bisa mendapatkan pupuk yang nonsubsidi melalui koperasi. Rachmat Gobel menegaskan akan memberikan bantuan modal sebesar Rp 500 juta untuk pengembangan koperasi pertanian agar bisa terealisasi pada awal pengembangan koperasi. Nanti akan lihat ke depan jika ini bisa berjalan dengan bagus akan ditambah lagi 500 juta selama 4 tahun ke depan.

Kepada pemerintah daerah, Rachmat Gobel juga selalu menekankan agar mereka mendorong tumbuhnya koperasi pertanian. Seperti saat saat menghadiri penanaman cabai serta penyerahan alsintan di Kecamatan Bulango Timur, kepada Bupati Bone Bolango diminta agar pemerintah daerah ini membangun kemandirian petani dengan menggerakkan koperasi. Ia mengatakan, selama ini petani yang ada di Gorontalo khususnya di Bone Bolango hanya berharap kepada bantuan subsidi dari pemerintah.

Petani di Gorontalo didorong untuk ikut bergabung dengan wadah koperasi tani demi mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih layak, karena petani lah yang bisa menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dengan menjadi anggota koperasi, pendapatan petani akan lebih bisa terjamin, kalau koperasi ada untung akan dibagi ke para petani. Koperasi juga membantu dalam beberapa hal seperti mengatur finansial dari para petani.

B. Sinergi Dua Lokomotif Baru

Untuk mewujudkan Visi Gorontalo 2051, Rachmat Gobel setidaknya telah menyiapkan dua lokomotif baru yang akan memacu pertumbuhan ekonomi rakyat Gorontalo. Satu adalah merealisasi perluasan dan peningkatan standar pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan internasional, dan satunya lagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Halal. Ia optimistis, dua lokomotif baru mampu bersinergi menggerak pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Ini bukan tanpa alasan, pengembangan Anggrek dan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan.

Seperti diketahui, sejak 2006 pengembangan pelabuhan Anggrek sudah lama masuk dalam wacana pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan. Bahkan pada 2017, sudah dilakukan studi pendahuluan, namun rencana ini tidak kunjung terealisasi. Barulah 2019 proyek ini mendapat titik terang, dengan keluarnya SK Menteri Perhubungan No.263 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo, yang saat ini telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 87 Tahun 2022 guna mendukung upaya percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo.

Diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa Rachmat Gobel sangat berperan dalam upaya mempercepat realisasi proyek ini. Berbagai langkah yang dilakukan Rachmat Gobel sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan proyek ini yang dibiayai dengan pola kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), satu mekanisme pembiayaan kreatif (*creative financing*) yang tengah dikembangkan pemerintah. Sebagai proyek KPBU, pengembangan pelabuhan Anggrek sama sekali tidak dibiayai oleh APBN, tapi murni oleh investor swasta.

“Peran pak Rachmat sangat besar mendukung pengembangan Anggrek ini sehingga bisa terealisasi,” kata Budi Karya saat penandatanganan kerjasama Kementerian Perhubungan dengan konsorsium *PT Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT)*. Terealisasinya proyek ini, tidak terlepas dari atas keberanian dan semangat idealis PT AGIT melakukan investasi di kawasan ini. Karena, seperti diakui Menteri Perhubungan, secara perhitungan bisnis, pengembangan pelabuhan Anggrek belumlah menguntungkan, sehingga kurang menarik bagi investor yang hanya memperhitungkan profit.

Kini, pengembangan tahap I pelabuhan Anggrek tengah berlangsung dan mendapat dukungan dari pinjaman sindikasi sebesar Rp 500 miliar dari Bank BNI dan *PT Indonesia Infrastructure Finance*. Perjanjian pembiayaan ini ditandatangani pada Juli 2022 lalu yang disaksikan langsung oleh Budi Karya Sumadi dan Rachmat Gobel.

Dengan terlaksananya penandatanganan pembiayaan tersebut, maka Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek telah mencapai salah satu milestone pentingnya, yaitu pemenuhan pembiayaan (*financial close*). Pembiayaan untuk tahap pertama pelaksanaan proyek telah tersedia dengan demikian proses pembangunan tahap pertama telah siap untuk segera dimulai. Sedangkan pengembangan tahap kedua direncanakan pada tahun 2031/2032.

“Saya minta agar pihak AGIT sebagai pengelola dapat bersinergi secara nasional dan internasional, terutama dengan Pemerintah Daerah, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Budi.

Mengenai proyek ini, Rachmat Gobel optimis akan memberi dampak positif yang besar bagi pembangunan Gorontalo, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Pasalnya, perencanaan pengembangan pelabuhan ini terintegrasi dengan pengembangan wilayah. AGIT sebagai pengelola telah merencanakan pengembangan wilayah hinterland yang berada disekitar wilayah Gorontalo Utara. Secara geografis, pelabuhan Anggrek juga sangat strategis karena memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong, menjadi pintu Indonesia ke kawasan Pasifik.

Serta tidak kalah penting, bagi investor sendiri, pengembalian dana investasi yang mereka keluarkan tidak bisa hanya tergantung pada efisiensi pengelolaan pelabuhan, tapi juga akan sangat ditentukan bagaimana meningkatkan perekonomian dan arus barang dari dan ke Gorontalo. Ini artinya, AGIT sebagai investor juga sangat berkepentingan untuk mendorong pengembangan kawasan *hinterland*, dan menjadi bagian untuk memperkuat ekosistem perekonomian Gorontalo menjadi destinasi investasi yang menarik.

“Berada di kawasan pengembangan berbagai komoditi pertanian di kawasan *hinterland* dan juga terhubung dan pendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang), ke depan pelabuhan Anggrek akan berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi,” kata Rachmat Gobel.

ENDEAVOR

PHONG

0 9346196

RACHMAT H. RACHMAT GOBEL
WAKIL KEPALA DINAS
PELABUHAN ANGREK


Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat mengunjungi pelabuhan Anggrek Gorontalo.

Selesai pengembangan tahap I, pelabuhan Anggrek nantinya dapat disinggahi kapal peti kemas dengan kapasitas 30.000 DWT (*dead wight ton*) dan kapal general cargo dengan kapasitas 10.000 DWT. Selain terminal bongkar muat barang dan peti kemas, pelabuhan ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas lain seperti peti kemas berpendingin (*reefer container*). Juga akan dilakukan pengembangan layanan terminal barang seperti penumpukan peti kemas, curah kering, barang umum dan general cargo serta peti kemas kosong. Pelabuhan ini dilengkapi dengan layanan konsolidasi dan distribusi barang (CFS), peralatan bongkar muat *Harbour Mobil Crane (HMC)* dan lapangan parkir truk peti kemas dan kargo. Hal yang menarik, AGIT juga mengadopsi konsep green port yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan *sustainable development goals (SDGs)*.

Pengembangan Anggrek membutuhkan areal daratan yang lebih luas, tidak kurang 20,08 Ha dibandingkan sebelumnya hanya 4,40 Ha. Areal perairan yang dibutuhkan mencapai 6.101 Ha, termasuk untuk area penunjang keselamatan pelayaran seluas 5.321,44 Ha.

Tentang rencana kerja sama menjadikan Gorontalo menjadi salah satu pusat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Produk Halal, Rachmat Gobel mengatakan, peluang ini sangat terbuka. Sumber daya alam dan kultur atau budaya masyarakat sangat mendukung. Berbagai peninjauan telah ia lakukan, termasuk membicarakan kerja sama dengan Turki, negara yang telah berhasil menjadikan industri produk halal sebagai basis ekonomi mereka. Turki memberikan respon yang sangat mengembirakan. Ini terbukti telah ditandatangani memorandum of understanding (MoU) antara PT Gobel International (Indonesia) dengan salah satu pemain terbesar industri produk halal Turki yaitu Malino Mechanical Industry Trade Inc. pada awal 2022.

Peninjauan kerja sama juga dilakukan dengan Jepang yang memiliki ekonomi kuat dan teknologi maju. Kawasan KEK Halal akan dilengkapi berbagai sarana untuk mendukung industri pertanian, peternakan, kelautan, hingga industri olahan. Dengan kehadiran kawasan khusus ini, ekspor berbagai komoditi dari Gorontalo tidak lagi dalam bentuk bahan mentah, tapi sudah jadi produk olahan.



Rachmat Gobel optimis, realisasi pengembangan kawasan pelabuhan Anggrek akan memberi dampak sinergi terhadap rencana pengembangan KEK Produk Halal. Keduanya akan menjadi lokomotif baru dengan daya multi effect sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi provinsi ini.

Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar, Indonesia harus lebih fokus untuk membidik pertumbuhan pasar produk halal dunia ini. Menjadikan produk halal sebagai salah satu unggulan, dan Gorontalo menjadi salah satu pusat produksinya. Potensi sumber daya alam cukup tersedia di Gorontalo, seperti komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Budaya atau kultur masyarakat juga sangat kental dengan nilai-nilai Islami.

Ia sangat terkejut oleh kenyataan bahwa produsen produk halal dunia masih dikuasai negara yang penduduk Islam-nya minoritas seperti Brasil, Australia, Prancis, Jerman, dan Selandia Baru. Di sisi lain, potensi pasar produk halal dunia terus berkembang, kini sudah mencapai US\$ 7 triliun dan diproyeksikan naik menjadi US\$ 11 triliun pada 2024.

“Kita perlu melihat apa yang dilakukan Turki. Negara ini mampu membangun industri halal, terutama usaha kecil, dan menengah-nya dengan kemampuan teknologi yang mereka sendiri. Sebagai sesama negara dengan mayoritas Islam, kita perlu belajar dari keberhasilan Turki. Negara ini mampu membangun industri, bukan sekadar membangun pabrik, struktur industri halalnya sangat kuat,” kata Rachmat Gobel.

Sejak masuk beberapa abad lalu, agama Islam berkembang pesat di Gorontalo sehingga sejak ratusan tahun lalu nilai-nilai kehalalan sudah melekat kuat dalam setiap kegiatan hidup masyarakat daerah ini. Praktik halal sudah menyatu pada sebagian besar masyarakat yang mendapat julukan Serambi Madinah ini. Tidak sulit bagi masyarakat Gorontalo menerima standard kehalalan dari setiap proses produksi yang mereka lakukan.

Oleh karena itu, Rachmat Gobel optimis, gagasan menjadikan Gorontalo sebagai pusat kawasan produk halal adalah sesuatu yang realistis, bukan hanya mimpi. “Mari kita semuanya bersinergi untuk membangkitkan semangat membangun warisan yang membanggakan bagi generasi penerus. Inilah misi besar di balik pengembangan pelabuhan Anggrek dan gagasan membangun kawasan produk halal,” katanya.

■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menyampaikan sambutan di acara Festival Produk Halal Milenial



Sebagai upaya memasyarakatkan industri produk halal, bekerjasama dengan Bank Indonesia pada Maret 2022 Rachmat Gobel berinisiatif menggelar festival produk halal di Gorontalo. Bertempat di Lapangan Ippot Tapa, Kabupaten Bone Bolango, festival dengan tajuk “Produk Halal Mellenial 2022” digelar selama tiga hari (26- 28 Maret 2022). Kegiatan itu antara lain, melaksanakan kurasi produk dari 165 UMKM dari enam kabupaten/kota dengan kategori *food, fashion, craft* berbasis '*local economic development*' yang tentunya mendukung unsur layak halal suatu produk. Kegiatan ini juga diisi pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal kepada 100 UMKM binaan maupun mitra agar para UMKM di Gorontalo mampu membuat dan menerapkan sistem jaminan halal (SJH) serta memahami proses sertifikasi halal khusus untuk skala UMKM. Adapun Peserta Festival Produk Halal Milenial 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Produk	Asal
1	IKM Tiga Berlian	Fashion	Kota Gorontalo
2	AJ. Jaya Mandiri	Kerajinan	Kab. Boalemo
3	Oliniyaa Craft	Kerajinan	Kab. Pohuwato
4	UKM Celoteh Sampah	Kerajinan	Kota Gorontalo
5	Kurawo Humairah	Kerajinan	Kota Gorontalo
6	Nantu Snack	Olahan Pangan	Kab. Boalemo
7	Si Ratu Akpel	Olahan Pangan	Kab. Boalemo
8	Gebram Kinamang Gorontalo	Olahan Pangan	Kab. Bone Bolango
9	La Kelor	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
10	Mafahim Gorontalo	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
11	Griya Abon Ikan d'Lira	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
12	Tabongo Center	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
13	Nurfarab	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
14	Karunia Berkah	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
15	Mamaca	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
16	IKM Kopi Otabiu'u	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo Utara
17	Karya Bersama	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo Utara
18	UKM Ridho Cemerlang	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo Utara
19	IKM Bafina	Olahan Pangan	Kab. Pohuwato
20	IKM Tolindi	Olahan Pangan	Kab. Pohuwato
21	Blue Dori	Olahan Pangan	Kota Gorontalo
22	Mutfood	Olahan Pangan	Kota Gorontalo
23	Ukm Hairulnisa	Olahan Pangan	Kota Gorontalo
24	IKM Ghidza Sasuke	Olahan Pangan	Kota Gorontalo
25	Zoellen Sagela	Olahan Pangan	Kota Gorontalo
26	Dafvan Putra Mandiri	Olahan Pangan	Kab. Gorontalo
27	Ameer Esoya	Olahan Pangan	Kota Gorontalo
28	Miss Putungo	Olahan Pangan	Kota Gorontalo



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Kyoshi Kimura dan masyarakat Gorontalo saat acara Festival Kuliner Ikan Tuna

C. Menjadikan Gorontalo Pusat Kuliner Ikan Tuna

Untuk meningkatkan nilai tambah bagi Nelayan, Rachmat Gobel telah menginisiasi untuk menjadikan Gorontalo sebagai pusat kuliner ikan Tuna. Sebagai langkah awal, bekerjasama dengan Bank Indonesia, Ia menggelar Festival Ikan Tuna pada 2-4 September 2022. Melalui festival ini Rachmat Gobel ingin memberikan gambaran kepada masyarakat Gorontalo betapa besar potensi ekonomi ikan tuna, jika mampu mengolahnya secara benar.

Ia menekankan, agar bisa berhasil menjadi pusat kuliner ikan tuna, masyarakat Gorontalo harus mengetahui hal ihwal tentang ikan tuna dan menjadikan sebagai satu budaya. Untuk itu ada beberapa hal yang ditekankan; Pertama, membangun skill memotong ikan tuna sebagai bagian dari budaya orang-orang Gorontalo. Kedua, membangun skill memancing ikan tuna sebagai bagian dari karakter orang Gorontalo. Ketiga, membangun aneka ragam kuliner ikan tuna sebagai keunggulan dari budaya kuliner orang Gorontalo. Keempat, membuat beragam festival yang terkait dengan ikan tuna.

Tidak tanggung-tanggung, untuk memberi inspirasi kepada masyarakat, Rachmat Gobel sengaja mendatangkan Raja Tuna dari Jepang Kyoshi Kimura untuk ikut memeriahkan festival ini. Kimura membawa serta lima chef dan para jagoan pemotongan tuna dari Jepang. Selain mempunyai keahlian tentang seluk beluk tuna, Kimura sempat membuat geger dunia ketika memenangkan lelang blue fin tuna dengan berat 278 kilogram dengan harga fantastis, 333,6 juta yen atau sekitar Rp 45 miliar.

Kimura adalah pemilik jaringan restoran Sushi Zanmai dan perusahaan Kiyomura Corporation. Basis usahanya dimulai di pasar ikan Tsukiji, Tokyo. Ia merupakan sahabat semasa kuliah Rachmat Gobel di Chuo University, Jepang.



Berada di kawasan Teluk Tomini, Gorontalo adalah tempat salah satu habitat terbaik ikan tuna. Meski berbatasan dengan sejumlah daerah lainnya, namun habitat utama tuna berlokasi di kawasan Gorontalo. Nelayan nelayan Gorontalo dikenal memiliki *skill/ keterampilan* yang baik dalam memancing ikan tuna.

Selama ini, ikan tuna merupakan komoditas ekspor unggulan dari Gorontalo. Kontribusi ikan tuna terhadap PDB Gorontalo mencapai 22%. Ekspor ikan tuna terbesar ke Jepang, yaitu 95%, sisanya diekspor ke AS, Australia, Singapura, dan Vietnam. Di Jepang, ikan tuna dijadikan sashimi dan sushi. Ikan di Teluk Tomini dikenal memiliki rasa yang lebih sedap dibandingkan dengan ikan dari perairan lain.





■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menyampaikan sambutannya pada acara Festival Kuliner Ikan Tuna Gorontalo

Bagi Rachmat Gobel, untuk memberi nilai tambah lebih untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat Gorontalo harus bisa menjadikan daerahnya sebagai pusat ikan tuna, mulai dari industri pengolahan sampai sebagai pusat kuliner. “Mulai hari ini, kita harus memancangkan tekad agar dalam beberapa tahun ke depan, kita jadikan Gorontalo sebagai pusat kuliner dan pusat ikan tuna dunia. Hari ini, mulai di sini, kita pasang tiang pancangnya, kita bangun fondasinya,” katanya.

Ada sejumlah alasan mengapa Rachmat Gobel mengadakan festival tersebut. Pertama, sebagai bentuk syukur atas karunia Tuhan Allah Yang Maha Esar bagi masyarakat Gorontalo atas anugerah keberlimpahan ikan tuna. Kedua, sebagai bentuk terima kasih kepada nelayan yang telah memberikan sumbangan ekonomi yang besar melalui ikan tuna kepada Gorontalo. Ketiga, membudayakan kemaritiman ikan tuna di masyarakat Gorontalo.

“Ikan adalah pangan yang tak mengenal sekat dan batas apapun. Suku apapun, bangsa apapun, agama apapun, pasti suka ikan. Ikan adalah pangan yang universal, ini keunggulan ikan,” ujar Rachmat Gobel. (*)

Memotret Pembangunan SDM Gorontalo, Mengejar Keteringgalan Menuju Era Disrupsi Teknologi



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berfoto bersama anak-anak pengunjung Taman Bermain David Bobihoe Akib, Gorontalo

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

Berita Resmi Statistik No. 61/12/Th. XVI, 1 Desember 2022



Usia Harapan Hidup
Tahun 2022
68,51 tahun

IPM 69,81
TAHUN 2022

8,02 tahun
Masa Sekolah
13-15 tahun

Sesuai dengan KBLB
dan Taklif yang Disesuaikan
Rp10.157.000,00

PERTUMBUHAN
IPM 2022
▲ 1,17%



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Kategori IPM
● Sangat Tinggi
● Tinggi
● Sedang
● Rendah

BADAN PENGURUS STATISTIK
PROVINSI GORONTALO
#BPSGORONTALO @bps.gorontalo.go.id

Kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Gorontalo masih jauh dari memuaskan, sejumlah indikator menunjukkan hal itu. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misalnya, meski mengalami perkembangan positif, namun masih jauh di bawah rata-rata nasional. IPM Gorontalo pada 2022 baru mencapai 69,81 atau masih jauh di bawah rata-rata nasional 72,91 sehingga menempati posisi 8 terendah dari 34 provinsi di Indonesia (BPS, 2022).

Rendahnya IPM itu antara lain terkait angka rata-rata lama sekolah penduduk Gorontalo yang baru mencapai 8,02 tahun dibandingkan rata-rata nasional 8,69 tahun. Hal tersebut sejalan dengan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Gorontalo yang juga masih rendah terutama pendidikan menengah ke atas atau kelompok umur 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-23 tahun.

APS untuk kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) hanya mencapai 92,0% yang artinya sekitar 8% penduduk Gorontalo yang masuk usia ini sudah tidak lagi bersekolah. Angka ini semakin memprihatinkan pada kelompok usia 16-18 tahun dan 19-23 tahun. APS untuk masing-masing kelompok ini adalah 71,30% dan 34,68%.

Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap kualitas ketersediaan angkatan kerja di Gorontalo. Menurut data Gorontalo Dalam Angka yang dipublikasi BPS, dari sekitar 579.009 lapangan kerja yang diisi pekerja yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 50,04% atau 289.734 di antaranya berpendidikan SD ke bawah atau jauh di atas rata-rata nasional 37,9%. Lainnya diisi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SMP 11,55% , SMA/SMK 24,00% dan Perguruan Tinggi 14,41%.

Berbagai kondisi tersebut tentu sangat tidak menunjang bagi terwujudnya Visi Gorontalo 2051 yaitu menjadi salah satu provinsi termakmur di Indonesia. Apalagi tantangan ke depan semakin berat di era industri 4.0 dan era *society 5.0* seperti sekarang ini. Ke depan, kehidupan masyarakat dunia akan semakin dinamis seperti yang ditandai terjadi disrupsi teknologi di berbagai sendi kehidupan.

Dunia tengah bergerak ke era digitalisasi, SDM Gorontalo harus memiliki kapasitas menghadapi semua tantangan itu. Harus berbenah, beradaptasi dengan perkembangan dengan berbagai perkembangan disrupsi teknologi.

“Kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo harus segera diperbaiki. SDM Gorontalo hanya bisa bersaing dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Itulah kenapa saya mengajak tokoh pendidikan dan tokoh agama untuk saling bersinergi dalam hal ini,” kata Rachmat Gobel.

Berbagai langkah telah dilakukan Rachmat Gobel untuk membangun SDM berkualitas di Gorontalo, baik melalui jalur informal maupun lewat sektor pendidikan atau formal.

Pendidikan Penduduk Gorontalo Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja		
SD	289.734	50,04%
SMP	66.900	11,55%
SMA/SMK	138.961	24,00%
Perguruan Tinggi	83.414	14,41%
Jumlah	579.009	100,00%

(BPS, 2021)

Untuk meningkatkan akses masyarakat ke dunia pendidikan misalnya, Ia telah mengupayakan berbagai bantuan pemerintah pusat untuk Gorontalo, seperti pembangunan asrama pondok pesantren, bantuan bus sekolah. Ia juga tengah memperjuangkan agar alokasi bea siswa dari Kemendikbud Ristek ke Gorontalo bisa lebih besar dibandingkan saat ini sekitar 1.800 siswa.

Untuk mengejar ketertinggalan, kata Rachmat Gobel, Gorontalo harus mempunyai *roadmap* pembangunan SDM dan pendidikan. Mengevaluasi apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh sekolah dan perguruan tinggi. Dari mulai peserta didik maupun guru-guru dan dosennya harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya agar menghasilkan SDM yang berkualitas.



Ia berharap dengan roadmap tersebut, Gorontalo bisa merancang berbagai program untuk mengejar ketertinggalan. Membuat satu visi ke depan dengan menjabarkan pembangunan SDM. Menyiapkan generasi muda Gorontalo untuk bisa menjadi calon-calon pemimpin masa depan.

“Ada korelasi antara kualitas SDM dengan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Gorontalo lebih banyak dinikmati SDM dari luar dari Gorontalo. Kalau kita tidak bangun SDM serta keahliannya, saya khawatir, bukan hanya akan kedatangan pekerja dari daerah lain saja, tapi juga pekerja asing mungkin akan masuk. Di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara kita ketahui bersama juga sudah masuk (pekerja asing),” kata melanjutkan.

Dalam kaitan itu, sebagai bentuk tanggung jawab Rachmat Gobel pada masyarakat Gorontalo, Ia berinisiatif untuk mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk memotret berbagai masalah yang terkait pembangunan SDM dari sudut pendidikan. FGD ini melibatkan Badan Keahlian DPR RI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Gorontalo, Universitas Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, MUI Gorontalo, Tokoh Pendidikan Gorontalo. Tema yang diangkat adalah “Pembangunan Sektor Pendidikan di Provinsi Gorontalo” dan berlangsung pada 23 November 2022, di Universitas Gorontalo.

“Harapan saya, hasil FGD ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan masalah pendidikan di Gorontalo,” ujar Rahmat Gobel.

FGD itu menghadirkan pembicara Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo Prof.Dr.Syamsul Qomar Badu, Rektor Universitas Gorontalo Dr. Sofyan Abdullah SP, MP, Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo, Dewan Pakar Majelis Ulama (MUI) Gorontalo KH. Drs Rasyid Camaru dan Pemerhati Pendidikan Gorontalo Alim Niode.



Wakil Ketua DPR/Korinbang RI Rahmat Gobel diwakili oleh Staf Khususnya Dra. Hj. Nining Indra Saleh menerima aspirasi dan rekomendasi dari APTISI Gorontalo terkait kebutuhan pengembangan SDM Gorontalo

FGD ini merupakan tindak lanjut pertemuan Rachmat Gobel dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Gorontalo di ruang kerjanya di Gedung DPR RI pada Kamis 28 September 2022. Saat itu, APTISI menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo tersebut. Gorontalo harus menjadi lumbung pangan dan dunia pendidikan harus maju sejalan dengan kondisi di wilayahnya serta rencana pengembangannya.

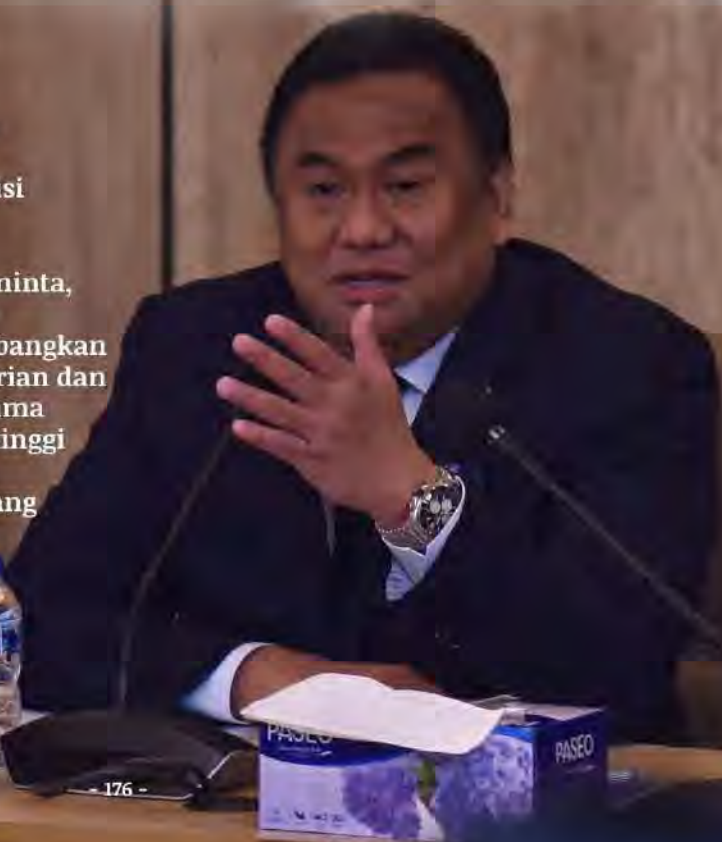
Hadir pada pertemuan ini adalah Prof. Syamsu Qamar Badu (mantan rektor Universitas Negeri Gorontalo) dari Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) Gorontalo dan Elnino M. Husein Mohi, anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang juga dari Gorontalo, Rektor Universitas Gorontalo Sofyan Abdullah, Rektor Universitas Bina Mandiri Titin Dunggio, Rektor Universitas Bina Taruna Ellys Rachman, Ketua Stikes Baktara Hartati Inaku, Wakil Rektor Universitas Gorontalo Dikson Yunus, Wakil Rektor Universitas Pohuwato Haris Hasan, Ketua Dewas Universitas Gorontalo Robby Hunawa, Ketua Yayasan Bina Taruna Sri N. Rachman, dan Ibrahim Ahmad dari Aptisi Gorontalo.

Menurut Ketua APTISI Gorontalo Azis Rachman mengatakan dalam pertemuan itu disampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi swasta di Gorontalo, diantaranya kebutuhan tempat magang mahasiswa. Selain itu, sekitar 40% mahasiswa di Gorontalo terhambat pada biaya pendidikan. Juga disampaikan, pendidikan tinggi di Gorontalo membutuhkan laboratorium kesehatan untuk pendidikan mahasiswa kesehatan dan pentingnya Gorontalo sebagai destinasi wisata.



Menanggapi ini, Rachmat Gobel mengatakan, akan menyampaikan aspirasi ini ke komisi terkait di DPR RI.

Namun ia juga meminta, perguruan tinggi di Gorontalo mengembangkan semangat kemandirian dan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar yang lebih maju seperti di Jepang dan Turki.

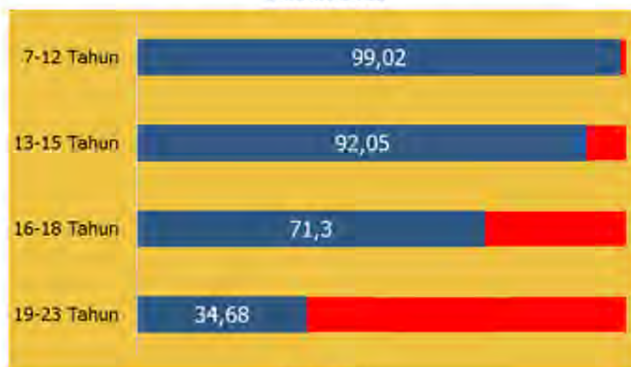


A. Statistik dan Potret Pendidikan Menengah

Dalam FGD yang digelar di Universitas Gorontalo terungkap bahwa, dari sisi sumber daya manusia, angkatan kerja di Gorontalo didominasi oleh lulusan sekolah dasar ke bawah. Profil tenaga kerja seperti ini paling banyak terserap di sektor non produktif. Mereka sulit bekerja di sektor sekunder dan tersier yang membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi.

Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih tinggi dan diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penutupan sekolah untuk meminimalisir paparan penyebaran virus. Menurut data Dinas Pendidikan Gorontalo, dari total 50.831 murid SMA/ SMK/SLB di Gorontalo, tercatat 500 orang di antaranya memilih tidak lagi melanjutkan sekolah (dpr.go.id, 2021). Angka ini menjadikan Gorontalo menjadi provinsi dengan angka anak putus sekolah paling tinggi. Faktor penyebabnya antara lain adalah masalah ekonomi, broken home, meninggal, sakit, hingga ada yang memilih menikah daripada sekolah (newsnesia.id, 2021).

Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Gorontalo
Tahun 2021



(BPS, 2021)

Kepala Dinas Pendidikan Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, M.T yang tampil sebagai salah satu narasumber dalam FGD tersebut mengatakan, pada intinya, penyelenggaraan pendidikan adalah masalah bersama dan harus didiskusikan secara bersama-sama, dikaji secara mendalam dengan melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan.

Untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di provinsi Gorontalo.

Saat ini, kewenangan dalam pengurusan pendidikan dibagi dalam dua kelompok.. Untuk tingkat pendidikan menengah (SMA, SMK, dan SLB) dikelola oleh Provinsi, sedangkan pendidikan PAUD, SD, dan SMP berada di bawah Pemerintah Kabupaten/kota. Kurikulum merdeka belajar merupakan kebijakan saat ini yang harus dilaksanakan. Untuk menunjang pelaksanaannya, Pemerintah Pusat mempersiapkan Sekolah Penggerak (SP) yang saat ini sudah mulai dicoba untuk dilakukan intervensi. Pendekatan SP tujuannya untuk pembentukan karakter siswa yang memiliki kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Di Provinsi Gorontalo SP di jajaran SMA-SMA terdiri dari 11 Sekolah Penggerak, dan di SMK terdapat sekitar 9 Sekolah Pusat Keunggulan (SPK).

Rata-rata lama sekolah di Gorontalo sampai akhir tahun 2021 sudah mencapai kondisi yang diinginkan yang ditargetkan RPJMD Provinsi Gorontalo, yaitu 7,9%. Persentase APK untuk sekolah menengah 96,50 sedikit melampaui target tersebut yaitu 98,86. Terkait dengan APM SM, saat ini masih menjadi permasalahan. Anak usia sekolah untuk SLB dari 0 sampai dengan 18 tahun, dan anak usia sekolah di SMA dan SMK adalah 16–18 tahun, inilah yang menjadi perhatian.

Capaian Kinerja Bidang Pendidikan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo										
Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Realisasi Kinerja Sasaran				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	
Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,35	7,50	7,70	7,90	7,46	7,69	7,82	7,90	7,90
Presentase APK SM	93,83	94,50	94,43	95,88	96,50	98,14	98,27	98,87	98,86	96,50
Presentase APM SM	76,50	76,88	77,35	77,63	78	78,71	78,75	77,30	77,75	78,0

(Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2022)

Rekapitulasi jumlah sekolah yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo terdiri dari 109 sekolah negeri dan 27 sekolah swasta. Dengan demikian, terdapat 136 sekolah SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Gorontalo di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Jumlah sekolah umum 70 sekolah, pendidikan kejuruan 58 sekolah, dan 8 sekolah khusus (SLB) per kabupaten kota

Jumlah Satuan Pendidikan tingkat Menengah di Provinsi Gorontalo						
No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Eksistensi Satuan Pendidikan			Kecamatan yang Belum Terdapat Satuan Pendidikan
			SMA	SMK	SLB	
1	Kota Gorontalo	9	9	9	1	Dumbo Raya dan Hulonthalangi
2	Kab. Gorontalo	19	19	14	1	Tabongo dan Telaga Jaya
3	Kab. Boalemo	7	12	10	2	-
4	Kab. Pohuwato	13	12	8	1	-
5	Kab. Bone Bolango	17	9	7	2	Bulango Timur, Bulawa, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, dan Tilongkabila
6	Kab. Gorontalo Utara	11	11	10	1	Monano

(Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2022)

Secara umum, sebaran sekolah di provinsi Gorontalo sudah cukup memadai. Hanya beberapa kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah. Satuan pendidikan yang ada saat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa mengakomodir siswa yang berada pada usia sekolah menengah. Memang masih terdapat banyak usulan untuk membangun sekolah dengan alasan tertentu, namun bukan hanya menambah jumlah sekolah yang perlu dilakukan, melainkan perlu juga diperhatikan bahwa beberapa sekolah—baik negeri maupun swasta—terancam tutup karena tidak memiliki siswa. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa penambahan sekolah benar-benar sesuai kebutuhan.

SMA 1 dan SMA 3 di Kota Gorontalo selalu menjadi rebutan siswa baru dari seluruh kabupaten, bahkan dari Kota Gorontalo. Sebenarnya kualifikasi SMA 1 dan SMA 3 saat ini setara dengan SMA yang lain di Provinsi Gorontalo, terutama di Kota Gorontalo. Hanya saja, karena semua orang ingin masuk ke SMA 1 dan SMA 3. Mereka yang masuk adalah yang memiliki kualifikasi bagus, dari 30% kuota jalur prestasi akademik semua terpenuhi. Bisa disimpulkan, 30% siswa di SMA 3 memiliki kompetensi akademik yang bagus sehingga sekolahnya bagus.

Untuk menunjang program penerimaan murid baru, sejak 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo telah menerapkan sistem *online* dengan menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Sistem ini dibuat dengan memberdayakan potensi SDM *programmer* yang ada.

Namun dalam penerapannya masih ada sejumlah masalah, diperlukan ketegasan dan konsistensi semua pihak untuk mengatasi persoalan terkait PPDB ini. Walaupun akan menemukan benturan yang cukup keras, semua pihak diminta untuk menjalankan dengan taat kriteria yang sudah ditentukan. Penggunaan aplikasi PPDB *online* tujuannya adalah untuk transparansi dan *realtime*.

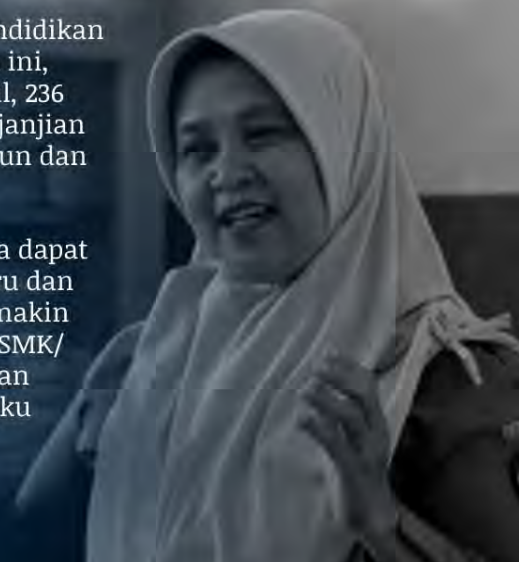
Manfaat penerapan sistem PPDB *online* mulai dirasakan oleh masyarakat. Sebagai diketahui, sebelumnya diterapkan PPDB *online*, SMA N 1 dan SMA N 3 Kota Gorontalo selalu penuh dengan siswa baru. Sekarang, SMA N 2 dan SMA N 4 sudah mulai penuh, sekolah-sekolah yang lain sudah mulai terisi, artinya ada kemajuan sekolah dan pemahaman masyarakat terhadap PPDB tersebut.

Saat ini yang menjadi permasalahan adalah di wilayah bagian Kota Gorontalo yaitu di Talumolo dan Pohe, terdapat beberapa siswa yang sulit terakomodir di SMA Negeri 1. Untuk itu Dinas Pendidikan Gorontalo membuka SMA Negeri 8 untuk menampung siswa yang tidak terakomodir ini dan beban penerimaan murid baru di SMA N 1 bisa dikurangi. Dalam hal ini, telah ditandatangani MoU dengan Walikota Gorontalo untuk menghibahkan salah satu eks sekolah yang ada di wilayah Talumolo, di wilayah Leato Selatan, untuk digunakan menjadi SMA 8 Gorontalo.

B. Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mencapai 4.176 orang. Dari jumlah ini, 2.335 orang diantaranya berstatus pegawai negeri sipil, 236 orang dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) dengan kontrak kurang lebih selama 5 tahun dan 1.515 dengan status Guru Tidak Tetap (GTT).

Perbandingan antara jumlah guru, sekolah, dan siswa dapat dikatakan cukup seimbang, hanya saja pemetaan guru dan tenaga kependidikan tidak begitu merata. Apabila semakin banyak yang mutasi, maka bisa dipastikan beberapa SMK/SMA akan tutup, hal ini bukan masalah sederhana, dan harus menjadi perhatian serius oleh seluruh pemangku kepentingan.



Bahkan, salah satu SMA di Tamalate, hanya kepala sekolah yang ASN, di SMA 3 Belastari hanya 1 kepala sekolah ditambah 1 orang ASN. Pemerataan keadilan harus diwujudkan di Provinsi Gorontalo. Apabila situasinya tidak ditangani, akan lahir masalah-masalah baru kemudian. Sebagai upayaantisipasi masalah tersebut, Dinas Pendidikan Gorontalo telah membuat aplikasi elektronik GTK, manfaatnya untuk melihat posisi di SMA tersebut berapa jumlah guru mata pelajarannya, berapa yang kosong, dan berapa yang terisi, serta berapa yang berlebih.

Masalah lain, masih ada 535 guru belum lulus Program Pendidikan Guru (PPG). Untuk meminimalisir kondisi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo telah bekerja sama dengan perguruan tinggi agar guru-guru tersebut bisa lulus PPG . Ini penting karena merupakan persyaratan untuk menerima tunjangan profesi guru (TPG) atau sertifikasi. Dinas Pendidikan juga mengadakan konsultasi di 3 kabupaten/kota untuk menuntaskan jumlah guru lulus PPG.

Ditemukan juga guru-guru yang belum S-1, sehingga di dorong melalui beasiswa yang ada untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Harapannya ini dapat mendongkrak dan mengatasi kekurangan kualifikasi SDM yang ada di Provinsi Gorontalo.

Jumlah Guru SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Gorontalo per Kabupaten/Kota						
Kabupaten/ Kota	Jumlah Guru			Penerima Tunjangan		
	PNS	PPPK	GTT	TPG	TAMSIL	TKG
Kota Gorontalo	598	47	249	430	105	-
Kab. Gorontalo	595	94	398	435	123	-
Kab. Boalemo	355	59	248	198	105	5
Kab. Pohuwato	270	43	211	168	93	-
Kab. Bone Bolango	330	44	191	224	60	-
Kab. Gorontalo Utara	187	39	218	147	49	-
Total	2.335	326	1.515	1.602	535	5

(Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2022)

Dalam hal peningkatan kompetensi Guru/Tenaga Pendidik, Dinas Pendidikan Gorontalo telah membuat program Guru Penggerak (GP), dimana jumlah kini sudah mencapai 94 orang dan tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Tiga 3 orang dari GP tersebut telah diangkat menjadi kepala sekolah, ini merupakan langkah yang sangat positif. Program GP merupakan salah satu program kementerian yang berpadu dengan daerah. Jumlah sekolah dengan kualifikasi sebagai Sekolah Penggerak (SP) di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 14 sekolah. Pada angkatan pertama terdapat di 3 sekolah, diantaranya SMA 3, SMA 2, dan SMA Muhammadiyah Kota Gorontalo, kemudian angkatan kedua ada 5 SP; dan angkatan ketiga 6 SP. Harapannya SP bisa memediasi dan menggerakkan beberapa sekolah yang lain termasuk membantu implementasi kurikulum merdeka mandiri yang ada di beberapa sekolah lainnya.

Formasi guru di Gorontalo masih terbuka luas. Untuk Guru PPPK misalnya, pada 2022 terdapat 1.657 formasi yang berasal dari 604 sisa formasi 2021 dan 1.053 dari formasi 2022. Pada tahun 2021 Guru PPPK terdapat 947 formasi, namun terisi hanya sekitar 326. Peran PGRI dan persatuan guru yang memberikan coaching clinic, pada tahun 2022, sisa formasi di tahun 2021 harus diisi dengan kategori P1 yaitu (102), kategori P2 (2), dan kategori P3 (500). Formasi di tahun 2022 terdapat 1.053.

Harapannya, kedepannya semakin banyak guru yang bisa masuk ke kategori guru PPPK. Namun juga ada masalah, diantara mereka yang lulus diterima menjadi guru PPPK, belum satu bulan ditempatkan sudah banyak yang membuat permohonan untuk mutasi. Padahal, guru PPPK ini merupakan guru yang sudah dikontrak 5 tahun sesuai dengan formasinya.

Formasi Guru PPPK di Provinsi Gorontalo						
Tahun 2021		Tahun 2022				
Formasi	Lulus dan Menerima SK	Sisa Formasi 2021			Formasi 2022	Total Formasi 2021-2022
		P1	P2	P3		
947	326	102	2	500	1.053	1.657

(Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, 2022)

Dalam hal literasi dan numerasi, serta karakter, dari hasil asesmen tahun 2021 dan 2022, angka literasi Provinsi Gorontalo adalah 1,6, di bawah angka literasi nasional 1,67. Numerasi juga demikian, masih di bawah angka rata-rata nasional. Maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan guru untuk bisa mentransfer ilmu, membuat anak-anak menyukai bahan bacaan, untuk memahami bacaan, dan mengintepretasinya.

Anggaran Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Gorontalo memang cukup besar, namun sebagian besar untuk infrastruktur. Harapannya, anggaran DAK ini juga dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana, terutama untuk vokasi. Untuk SMK, peralatan-peralatan yang dibutuhkan sebaiknya dibeli oleh SMK itu sendiri. SMK di Gorontalo tidak bisa disamakan dengan SMK di pulau Jawa atau daerah lainnya di Indonesia. Setiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda. Bagi daerah seperti Gorontalo yang belum memiliki perusahaan-perusahaan besar, maka program vokasinya harus berbasis komoditi lokal. Semestinya anak-anak bukan hanya dididik untuk masuk ke industri, tetapi juga dididik untuk bisa berwirausaha, mulai membuka usaha-usaha home industry dan usaha kelas rumah tangga. Anggaran untuk infrastruktur memang penting, tetapi saat ini bangunan sekolah rata-rata sudah lebih baik. Sebaiknya anggaran terkait pengembangan peningkatan kompetensi guru harus lebih ditambahkan, sebab APBD Provinsi Gorontalo hanya lebih fokus untuk bisa membayar gaji guru dan habis untuk membayar gaji guru, tunjangan guru, dan lain sebagainya.

Provinsi Gorontalo sangat membutuhkan anggaran dari pusat untuk peningkatan kompetensi guru, sebagaimana disampaikan Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP., M.T, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada saat menjadi narasumber pada FGD Pendidikan Gorontalo yang dilaksanakan Badan Keahlian DPR RI.

C. Potret Perguruan Tinggi

Disamping 3 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Gorontalo, IAIN Sultan Amai dan Politeknik Kesehatan Gorontalo (Polkesgo), saat ini terdapat 11 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Gorontalo yang tergabung dalam APTISI. Terdiri dari 7 Universitas, 3 Sekolah Tinggi dan 1 Politeknik, dan 87 Program Studi dengan jumlah mahasiswa sekitar 19.000 orang, di mana mahasiswa asal Gorontalo 15.242 orang dan mahasiswa luar Gorontalo 3.758 orang.

Sebaran mahasiswa perguruan tinggi swasta di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah sebagai berikut: Kota Gorontalo terdapat 34,7%; Kabupaten Gorontalo 32,9%; Kabupaten Bone Bolango 9,0%), Kabupaten Boalemo 5,8%; Kabupaten Gorontalo Utara 14,9%; dan Kabupaten Pohuwato terdapat 2,7%. Sementara itu, sebaran PTS di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: Kota Gorontalo terdapat 5 PTS; Kabupaten Gorontalo 2 PTS; Kabupaten Bone Bolango 2 PTS; Kabupaten Boalemo tidak memiliki PTS; Kabupaten Gorontalo Utara 1 PTS; dan Kabupaten Pahuwato terdapat 1 PTS.

NO	NAMA PTS / YAYASAN	Alamat
A		
1	Universitas Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
2	Universitas Ihsan Gorontalo	Kota Gorontalo
3	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
4	Universitas Nahdatul Ulama Gorontalo	Kota Gorontalo
5	Universitas Pohuwato	Kabupaten Pohuwato
6	Universitas Bina Mandiri Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango
7	Universitas Bina Taruna Gorontalo	Kota Gorontalo
8	STMIK Ihsan Gorontalo	Kota Gorontalo
9	STIKES Bakti Nusantara Gorontalo	Kota Gorontalo
10	STIH Ihsan Gorontalo Utara	Kab. Gorontalo Utara
11	Politeknik Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango
B	BADAN PENYELENGGARA YAYASAN	
12	Yayasan Pendidikan Duluo Limo Lopohaiia (YP-DLP) Gorontalo	
13	Yayasan Pengemb. Ilmu Pengetahuan & Teknologi (YPIPT) Ihsan Gorontalo	
14	BPH Perserikatan Muhammadiyah Provinsi Gorontalo	
15	Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG)	
16	Yayasan Bina Taruna Gorontalo (YBT)	
17	Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo (Yayasan BAKTARA)	
18	Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPSDM) Gorontalo	
19	Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama Provinsi Gorontalo	

(APTISI Gorontalo, 2022)

Sama seperti provinsi lainnya, tantangan terbesar Gorontalo adalah menyiapkan SDM berkualitas menghadapi Industry 4.0 dan Society 5.0 pada era disrupsi teknologi, dimana tenaga manusia akan digantikan oleh alat/mesin-mesin. International Labour Organization (ILO) memprediksi, sekitar 75-375 juta tenaga profesional global akan beralih profesi. Sebanyak 18 juta pekerjaan akan digantikan oleh *artificial intelligence*.

Oleh karena itu Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital (Parray, ILO, 2017). Pekerja saat ini diharapkan memiliki *21st century skills* yaitu: (1) Cara berpikir, yaitu kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan pembelajaran; (2) Cara Bekerja, membutuhkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi; (3) Sarana Bekerja, yaitu literasi informasi/data literasi TIK; (4) Cara hidup di dunia, yaitu kewarganegaraan, kehidupan dan karir, tanggung jawab pribadi dan sosial, (Sumber: Assessment and Teaching of 21st Century Skills, ATC21S, 2018).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Gorontalo masih harus mengejar ketertinggalannya, ini tergambar dari angka APK perguruan tinggi yang masih rendah yaitu 34,68%. “Angka ini memprihatinkan karena hanya sekitar 30% diantara kelompok usia perguruan tinggi yang bisa melanjutkan pendidikan. Bisa dibayangkan, bagaimana Gorontalo menghadapi era industry 4.0 dan society 5.0 yang mensyaratkan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Dr. Sofyan Abdullah, SP, MP, Rektor Universitas Gorontalo yang menjadi salah satu narasumber pada FGD.

“Ke depan, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi holistik dan lintas disipliner. Seperti contoh insinyur ilmu dasarnya adalah teknik, sebaiknya memiliki tambahan pengetahuan di bidang ilmu desain. Pengacara ilmu dasarnya adalah hukum, sebaiknya memiliki kemampuan di bidang komunikasi. Sutradara film ilmu dasarnya adalah perfilman, sebaiknya memiliki kemampuan tambahan di bidang pemasaran”.

Perguruan Tinggi dihadapkan pada tantangan untuk melahirkan SDM berkualitas di masa depan, menghasilkan lulusan yang dapat diterima dunia kerja. Tantangan ini dapat dilihat pada masih banyaknya angkatan kerja yang belum tertampung dalam dunia kerja.



Isu-isu strategis PTS di Gorontalo mencakup visi, strategi, organisasi, pemasaran, dan pengembangan. Sementara itu, tantangan PTS di Gorontalo mencakup rekognisi akademik, SDM, rekognisi kerja sama, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI), dan pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Sebagaimana diketahui, Kemendikbud Ristek telah meluncurkan program Merdeka Belajar episode keenam tentang pendanaan untuk Perguruan Tinggi. Ada tiga terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, salah satunya adalah 8 indikator kinerja utama untuk penetapan penyaluran bantuan dana, yaitu: (1) lulusan mendapat pekerjaan yang layak; (2) mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus; (3) dosen berkegiatan di luar kampus; (4) praktisi mengajar di dalam

kampus; (5) hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat; (6) program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia; (7) kelas yang kolaboratif dan partisipatif; (8) program studi berstandar internasional.

Dalam paparannya, Dr. Sofyan Abdullah menyebutkan, strategi membangun pendidikan di Gorontalo membutuhkan; (1) peningkatan kerja sama nasional dan internasional maupun profesi keilmuan; (2) penguatan sistem penjaminan mutu internal dalam menjamin sistem penjaminan mutu eksternal baik nasional maupun internasional; (3) *supporting system* badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi serta lembaga layanan pendidikan tinggi; (4) rekognisi sumber daya manusia dari segi jenjang, kualifikasi keilmuan, *homebase* dan profesi keilmuan; (5) keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

Potret Permasalahan PTS

Salah satu masalah yang dihadapi PTS Gorontalo saat ini adalah mahalnya biaya pendaftaran akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAMPT). Untuk setiap program studi PTS harus mengeluarkan biaya Rp 50 juta-Rp 73 juta yang wajib dibayar saat registrasi awal. Kondisi ini sangat memberatkan karena PTS yang harus juga menyiapkan biaya tambahan sebagai operasional proses akreditasi sebesar Rp 25 juta per program studi. Disisi lain masih sangat banyak PTS yang membutuhkan anggaran operasional untuk mengembangkan sarana dan prasarana serta kebutuhan biaya operasional lain-nya.

Harapannya, biaya pendaftaran akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) harus ditanggung negara, sama seperti kebijakan akreditasi sebelumnya yaitu oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Atau cara lain adalah pemerintah memberikan bantuan biaya akreditasi prodi kepada PTS melalui LAMPT saat pengajuan akreditasi prodi oleh PTS melalui LAM-PT tanpa syarat selektif atau melalui hibah. Jika ini tidak memungkinkan, seluruh proses akreditasi program studi dikembalikan kepada BANPT dengan biaya negara dan LAMPT dibubarkan.



Kebijakan Pemerintah Pusat (Kemdikbud Ristek) yang melakukan “moratorium” pembukaan program studi, sangat memberatkan PTS karena tidak didasarkan melalui kajian peta kebutuhan program studi setiap wilayah LLDIKTI. Harapannya, sudah saatnya pemerintah memberikan kesempatan dan kebijakan seperti dalam bentuk diskresi kepada PTS dengan membuka kembali “moratorium”. Ini terutama untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang sangat membutuhkan program studi terkait bahkan tidak memiliki bidang ilmu tertentu. Dengan demikian diharapkan LLDIKTI Wilayah memiliki kajian tentang daftar program studi yang belum tersedia dan dibutuhkan oleh daerah sesuai wilayahnya.

Kebijakan perpanjangan proses akreditasi program studi masih membutuhkan penataan ulang. Hal ini dapat diatasi, dimana untuk program studi yang telah terakreditasi di atas lima tahun, sebaiknya diberikan kebijakan perpanjangan otomatis berbasis PDDIKTI, tanpa harus membebani dengan syarat dokumen tambahan. Ini untuk menghindari ketua program studi hanya menghabiskan waktu untuk membuat dokumen tambahan.

PTS dan Yayasan saat ini masih menjadi “objek pajak” yang sangat membebani Yayasan dan PTS masih disetarakan dengan kategori “perusahaan bisnis/persero”

sehingga masih menunjukkan dikotomi antara PTS dengan PTN. Sebaiknya PTS/Yayasan dalam penyelenggaraan yayasan Pendidikan yang berdasarkan UU Yayasan adalah organisasi nirlaba sehingga dibebaskan dari berbagai jenis pajak (IMB, PBB, PAJAK PLN, BPHTB BPN, dll). Pajak ini sangat memberatkan operasional PTS/Yayasan dalam upaya berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.



Untuk alokasi kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, PTS saat ini masih membutuhkan penataan distribusi.

Distribusinya berdasarkan rasio mahasiswa antara PTN dan PTS, sehingga kuota KIP lebih banyak terdistribusi ke mahasiswa PTN (SMPTN/SBMPTN) dan pada PT tertentu. PTS hanya menunggu distribusi dari alokasi yang kurang dimanfaatkan oleh PTN, padahal mahasiswa baru PTS sangat bergantung pada beasiswa KIP untuk melanjutkan pendidikan.

PTN sebaiknya naik level dan berorientasi ke program *Internasional Class University* dengan memperbesar target jumlah mahasiswa baru asing untuk seluruh program studi. PTN sebaiknya fokus pengembangan jumlah mahasiswa strata S2 dan S3, bukan memperbesar jumlah mahasiswa S1. Seharusnya level Diploma (DV/DIII) dan Sarjana S1 itu menjadi lahan pengembangan PTS sehingga memiliki kemandirian yang lebih baik.

PTS saat ini masih mengalami dampak langsung Covid-19 dan dalam rangka pemulihan dan penyehatan kembali. Pemerintah (Kemdikbud Ristek RI) diharapkan dapat memberikan intervensi alokasi bantuan dalam program hibah pembinaan PTS (PHP-PTS) terutama dialokasikan kepada PTS cluster 4 dan 5 secara proporsional pada setiap wilayah provinsi di Indonesia sebagai kebijakan afirmasi.

D. Memperkuat Kembali Nilai Filosofi

Dewan Pakar Majelis Ulama (MUI) Gorontalo KH. Drs Rasyid Camaru dan Pemerhati Pendidikan Gorontalo Alim Niode dalam paparannya meminta agar dunia pendidikan Gorontalo berkontribusi untuk menguatkan kembali nilai-nilai luhur yang hidup dalam kebudayaan masyarakat Gorontalo. Sejarah mencatat, sejak 400 tahun lalu masyarakat Gorontalo telah hidup dalam tatanan yang dilandasi falsafah adati *hula-hula'a to sara'a, sa'a hula-hula'a to kuru'ani* (adat bersendikan syariat, syariat bersendian Al-Quran). Itulah sebabnya, Gorontalo mendapat predikat sebagai Serambi Madinah.

Falsafah adati *hula-hula'a to sara'a, sa'a hula-hula'a to kuru'ani* menjadi landasan hidup masyarakat Gorontalo yang diterapkan dalam adat: *Payu Limo Totalu, Lipu Pei Hulalu* (dengan lima landasan prinsip dasar negeri kubangun), *Bangusa talalo, lipu poduluwalo* (bangsa dijaga, negeri dibela), *Batanga pomaya* (diri kita abdikan), *Upango potombulu* (harta dimanfaatkan atau sedekahkan), *Nyawa podungalo* (jiwa raga kita pertaruhkan) dan *Openu demoputi'o tulalo, bodila moputi'o baya* (biar putih tulang tapi tidak dipermalukan).

“Memperkuat kembali nilai-nilai tersebut merupakan tanggung jawab kita semua, dan dunia pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting,” kata Pemerhati Pendidikan Gorontalo Alim Niode.

Senada dengan Alim Niode, Dewan Pakar Majelis Ulama (MUI) Gorontalo KH. Drs Rasyid Camaru mengatakan, hidup dalam falsafah *“adati hula-hula'a to sara'a, sa'a hula-hula'a to kuru'ani”* masyarakat Gorontalo pernah tampil sebagai salah satupusat pendidikan dan niaga terbesar di Sulawesi. Berperan besar terhadap kemajuan di wilayah sekitarnya. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan penyebaran islam dan pusat perdagangan paling berpengaruh di wilayah Teluk Tomoni.

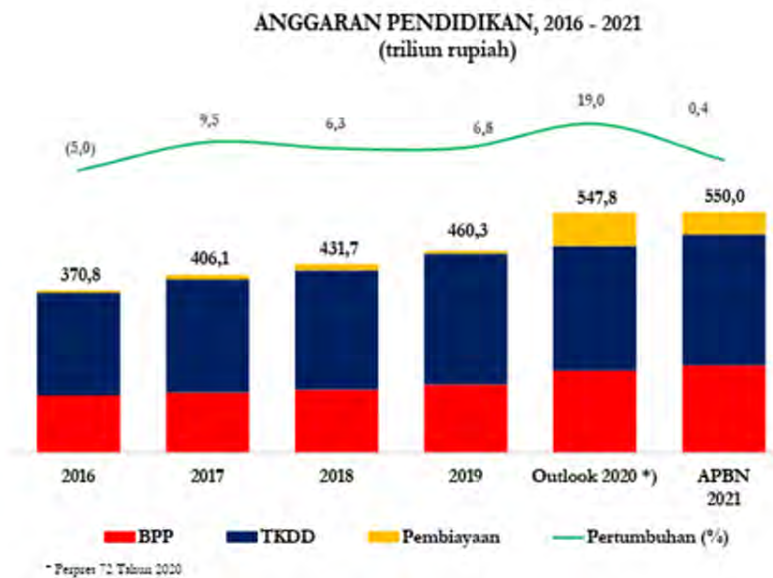
Dengan letaknya yang strategis pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol ToliToli dan, Donggala dan Bolaang Mongondow.



E. Dukungan APBN dan APBD

Semenjak berdiri pada 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000, provinsi Gorontalo belum mengalami kemajuan yang signifikan, khususnya pada bidang pendidikan.

Untuk memajukan pendidikan Indonesia negara telah mengamanatkan melalui UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) yaitu; anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).



Anggaran fungsi pendidikan tahun 2022 sebesar 20,0% dari APBN yaitu Rp542,83T



(Sumber : Raker Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek, 19 Januari 2022)

Pada tahun 2023, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023. Anggaran sebesar itu ditetapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dalam menghadapi disrupsi teknologi, serta untuk menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.

Anggaran tersebut juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2022, terkait RUU APBN 2023). Sumber : (<https://puslapdik.kemdikbud.go.id>)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia itu ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Untuk Gorontalo, pagu anggaran belanja pemerintah (fiskal) yang tersedia pada 2022 mencapai Rp 12,4 triliun. Angka ini berasal dari pagu belanja APBD Provinsi Gorontalo dengan pangsa Rp 2,03 triliun atau 16,43% dari total belanja, alokasi APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp 6,52 triliun (52,55%) dan dari APBN sebesar Rp 3,85 triliun (31,02%). Nilai pagu belanja pada tahun 2022 terkontraksi sebesar 2,96% (yoy) atau berkurang sebesar Rp 378 Miliar. Penurunan pagu belanja terjadi pada APBN dan APBD Kabupaten/Kota.

Pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada APBD tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Rapat Paripurna ke-66 dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Ranperda APBD 2022 yang diikuti secara daring, Senin (18/10/2021).

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 turun sebesar 8,37% (Rp 160,33 miliar) menjadi Rp 1,75 triliun dari APBD induk 2021 sebesar Rp1,91 triliun. Dari sisi belanja daerah turun sebesar 9,21% (Rp 176,08 miliar) menjadi sebesar Rp1,37 triliun dari APBD induk 2021 sebesar Rp 1,91 triliun.

Untuk alokasi pada sektor pendidikan, APBD Gorontalo hanya lebih fokus untuk bisa membayar gaji guru. Anggaran APBD habis untuk membayar gaji guru, tunjangan guru. Perlu perjuangan untuk mendapatkan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru. Harapannya pemerintah pusat ke depan dapat memberikan dukungan anggaran yang lebih baik.





F. Taman Bermain Bertaraf Internasional

Sebagai wujud dedikasinya bagi pengembangan SDM Gorontalo, Rachmat Gobel telah membangun taman bermain dengan standard internasional. Kurikulum dan sarannya didisain untuk membangun karakter anak yang berkualitas. Upaya ini diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Membangun generasi penerus yang akan dapat memegang tongkat estafet arah kemajuan bangsa Indonesia.

Taman bermain yang diberi nama Taman Bermain David Bobihoe Akib-- nama dari mantan Bupati Gorontalo-- ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap. Selain didesain untuk menunjang kebutuhan pendidikan, juga memiliki fasilitas taman bermain guna memacu kemampuan motorik anak-anak. Bangunan terdiri dari dua unit, yaitu ruang kelas untuk proses belajar mengajar, dan bagian luarnya terdapat arena *outdoor* yang memiliki arena bermain yang menggunakan bahan yang aman bagi anak-anak.

Rencana pembangunan sekolah dan taman bermain seperti ini, juga akan ditempatkan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Sebab masa depan Gorontalo akan sangat ditentukan oleh seberapa baik Gorontalo membangun kualitas pendidikan bagi anak-anak, kata Rachmat Gobel.

■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat acara peresmian Taman Bermain David Bobihoe Akib





Gorontalo Kian Menarik, Jepang Tertarik Investasi

Sejumlah langkah yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel berhasil menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo. Ini antara lain tersirat dari kunjungan rombongan Gubernur Prefektur Ehime, Jepang, Tokihiro Nakamura Jepang ke Provinsi Gorontalo pada 17-19 Januari 2023. Datang dengan rombongan besar (37 orang), Nakamura tidak hanya mengikut sertakan pengusaha, tapi juga membawa akademisi, birokrat dan Ketua Majelis Prefektur Ehime, Hiroshi Watanabe.

“Potensi provinsi Gorontalo begitu besar dengan di dukung ketersediaan lahan yang cukup luas. Saya sudah lama kenal dengan Pak Rachmat, sejak masih jadi pengusaha. Sekarang menjadi politisi, jika berdialog selalu yang dibicarakan Gorontalo. Bapak dan Ibu beruntung memiliki pemimpin seperti ini. Rachmat Gobel memikirkan bagaimana agar Gorontalo maju dan sejahtera,” kata Nakamura saat bersama Rachmat Gobel menghadiri panen padi perdana di demplot, desa Iloheluma, Kabupaten Bone Bolango.

Kepada Nakamura, Rachmat Gobel menjelaskan, penanaman padi di demplot desa Iloheluma ini menggunakan teknologi pemupukan padi sawah berbasis organik (IPATBO). Ini adalah dalam rangka uji coba penggunaan pupuk organik dalam upaya meningkatkan produktivitas petani. Berdasarkan kalkulasi, perkiraan hasil panen mencapai 7,45 ton per ha, jauh di atas penggunaan pupuk kimia biasa yang hanya sekitar 4 ton per ha. Penggunaan IBOT juga dilakukan pada tanaman jagung, namun masih belum waktunya panen.

Rachmat Gobel mengatakan, Ia berharap uji coba akan lebih masif dan menjadi solusi bagi petani di Gorontalo. Berdasarkan data BPS, keuntungan petani padi sekitar Rp 6,77 juta per ha, dengan pemakaian IBOT keuntungannya bisa menjadi sekitar Rp 14,5 juta per ha. Selain produktivitas tinggi, penggunaan pupuk ini juga menghasilkan beras organik yang harganya lebih mahal dibandingkan beras dari padi yang menggunakan pupuk kimia. Selain itu ada keuntungan lain, tanah makin sehat dan menghasilkan asupan makanan bagi manusia yang lebih sehat.

“Ini artinya petani bukan sekadar petani pejuang, tapi petani sebagai pejuang pangan nasional. Padi juga menjadi simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Panen padi bersama ini juga simbol kebahagiaan kita semua,” kata Rachmat Rachmat Gobel.

Pada kesempatan itu, Gobel juga membagikan traktor roda empat berjumlah tiga unit dan traktor roda dua berjumlah 18 unit. “Modernisasi pertanian selain membutuhkan bibit yang unggul, juga membutuhkan teknik mengolah yang benar, irigasi yang baik, penggunaan pupuk dan pembasmi hama yang unggul, penanganan pasca panen yang modern, dan yang juga tak kalah penting adalah penggunaan alat dan mesin pertanian yang modern, termasuk traktor ini. Mari kita jaga alsintan ini. Kita majukan pertanian, membangun kedaulatan dan ketahanan pangan, dan menyejahterakan serta memakmurkan petaninya,” katanya.

Dalam kesempatan ini juga Rachmat Gobel meminta kepada Gubernur prefektur Ehime untuk ikut serta dalam salah satu program yang di gagas oleh Rachmat Gobel yakni mempersiapkan “para petani tangguh”. Untuk mengejawantahkan hal ini Rachmat Gobel meminta kepada Gubernur prefektur Ehime untuk memberikan fasilitas serta kesempatan kepada petani muda di Provinsi Gorontalo untuk belajar ke Jepang dalam hal pengembangan pertanian yang berbasis teknologi.

Hal ini perlu dilakukan, kata Rachmat Gobel, untuk meningkatkan pengetahuan bagi para petani dalam mengembangkan pertanian modern yang nantinya akan berimplikasi bagi peningkatan ekonomi bagi para petani itu sendiri maupun masyarakat Gorontalo secara umum.

Tokihiro Nakamura, dalam sambutannya mengaku tak mengira diajak panen bersama yang menghadirkan petani dalam jumlah besar. “Saya mengira hanya panen padi biasa,” katanya. Ia juga memuji penggunaan pupuk organik ini. “Setiap hal baru selalu akan membutuhkan keberanian. Dan penguat keberanian adalah bapak dan ibu yang menjadi pemilihnya. Visi misi seorang politisi biasanya dinilai skeptis oleh pemilihnya, bahkan dianggap hanya sebagai pemanis bibir.

Namun visi misi itu bisa diwujudkan jika ada dukungan dari para pemilihnya. Jadi peran pemilih sangat penting. Namun bapak dan ibu sangat beruntung memiliki wakil rakyat seperti Rachmat Gobel yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan visi-misinya,” katanya, yang disambut tepuk tangan para petani.





A. Pelabuhan Anggrek

Gubernur prefektur Ehime bersama rombongan juga melakukan kunjungan ke pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara. Kunjungan ini untuk melihat potensinya sebagai gerbang utama dari lalu lintas ekonomi Gorontalo di masa datang. Melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pengelolaan Anggrek telah diserahkan pemerintah ke PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) untuk dikembangkan menjadi pelabuhan modern berstandar internasional. Untuk pengembangan ini AGIT akan mengelontorkan dana Rp 1,4 triliun.

KPBU pelabuhan Anggrek merupakan salah satu kerja nyata yang dilakukan oleh Rachmat Gobel dalam membangun prekonomian rakyat Gorontalo. Seperti diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rachmat Gobel mempunyai peran besar dalam mewujudkan pengembangan pelabuhan ini. Pengembangan pelabuhan juga terintegrasi dengan pengembangan di kawasan hinterland untuk industri agribisnis. Pengembangan pelabuhan anggrek sudah sangat lama menjadi dambaan masyarakat Gorontalo.

Diharapkan, dengan kunjungan Gubernur Tokihiro Nakamura dan sejumlah pengusaha dan Prefektur Ehime, akan terealisasi kerjasama investasi bagi pengembangan pelabuhan dan kawasan industri di sekitar pelabuhan Anggrek. Tidak cuma soal infrastruktur, kata Rachmat Gobel, Ia juga mempersiapkan segala Sumber Daya Manusia (SDM) di Gorontalo, antara program magang anak muda Gorontalo ke Jepang.

“Kita punya program panjang, jadi tugas kita ini mempersiapkan SDM Gorontalo. Anak-anak muda yang bisa dilatih bekerja di Jepang selama 1 sampai 2 tahun dan secara terus-menerus sehingga terbentuk karakter diri yang adaptif terhadap teknologi serta kompeten. “Makanya saya perlu SDM di Gorontalo, anak-anak muda kita yang kita persiapkan untuk belajar di sana (Jepang)” kata Rachmat Gobel.





B. Menilik Peluang Pengembangan Sektor Pariwisata

Rombongan Gubernur Prefektur Ehime juga melihat potensi sektor wisata Gorontalo. Didampingi Rachmat Gobel, Nakamura dan rombongan melakukan kunjungan ke beberapa objek wisata yang ada di provinsi Gorontalo di antaranya wisata Hiu Paus, Benteng Otanah dan Wisata Kuliner Tamendao.

Nakamura dan rombongan sangat menikmati keindahan wisata yang ada di Gorontalo. Ia menegaskan, elain potensi di sektor pertanian Gorontalo juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Potensi ini harus di kembangkan serta di kelola dengan baik agar dapat menjadi wisata berkelas dunia.

Di akhir dari kegiatan kunjungannya, rombongan Gubernur Prefektur Ehime diundang oleh Rachmat Gobel untuk makan malam di tempat wisata kuliner Tamendao, dimana wisata kuliner Tamendao tersebut digagas oleh Rachmat Gobel pada tahun 2021 dengan menggunakan program KotaKu dari Kementerian PUPR. Dalam kegiatan tersebut suasana keakraban terjalin dengan hangat antar rombongan Gubernur prefektur Ehime dengan masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan ini Gubernur prefektur Ehime mengucapkan banyak terima kasih kepada Rachmat Gobel atas sambutan hangat yang diberikan. Selain mendiskusikan mengenai hal-hal penting dalam membangun kerjasama antara prefektur Ehime dengan provinsi Gorontalo, Nakamura juga menghibahkan empat unit ambulans untuk peningkatan pelayanan kesehatan di provinsi Gorontalo.





C. Kerjasama dengan Platform Sister City

Selain melihat berbagai prospek dan potensi perekonomian Gorontalo, kedatangan Gubernur Nakamura juga terkait dengan rencana kerja sama *city to city* antara Provinsi Gorontalo dengan Prefektur Ehime. Dalam kunjungannya ini, Nakamura juga melakukan pertemuan dengan Pejabat (PJ) Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer beserta jajarannya. Kerjasama *city to city* dalam rangka mewujudkan masyarakat bebas karbon. Dalam hal ini Rachmat Gobel memiliki peran yang sangat penting sebagai tokoh yang menjembatani provinsi Gorontalo dengan Prefektur Ehime.

Kerja sama tersebut akan difokuskan pada 4 isu yakni: manajemen lingkungan, pembangunan ekonomi dan Industri, pertanian dan kehutanan; serta pendidikan dan pelatihan. Ke empat hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas karbon yaitu konsep pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kerja sama ini antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan aparatur sipil Negara dalam hal manajemen lingkungan; (2) Pengenalan teknologi pengolahan air limbah; (3) Peningkatan produktifitas dan produksi pertanian.

Kerjasama *city to city* yang akan dilakukan ini juga nantinya akan menerapkan model baru dalam kebijakan netralitas karbon, kebijakan dalam pemanfaatan sampah dan limbah B3 serta kebijakan penanganan lahan kritis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

D. Belajar dari Prefektur Ehime, Jepang

Prefektur Ehime dikelilingi oleh alam yang kaya dan beragam; di selatan terdapat pegunungan Shikoku, di utara terdapat Laut Pedalaman Seto, dan di barat terdapat Laut Uwa. Industri pertanian, kehutanan dan perikanan berkembang dengan memanfaatkan iklim sedang dan kering. Di prefektur ini, pertanian buah lebih populer dibandingkan pertanian padi karena kondisi geografis dan iklim.

Dikawasan Nanyo (Ehime Selatan) dan pulau-pulau di Laut Pedalaman Seto, telah memanfaatkan lahan pesisir yang curam, menjadikannya lahan terasering untuk buah jeruk yang memiliki volume produksi tertinggi di Jepang. Selain jeruk, produk lain yang menyumbang persentase tinggi adalah kastanye, jamur shiitake kering,

Di dataran yang lebih tinggi, terdapat peternakan sapi perah dan ternak, dan di daerah pegunungan, tomat, sayuran dataran tinggi, dan pertanian teh merupakan tanaman utama. Sekitar 70% lahan Ehime berhutan, termasuk hutan cedar dan cemara yang dikelola. Ehime adalah penghasil kayu cypress terbesar di Jepang.

Industri perikanan di kawasan ini juga sangat maju, dengan sumber daya laut yang melimpah. Ehime telah mengembangkan perikanan pesisir dan akuakultur. Khususnya di Laut Uwa, industri ini telah memanfaatkan teluk-teluk kecil yang dalam di garis pantai untuk mendukung akuakultur tingkat tertinggi di Jepang.

Prefektur ini juga memiliki banyak industri seperti di sekitar wilayah Matsuya yang memiliki industri pembuatan kapal, kimia, penyulingan minyak, dan produk kertas dan tekstil. (*)



Apresiasi dari Akademisi, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat atas Kinerja Rachmat Gobel

Atas prakarsa sejumlah kader Partai NasDem, pada Kamis 10 Maret 2022 di Kota Gorontalo, diselenggarakan diskusi bedah buku tentang laporan kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel. Buku dengan judul *Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi, Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan Edisi ke-2* memuat berbagai pemikiran dan gagasan serta kegiatan Rachmat Gobel sebagai pimpinan dan anggota legislatif dari dapil Provinsi Gorontalo.

Bedah buku ini menghadirkan penanggap dan pembicara mulai para akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat hingga para pejabat pemerintah provinsi, kota dan kabupaten serta perwakilan lainnya dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).





Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI yang meliputi provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, M.P. mengatakan, Ia telah membaca seluruh isi buku ini yang terdiri atas XII Bab dan 464 halaman dan menyimpulkan, buku ini yang berisikan lebih fokus kinerja Rachmat Gobel sebagai wakil rakyat Gorontalo di DPR RI. Gagasan dan berbagai program nyata yang dilakukan Rachmat Gobel seperti yang tertuang dalam buku ini, telah menjadi penyemangat bagi anak-anak muda dan generasi penerus yang ingin belajar di bidang ilmu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Sebagai akademisi dan juga seorang yang berkecimpung di bidang pendidikan, Mahludin menyatakan kekagumannya terhadap Rachmat Gobel yang begitu detail dan transparan membahas isu-isu pembangunan ekonomi di sektor-sektor tersebut.

“Suatu hal yang paradoks jika melihat latar belakang seorang Rachmat Gobel dari seorang pengusaha elektronik, sangat menguasai secara rinci masalah terkini di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian. Para penulis sukses menerjemahkan pemikiran-pemikiran Rachmat Gobel dan disampaikan secara sempurna dalam sebuah tulisan yang baik di buku ini,”
kata Mahludin Baruwadi dalam testimoninya.

Hal ini juga dibenarkan oleh penanggap lainnya Dr. Lilan Dama, S.Pd, M.Pd, seorang akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo. Lilan Darma sepakat, meskipun kiprah Rachmat Gobel sudah dikenal secara nasional dan internasional, tapi perhatiannya di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian serta kepada konstituennya di provinsi Gorontalo sangat tinggi. Menurut dia, para tokoh dan politisi asal Gorontalo sangat sedikit membahas sektor-sektor yang ada di pembangunan pertanian dan sejenisnya, baru ada ketika Rachmat Gobel tampil sebagai perwakilan masyarakat Gorontalo di DPR RI.

“Tentu ini sangat baik karena sektor ini merupakan sektor terpenting bagi masyarakat Gorontalo yang secara makro ekonomia masih jauh tertinggal dari wilayah lainnya di Indonesia dan masih masuk lima provinsi termiskin di Indonesia.” Jelasnya.

Lilan Dama sendiri melihat bahwa apa yang diungkapkan dalam buku jilid ke-2 Rachmat Gobel ini adalah, ada kepentingan nasional yang coba disampaikan, dan para penulis, editor dan penerbit buku ini telah memberikan pesan yang baik sehingga buku ini sangat perlu dan menarik dibaca. Ada beberapa catatan penting dari Lilan Dama terhadap buku ini: Pertama, buku ini merupakan buku laporan non fiksi bukan buku khayalan. Mengapa demikian, karena narasinya memaparkan gambaran yang hidup sehingga menjadi daya tarik bagi orang ingin membacanya. Kedua, buku ini menyampaikan fakta sesuai dengan tempat dan kejadian yang ada di lapangan beserta bukti-bukti empirik yang disampaikan Rachmat Gobel kepada masyarakat di dapilnya, Gorontalo.

Sebagai salah satu tokoh pendidikan Gorontalo, Lilan Duma menilai, buku Rachmat Gobel yang ia telah mulai membacanya dari Bab I hingga Bab XII telah banyak berbicara tentang aspek ontologi ketokohan dari seorang Rachmat Gobel, dan para penulis telah memaparkan secara baik dan jelas. Ia yakin buku ini akan berkelanjutan kepada jilid-jilid berikutnya karena tentu masa tugas Rachmat Gobel di DPR RI sebagai wakil rakyat Gorontalo belum selesai.

“Untuk buku selanjutnya, akan lebih baik menyentuh aspek dari sudut aksiologinya yang harus di *breakdown* pada setiap Bab, karena tulisan di buku ini sangat denotatif sesuai dengan realita yang ada,” kata Lilan Duma.

Menurutnya buku jilid kedua ini adalah sebuah penyempurnaan dari jilid pertama yang sangat inspiratif, oleh karena itu menurutnya dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang membacanya karena disampaikan melalui tulisan dengan bahasa baku yang tidak lebai atau berlebihan menuji sosok Rachmat Gobel.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada buku ini dengan centang bintang lima sebagai buku yang wajib dibaca dan dikritisi bersama,” ujar dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo.

A. Konsistensi yang Akan Membawa Gorontalo Menuju Kesejahteraan

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Dr. Drs. H. Idris Rahim, MM mengatakan kepedulian sosok Rachmat Gobel terhadap pertanian dan UMKM sangat didambakan oleh masyarakat Gorontalo dimana 39% profesi masyarakat di provinsi tersebut adalah petani. Perhatian Rachmat Gobel kepada sektor pertanian seperti yang dipaparkan dalam buku ini sangat bermanfaat dan pelaksanaannya di lapangan sangat dirasakan serta meningkatkan taraf hidup petani khususnya dalam penyediaan bibit dan pupuk.

Harapan Idris Rahim sebagai salah satu pimpinan di provinsi Gorontalo, apa yang telah Rachmat Gobel paparkan dalam bidang pertanian ini dapat terus berlanjut, perlunya penekanan dan ketersediaan bibit dan pupuk yang terjangkau harganya oleh petani. “Semoga dalam jilid buku mendatang sektor pertanian lebih mendapat porsi yang lebih banyak,” harap Idris.

Idris Rahim juga menuturkan, UMKM di Provinsi Gorontalo perlu mendapat perhatian yang serius karena jumlahnya sangat banyak. Selama pandemi Covid-19, sekitar 115.000 UMKM mengalami keterpurukan dan hanya mengandalkan bantuan

dari Bank Indonesia melalui kredit usaha rakyat (KUR). Sedangkan ada beberapa faktor kelemahan dalam menangani UMKM di Gorontalo, pertama adalah organisasi ini tidak saling kontrol, kedua permodalan, sedangkan faktor ketiga adalah jejaringnya.

Dalam tanggapan akhirnya, Wakil Gubernur Gorontalo itu menggarisbawahi, jika Rachmat Gobel tetap fokus terhadap pertanian dan UMKM, Gorontalo akan menuju kepada kesejahteraan rakyat. Namun ia menambahkan sebenarnya masalah kesejahteraan bukanlah tugas semata Rachmat Gobel melainkan juga tugas semua, mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan para akademisi.

B. Sang Pemberi Cahaya Negeri

Apresiasi juga datang dari tokoh adat Gorontalo. Dalam diskusi bedah buku ini, Ketua Adat Gorontalo Drs. H. Karim Pateda memberikan pendapatnya dari segi adat Gorontalo. Menurutnya apa yang dilakukan Rachmat Gobel kepada Provinsi Gorontalo sesuai dengan gelar adat Gorontalo yang disandangnya dengan gelar ‘**Ti Bulilango Hunggia**’ yang artinya “**Sang Pemberi Cahaya Negeri**”.

Karim Pateda mengatakan, setelah membaca buku “Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi, National Interest dan Agenda Pembangunan”, Ia yakini bahwa menurut adat Gorontalo bahwa apa yang dijalankan Rachmat Gobel telah terjelma. Artinya, apa yang disampaikan, diucapkan, dan diperbuat, sesuai dengan kenyataan dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di Gorontalo. “Rachmat Gobel turut andil dalam mengentaskan kemiskinan di dapilnya Gorontalo. Dalam buku ini bagaimana Rachmat Gobel dengan baik menjelaskan tentang kesenjangan yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” demikian dikatakan Karim Pateda.



Karim menjelaskan begitu banyak kriteria kemiskinan itu menurut pendapat yang berbeda. Kmesikinan menurut pandangan BPJS, BKKBN, Kemenag, dan kemiskinan menurut pandangan Diknas. Bahkan menurutnya, ada juga pandangan kemiskinan itu dari persepsi pimpinan, kepala daerah dan pejabat jika terjadi adanya pergantian jabatan. Para pejabat itu memiliki definisi kemiskinan berbeda dengan pejabat yang digantikan.

Masalah ini menurut penuturannya pernah terjadi di era Bupati Gorontalo, Ahmad Hoesa Pakaya (2000-2005) mengenai program lantainisasi. Menurut Ahmad Hosea jika rumah-rumah berlantai bagus artinya tidak ada lagi kemiskinan, padahal bukan itu ukurannya. "Pengentasan kemiskinan itu harus turun langsung ke lapangan, melihat, mendengar, dan merasakan lsehingga bisa berbuat langsung seperti yang dilakukan Rachmat Gobel," ujarnya.

C. Paduan Jiwa Kebangsaan dan Jiwa Keagamaan

Salah satu yang membuat ketokohan Rachmat Gobel menjadi kuat adalah bagaimana Ia mempraktekkan jiwa kebangsaan bersama-sama dengan jiwa keagamaan yang kuat. Ini diungkapkan Nikson Ahmad, salah satu tokoh masyarakat Gorontalo. Nikson memberikan contoh, bagaimana jiwa keagamaan Rachmat Gobel yang kuat itu tergambar jelas dalam Bab VII buku tersebut tentang "Membangun Semangat Restorasi Dalam Keberagaman". Dimana jelas tergambar netralitas dalam membawa aspirasi warga, dan terpenting adalah bagaimana fungsi nilai-nilai Syarikat Islam yang muncul dalam dalam pembahasan di Bab buku itu.

"Tentu jiwa kebangsaan dan religius ini tidak diperoleh Rachmat Gobel ketika menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI atau sebagai anggota DPR RI, bibitnya sudah terpatri sejak lama dan berkembang jauh sebelumnya," kata Nikson. Ketika membaca buku tersebut, Nikson melihat bagaimana sikap kenegarawan Rachmat Gobel, ketika mengunjungi Sulawesi dan dapilnya Gorontalo.

Keputusan mengunjungi wilayah ini dikarenakan memang bahwa adanya disparitas pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius. Tentu ini merupakan hal yang membanggakan sebagai putra Gorontalo, Rachmat Gobel *concern* dan tidak membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Terpenting bagi seorang Rachmat Gobel bagaimana pembangunan ekonomi dan pertanian menjadi tiang utama dalam pengentasan kemiskinan.

Di Bab V buku yang ada itu, Rachmat Gobel mengungkapkan persoalan bangsa bukan semata dengan memacu pertumbuhan ekonomi dengan investasi besar-besaran, tetapi juga kualitas perencanaan pembangunan harus dibangun sedini mungkin dan konsistensi. Perencanaan itu dapat dilakukan dengan membela kepentingan sebagian besar masyarakat. Bagi Nikson Ahmad, Rachmat Gobel merupakan tokoh yang tidak mementingkan diri sendiri semuanya, Ia berikan kepada bangsa ini dan terutama daerah pemilihannya Provinsi Gorontalo. "Kita bersyukur, Gorontalo memiliki tokoh sekaliber Rachmat Gobel," kata Nikson Ahmad.

D. Berpikir Untuk Kepentingan Orang Banyak

Karakter kuat Rachmat Gobel terbentuk sejak kecil dalam keluarga didikan kedua orang tuanya yang terus terbawa hingga sekarang. Menjadi buah dalam kiprahnya sebagai sosok yang tidak hanya berpikir secara pribadi tapi juga kepada kepentingan orang banyak.

Itu diakui K.H. Adnan Entengo, S.Ap. M.Pd., Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo. Dalam testimoni pada acara bedah buku, Adnan Entengo mengatakan, karakter itulah yang menjadi roh berbagai langkah dan program Rachmat Gobel selama ini seperti tertuang dalam Bab I buku *Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi, Kepentingan Nasional dan Agenda Pembangunan*. Mengapa demikian, karena disinilah menurut Adnan jika ingin mengetahui karakter dari sosok seorang Rachmat Gobel yang terurai lengkap di bab ini.

Rachmat Gobel menurut pandangan Adnan Entengo, merupakan sosok sederhana, pendengar yang baik, sering turun ke bawah, dan cepat mengerti pokok permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya, Gorontalo. Walaupun berasal dari partai yang berbeda tapi ia paham kehadiran Rachmat Gobel yang sering bertandang ke Gorontalo amat dirasakan oleh seluruh masyarakat di provinsi yang dijuluki sebagai “Serambi Madinah” itu.



Mengutip dua hal kinerja Rachmat Gobel dari buku tersebut, Adnan Entengo mengatakan, ada dua hal yang paling penting. Pertama, dari sisi ekonomi, Rachmat Gobel mengatakan kepada kita tentang Pasal 33 UUD 1945 bahwa sistem perekonomian kita itu harus berlandaskan semangat kerakyatan. Kedua, walaupun Rachmat Gobel sebagai tokoh nasional banyak berinteraksi di Jakarta maupun diluar Gorontalo, ia tak pernah melupakan Gorontalo sebagai daerah pemilihannya. Ini artinya Rachmat Gobel konsisten terhadap amanat orang tuanya untuk tidak melupakan Gorontalo.

Sebagai contoh salah satu kinerja Rachmat Gobel, menurut Adnan Entego adalah pembangunan pelabuhan Anggrek, yang Insya Allah akan menjadi hadiah bagi anak cucu masyarakat Gorontalo kedepan dan menjadikan ekonomi Gorontalo menjadi lebih baik lagi.

“Saya pribadi sebagai masyarakat Gorontalo sangat bangga terhadap kinerja Rachmat Gobel yang bagi kita semuanya memberikan manfaat besar. Sangat sedikit tokoh-tokoh nasional yang berasal dari provinsi kita, seluruh tenaga dan pikiran tucurahkan bagi Gorontalo,” kata Adnan Entego.

Provinsi Gorontalo yang masih masuk lima besar provinsi termiskin di Indonesia butuh sosok yang benar-benar dapat membawa perubahan menyeluruh khususnya pembangunan ekonomi dan pertanian, apalagi 39%persen masyarakatnya adalah petani. Yamin Rajawali, petani dan pelaku UMKM Gorontalo dalam tannggapannya mengatakan, Gorontalo harus segera keluar dari jerat kemiskinan karena hal ini telah dinantikan lama bagi masyarakat yang mata pencahriannya petani, dan ini jumlahnya cukup banyak.



Membaca buku jilid kedua Rachmat Gobel, Yamin Rajawali yang hari-harinya sebagai petani, merasa senang ada tokoh sekaliber Rachmat Gobel totalitas mengabdikan dan bekerja untuk Gorontalo. Ia menggambarkan Rachmat Gobel sebagai sosok pemimpin yang mampu merasakan, mendengar dan melihat langsung aspirasi kaum petani.

Kepedulian Rachmat Gobel itu digambarkan Yamin merupakan wujud dan harapan agar dapat mempengaruhi dan menyampaikan kepada pemerintah pusat maupun provinsi akan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Buku “Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi” itu bagi Yamin Rajawali adalah aspirasi dan referensi kepada siapapun yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang yang mampu melayanidan memberi jawaban terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat.

Harapan masyarakat, kata Yamin Rajawali, seperti tertuang dalam buku ini Rachmat Gobel lebih konsentrasi kepada masalah pertanian dan UMKM dan koperasi. Ini penting agar koperasi menjadi salah satu kunci dalam rangka untuk bisa menjadi jawaban bagi persoalan yang dirasakan oleh petani itu sendiri.

“Kita menginginkan koperasi itu menjadi kuat bukan dari sisi lembaganya yang kuat tapi juga dari sisi permodalan. Dan mengharapkan praktek demplot yang dilaksana Rachmat Gobel sepeerti yang tertuang dalam buku laporan jilid kedua, bisa di hand over kebeberapa koperasi sehingga dapat berdampak luas kepada masyarakat,” tutur Yamin Rajawali.

E. Di Mata Mahasiswa dan Aktivist LSM

Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Man’uth Ishak, mengatakan, ia mewakili generasi Z, menilai buku laporan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel merupakan wujud agenda transformasi birokrasi dan transparansi. Rachmat Gobel salah satu pejabat yang berani mempublikasikan agenda dan kegiatannya untuk bisa dibaca oleh masyarakat Gorontalo.

Dalam buku laporan ini, menurut Man’uth Ishak, Rachmat Gobel secara tegas dan keras menyinggung kegiatan industri yang masih adanya “praktek kolusi”. Dimana menurut pandangannya, ada proyek sebelum pelelangan tapi sudah ada pemenangnya.

“Kami selaku perwakilan BEM se-provinsi Gorontalo, selalu mengawasi kinerja pemerintah dan selalu mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan pemerintah selama sebulan, setahun, dan seterusnya. Buku ini menjadi bacaan wajib kami sebagai mahasiswa karena ditampilkan secara terbuka dan gambling”.

Namun, menurut Man’uth Ishak, setelah membaca buku jilid kedua itu, ia memberikan masukan kurangnya pembahasan dan ulasan terkait bidang teknologi. Baginya pembahasan teknologi penting karena bagaimana kita beradaptasi di tengah penetrasi teknologi yang begitu kuat dan kesiapan masyarakat dalam menerima terhadap teknologi-teknologi terbaru, dan ia mencontohkan bagaimana petani menggunakan hewan sebagai alat pembajak.

Man’uth Ishak memberikan sebuah analogi, orang sukses adalah bukan orang yang pintar namun orang yang mampu beradaptasi. Rachmat Gobel adalah seorang tokoh yang mampu beradaptasi dan mampu membawa Provinsi ke perubagan yang baik. Ini menjadi keyakinan besar masyarakat Gorontalo.

Sedangkan bagi aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Gorontalo, Alfian Hamzah, ada dua alasan Rachmat Gobel meluncurkan buku jild kedua ini. Alasan pertama adalah karena beliau disumpah dan kedua karena perintah undang-undang. Alfian Hamzah juga memberikan contoh bahwa banyak anggota DPR baik pusat, kabupaten/kota yang disumpah, tapi dia tidak memberikan kontribusi apapun kepada provinsi Gorontalo. Baginya buku Rachmat Gobel terbukti bukan saja dari isi buku tapi adanya tindakan nyata dari apa yang telah dipaparkan dan bermanfaat bagi Provinsi Gorontalo.

Sebagai perwakilan dari LSM di Gorontalo, Alfian Hamzah mengatakan Rachmat Gobel telah memberikan sumbangsih nyata bagi pembangunan Gorontalo. Ini dapat terlihat dari isu buku jilid kedua yang telah ia baca dimana isi buku tersebut mudah dicerna bagi siapa saja yang membacanya, karenamenurut pandangannya, buku itu hasil kerja nyata bukan khayalan.

F. Tidak Berpikir Akan Jadi Wakil Ketua DPR RI

Memberikan sambutan terakhir dalam bedah buku itu, Rachmat Gobel mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir menjadi Wakil Ketua DPR RI. Ketika pertama kali bergabung ke Partai NasDem dan sebagai calon legislatif dari Gorontalo, Ia ingat pesan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengatakan agar dirinya mengabdikan di Indonesia agar bisa memperjuangkan Gorontalo.

“Saya terkejut bisa menang, sebelumnya saya dikatakan hanya berada di urutan kelima, ternyata rakyat Gorontalo memberi saya kepercayaan untuk duduk sebagai anggota legislatif hingga akhirnya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR,”.

Rachmat Gobel masih ingat bagaimana saat kampanye di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo banyak masyarakat yang bertanya kepadanya, apakah bapak akan sering ke Gorontalo? Ia kaget dengan pertanyaan itu karena ternyata banyak calon legislatif ketika terpilih menjadi anggota DPR RI hanya muncul lima tahun sekali, jelang pemilihan legislatif berikutnya agar bisa dipilih kembali. Menjawab pertanyaan tersebut Rachmat Gobel mengatakan kepada calon pemilihnya, walaupun dirinya tidak dilahirkan di Gorontalo, tidak pernah belajar di Gorontalo, kepercayaan dan kehormatan Ia kembalikan kepada masyarakat Gorontalo. Perihal adanya buku laporan kinerja ini, Rachmat Gobel menjelaskan, pada awal masa jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, beliau ingin ada sebuah buku laporan kerja agar masyarakat Gorontalo mengetahui apa yang telah beliau kerjakan.



Rachmat Gobel mengatakan, bahwa staf khusus dan Kesekjenan DPR RI menjelaskan bahwa beliau memiliki fasilitas untuk membuat buku laporan kinerja tersebut. "Bagi saya buku laporan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban saya," kata Rachmat Gobel. Buku Rachmat Gobel menjadi bukti bukan saja dari isi buku tapi adanya tindakan nyata dari apa yang telah dipaparkan dan bermanfaat bagi Provinsi Gorontalo.

Dalam paparannya, Rachmat Gobel menceritakan bagaimana ketika ia memasuki jabatan tahun kedua sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang sekaligus juga sebagai anggota DPR RI. Ketika itu Indonesia dan dunia tengah menghadapi masalah besar akibat adanya pandemi Covid-19. Sebagai anggota legislatif terpaksa Ia harus mengurangi kegiatannya keluar kota termasuk mengunjungi provinsi Gorontalo. Selama dua tahun sebagai anggota DPR RI, Ia merasa belum maksimal memenuhi aspirasi masyarakat yang bisa dikerjakannya untuk membangun Gorontalo.

"Goal saya sederhana, membangun provinsi Gorontalo dari lima wilayah termiskin menjadi lima termakmur di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bagaimana perbedaan dirinya sebagai seorang pengusaha dan politisi. Menurutnya, di bisnis itu jelas ada keuntungan dan deviden tapi politik semuanya masih abu-abu butuh perjuangan yang lebih keras lagi, seraya menyebutkan dimana sebelumnya sebagai pengusaha ia tidak memiliki interest politic sama sekali malah kini terjun ke dunia politik selama 4,5 tahun terakhir ini.

Namun Rachmat Gobel kembali menekankan, bagaimana Ia tertarik sebagai politisi dan bergabung dengan Partai NasDem, ketika terpesona dengan pidato kebangsaan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang membuat ia mengambil keputusan ingin memperjuangkan dan mewujudkan pikiran-pikiran Surya Paloh dalam membangun bangsa.

Dalam beberapa kesempatan keliling dan menemui konstituennya, Rachmat Gobel mengatakan, Ia bukan saja fokus terhadap masalah pertanian, koperasi, UMKM namun juga fokus terhadap pendidikan, kesehatan serta perumahan. Baginya tiga isu terakhir yang disebutkan sangat penting karena masuk menjadi bagian faktor kemiskinan Gorontalo. Ia menyebutkan harus ada kejujuran hati akan potret masalah yang dihadapi daerah kita sendiri.

Sebagai contoh, ketika beberapa waktu sebelumnya mengunjungi Gorontalo Utara, banyak pelajar ketika ditemuinya tidak mengenal nama presiden Republik Indonesia, menteri kabinet, bahkan nama Bupati Gorontalo Utara. Ia menambahkan dalam membangun wilayah Rachmat Gobel menyarankan, tidak perlu protokol yang berlebihan. Terpenting adalah membangun silaturahmi dan menyarankan perlu evaluasi dalam membangun Gorontalo dengan lahan yang luas dan subur.

Rachmat Gobel mengungkapkan ada dua aspek dalam memecahkan kemiskinan di Gorontalo. Pertama adalah ekonomi, pertanian, kelautan, dan peternakan. Kedua UMKM. Ini harus menjadi fokus. Ia juga menambahkan sektor pariwisata juga harus terus dikembangkan karena merupakan potensi Provinsi Gorontalo di alam yang indah tersebut.

Ia mengakui telah membuat *pilot project* pertanian di Gorontalo, yang sebelumnya sebesar kisaran 3-4 juta ton, kini mencapai 10 juta ton dalam 1 hektar. Andai saja tuturnya, dibangun 50.000 hektar industri pangan, Gorontalo akan maju pesat. Ini diakui Rachmat Gobel sedang ia mempersiapkan dalam visi membangun Gorontalo 2051. Visi Gorontalo 2051 dihitung mulai ia memenangkan proyek untuk mengelola pelabuhan Anggrek Gorontalo 2021. Dari situlah kebangkitan Gorontalo untuk mengentaskan kemiskinan.

Rachmat Gobel juga memaparkan rencananya membangun daerah khusus ekonomi halal di Gorontalo karena melihat potensi pertanian, perkebunan, dan kelautan yang dapat dikelola menjadi produk untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam *tagline*: “Dari Gorontalo Untuk Indonesia”, Rachmat Gobel juga akan memulai fokus dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga masalah penerangan di wilayah-wilayah provinsi Gorontalo yang dirasa masih gelap. “Saya akan membuat wilayah Gorontalo yang gelap gulita seperti Pinogu, dan Bone Bolango menjadi terang benderang agar pertumbuhan ekonomi semakin menggeliat,” tutupnya.



Foto bersama Wakil Ketua DPR/Korinbang RI Rahmat Gobel dengan Tim Penyusun Buku sesaat setelah acara launnching dan bedah buku dilaksanakan



8
BAB

**LIPUTAN
KHUSUS**

“Ketika kekuasaan menuntun manusia menuju kesombongan, maka puisi mengingatkannya akan keterbatasannya. Ketika kekuasaan mempersempit ruang pandang manusia, maka puisi mengingatkannya akan kelimpahan dan keragaman. Ketika kekuasaan itu mengotori, maka puisi membersihkannya.”

- John F. Kennedy -

Apresiasi untuk H.B Jassin, Pahlawan Peradaban dari Gorontalo

Siapa yang tidak kenal sosok Hans Bague Jassin atau lebih dikenal dengan nama H.B Jassin? Ia adalah seorang yang berpengaruh besar dalam dunia kesusastraan Indonesia. H.B Jassin adalah tokoh dan pahlawan peradaban dari dunia sastra. Kecerdasan dan dedikasinya terhadap dunia sastra yang sulit tertandingi, telah menoreh begitu banyak perannya bagi kemajuan dunia sastra dan peradaban.



HB Jassin lahir di Gorontalo pada 31 Juli 1917 di Gorontalo dari pasangan suami isteri Bague Mantu Jassin dan Habiba Jau. Di usia ke 15, atau pada 1932 Ia menamatkan sekolahnya di *Hollansch-Inlandsche School (HIS)* yaitu sekolah Belanda untuk bumiputera di Gorontalo. Kemudian Ia melanjutkan pendidikannya ke Hoogers Burgerschool (HBS) di kota Medan, dan menamatkannya pada 1938. Pada 1957, Jassin meraih gelar kesarjanaannya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada 1958 memperdalam pengetahuannya mengenai ilmu perbandingan sastra (*Comparative Literature*) di Yale University, Amerika Serikat sampai 1959.

Berbagai penghargaan telah terima antara lain Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden RI tahun 1994, Bintang Satyalanca Kebudayaan RI tahun 1969, dan ASEAN Award 1990. Pada tahun 1993, H.B Jassin juga menerima Gelar Adat Gorontalo atau Pulanga “*Ti Molotinepa Wulito*” yang artinya Sang Putra Terbaik Bangsa yang Menguasai Bahasa.

Setelah pengabdian panjangnya, H.B Jassin yang dijuluki Paus Sastra Indonesia meninggal di Jakarta pada 11 Maret 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.

Sejak masih sekolah H.B Jassin telah menyukai dunia sastra. Tidak heran, ketika pada 1940 Sutan Takdir Alisyahbana menawarkan untuk bergabung sebagai redaktur di Balai Pustaka, H.B Jassin menerimanya, langsung meninggalkan pekerjaan di kantor Asisten Residen Gorontalo. Dalam perjalanannya H.B Jassin dipercaya untuk menjadi redaktur dan kritikus sastra pada berbagai majalah budaya dan sastra di Indonesia seperti *Pandji Poestaka*, *Mimbar Indonesia*, *Zenith*, *Sastra*, *Bahasa dan Budaya*, *Horison*. Melalui dunia sastra inilah H.B Jassin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara.

A. Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Dedikasi dan perjuangan H.B Jassin telah mendapat apresiasi yang begitu luas. Tidak hanya dari lingkungan dunia sastra, tapi juga banyak tokoh-tokoh kebudayaan. Banyak pihak berpendapat, H.B Jassin sangat layak untuk memperoleh penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

Pada tahun 2022, masyarakat Gorontalo bahu membahu memperjuangkan H.B Jassin untuk ditetapkan oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Sebagai putra Gorontalo dan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel ikut berjuang dengan segala daya yang bisa ia lakukan. Melakukan pendekatan ke berbagai pihak, untuk meyakinkan bahwa H.B Jassin adalah tokoh yang berhak menyandang gelar Pahlawan Nasional. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap H.B Jassin, sekaligus penting bagi generasi penurus bahwa mereka mempunyai seorang tokoh sastra yang perlu ditauladani.

Penyelenggaraan seminar nasional adalah salah satu syarat dan tahapan yang harus dilalui sebelum pemerintah menetapkan seseorang untuk menjadi pahlawan nasional. Karena itu, Rachmat Gobel membentuk kepanitiaan untuk menyelenggarakan seminar nasional tentang H.B Jassin. Seminar berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, pada Rabu, 23 Februari 2022.



Pada tahun 2022, masyarakat Gorontalo bahu membahu memperjuangkan H.B Jassin untuk ditetapkan oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Sebagai putra Gorontalo dan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel ikut berjuang dengan segala daya yang bisa dilakukan. Melakukan pendekatan ke berbagai pihak, untuk meyakinkan bahwa H.B Jassin adalah tokoh yang berhak menyandang gelar Pahlawan Nasional. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap H.B Jassin, sekaligus penting bagi generasi penerus bahwa mereka mempunyai seorang tokoh sastra yang perlu ditauladani.

Penyelenggaraan seminar nasional adalah salah satu syarat dan tahapan yang harus dilalui sebelum pemerintah menetapkan seseorang untuk menjadi pahlawan nasional. Karena itu, Rachmat Gobel membentuk kepanitiaan untuk menyelenggarakan seminar nasional tentang H.B Jassin. Seminar berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, pada Rabu, 23 Februari 2022.



Seminar bertema “HB Jassin Pahlawan Peradaban Indonesia” ini menghadirkan pembicara Menko Polhukam Mahfud MD, pengamat sosial Fachry Ali, penyair dan budayawan Nirwan Dewanto, dan Oyon Sofyan, seorang penulis biografi HB Jassin. Dalam acara yang dibuka Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel ini, juga hadir Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, yang juga mantan gubernur Gorontalo. Hadir pula Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Hamim Pou.

Diskusi ini dipandu oleh moderator Hamid Basyaib, seorang penulis dan cendekiawan. Dalam seminar itu, panitia membagikan buku berjudul HB Jassin Pahlawan Peradaban Indonesia. Buku itu berisi kumpulan tulisan dari para tokoh tentang Jassin. Para tokoh itu adalah Mochtar Lubis, Ali Audah, Budi Darma, Sulisty Basuki, dan Nirwan Dewanto. Buku ini disunting oleh Hamid Basyaib dan kata pengantar oleh Rachmat Gobel. Berbagai tulisan dalam buku ini tergambar sosok dan kontribusi H.B Jassin dalam jagat sastra Indonesia.

Rachmat Gobel mengatakan, ada tiga hal yang dilakukan H.B Jassin yang memberi kontribusi besar terhadap sastra dan kebudayaan Indonesia. Pertama, Ia adalah seorang kritikus sastra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kedua, H.B Jassin mungkin satu-satunya kurator sastra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Istilah kurator dalam dunia sastra mungkin terasa ganjil, karena dalam dunia sastra galibnya hanya mengenal istilah kritik sastra. Namun apa yang dilakukan H.B Jassin tak sekadar melakukan kritik sastra, seperti yang dikenal dalam ilmu sastra, Ia juga melakukan kurasi. Pada titik inilah H.B Jassin kemudian mendapat julukan sebagai Paus Sastra Indonesia.



Julukan ini awalnya celaan yang disampaikan dari seorang wartawan dan kritikus film yang bernama Gayus Siagian dalam Simposium Sastra yang digelar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1950. Sebagai salah satu pemrasaran Gayus Siagian mengatakan H.B Jassin adalah “Paus Sastra” karena apa saja yang ditulisnya selalu diterima oleh publik sebagai sebuah kebenaran. Namun ledakan itu justru kemudian bermakna positif, memperkuat legitimasi seorang H.B Jassin sebagai kritikus sastra terbaik.

Berkat kerja-kerja kritik dan kurasi sastra H.B Jassin itulah, masyarakat menjadi mengenal periodisasi dalam perkembangan sastra Indonesia seperti Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66. Juga mengenal Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45 dan Amir Hamzah sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Berkat H.B Jassin pula pencinta sastra dibimbing tentang karya sastra mana saja yang baik. Dan itu semua diterima publik. Tentang periodisasi sastra yang antara lain dikemukakannya memang langsung dibuat dalam judul-judul buku yang ditulis Jassin.

Setelah H.B Jassin tak lagi aktif melakukan kritik dan kurasi sastra, masyarakat tak lagi cukup familiar mengenal periodisasi sastra sesudahnya, bahkan tak cukup mengenali karya sastra dan sastrawan yang baik. Bukan tidak ada upaya untuk melakukan itu, namun kurangnya legitimasi publik yang membuat upaya itu tak cukup familiar.

Ketiga, dan ini yang paling utama, H.B Jassin melakukan dokumentasi sastra yang luar biasa. Ia mengumpulkan naskah-naskah sastra, baik yang tulis tangan, maupun yang masih berupa oret-oretan yang belum selesai. Ia mempunyai dokumentasi dokumen naskah sastra yang sudah diterbitkan di berbagai media maupun buku, kliping koran atau majalah, ada skripsi, ada pidato, ada pula rekaman suara. Bahkan tulisan tangan sejumlah sastrawan, termasuk milik penyair terkemuka Chairil Anwar dan Amir Hamzah, bisa ia peroleh dan masuk dalam dokumentasinya. Ia juga mendokumentasikan surat-surat pribadi sastrawan. Semua ini menjadi dokumentasi koleksi terlengkap tentang sastra Indonesia.

Data 2011, seperti dimuat dalam buku Mengenal Lebih Dekat Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin karya Oyon Sofyan, koleksi H.B Jassin sudah mencapai puluhan ribu. Semuanya tersimpan berupa 33.125 judul buku fiksi, 17.352 judul buku nonfiksi. Ada juga 575 judul buku referensi, 246 majalah, naskah drama 797 judul, biografi pengarang 6.000 map, foto pengarang 4.000 map, foto peristiwa sastra 799 map, kliping sastra dan budaya 17.357 map, skripsi dan disertasi 1.789 judul, makalah 500 judul, rekaman suara 900 kaset, dan rekaman video 60 video. Setelah kepergiannya, jumlah dokumentasi masih terus bertambah.

Atas tiga pertimbangan itulah, kata Rachmat Gobel, masyarakat Gorontalo mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan H.B Jassin sebagai Pahlawan Nasional. Proses administrasi sudah dilakukan oleh tim dan dilakukan secara berjenjang melalui Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

Apa yang dilakukan H.B Jassin adalah sumbangan yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan bagi peradaban Indonesia. Ia mengabdikan sepanjang hidupnya bagi pengembangan dan pendokumentasian sastra Indonesia. Gagasan dan pemikirannya di bidang kritik sastra terwariskan hingga kini, tak hanya bagi peminat sastra dan pegiat sastra tapi juga bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia. Apa yang dilakukannya, telah melampaui zaman dan akan terus abadi.

Dalam jagad sastra, baru Amir Hamzah yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Itupun, mohon maaf, kata Rachmat Gobel, dimulai dari tragedi. Karena itu, sudah saatnya bangsa ini secara sungguh-sungguh dan serius menghargai pejuang sastra dan peradaban ke tempat yang lebih baik. Anugerah gelar Pahlawan Nasional bagi H.B Jassin akan menjadi cahaya baru, cara pandang baru, bagi bangsa Indonesia dalam melihat makna kepahlawanan. Kepahlawanan bukan hanya dalam makna perang dan politik, tapi juga perjuangan di bidang kebudayaan dan peradaban.



Mengutip kata-kata Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang begitu masyhur, Rachmat Gobel menyebutkan;

“When power leads man toward arrogance, poetry reminds him of his limitations. When power narrows the area of man’s concern, poetry reminds him of the richness and diversity of existence. When power corrupts, poetry cleanses.”

(Ketika kekuasaan menuntun manusia menuju kesombongan, maka puisi mengingatkannya akan keterbatasannya. Ketika kekuasaan mempersempit ruang pandang manusia, maka puisi mengingatkannya akan kelimpahan dan keragaman. Ketika kekuasaan itu mengotori, maka puisi membersihkannya.)

Jika usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk H.B Jassin diluluskan pemerintah, ini akan dicatat sebagai sejarah baru. Membuktikan bahwa bangsa Indonesia memberikan tempat yang tinggi pada kepahlawanan peradaban, pada kepahlawanan kebudayaan, khususnya di bidang sastra. Apa yang dilakukan H.B Jassin adalah mengawetkan ingatan publik tentang nilai-nilai, tentang visi, tentang kehalusan budi, dan tentang semangat para sastrawan yang berkontribusi pada zamannya, bahkan untuk ratusan atau ribuan tahun ke depan.

H.B Jassin adalah persembahan masyarakat Gorontalo untuk Indonesia. Memang, sebagai manusia tak semua hal yang dilakukan H.B Jassin bisa disetujui, yang hal itu sangat relatif dan subjektif. Namun H.B Jassin adalah manusia yang positif, lembut, tekun, dan teguh pada pendirian. Karakter itulah yang membuat karya-karyanya menjadi hujah, seolah kata-kata seorang Paus.

B. Prakarsa dan Dana Pribadi

Salah satu yang sulit ditandingi dari seorang H.B Jassin adalah komitmennya menjadi penjaga sastra Indonesia, dan ini mendatangkan banyak kekaguman tokoh-tokoh sastra. Semua itu dilakukan atas prakarsa pribadi, bahkan untuk menjaga komitmennya itu H.B Jassin secara ikhlas mengeluarkan dananya sendiri atau uang pribadi. Kegiatan dokumentasi ini sudah dilakukannya sejak usia muda, sekitar tahun 1933, sejak menempuh pendidikan di HBS Medan.

Kekaguman ini antara lain disampaikan oleh sastrawan Aoh K Hadimadja dalam salah satu tulisannya pada 1971. Siapakah kelak yang bisa melanjutkan usaha dan ketekunan H.B Jassin, kata Aoh K Hadimadja, membeli surat-surat kabar hanya untuk kepentingan dokumentasi, dan itu dari kantongnya sendiri. Berbagai tawaran menjadi dosen di berbagai universitas di luar negeri ditolakinya, hanya demi mengikuti perkembangan dan pertumbuhan sastra di negerinya sendiri. "Jassin menjadi penjaga sastra Indonesia yang tidak ada lawannya, akan tetapi tidaklah fair, kalau semuanya dipikul sendiri," kata Aoh K Hadimadja yang wafat pada 1973.

Pada 1975, penyair dan dramawan WS Rendra menulis, "Saya sangat terkesan akan pribadi H.B Jassin sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Ia sudah banyak merelakan waktunya, uangnya untuk membuat dokumentasi tentang sastra Indonesia sehingga hampir dia tidak punya apa-apa lagi dalam sosial ekonominya sehari-hari."

WS Rendra mencatat, karena fokus pada pendokumentasian, H.B Jassin menjadi tak memiliki banyak teman. Ia juga berjuang keras hanya untuk membeli sebuah lemari, karena sedang kesulitan uang. "Masa krisis H.B Jassin adalah sekitar tahun 1964. Di samping menyelamatkan dokumentasi itu supaya jangan dimakan rayap, Ia juga harus berusaha keras agar dokumentasinya itu jangan disita Lekra/PKI untuk dibakar. Waktu itu orang-orang Lekra memang mengincar-ngincar dokumentasi itu untuk dimusnahkan," katanya.

Apa yang dilakukan H.B Jassin ini sangat bernilai bagi Indonesia. Pada 1975, penyair dan dosen sastra Universitas Indonesia Sapardi Djoko Damono dalam tulisannya menyebutkan, tidak bisa dibayangkan kalau H.B Jassin tidak melakukan dokumentasi sastra Indonesia. "Tidak bisa membayangkan kalau tak ada koleksi Jassin, saya akan belajar dari mana tentang sastra Indonesia," kata Sapardi.

Pada 1986, sastrawan dan wartawan Mochtar Lubis, mencatat: "Di samping terkenal sebagai kritikus sastra, Jassin juga terkenal di dalam dan luar negeri, terutama di pusat-pusat penelitian sastra di banyak perguruan tinggi, sebagai satu-satunya pengumpul dokumentasi sastra Indonesia modern yang terbesar dan terlengkap di dunia".

Melihat perjuangannya yang rela menghabiskan dananya sendiri, pada 1976 atas prakarsa teman-teman seperti Ajip Rosidi mengulurkan ke H.B Jassin agar mendirikan Yayasan. Difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Letjen Ali Sadikin, pada 28 Juni 1976 berdirilah Yayasan Dokumentasi H.B Jassin. Tanggal 30 Mei 1977, Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin diresmikan oleh Letjen Ali Sadikin.

Mulai saat itulah, semua dokumen sastra H.B. Jassin yang berada di berbagai tempat disimpan dan dikumpulkan pada satu tempat yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki, dikelola oleh Yayasan Dokumentasi Sastra H.B. Jassin yang lebih dikenal dengan sebutan PDS H.B. Jassin.

Dengan begitu, mulai ada keterlibatan publik secara lebih luas dalam proses dokumentasi sastra Indonesia. Walau sudah ada bantuan dana dari Pemda DKI, namun besarnya naik-turun sehingga tidak cukup menunjang kegiatan yayasan. Kondisi PDS H.B. Jassin memprihatinkan, bahkan pada 1983 aliran listriknya dimatikan karena sudah tak mampu membayar tagihan.

“Hati saya terganggu setelah membaca laporan media massa yang menyebutkan bahwa pusat (PDS H.B. Jassin) ini tidak memiliki alat pendingin dan sudah beberapa bulan listriknya dicabut karena tidak mampu membayar,” kata Adam Malik mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden tentang putusnya aliran listrik itu.

Tanggapan senada juga datang dari penyair Sutardji Calzoum Bachri. “Saya merasa malu besar, sebab orang-orang di luar negeri yang saya tahu betul, ngiler melihat kekayaan PDS HB Jassin,” kata Sutardji.

Walaupun kemudian masalah listrik bisa teratasi, kondisi PDS HB Jassin tetap memprihatinkan dan ini berlangsung sampai 2017. Kemudian atas prakarsa Gubernur DKI Anies Baswedan, ruang PDS H.B. Jassin diperbaiki. Bahkan mulai 2018, pengelolaan PDS HB Jassin diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Kini, PDS H.B. Jassin sudah dikelola dengan jauh lebih baik, termasuk dilakukan digitalisasi. Tempatnya tidak lagi berantakan dan tidak memprihatinkan lagi, kondisinya sudah lebih nyaman. H.B. Jassin sendiri, sebelum terkenal menjadi kritikus sastra juga menulis puisi dan cerpen yang dimuat di berbagai media. Ia juga menerjemahkan Alquran, yang disebut terjemahan berwajah puisi, dan menerjemahkan buku-buku sastra dunia.

Di era kolonial karya-karyanya dimuat di *Volksalmanak*, *Pandji Poestaka*, dan *Poedjangga Baroe*. Pada zaman pendudukan Jepang karya-karyanya dimuat di *Djawa Baroe*. Setelah kemerdekaan, karya-karyanya dimuat di *Merdeka* dan *Pantja Raja*. Menurut Sapardi Djoko Damono, setelah pertengahan 1940-an, H.B. Jassin tampaknya tidak berminat lagi pada penulisan cerpen dan puisi.

C. Layak Jadi Pahlawan Nasional

Menkopolkam Mahfud MD dalam sambutannya pada seminar mengakui, sosok HB Jassin dengan maha karyanya memang layak menjadi pahlawan nasional. “Bagi saya dari sudut materinya atau jati dirinya, sosok HB Jassin dan maha karyanya memang layak menjadi pahlawan nasional,” kata Mahfud MD yang datang ke seminar mewakili pemerintah sebagai Ketua Dewan Pembina Gelar dan Tanda Kehormatan.

Ia mengatakan, sangat mengapresiasi undangan seminar nasional yang mengangkat peran ketokohan HB Jassin dari Gorontalo ini dan diusulkan menjadi

Pahlawan Nasional. Indonesia, lanjutnya, punya banyak pahlawan nasional yang bergerak dibidang seni. Pada Oktober 2021, pemerintah menganugerahi tokoh perfilman Usmar Ismail sebagai Pahlawan Nasional. Sebelumnya, pada 2004 pemerintah mengukuhkan pencipta lagu Ismail Marzuki sebagai Pahlawan Nasional. Jauh sebelumnya, pada 1974 pemerintah juga telah memberi gelar Pahlawan Nasional kepada sastrawan Amir Hamzah.



“Jika dideretkan dengan nama-nama itu, HB Jassin ini tidak kalah untuk disebut memenuhi syarat dengan alasan HB Jassin dapat memperkuat optimisme kita sebagai bangsa dalam menghadapi semua tantangan dan persoalan serta mengharuskan akal budi kita di tengah situasi politik ekonomi dan sosial yang cenderung semakin keras,” kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud, karya sastra sesungguhnya bukan hanya berisi dongeng atau khayalan kosong karena sastra itu lahir dari pergaulan antar manusia di dalam hidup dan kehidupan. Sastra merupakan cermin sekaligus ekspresi kemanusiaan dan kehidupan sosial yang disajikan melalui keindahan kata, keindahan kalimat dan alur kisah yang sangat bagus. Karya sastra harus diselami dan diarungi dengan seluruh rasa, dan dengan rahasia yang ada di baliknya. Mengutip karya tokoh sastra terkenal Kahlil Gibran, Mahfud MD mengatakan, “berikan kepada saya sebuah seruling, mari kita bernyanyi bersama karena di dalam serulingku ada pesan pesan dan rahasia kehidupan”.

H.B Jassin memang sudah meninggal, tapi karyanya telah lama menjadi bagian substansi Pendidikan Bahasa dan Sastra dalam dunia Pendidikan Bahasa di Indonesia. Pendidikan Bahasa tentu tidak hanya sekedar menggunakan bahasa yang baik dan benar, melainkan juga berbahasa dengan indah dan sesuai dengan rasa keindahan, dan ini sarat ditemukan pada karya H.B Jassin. “Kita dapat mencatatnya bahwa H.B Jassin dalam hidupnya telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kekayaan khasanah Bahasa Indonesia dan pembentukan Peradaban Indonesia,” kata Mahfud MD.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan, karya sastra telah mampu mengembangkan kesadaran sosial dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Salah satu peran penting H.B Jassin pada masa perjuangan kemerdekaan ini adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebuah buku yang berjudul Max Havellar, buah karya Eduard Douwes Dekker, yang dikenal dengan nama pena Multatuli.

Buku yang tentang kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda tanah Hindia Belanda ini, telah menjadi salah satu sumber untuk membangkitkan tatanan dalam ketidakadilan dari ketimpangan di masa penjajahan. Karya sastra menjadi kritik, baik terhadap negara, terhadap diri sendiri, maupun terhadap perkembangan sosial politik agar tidak melenceng dari semangat kemerdekaan.

H.B Jassin, menurut Mahfud MD, juga memiliki integritas, di mana dia telah melindungi seorang penulis yang dituduh melakukan penistaan agama pada tahun 1968, pada waktu itu sudah berlaku Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Saat itu beliau menulis karyanya berjudul "Langit Makin Mendung" yang dimuat di majalah sastra dengan menggunakan nama samaran Kipanjikusmin. Isinya dianggap menghina Agama Islam dan sebagai editor majalah Sastra H.B Jassin diminta untuk menggunakan nama asli penulis. H.B Jassin menolaknya, Ia dibawa ke pengadilan dan didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dihukum 1 (satu) tahun.

Selain itu, kata Mahfud, karya HB Jassin yang sangat terkenal yaitu tentang "Al-Quranul Karim Bacaan Mulia". Al-Quran berwajah puisi tersebut, lanjutnya, sangat populer ketika Ia mahasiswa dan setelah itu populer di tengah-tengah masyarakat.

Selain di bidang sastra, H.B Jassin memiliki peran besar untuk menumbuhkan literasi dengan menjadi redaktur buku dan karya sastra di Indonesia. Ia menempatkan kritik sastranya lebih bersifat edukatif dan apresiatif, kritiknya menempatkan pada kepekaan dan perasaan daripada teori ilmiah.

Mahfud MD menegaskan, sebagai Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Ia menilai, dari catatan hidup dan karyanya, H.B Jassin sudah pantas menjadi Pahlawan Nasional. Namun penetapannya, tentu harus di dalam suatu prosedur. Seminar seperti yang digelar ini merupakan salah satu prosedur, tetapi ini belumlah cukup. Harus ada daerah yang akan mengusulkan, ditentukan apakah diusulkan dari Jakarta karena H.B Jassin tinggal di Jakarta ataukah dari Gorontalo di tanah kelahirannya.

"Mau tidak hal tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui. Setelah diusulkan oleh Gubernur maka Kementerian Sosial mendaftarkan nama-nama yang layak untuk diserahkan kepada Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, yang kemudian dilakukan perankingan yang akan diserahkan kepada presiden untuk dipilih atau ditetapkan seluruhnya menjadi Pahlawan Nasional," kata Mahfud MD.

D. Soft Power bagi Nation State

Dalam pandangan cendekiawan dan pengamat sosial budaya Fachry Ali, membicarakan H.B Jassin sebenarnya mendiskusikan tentang soft power. H.B Jassin adalah salah satu yang secara kontinyu mereproduksi soft power bagi nation state bagi negara dan bangsa. Inilah peran penting H.B Jassin yang secara kontinyu mereproduksi gagasannya.

H.B Jassin hanya berhenti setelah meninggal. “Inti dari H.B Jassin adalah tokoh yang mereproduksi terus menerus *software* dan kita adalah *hard power* secara keseluruhan. HB Jassin seperti yang dikatakan oleh Pak Rachmat Gobel membiayai sendiri elemen-elemen dari *software*, jadi memang sangat pantas untuk kita ajukan sebagai tokoh nasional. Dengan demikian seperti kata Pak Mahfud MD, kita memang harus menjunjung peradaban,” kata Fachry Ali.

Senada dengan Fachry Ali, budayawan dan penyair Nirwan Dewanto menyampaikan, bagi orang-orang di lingkungan seni dan budaya, H.B Jassin adalah salah satu wujud *soft power* di dalam wacana nasionalisme Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia itu dibangun secara terus menerus melalui pergulatan yang tidak henti, melalui 1 (satu) disiplin, tidak melalui 1 (satu) rumus. Apa yang dilakukan oleh HB Jassin yaitu bekerja di belakang adalah bagian yang sangat penting dalam proses membangun peradaban Indonesia.”

H.B Jassin melakukan rangkap peran yang tidak mungkin dilakukan oleh siapa pun di Indonesia. Ia menjalani peran ini sejak dahulu, begitu panjang masa kerjanya sehingga tidak mungkin direproduksi oleh orang lain. Pertama adalah peran selaku redaktur majalah-majalah sastra. Ini sudah tidak bisa ditemui lagi di masa sekarang, karena saat ini tidak lagi ada satupun majalah sastra. Dahulu, para sastrawan menjadi sastrawan melalui majalah sastra. Chairil Anwar hanya muncul di majalah sastra. Amir Hamzah hanya muncul di majalah Pujangga Baru. Sapardi Djoko Damono, Goenawan Mohamad, dan Pramoedya Ananta Toer kesemuanya muncul di majalah sastra.

H.B Jassin mengambil posisi yang sangat tepat, berada di semua majalah sastra dari tahun 1940an hingga akhir hidupnya. Mulai dari majalah Panji Pustaka hingga majalah Horison. Buah kerjanya sebagai redaktur menghasilkan suatu komentar, cikal bakal kritik sastra yang sangat berguna. Bukan hanya untuk mengukuhkan para sastrawan tetapi memperkenalkan sastra Indonesia kepada semua. H.B Jassin memberlakukan dirinya sebagai jembatan apresiasi.

“Saya mengenal sastra Indonesia melalui majalah Gema Tanah Air, Angkatan 66, yang semua idiologinya disusun oleh Bapak HB Jassin. Sejarah sastra Indonesia kita praktis adalah sejarah sastra yang disusun melalui buah karya H.B Jassin. Amir Hamzah disebut sebagai Raja Penyair Zaman Pujangga Baru, Chairil Anwar disebut Pembaharu Besar Angkatan Tahun 45 melalui tangan HB Jassin. Buah dari kritik ini yang membuat kita mempunyai sejarah sastra Indonesia sebagai soft power. Kritik sastra adalah buah dari kerjanya sebagai redaktur sastra. Dari pekerjaannya sebagai redaktur sastra, HB Jassin membangun warisan sastra Indonesia yang sangat besar bernama Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin,” Nirwan

Menurut Nirwan, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin bukan hanya berisi buku-buku tapi juga menyimpan seluruh jejak kreativitas yang pernah dihasilkan oleh para sastrawan. “Anda kalau ingin melihat tulisan tangan Chairil Anwar, surat-surat cintanya Sitor Situmorang, catatan harian Amir Hamzah yang sangat pribadi, maka orang akan menemukannya di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Bahkan nota pembelian pun ada, buku-buku harian beberapa orang pengarang yang ditiptkan dan tidak diperkenankan dibuka hingga pengarang tersebut meninggal.

“Terlalu banyak rahasia yang tersimpan sehingga pengarang tidak ingin untuk diketahui bahkan oleh keluarganya sekalipun. Itulah Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin yang sangat unik menurut saya, bukan hanya karena dibangun oleh HB Jassin melainkan karena seluruh rekam jejak dari sastra Indonesia terdapat di sana,” katanya.

H.B Jassin mengerjakan pekerjaannya sendirian. HB Jassin tidak dibantu oleh negara maupun filantropi. Ini menjadi tauladan penting, karena saat ini semua orang harus menunggu birokrasi dan belas kasihan negara untuk mewujudkan ambisinya. H.B Jassin dalam melakukan pekerjaannya tidak seperti itu. Memang betul ada bantuan dari Ali Sadikin, tetapi bantuan itu hadir ketika semuanya sudah jadi. Perlu diingat bahwa HB Jassin bukan hanya sebagai dokumentator tetapi juga penerjemah sastra. Penerjemah sastra adalah tugas yang sangat penting karena menurut H.B Jassin sastra Indonesia adalah warga sastra dunia. Artinya, sastra Indonesia harus memiliki mutu yang setara dengan sastra internasional. Salah satu jalannya adalah penerjemahan. HB Jassin menerjemahkan tulisan Max Havelaar, beberapa pengarang Belanda dan Jerman, Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia, dan masih banyak sekali terjemahan HB Jassin dari penulis bahasa Belanda dan Jerman.



Generasi HB Jassin adalah generasi yang sangat khas dan kosmopolit. Soekarno-Hatta, HB Jassin, Chairil Anwar adalah tokoh yang membangun nasionalisme dengan wawasan internasional. H.B Jassin adalah penerjemah besar yang memperkaya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya dapat diperkaya melalui terjemahan. HB Jassin adalah seorang wali penjaga sastra Indonesia, artinya sastra Indonesia dalam satu himpunan keseluruhannya adalah *private history of our nations*.

“Untuk memahami jati diri bangsa Indonesia, Anda harus membaca karya-karya Chairil Anwar, Amir Hamzah, dan penyair-penyair Indonesia lainnya. HB Jassin berjasa atas lahirnya karya-karya sastra Indonesia dari tokoh-tokoh ini,” kata Nirwan.

Apabila mengingat maxim ketiga dari Sumpah Pemuda yaitu menjunjung bahasa persatuan, lanjut Nirwan, maka bentuk terbaik dari menjunjung bahasa persatuan adalah sastra Indonesia. Ketika membaca tulisan Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan prosa-prosa lainnya, orang akan tahu bahwa bahasa Indonesia sangat maju.

Menurut Nirwan, HB Jassin yang saat ini diusulkan oleh masyarakat dari Gorontalo dan Bapak Rachmat Gobel untuk menjadi pahlawan nasional adalah orang Gorontalo dalam arti tertentu. Gorontalo atau daerah sebagaimana dibuktikan oleh HB Jassin bukan hanya dapat menghasilkan sekedar putra daerah tetapi juga manusia universal. H.B Jassin menjadi kritikus dan dokumentator kelasnya adalah internasional.

Yang ingin saya sampaikan, kata Nirwan, HB Jassin adalah sumbangan daerah kepada peradaban Indonesia dan kebudayaan dunia. Sosok ini telah menyusun sejarah sastra sebagai *private history of nations*. Artinya, Ia menunjukkan karya-karya yang terbaik dalam sastra Indonesia. Dengan kata lain, HB Jassin mengatakan bahwa “warga saya, warga Indonesia adalah warga dunia yang layak mendapatkan asupan gizi bacaan yang terbaik”.

Pendekatan HB Jassin adalah pendekatan kanonik. Ia menyusun daftar bacaan yang penting sebagai sarana mengembangkan diri bukan hanya sebagai bangsa tetapi juga manusia. Bagi Nirwan, H.B Jassin juga mengatasi politik identitas. Ini merupakan contoh yang sangat penting, Indonesia harus mengatasi politik identitas. H.B Jassin menurut hemat saya, kata Nirwan, adalah sosok kontra argumen dari semua yang banyak orang sekarang ini, berlomba-lomba untuk membuat monumen. Apabila seseorang ingin menjadi monumen, ia perlu dukungan politik, cap jempol di media massa, dan *clickbait*.

“Semua orang menjadikan dirinya monumen, semua orang perlu bantuan massa dan negara untuk menjadi monumen-monumen kecil maupun besar. H.B Jassin adalah tokoh yang sama sekali tidak demikian. HB Jassin adalah anti monumen yang sangat monumental,” kata Nirwan Dewanto.

E. Hidupnya Sangat Sederhana

Kata Oyon Sofyan, staf H.B Jassin yang kemudian menjadi penulis biografinya, H.B Jassin sudah menulis dan menjadi penyair sejak SMP, saat itu bernama HBS, saat itu Jassin tinggal di Medan.

“Ini yang orang jarang mengungkapkannya. Ia sudah menulis di berbagai majalah dan media massa sejak HBS. Waktu itu dalam Bahasa Belanda. Dia menjadi redaktur atau redaksi dengan Chairil Anwar dan Bahrum Rangkuti. Akhirnya mereka tiga orang ini menjadi sastrawan besar semua,” katanya.

Oyon mengatakan, suatu ketika pada tahun 1940-an H.B Jassin datang ke Jakarta mencari pekerjaan dan bekerja di Balai Pustaka atas rekomendasi Sutan Takdir Alisjahbana. Chairil tahu bahwa temannya yang namanya Jassin ada di Balai Pustaka, di majalah Pujangga Baru. Maka anak Medan dan muda itu datanglah ke Jakarta menemui temannya sambil membawa naskah puisi. “Sin apa kabar?” kata Chairil.

“Baik,” kata Jassin. “Ini Sin ada puisi saya, tolong dimuat di majalah Pujangga Baru,” kata Chairil. Itulah kira-kira dialog keduanya seperti diceritakan Oyon. Waktu itu Jassin sebagai sekretaris Pujangga Baru.

Saat itu H.B Jassin baru lulus dari sekolah, merasa masih kecil atau terlalu muda. “Saya tidak berkuasa Ril, untuk memuatkan tulisan kamu di majalah Pujangga Baru, di sana ada Takdir, ada Amir Hamzah, ada Arminjn Pane, dan lain-lain orang-orang tua. Saya ini hanya menerima naskah-naskah, tolong kamu sampaikan pada orang-orang itu puisi kamu pada Takdir cs,” kata H.B Jassin.

Maka H.B Jassin pun menyerahkan naskah itu ke Takdir Alisyabana dan kawan-kawan. Namun apa jawaban mereka? “Ini bukan puisi,” kata mereka. Kemudian H.B Jassin menyampaikan hal itu pada Chairil. “Gimana Sin? Ditolak? Itu orang-orang tua tidak mengerti puisi,” kata Chairil.

“Menurutmu bagus ga?” kata Chairil, “Bagus sekali, tapi kan tidak bisa mengatakan bagus dengan lisan,” kata Jassin. Akhirnya H.B Jassin membuat studi merumuskan dan menjabarkan puisi-puisi Chairil Anwar, dan kemudian dimuat di majalah pada tahun 1945. Gegerlah sastra Indonesia, bahwa H.B Jassin telah menemukan penyair, Chairil Anwar. “Kalau tidak ada Jassin, mungkin Chairil tidak akan dikenal,” kata Oyon.

Oyon mengatakan, sejak SMP H.B Jassin sudah berpolemik dengan banyak orang di majalah Bahasa Belanda. “Saya sudah rekap semua tulisan-tulisannya zaman dulu, baiknya memang diterbitkan tulisan itu. Itulah di antaranya kebesaran Jassin,” katanya.

Selain itu ada kisah Oyon saat mengantar Jassin bertemu KH Abdurrahman Wahid. Saat itu hendak meminta pendapat Gus Dur. “Gus saya ini mau membuat Al-Quran berwajah puisi,” kata Jassin. Kata Gus Dur, “Silakan Pak Jassin tidak melanggar aturan, saya ada di belakang Pak Jassin.” Jassin juga sudah datang ke Kementerian Agama dan tokoh agama lain, mereka menyetujui juga untuk diterbitkan. Tapi waktu telah membuat mereka berubah sikap, menjadi tidak setuju dengan alasan masyarakat Indonesia belum bisa menerima hal seperti itu.



Jassin mengatakan, “Yon kok jadi begini, bila perlu rumah saya dijual, untuk bisa menerbitkan Quran berwajah puisi.” Kata Jassin, “Sayang saya ini sudah tua, kalau saya masih muda, saya layani mereka yang punya keberatan.” Menurut Oyon, Jassin biasa menghadapi situasi seperti itu seperti dulu membela penulis dengan nama samara Ki Pandji Kusmin hingga Jassin dihukum dihukum.

Oyon bercerita, hidup Jassin sangat sederhana. “Saya gaul dengan Jassin hampir 30 tahun lebih, tiap hari jalan kaki atau naik bajaj. Saya tanya, kok jalan kaki? Kata Jassin, jalan kaki karena senang bisa jalan sambil tidak lepas bisa baca Asmaul Husna,” katanya.

Suatu kali, Jassin menegur karena pekerjaan makin menumpuk padahal setelah menjadi yayasan ada karyawan. “Walaupun sudah jadi Yayasan, H.B Jassin tetap mengerjakan, padahal dia sibuknya luar biasa. Masih megang kritik koran, menandai koran, itu yang tidak dimiliki orang lain. Jassin itu tenaga kuda, kuat sekali,” katanya.



■ Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat kegiatan seminar nasional HB. Jassin

Mendorong Peran Wanita Syarikat Islam Dalam Menjawab Tantangan Bangsa

Mewarisi ayahnya, Thayeb Mohammad Gobel, Rachmat Gobel dikenal dekat dengan organisasi Syarikat Islam. Ia adalah Wakil Ketua Umum Syarikat Islam, organisasi yang sudah eksis sejak era kolonial. Didirikan pada 16 Oktober 1905 dengan nama Sarekat Dagang Islam. Perkumpulan pedagang-pedagang Islam ini dibentuk untuk menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat pada masa itu. Pada 1906 SDI menggelar kongres pertamanya di Surabaya dan memutuskan untuk memperluas pergerakan organisasi dan merubah nama menjadi Sarekat Islam (SI).

Pada Kamis, 8 September 2022, bertempat di ruang kerjanya di DPR RI, Rachmat Gobel menerima tamu dari Wanita Syarikat Islam (WSI). Kelahiran WSI ini tidak dapat dipisahkan dari Syarikat Dagang Islam (SDI) 1905 dan Syarikat Islam tahun 1906.

Prof Dr Valina Singka Subekti sebagai Ketua Umum WSI mengundang Gobel untuk hadir dan memberikan pidato pada pembukaan Musyawarah Nasional XI atau kongres Wanita Syarikat Islam yang akan dilaksanakan pada Jumat, 9 September 2022. Acara akan berlangsung di Hotel Grand Cempaka, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kongres akan diikuti 156 peserta dari seluruh Indonesia dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dijadualkan akan membuka kongres tersebut.

Pada kesempatan itu, Valina menyampaikan bahwa kongres tersebut akan fokus pada tiga isu, yaitu ekonomi, ketahanan keluarga, serta keterlibatan perempuan dalam politik. Tentang hal ini, Rachmat Gobel menyampaikan tentang penting WSI untuk memperhatikan masalah pendidikan bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.



Menurut Rachmat Gobel, pendidikan harus bisa menjawab tantangan yang dihadapi bangsa dan negara. Sebagai contoh, Ia mengemukakan tentang ancaman krisis pangan yang dihadapi dunia. Ini akibat *climate change*, konflik global, dan meningkatnya jumlah penduduk dunia. Pendidikan harus bisa menjawab tantangan tersebut. Karena Indonesia juga menghadapi problem usia petani yang menua dan tak tertariknya generasi muda untuk menjadi petani. Pada titik ini, selain perlu solusi dari sisi lainnya, maka peran Pendidikan adalah bagaimana mengintegrasikan Pendidikan dalam pertanian.



Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang industrialisasi yang harus dilakukan Indonesia. Hal itu ia kemukakan untuk menjawab pertanyaan publik bahwa apakah benar saat ini sedang terjadi de-industrialisasi di Indonesia. Baginya, industrialisasi adalah sebuah keharusan. Untuk itu insitusi pendidikan harus menyiapkan sumberdaya manusianya agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Karena itu, menurut Rachmat Gobel, Kemendikbud harus melakukan koordinasi dengan banyak kementerian yang membidangi ekonomi, bahkan termasuk dengan kementerian tenaga kerja. Ia justru prihatin karena kemenristek dikti yang sangat sibuk dengan program digitalisasi pendidikan. “Jangan sampai berorientasi pada proyek, pengadaan, dan vendor. Karena digitalisasi pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi infrastrukturnya.

Memenuhi undangan WSI, Rachmat Gobel hadir dalam Munas XI Wanita Syarikat Islam. Dalam sambutannya, Rachmat Gobel menilai jumlah kaum wanita di jabatan-jabatan publik masih jauh lebih kecil dari proporsi populasinya, yang sekitar 49,5% dari total penduduk Indonesia. “Masih ada bias gender. Karena itu kaum wanita harus merebut jabatan-jabatan publik”.

Acara itu dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara virtual. Dalam pembukaan organisasi yang dipimpin Prof Dr Valina Singka Subekti itu hadir, antara lain, Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gobel sendiri adalah Wakil Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.

Rachmat Gobel mengatakan, dalam sejarah Indonesia, kaum wanita memiliki jejak yang kuat. Bahkan di antara mereka ada yang memimpin perang seperti Cut Nyak Dien dan Laksamana Malahayati. Di Jawa, Ratu Kalinyamat menjadi promotor pengiriman armada kapal perang terbesar untuk menyerbu penjajah Portugal di Selat Malaka. Kontribusi kaum wanita itu terus berlangsung hingga kini di berbagai bidang. Namun ia menilai, wanita yang menduduki jabatan publik masih jauh dari proporsinya. Padahal kualitas wanita Indonesia sama baiknya dengan kaum pria.

Untuk itu, Gobel mengajak para aktivis Wanita Syarikat Islam untuk tak berhenti berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. "Fokus pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Karena kualitas sumberdaya manusia yang unggul akan menjadi pembeda dalam transformasi suatu bangsa," katanya. Ia menyebutkan, bangsa yang unggul adalah bangsa dengan karakter yang kuat. "Bukan yang lembek. Jadilah wanita pejuang".

Gobel mengingatkan, kondisi geopolitik dunia yang tak stabil seperti perang Rusia-Ukraina telah mengganggu pasokan barang di seluruh dunia. "Harga-harga jadi naik," katanya. Hal ini membutuhkan solusi dari tiap bangsa, termasuk dari Wanita Syarikat Islam. "Munas ini diharapkan bisa melahirkan konsepsi-konsepsi di bidang sosial, budaya, dan ekonomi".

Menurutnya, banyak orang yang berpendapat bahwa Indonesia kekurangan dana. "Itu harus dikoreksi. Jumlah penduduk yang 275 juta serta kekayaan alam Indonesia yang berlimpah merupakan modal yang sangat besar. Yang penting harus bersatu. Seperti lidi, jika bersatu menjadi kuat" .

Selain itu, Rachmat Gobel juga mengatakan Wanita Syarikat Islam bisa melahirkan lebih banyak lagi kader-kader bangsa. "Indonesia sangat membutuhkan partisipasi semua pihak untuk membangun negeri ini" .





Rachmat Gobel Ajak Majelis Adat Kerajaan Nusantara Kembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

Sampai saat ini potensi ekonomis dari keragaman budaya sebagai salah satu basis ekonomi kreatif belum banyak dilirik, termasuk oleh kebijakan pemerintah. Perhatian masih jauh dari memadai, padahal Indonesia mempunyai potensinya sangat besar dibidang ini, seperti industri kerajinan dan industri jamu atau herbal.

“Potensi ekonomi kreatif berbasis budaya sangat besar, tapi pengembangan masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, saya mengajak kerajaan-kerajaan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara untuk bersama-sama dengan Pemerintah menciptakan ekonomi kreatif yang berbasis budaya,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menerima perwakilan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) untuk audiensi pada Kamis 18 Agustus 2022. Audiensi ini 11 orang pengurus dan perwakilan kerajaan se-nusantara.

Berdasarkan data dari IMARC Group, perusahaan market research terkemuka, permintaan dunia terhadap produk berbasis budaya seperti kerajinan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hotel, pariwisata, termasuk perkantoran. Pada 2022, nilai pasar produk kerajinan dunia diperkirakan sudah mencapai US\$ 752,2 miliar, dan diproyeksikan akan mencapai US\$ 1.296,6 miliar pada 2028. Angka ini jauh diatas ekspor produk kerajinan Indonesia yang menurut data Kemenperind baru mencapai US\$ 725,5 juta pada Januari-September.

Potensi yang sama juga terlihat pada industri jamu atau *herbal medicine*. Menurut *Fortune Bussine Insight*, nilai pasar herbal medicine pada 2022 sudah mencapai US\$ 165,66 miliar dan diproyeksikan akan US\$ 347,50 miliar pada 2029. Sementara itu data BPS menyebutkan, pada 2021 lalu total nilai ekspor jamu Indonesia pada 2021 baru mencapai US\$ 41,5 juta.

“Jadi kita harus bisa memanfaatkan potensi ekonomi kreatif berbasis keragaman budaya dan keragaman hayati agar bisa mempunyai nilai ekonomi tinggi. Perlu diingat bahwa industri kerajinan dan industri jamu mempunyai keterkaitan sangat dengan UMKM sebagai pelaku terbesar ekonomi rakyat,” .

Oleh karena itulah, Rachmat Gobel juga mengharapkan MAKN mengangkat isu mengenai pendidikan budaya serta membawa misi pengembangan SDM untuk pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini harus menjadi jargon ataupun isu utama dari MAKN dalam menjalankan program-program MAKN itu sendiri.

Dalam audiensi dengan Rachmat Gobel, MAKN mengharapkan dukungan DPR, terutama terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara yang saat ini telah masuk dalam list Prolegnas jangka menengah 5 tahun yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), agar segera untuk di masukkan ke prolegnas prioritas agar dapat dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Undang-Undang.



Dalam kesempatan itu, MAKN juga menyinggung soal 5 target Presiden Joko Widodo yang belum dapat terealisasi diantaranya penyesuaian asset-asset kerajaan yang dulu dipinjamkan ke NKRI, permasalahan tanah hak ulayat adat, pembiayaan revitalisasi keraton atau istana kerajaan diharapkan tidak lagi parsial.

Disamping itu, MAKN juga menyoroti belum terealisasinya pembiayaan pemeliharaan kebudayaan kerajaan-kerajaan nusantara yang hampir punah. Kemitraan MAKN dengan berbagai kementerian khususnya Kementerian Pariwisata belum terealisasi. MAKN juga melihat, pentingnya kehadiran negara dalam membantu digitalisasi dokumentasi kerajaan-kerajaan Nusantara. Ini penting untuk dilakukan karena eksistensi kerajaan-kerajaan Nusantara bergantung pada dokumen-dokumen kerajaan masing-masing.

Menanggapi hal tersebut Rachmat Gobel sangat mengapresiasi adanya organisasi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), dimana kehadiran MAKN merupakan bentuk dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan patut untuk di lestarikan.

Terkait dengan isu-isu yang disampaikan MAKN, Rachmat Gobel mengatakan, akan mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara, untuk dapat di masukkan kedalam Prolegnas Prioritas agar dapat segera dibahas serta di sahkan. Diharapkan untuk saat ini MAKN terus melakukan konsolidasi ke seluruh kerajaan-kerajaan nusantara yang belum bergabung ke MAKN, hal ini penting dilakukan untuk menjaga budaya nasional tetap eksis, namun untuk program-program lainnya yang diminta oleh MAKN, Rachmat Gobel menegaskan bahwa saat ini Pemerintah masih memfokuskan kepada agenda-agenda prioritas lainnya.



MAKN adalah erkumpulan kerajaan nusantara yang bersifat kekeluargaan independen, didirikan pada bulan Agustus tahun 2019 oleh 56 deklarator kerajaan dari berbagai daerah di Indonesia. MAKN dibentuk dengan tujuan menjaga, melestarikan, mengembangkan dan melindungi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya warisan para leluhur kerjaan. Serta membangun kerjasama antara kerajaan-kerajaan nusantara, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta lembaga-lembaga swasta dan BUMN. (*)





Kenduri Bahari di Banyuwangi: Memperkuat Budaya Maritim Berbasis Kearifan Lokal

Jawa Timur mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pesisir. Terdapat 151 wilayah kecamatan yang mempunyai kawasan pesisir di 22 Kabupaten/Kota pesisir dengan luas 1.382.233 hektar. Luas perairan mencapai 54.718 km² yang diukur sejauh 12 mil dari garis pantai. Panjang garis pantai diukur dari pasang tertinggi mencapai 3.498,12 km dan mempunyai 427 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terluar (terdepan) sebanyak 3 pulau.

Dengan kondisi geografis seperti itu, sebagian masyarakat Jawa Timur hidup dalam lingkungan budaya maritim yang kuat. Dalam kaitan inilah, Partai Nasdem menggelar acara yang diberi tajuk Kenduri Maritim di salah satu kabupaten di provinsi ini yaitu Kabupaten Banyuwangi.

Dalam budaya Jawa, kenduri berarti selamat atau kenduren, satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Kenduri adalah warisan leluhur yang sangat baik, kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar anggota masyarakat.

Secara budaya, kenduri memiliki makna ungkapan rasa syukur secara bersama-sama, baik masyarakat di wilayah pegunungan maupun di tepi laut. Acara kenduri bukan hanya mengandung spirit menikmati hasil, tapi membagikan hasil yang diperoleh dari sumber daya alam dengan prinsip kebersamaan dan keikhlasan.

Secara sosial, kenduri bermakna merajut tali silaturahmi, menjalin dan merawat hubungan antar manusia untuk saling hormat-menghormati, juga menerima sajian yang apa adanya. Dilakukan dengan sukarela, melibatkan masyarakat dengan saling mendatangi dan mendoakan yang terbaik.

Kegiatan Kenduri Bahari dibuka dan diresmikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, dengan mengedepankan budaya kearifan lokal masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya interaksi antar manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan alam dan interaksi seluruh makhluk biota laut yang menjadikan mangrove sebagai “kawasan mencari makan”, tempat tinggal dan pembiakan hewan laut.

Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan sebagai Gerakan Sadar Budaya Konservasi melalui budaya larung sesajen di laut. penanaman mangrove Di Pantai Utara Jawa Timur dan selamatan kenduri untuk para petani, nelayan dan masyarakat Banyuwangi.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan DPD NasDem ini, Kenduri ini juga menjadi tema acara yaitu Kendalikan, Lindungi dan Lestarikan, semua potensi yang ada di kawasan Banyuwangi, terutama budaya maritimnya. Melalui kegiatan ini, masyarakat Banyuwangi yang sebagian besar adalah nelayan diajak untuk melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman ribuan mangrove.

Dalam acara ini juga dihadiri sejumlah kader partai diantara anggota Komisi IV DPR RI, H. Charles Meikyansah, S.Sos. Acara juga disaksikan langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Sri Sajekti Sudjunadi alias Bunda Jannet. Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Banyuwangi, Ir H Supriyadi Karima Syaiful dan Zamroni SH. Termasuk Ketua Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Ali Mustofa beserta anggota dan jajaran pengurus lainnya.

Kenduri Bahari Banyuwangi antara lain dimeriah dengan kegiatan larung sesajen untuk para nelayan, penanaman mangrove untuk pantai yang terlindung, laguna, muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas genangan pada saat surut dan selamatan serta pertemuan dengan para nelayan, petani dan masyarakat Banyuwangi.



A. Kegiatan Larung di Teluk Panggang

Tradisi melarung adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat Banyuwani. Dalam rangka penyelenggaraan Kenduri Bahari, pada 28 Agustus 2022 Partai NasDem menggelar acara larung di kawasan Teluk Panggang, Dusun Kali Watu dan Dusun Pondok Asem, Desa Kedungsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Rachmat Gobel, baginya mengikuti acara ini sebagai pengalaman luar biasa. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan bagaimana perjuangan para nelayan untuk bisa menghidupi keluarga dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa dengan melaut untuk mencari ikan.

Dalam kesempatan ini Rachmat Gobel menyampaikan bahwa para nelayan ini adalah pejuang yang ikut berperan di dalam mengisi pembangunan negeri ini. Tanpa para nelayan, katanya, bangsa ini tidak akan bisa menikmati hasil kekayaan laut Indonesia yang dianugerahkan Allah SWT kepada Indonesia. Dalam acara tersebut Rachmat Gobel juga telah menampung berbagai aspirasi para nelayan, salah satunya adalah meminta perbaikan dermaga, dan usulan tersebut akan disampaikan kepada Komisi terkait untuk ditindaklanjuti.

“Kita harus memikirkan untuk merumuskan apa yang harus diperbaiki supaya hasil produktivitas nelayan di Banyuwangi bisa ditingkatkan. Para nelayan adalah pejuang dalam mengisi pembangunan negeri. Tanpa para nelayan, kita tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam yang diberikan Allah, Tuhan yang Maha Esa,”.

Rachmat Gobel juga menegaskan bahwa negara Indonesia, dianugerahi laut yang luas dan besar dengan seisinya, maka nelayan mempunyai peran penting dalam memenuhi kecukupan dan kestabilan sektor pangan di negeri ini. Apalagi saat ini dunia sedang memasuki masalah krisis pangan. Ia menyampaikan bahwa nelayan dan petani harus diberdayakan agar mendapat nilai tambah untuk bisa mengatasi masalah krisis pangan.



B. Penanaman Mangrove di Petilasan Naya Genggong

Sebagai provinsi yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, sejumlah daerah Jawa Timur mempunyai potensi untuk menjadi pusat kawasan mangrove. Terkait dengan potensi ini, melalui kegiatan Kenduri Bahari, Partai NasDem mengajak masyarakat untuk melestarikan hutan mangrove yang mempunyai arti penting bagi pengurangan emisi karbon. Dalam rangkaian Kenduri Bahari, Partai NasDem menyelenggarakan penanaman Mangrove di Petilasan Naya Genggong, Desa Kedungsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwang pada 28 Agustus 2022.

Besarnya potensi kawasan mangrove di Jatim menjadikan kegiatan penanaman pada ekosistem mangrove sangat penting dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Akan memberi dampak luas dalam mempercepat target pengurangan emisi karbon gas rumah kaca guna menghadang laju perubahan iklim.

Penanaman mangrove mampu melindungi pantai dari abrasi, energi gelombang tsunami, dan memperbaiki habitat pantai serta ekosistem pesisir pantai. Selain itu, hilirisasi dari produk mangrove bisa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar pesisir.

Berdasarkan PMN tahun 2021, luas mangrove eksisting di Jatim merupakan yang terluas di Pulau Jawa, Luasnya mencapai 27.221 hektar atau sekitar 48% dari luas total mangrove di Pulau Jawa.

Luas potensi habitat mangrove di Jawa Timur mencapai 51.577 hektar. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jatim hingga pada tahun 2021 antara lain melakukan penanaman mangrove seluas 42,75 hektar atau sebanyak 136.600 batang di Kabupaten Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, dan Bangkalan.



Hutan mangrove di pesisir Jawa Timur banyak yang rusak, karena ulah yang tidak bertanggung jawab. Sekitar 7.000 hektare rusak parah, 128.000 hektare rusak sedang, dan hanya 12.000 hektare dalam kondisi baik. Hutan mangrove yang masih terjaga baik di antaranya di pesisir Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi. "Hutan mangrove rusak akibat penjarahan liar," penjarahan hutan mangrove terjadi secara besar-besaran.

Pelaku (oknum) mengambil pohon dan batang tanaman lalu diolah menjadi arang dan bahan industri kosmetik dan farmasi. Tak hanya penjarahan liar, sejumlah kawasan hutan mangrove berubah menjadi pemukiman, industri dan tambak. Akibatnya luas hutan mangrove Jawa Timur terus menyusut. Penyusutan ini dikhawatirkan berdampak pada perekonomian masyarakat pesisir.

DPW NasDem Jawa Timur menginisiasi aksi penghijauan melalui gerakan Kendalikan, Lindungi dan Lestarikan atau "Kenduri Bahari". Dalam acara Kenduri bahari tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel diundang oleh DPW Partai NasDem Jatim untuk meresmikan dan menanam mangrove secara simbolis di Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi bersama para nelayan dan petani serta kader Partai NasDem. Rachmat Gobel juga sangat peduli terhadap lingkungan dan penghijauan dalam melestarikan alam sekitar, dari dimulainya penanaman mangrove, mudah-mudahan akan meningkatkan produksi oksigen yang sangat dibutuhkan masyarakat dunia dan kebutuhan orang banyak khususnya di Banyuwangi.

Dalam acara penanam mangrove ini, Rachmat Gobel didampingi oleh Ketua DPW NasDem Jatim, Sri Sajekti Sudjunadi (Bunda Janet). Ia menegaskan bahwa Partai NasDem melakukan aksi penanaman pohon sebagai langkah antisipasi perubahan iklim yang menjadi permasalahan dunia.

Rachmat Gobel menambahkan, aksi penanaman mangrove merupakan bantuan dari Bank Indonesia sebagai wujud syukur dan menjaga keindahan alam yang telah dianugerahkan Tuhan yang Maha Esa. Selain penanaman ribuan pohon mangrove, juga dibagikan bantuan bibit dari Bank Indonesia untuk para petani dan nelayan. Kegiatan ini juga dimeriahkan acara jalan sehat yang diikuti ribuan warga setempat. "Semua jalan sehat dengan suka ria. Ingat, bangsa Indonesia akan menjadi kuat jika kita sehat".



C. Panggung Budaya dan Kreatifitas Lokal

Kenduri Bahari juga dimeriahkan berbagai kegiatan budaya dan kesenian khas dari masyarakat pesisiran. Melalui acara ini disampaikan pesan-pesan kegembiraan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Aksi kepedulian sosial juga diselenggarakan seperti santunan/beasiswa anak yatim, maupun lomba-lomba olahan kuliner laut dengan menyasar kelompok ibu-ibu.



D. Kunjungan ke Industri Perkapalan

Dalam rangkaian kunjungan ke Banyuwangi, Rachmat Gobel juga mengunjungi perusahaan industri perkapalan milik swasta PT Lundin Industry Invest di Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Senin, 29 Agustus 2022. Pabrik tersebut sudah maju dan berteknologi unggul. Di pabrik ini Rachmat Gobel melihat salah satu produk PT Lundin Industry Invest yakni kapal pengangkut penumpang berkapasitas 60 orang, anti peluru dan dilengkapi peluncur roket. Kapal ini juga dilengkapi sistem pengoperasian yang serba komputer.

Salah satu keunggulan industri pertahanan dengan merek North Sea Boats ini adalah membuat kapal boat dengan bahan komposit berteknologi nano particle sehingga ringan, lebih kuat dari metal, dan bisa melaju dengan cepat. Selain memproduksi armored troop carrier, PT Lundin juga memproduksi kapal patroli, kapal tank, *catamaran*, *trimaran*, *amfibi*, *rib*, *combat*, *drone*, dan lain-lain.

PT Lundin telah mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Australia, Italia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Thailand, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Rusia, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan disebut sesuai standar NATO dan NASA. Perusahaan ini milik pasangan suami-istri John Lundin dan Lizza Lundin. Dalam kunjungan ini, Rachmat Gobel diterima oleh Lizza sebagai Direktur Utama PT Lundin.



Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel bersama Anggota DPR RI Charles Mekyansyah dari Fraksi NasDem Dapil Jatim dan Ibu Liza Presiden Direktur PT. Lundin Industry Invest melihat langsung kapal perang untuk Angkatan laut Indonesia yang dibuat oleh PT. Lundin.

Rachmat Gobel menyampaikan, kita harus mendukung dan melindunginya untuk ketahanan nasional Indonesia dan juga memberikan devisa buat Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar mendapat perlindungan dan juga prioritas. Tidak gampang untuk memiliki industri pertahanan yang unggul, karena teknologi militer biasanya sangat sulit untuk ditransfer dari negara-negara maju. Namun, kini sudah ada perusahaan swasta yang sudah bisa membuat industri pertahanan di Banyuwangi Jawa Timur.

Rachmat Gobel mengakui tidak mudah untuk membangun industri, apalagi industri militer. Karena itu, Ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada industri tersebut. Saat ini ada sekitar 16 perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang industri pertahanan. Salah satu di antaranya milik Tommy Winata yang memproduksi kendaraan taktis dan sejumlah BUMN juga memproduksi industri pertahanan seperti Pindad, Boma Bisma, Dahana, bahkan PAL dan Dirgantara Indonesia. BUMN strategis tersebut dirintis sejak era Sukarno, lalu dikembangkan di masa Soeharto, dan masih ada hingga kini.

Rachmat Gobel juga menyampaikan bahwa dulu APBN masih kecil, saat ini sudah cukup besar. Sudah saatnya industri pertahanan nasional yang merupakan industri strategis untuk mendapat perlindungan dan prioritas dari pemerintah.

Menurutnya, Indonesia akan terus berkembang untuk menjadi negara maju. Hal ini bisa dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat dan masuk ke dalam 20 negara dengan PDB terbesar di dunia, yaitu G-20. “Artinya anggaran pertahanan kita juga relatif besar. Jangan sampai anggaran yang cukup besar itu dihamburkan untuk memajukan industri pertahanan negara lain. Kita juga sudah pernah mengalami terkena embargo senjata militer sehingga kita menjadi lemah. Kini kita sudah memiliki industri pertahanan yang unggul. Jadi jangan disia-siakan,”.

Indonesia adalah negara maritim, sehingga akan membutuhkan banyak kapal boat untuk menjaga laut Indonesia yang luas. Selain yang bersifat militer, kapal boat juga diperlukan untuk menjaga kekayaan laut kita dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing.

Rachmat Gobel mengatakan, ia pernah diundang Turki untuk melihat industri pertahanan negara yang sedang beranjak bangkit tersebut. Awalnya mereka pun impor. Kini perlahan mereka mulai bisa mandiri, termasuk membangun industri komponennya. Indonesia harus bergerak ke arah seperti itu. Belanja pertahanan selain menyedot anggaran yang cukup besar juga memiliki makna strategis karena menyangkut kedaulatan dan rahasia negara. Jadi tak bisa tergantung impor terus.



“Meneguhkan Politik Kebangsaan, bahwa Partai NasDem sebagai gerakan politik berorientasi pada politik kebangsaan yang moderat dan melalui Partai NasDem masyarakat dapat menilai bahwa partai ini merupakan partai “wong waras” dimana ide, pikiran, dan gagasan menjadi nafas gerakannya.”

- Rachmat Gobel -



**MENUJU
PEMILU 2024**

**BAB
9**



Menguatkan Konsolidasi Partai Menuju Pemilu 2024

A. Menegaskan Identitas dan Platform Perjuangan Partai

Sebelum helatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni 2022 digelar, Partai NasDem menyelenggarakan kegiatan Pra-Rakernas antara lain dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* di NasDem Tower, Jl RP Soeroso No 42-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat.

FGD dilakukan dengan membahas beberapa tema dan permasalahan terkini ini sebagai upaya untuk meneguhkan *platform* perjuangan Partai NasDem sebagai "Partai Gagasan" dengan memberikan sumbang gagasan untuk penyelesaian berbagai masalah kebangsaan. Selain itu, kedudukan Partai NasDem dalam pemerintahan dapat secara optimal berkontribusi terhadap hajat hidup orang banyak, sehingga kehadiran Partai NasDem dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik diantaranya adalah terkait; (a) Energi, lingkungan hidup, dan Geopolitik Dunia; (b) Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Geopolitik Dunia; Restorasi Indonesia, serta; (c) Adaptasi dan implementasi nilai Pancasila di tengah ekonomi neo-liberal.

Rachmat Gobel memandang pelaksanaan Pra-Rakernas ini sangat penting untuk memperkuat peran partai dalam membangun dinamika politik nasional serta meneguhkan gagasan politik kebangsaan. Sangat penting bagi kader maupun masyarakat luas mengetahui dan memahami berbagai isu yang menjadi perhatian Partai NasDem terkait berbagai isu dan tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Sebagai kader partai, Rachmat Gobel memandang bahwa pesan dari Pra Rakernas ini sangat penting sehingga menjadi bagian dari salah satu bab buku ini disampaikan kepada publik, bahwa Partai NasDem senantiasa berupaya untuk melihat permasalahan bangsa tidak secara parsial dan sepihak. Partai NasDem selalu menjadi bagian dari "*res publica*" bahwa tanggung jawab dan tugas warga negara adalah yang terpenting. Oleh karena itu, partai harus mampu menjadi sarana mengkomodir berbagai publik.

B. Energi, Keberlanjutan Lingkungan Hidup, dan Geopolitik Dunia

Seperti diketahui, sejak 1950 telah terjadi fenomena perubahan iklim akibat terjadinya pemanasan global (*global warming*). Fenomena ini muncul berkaitan terjadinya peningkatan emisi CO₂ akibat revolusi industri, *land use* yang berlebihan serta luas hutan yang kian berkurang. Semua ini telah membuat emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan diberbagai sektor produksi sulit dikendalikan atau tidak banyak bisa dihilangkan serta berdampak besar terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan.

Dampak yang paling dirasakan antara lain kenaikan suhu bumi, dan kalau ini terus berlanjut akan sangat membahayakan kehidupan umat manusia beserta lingkungan hidupnya. Jika panas bumi terus naik 2°C, ini akan berdampak buruk pada cuaca. Diperkirakan situasi ini akan membuat 37% daratan akan terkena curah hujan ekstrem, permukaan air laut akan naik dan kota-kota yang rendah terancam tenggelam. Bila suhu bumi naik 1,5°C saja, maka 14% populasi dunia akan yang merasakan panas ekstrem; 4% binatang bertulang belakang, 8% tumbuhan dan 6% serangga musnah; 70-90 % terumbu karang berkurang; hingga 3% panen jagungberkurang di daerah tropis. Olehnya itu, Indonesia berkomitmen mencapai *net zero emission* di tahun 2060 dan membutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkannya.

Upaya transisi energi ini bergantung pada kultur energi terbarukan seperti pemanfaatan nikel untuk menghadirkan kendaraan listrik. Saat ini upaya ini masih belum maksimal karena butuh teknologi untuk mengembangkan pemanfaatannya dan didukung oleh regulasi yang memadai, termasuk di sektor finansial. Presiden sudah mengeluarkan kebijakan jitu melalui hilirisasi energi, supaya ke depan Indonesia tidak lagi menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah, tapi diolah dalam negeri untuk menjamin transisi energi dan berkontribusi pada dunia.

Narasumber pada FGD ini adalah Suyoto, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem; Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA BAPPENAS; Elia Massa Manik, Mantan Direktur Utama PT. Pertamina; Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI; Emma Rachmawati, Direktur Mitigasi dan Perubahan Iklim KLHK, Gembong Primadjaya Ketua Alumni ITB, serta Pieter F. Gontha sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai NasDem.

Dari FGD ini ada beberapa poin penting yang disampaikan para narasumber, diantaranya adalah seluruh elemen masyarakat harus mengambil peran untuk mencapai target *net zero emission* pada 2060, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Indonesia berkomitmen target ini melalui transisi energi fosil ke non fosil yang didukung potensi panas bumi, surya, dan nikel sebagai bahan baku baterai. Indonesia mempunyai sumber daya Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebesar 3.300 GW yang bersumber dari sinar matahari, begitu juga potensi nuklir dan uranium.

Dalam kaitan itu, maka calon pemimpin Indonesia selanjutnya diharapkan dapat memastikan transisi energi melalui penyusunan *road map* dan komitmen alih energi yang jelas, memastikan rakyat memiliki ketahanan pangan secara mandiri dan juga dapat secara konsisten menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan pada *Focus Group Discussion* ini, diantaranya adalah ;

- Terkait regulasi, diperlukan Perbaikan UU Migas yang membuka ruang untuk memaksimalkan potensi yang ada, membuat Undang-undang yang mendukung roadmap untuk mencapai Net Zero Emission di 2060, memperbaiki syarat dan ketentuan fiskal yang dapat menarik investor untuk masuk ke sektor EBET.
- Upaya mencapai *Net Zero Emission* melalui perencanaan pembangunan berkelanjutan rendah karbon, penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, dan pemulihan lahan berkelanjutan sudah dirancang oleh pemerintah. Namun, perlu ada kebijakanyang lebih jelas dalam pelibatan masyarakat, termasuk di antaranya adalah partai politik.
- Potensi kenaikan harga minyak dunia akibat perkembangan situasi Rusia-Ukraina harus diantisipasi karena berkaitan langsung dengan angka subsidi BBM.

Rekomendasi tersebut sejalan dengan gagasan Rachmat Gobel, bahwa orientasi masa depan Indonesia harus bertumpu pada pemanfaatan EBET. Sehingga perlu didorong pemanfaatan EBET secara massif di sektor pembangkit listrik terutama *co-firing* batubara & PLTS serta peningkatan campuran biodiesel dan pemanfaatan bioetanol agar capaian bauran EBT pada tahun 2030 dapat melebihi target pemerintah dan sejalan dengan target NZE di tahun 2060. Juga pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor listrik harus didorong secara massif terutama untuk menyerap *excess power* guna mendorong percepatan transisi energi Indonesia menuju energi terbarukan.



C. Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Geopolitik Dunia

Dalam topik Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Geopolitik Dunia ini para peserta FGD membahas bagaimana menghadapi perkembangan global dan konstalasi politik dan ekonomi global. Dampak perang Rusia dengan Ukraina, mengakibatkan harga komoditas melonjak di pasar dunia. Perkembangan situasi geopolitik tersebut akan menentukan bagaimana akselerasi, serta peran aktif Indonesia dalam kancah dunia dalam upaya mengadaptasi diri dan menghindari berbagai resiko yang dapat berakibat krisis seperti pengalaman masa lalu.

Narasumber FGD dalam topik ini adalah Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI; Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI; Andi Widjajanto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas); Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian; Prof. Dr. Bustanul Arifin, Akademisi dan Pengamat Pertanian; Muhammad Luthfi, Menteri Perdagangan; Arsjad Rasyid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia; Franciscus Welirang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo); Ukay Karyadi, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Rizal E. Halim, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); Yessi Melania, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi NasDem; Fauzi Amro, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi NasDem.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan para narasumber seperti dalam menghadapi perkembangan ekonomi global dan konstalasi politik dan ekonomi global perlu upaya dalam mempertahankan pangan dan energi. Ketahanan pangan masih menjadi masalah sulit, seperti isu lahan produktif menyusut, alih fungsi lahan, dll. Terkait hubungan politik dunia, Indonesia harus mengambil bagian (nonblok) dalam menyikapi masalah. Mengambil sikap perdamaian dunia, serta berusaha menyelesaikan masalah komoditi pangan bersama.

Tentang pangan, para nara sumber menilai, Indonesia kedepan harus menjadikan pangan sebagai hal yang penting. Krisis pangan yang dipicu oleh menurunnya produksi pupuk, pada level dunia krisis energi yang menyebabkan menurunnya produksi pangan. Juga terjadi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga energi (minyak dan gas bumi). Ditambah kenaikan biaya distribusi, harga pangan akan semakin mahal. Kondisi ini akan dapat mengurangi akses penduduk berpendapatan rendah terhadap pangan. Akibatnya, angka kerawanan pangan akan meningkat. Setiap negara wajib dan bertanggung jawab memastikan rakyat untuk tidak kelaparan. Oleh karena itu negara harus memastikan, tidak boleh ada rakyat kekurangan asupan gizi dan nutrisi.





Terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada *Focus Group Discussion* ini, diantaranya;

- Melakukan mitigasi dampak krisis berkepanjangan. Konteks dalam negeri melakukan proteksi dari hulu ke hilir, memastikan semua aktivitas dapat berjalan lancar.
- Problem geopolitik (perang ekonomi, pandemi, perang Ukraina dan Rusia) dunia harus dipandang sebagai peluang dan tantangan salah satu menjadi penentu distribusi dan harga komoditas pangan.
- Mendesain ulang komoditas pangan demi resiliensi pada keamanan dan kemandirian pangan serta kedaulatan pangan.
- Menjaga stabilitas dan ketersediaan stok pangan, termasuk menjaga mata rantai pasok komoditas pangan, serta Mengurangi dependensi (ketergantungan) komoditas pangan dari luar negeri.
- Membangun persepsi dan transformasi terhadap kemajuan para petani Indonesia.

Rachmat Gobel mengapresiasi hasil dan beberapa rekomendasi yang dihasilkan, Rachmat Gobel juga menyampaikan bahwa persoalan krisis pertanian bukan tanah, melainkan pada produktivitas, pupuk sebagai faktor kunci yang mendukung keberhasilan produktifitas pertanian perlu untuk terus diperbaiki penyediaannya. Rachmat Gobel sendiri telah menginisiasi dilakukannya *pilot project* penyediaan pupuk non subsidi yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Pupuk non-subsidi tersebut disalurkan kepada petani binaan di Gorontalo, Jawa Timur, dan NTT.

D. Adaptasi dan Implementasi Nilai Pancasila di Tengah Ekonomi Neo-Liberal

Krisis pemahaman Pancasila yang melanda bangsa Indonesia saat ini mencerminkan kegagalan atau keterlambatan bangsa Indonesia dalam memahami hakikat globalisasi sebagai bentuk baru perkembangan kapitalisme, dalam wujud *neo-liberalisme*. Kita tidak pernah percaya bahwa tesis globalisasi yang didasarkan pada interdependensi kehidupan masyarakat akan menggantikan tesis imperialisme yang didasarkan pada dominasi negara-negara industri maju atas negara-negara berkembang. Tidak dapat disangkal bahwa liberalisme telah membawa umat manusia pada kemajuan besar dalam budaya politik dan kemanusiaan. Liberalisme adalah aliran atau ideologi pertama yang menempatkan martabat manusia dalam kebebasan. Nilai tertinggi dari liberalisme adalah kebebasan pribadi. Tidak ada nilai yang lebih tinggi dari kebebasan individu ini. Tidak ada kekuasaan, termasuk kekuasaan negara, yang dapat mencegah kebebasan ini.

Di bidang ekonomi, liberalisme mengajarkan kebebasan berusaha dan bekerja – dengan demikian liberalisme sangat menekankan perlunya persaingan bebas di antara pelaku-pelaku ekonomi. Liberalisme klasik menggagas kegiatan ekonomi yang digerakkan bukan oleh otoritas negara, melainkan oleh harga pasar dalam dinamika perimbangan *supply and demand*. Bahkan dewasa ini *neo-liberalisme* mulai memperluas mekanisme ini bukan hanya untuk mengatur kegiatan ekonomi semata, melainkan juga untuk mengorganisasikan seluruh bidang hidup kegiatan manusia.

Sementara itu, Pancasila dalam justru menghendaki peranan negara untuk membuat regulasi yang efektif atas kapital, baik kapital asing maupun kapital domestik untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dan mewujudkan keadilan sosial. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa kebebasan yang hampir tanpa batas itu dengan sendirinya dipergunakan oleh individu atau kelompok yang kuat untuk makin memperluas kegiatan dan pengaruhnya, serta makin mempersempit bahkan menghancurkan kemungkinan yang lemah untuk tumbuh.

Pancasila benar-benar ingin mencegah persaingan bebas dan *survival of the fittest*, yang menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil dengan memusatkan modal pada perusahaan besar, terutama perusahaan transnasional. Pihak yang kalah berhak jatuh ke dalam lumpur kemiskinan, dan mewujudkan tanggung jawab sosial negara untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ditolak oleh liberalisme.

Meskipun perkembangan global memaksa kita untuk mengakui bahwa pasar adalah pusat kegiatan dan kemajuan ekonomi, pengalaman negara-negara di seluruh dunia juga menunjukkan bahwa tata kelola negara masih memainkan peran yang sangat penting. Tidak hanya untuk menghasilkan modal yang lebih baik, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pembelaan kita terhadap peran negara untuk memperkuat kontrol sosial atas modal tidak mungkin dilakukan ketika negara dikuasai oleh oligarki politik dan pengejaran keuntungan.

Dalam keadaan demikian, secara sosial keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas memerlukan prinsip-prinsip dasarnya. Gagasan sentral republikanisme yang ada dalam gagasan falsafah Pancasila menekankan bahwa proses demokrasi dapat melayani dan memastikan integrasi sosial suatu masyarakat yang mengalami perbedaan yang semakin beragam. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah menerapkan politik rekognisi dan kebijakan rekognisi yang akan menjamin hak-hak individu dan persamaan hak dari berbagai kelompok budaya agar dapat hidup berdampingan secara damai dan produktif di republik ini.

Selain itu, dalam upaya mencegah tirani dan ketidakadilan di bidang politik dan ekonomi yang ditunjukkan oleh *neo-liberalisme*, prinsip “sosial demokrasi” yang terkandung dalam sila keempat dan kelima Pancasila menawarkan solusi yang dapat diandalkan. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi yang dikembangkan dalam bidang politik pada hakikatnya adalah demokrasi deliberatif yang netral yang mengikutsertakan dan memperhatikan pendapat semua pihak secara partisipatif. Di bidang ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial untuk mengatasi dan mengimbangi ketimpangan pasar, menjaga iklim persaingan yang sehat, melindungi yang lemah dan berinvestasi pada barang publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Narasumber pada FGD ini, diantaranya; Willy Aditya Wakil Ketua Baleg DPR RI / Ketua DPP Partai NasDem, Yanuar Nugroho Staf Pengajar STF Driyarkara Jakarta, Visiting Senior Fellow, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore Honorary Fellow, University of Manchester, UK dan Philips Vermonte, Ph.D - Dean, Faculty of Social Sciences, the Indonesian International Islamic University (UIII) dan Senior Fellow CSIS.

Para narasumber meyampaikan beberapa poin penting yaitu;

- Partai NasDem terinspirasi dari kemenangan SPD (Social Party Demokrat) di Jerman. Setelah beberapa kali tidak menang pemilu, SPD kembali berhasil dengan mengangkat kepentingan publik sebagai tujuan perjuangan partai. Sehingga persoalan publik yang ada oleh partai politik harus dipandang bukan hanya sebagai tugas konstitusional normatif tapi harus dapat memberikan kemanfaatan seluas-luasnya pada masyarakat. Maka Partai NasDem memandang bahwa nafas demokrasi harus sejalan dengan inklusifitas pembangunan dan kemanfaatan publik yang dirasakan sebagai dampak pembangunan tersebut.
- Partai NasDem harus mengambil peran dalam upaya penguatan demokrasi Indonesia, utamanya penguatan *good governance* dan tentang kebijakan publik. Misalnya seperti isu-isu penanganan korupsi, penguatan anggaran untuk kepentingan publik lainnya seperti anggaran dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi mikro, serta penguatan SDM birokrasi yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan hajat hidup orang banyak.



Terkait hal ini, Rachmat Gobel berpandangan bahwa Pancasila harus dapat diukur dengan terbentuknya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Keseriusan negara dalam melindungi segenap bangsa dan menumpahkan darah demi persatuan Indonesia dapat dinilai dari upaya nyata untuk mencapai keadilan sosial.

Prinsip ini sebagaimana telah terumuskan dalam alinea Pembukaan UUD 1945 kita – “yang melindungi seluruh rakyat Indonesia – dan pertumpahan darah seluruh Indonesia, berdasarkan persatuan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

” **Betapapun kuatnya ikatan persatuan bangsa, ketika ketidakadilan tidak lagi dapat ditolerir, resistensi dan kecemburuan sosial menyebar sebagai bentuk kekerasan terhadap mereka yang dianggap “bersalah”. Hal ini juga mempertontotkan kealpaan dan kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Fakta empiris menunjukkan bahwa daerah-daerah yang diwarnai banyak kantong-kantong kemiskinan merupakan lahan subur bagi benih-benih kekerasan.**

Jadi, jika pertumbuhan ekonomi negara ini dibarengi dengan peningkatan ketimpangan sosial yang ditunjukkan dengan rasio gini yang kian melebar, adalah bom waktu kekerasan dalam berbagai bentuknya sewaktu-waktu bisa meledak. Perbedaan ekonomi, harus diatasi oleh negara dengan mengembangkan negara kesejahteraan yang melayani kepentingan seluruh bangsa.



E. NasDem Tour Tower Kader NasDem Gorontalo

Serangkaian dengan acara Rakernas Partai NasDem Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga meminta untuk dilaksanakan program NasDem Tour Tower sebagai bagian dari agenda kegiatan tersebut. Kegiatan ini bertujuan agar peserta Rakernas yang berasal dari DPW, DPD, DPC, DPRt, Sayap dan Badan Partai dari seluruh Indonesia dapat berkunjung ke NasDem Tower.

NasDem Tower merupakan gedung utama untuk kegiatan Partai NasDem. Ini adalah simbol kekhidmatan Partai NasDem dalam menatap masa depan untuk melayani warga negara Indonesia. Terletak di kawasan pusat ibu kota Jakarta, Gondangdia, Menteng, gedung perkantoran 21 lantai ini dilengkapi dengan helipad di lantai atas, menjadikan menara perkantoran ini menjadi gedung perkantoran pesta terbesar dan salah satu gedung tertinggi di daerah Gondangdia.

Rachmat Gobel mendukung program tersebut, sehingga mewajibkan seluruh kader NasDem dari Gorontalo baik pengurus DPW, DPD, DPC, DPRt, bahkan kader militan untuk mengikuti NasDem Tour Tower, didalam gedung ini Rachmat Gobel memperkenalkan NasDem Tower sebagai Rumah Restorasi Indonesia. Meski menerapkan gaya desain modern pada arsitekturnya, menurut Rachmat Gobel namun desain interior Nasdem Tower menerapkan gaya klasik modern yang elegan dengan didominasi *finishing marmor statuario*. Secara keseluruhan, NasDem Tower membawa sebuah pernyataan baru bagi partai-partai di Indonesia, di mana bangunan partai bisa keluar dari stigma lama dan moderat.



Catatan dari Rapat Kerja Nasional Partai NasDem 2022; Meneguhkan Politik Kebangsaan

Pada 15-17 Juni 2022, Partai NasDem menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang berlangsung di NasDem Tower, Menteng, Jakarta. Secara objektif, rakernas ini adalah momentum Partai NasDem untuk memanaskan mesin partai menghadapi pemilu 2024. Pada rakernas ini juga Partai NasDem mengumumkan bakal calon Presiden yang akan diusung. Rakernas menjadi mekanisme formal bagi Partai NasDem dalam pengambilan keputusan, dimana masing-masing pengurus wilayah (DPW) Provinsi seluruh Indonesia mengumumkan nama bakal calon presiden sebagai masukan kepada DPP Partai NasDem. Rakernas ini mempertegas posisi NasDem sebagai partai yang membawa politik gagasan dalam berdemokrasi. Ini dalam rangka upaya mendorong partisipasi politik secara inklusif dan deliberatif dengan membuka seluas-luasnya partisipasi dari berbagai organ partai di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia.

Rangkaian Rakernas dibuka dengan apel siaga dan penyerahan 34 mobil kemenangan pemilu 2024 untuk masing-masing dewan pimpinan wilayah (DPW) oleh Prananda Surya Paloh sebagai Ketua Bappilu Partai NasDem. Pada Rakernas ini, Surya Paloh sebagai Ketua Umum menyampaikan pidato politik di hadapan 12.000 kader Nasdem. Ia meminta semua pihak mengoptimalkan momen Rakernas untuk memperkuat konsolidasi, merumuskan dan merancang berbagai strategi untuk menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya adalah mencari atau memilih kandidat capres, dan memulihkan keterbelahan di masyarakat sebagai imbas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Surya Paloh juga mengaskan kepada seluruh kader Partai NasDem untuk bekerja keras dan berpolitik secara etis tanpa politik identitas yang menjadi penyebab polarisasi di masyarakat. Pemilu bukan ajang adu domba, apalagi pecah belah. Cita-cita gerakan politik Partai Nasdem adalah perubahan untuk Indonesia yang kuat. Partai NasDem tidak ingin melihat adanya narasi politik dan ideologi baru untuk menggantikan Pancasila, serta gerakan politik primordial yang mempertajam perbedaan misalnya antara Jawa, non-Jawa, pribumi atau non-pribumi.

Atas dasar pikiran tersebutlah Partai NasDem menjadikan Rakernas Tahun 2022 dengan tema utama; "Meneguhkan Politik Kebangsaan". Prananda Surya Paloh sebagai Ketua *Steering Committee* Rakernas Partai NasDem Tahun 2022 dalam sambutannya mengajak seluruh kader untuk terus mengorientasikan gerakan politik kebangsaan yang moderat dan melalui Partai NasDem masyarakat dapat menilai bahwa partai ini merupakan partai "wong waras" dimana ide, pikiran, dan gagasan menjadi nafas gerakannya. Prananda juga mengingatkan bahwa Rakernas adalah puncak konsolidasi partai setelah menjalankan Rakerwil bidang Ideologi Organisasi dan Kaderisasi (IOK) dan selanjutnya akan dilaksanakan Rakerwil-Rakerwil Bappilu diseluruh Indonesia dalam rangka konsolidasi seluruh kader dan elemen Partai NasDem untuk mengkonsolidasikan kekuatan menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Agenda pembahasan pada Rakernas Partai NasDem Tahun 2022 ini terdiri dari :

- Usulan dan aspirasi DPW Partai NasDem seluruh Indonesia tentang Bakal Calon Capres yang akan didukung oleh Partai NasDem pada Pemilu 2024;
- Kebijakan Publik dan Isu-Isu Strategis terkait Pertumbuhan Sektor Riil & Penciptaan Lapangan Kerja;
- Keberlanjutan Lingkungan Hidup, Pangan, dan Energi
- Kesiapan Partai Nasdem Menuju Pemilu 2024; Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi;
- *Branding* Partai dan *Platform Campaign*; Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi;
- Skema Pemenangan Pemilu 2024 Partai NasDem;
- Diskusi tentang "Bagaimana Meningkatkan Popularitas & Elektabilitas";
- Tata Kelola Keuangan Partai;
- Forum Bendahara dan Bimtek E-Iuran;
- Forum Sayap Dan Badan Sesi terkait Laporan Kegiatan Badan & Sayap Partai NasDem serta *Takshow* "Cakap Berselancar Di Dunia Digital";
- Seminar Kebangsaan tentang "Masa Depan Negara Bangsa di Tengah Maraknya Politik Identitas" serta tentang "Pers, Partai Politik, dan Pemilu";
- *Stadium Generale* oleh Dr. Mahatir Muhammad.

A. Rakernas Hasilkan 3 Nama Bakal Calon Presiden

Salah satu agenda utama dalam Rakernas 2022 ini mencari calon presiden yang akan diusung Partai NasDem pada pemilu 2024. Melalui sidang pleno yang dipimpin oleh Johnny G. Plate dan Willy Aditya, setiap DPW diminta merekomendasikan nama yang akan dicalonkan menjadi kandidat bakal calon presiden untuk pemilu yang akan datang. Tidak kurang dari 24 nama yang muncul dari pilihan DPW, baik tokoh yang berasal dari internal maupun dari luar partai atau eksternal partai. Dari 24 nama itu, usulan terbanyak diperoleh Anis Baswedan yaitu 31 DPW, kemudian Ganjar Pranowo dapat dukungan dari 28 DPW, Andika Perkasa 15 DPW. Tiga nama semuanya berasal dari tokoh luar partai, dan nama-nama inilah kemudian diumumkan Partai NasDem, akan digodok untuk menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.

5 Besar Usulan Bakal Calon Presiden Partai NasDem pada Rakernas Tahun 2022



**ANIES RASYID
BASWEDAN**

32
Rekomendasi
DPW



**GANJAR
PRANOWO**

29
Rekomendasi
DPW



**ERICK
TOHIR**

16
Rekomendasi
DPW



**RACHMAT
GOBEL**

14
Rekomendasi
DPW



**ANDIKA
PERKASA**

13
Rekomendasi
DPW





”

Rachmat Gobel adalah kader internal Partai NasDem yang namanya paling banyak diusulkan sebagai kandidat bakal capres 2024 dari unsur internal. Ada 14 DPW yang merekomendasikan Rachmat Gobel menjadi bakal calon presiden dari Partai NasDem pada Pemilu 2024 nanti, diantaranya ; DPW Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku, D.I.Yogyakarta, Lampung, Jambi, Bali, Kepulauan Riau, dan Aceh.

B. Kebijakan Publik dan Isu-Isu Strategis : Pertumbuhan Sektor Riil dan Penciptaan Lapangan Kerja

Diskusi ini dipimpin oleh Martin Manurung, Hermawi Taslim, Irma Suryani Chaniago dengan narasumber; Prof. Dr. Ratlan Pardede, A. Prasetyantoko, S.E., M.Sc. Ph.D., Maxi Gunawan. Diskusi diharapkan bisa memberikan masukan masukan untuk optimalisasi belanja di masing-masing kementerian terkait dalam melaksanakan program berbasis pemberdayaan masyarakat, program yang dapat menyangga daya beli masyarakat dan mendukung produktivitas pada berbagai linkage sektor utamanya yang berbasis pada industri skala kecil dan menengah.

Langkah itu penting karena setelah mengalami krisis Covid-19, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan di kisaran 4%-5%. Kebijakan pemerintah telah meningkatkan kembali kepercayaan publik dan membaiknya iklim investasi. Mobilitas penduduk dan logistik berhasil mendorong aktivitas perdagangan dan sektor riil dan telah menjadi faktor pendorong tren positif perekonomian Indonesia. Adapun beberapa poin penting pada diskusi ini, yaitu;

- Perkiraan atau prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sekitar 4,7%-5,5%, atau lebih baik dari capaian 2021 sebesar 3,2%-4,0%.
- Konteks ekonomi global yang secara langsung terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti posisi perekonomian nasional terhadap ekonomi global dan dampaknya pada sektor riil. Adanya faktor *global bull market* dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan memicu risiko stagflasi "*booming commodity*" terhadap kesinambungan pertumbuhan ekspor komoditas Indonesia;
- Strategi dan rekomendasi program prioritas dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional seperti pentingnya penguatan UMKM sebagai *bumper* ekonomi masyarakat;
- Diperlukan keseriusan untuk Mengelola Sektor Ekonomi Digital. Ini antara lain karena terkait dengan dinamika perekonomian ke depan dan kenyataan masih rendahnya daya saing digital Indonesia dibandingkan besarnya peluang pengembangannya.
- Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah yaitu; (1) Mempercepat pertumbuhan SDM yang memiliki *future skills* set untuk menciptakan berbagai inovasi dalam mendukung ekonomi digital. Percepatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan. Selain itu, perlu dukungan dari perguruan tinggi untuk melahirkan SDM yang mumpuni melalui peningkatan kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, terutama untuk materi terkait digital; (2) Mempercepat penguatan kesiapan infrastruktur digital dalam menyediakan konektivitas yang merata, khususnya bagi populasi yang berada pada wilayah 3T. Pemerintah daerah dapat menginisiasi upaya kolaborasi dengan penyedia TIK guna mempercepat perkembangan TIK di daerah masing-masing.

Salah satu contohnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Telkom Indonesia yang bekerja sama dalam memasang poin untuk mengakses *Mangoesky Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, serta; (3) Memberikan pemahaman ataupun literasi terkait pemanfaatan internet dalam kegiatan yang lebih bersifat produktif, serta mendorong peningkatan adopsi teknologi digital untuk kegiatan produktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

C. Keberlanjutan Lingkungan Hidup, Pangan, dan Energi

Pimpinan forum diskusi ini adalah Amelia Anggreni, dengan narasumber Prof Purnomo Yusgiantoro, Sugeng Suparwoto. Diskusi ini membahas dampak pandemi Covid-19, perang ekonomi, perang Rusia dan Ukraina, kelangkaan bahan pokok, problem energi dan pangan sampai pada kemiskinan.

Sebagai gambaran, Indonesia memiliki banyak potensi minyak dan gas (migas) serta mineral dan batubara (minerba) yang dapat dimanfaatkan menuju transisi dari energi fosil ke nonfosil, potensi sumber energi baru terbarukan yang cukup besar di Indonesia. Dalam konteks ini di sadari bahwa tidak mudah sampai pada kondisi pemakaian energi yang sesuai dengan harapan. Perlu bridging untuk mencapai energi yang ramah lingkungan sebagai komitmen negara terkait energi *Net Zero Emision (NZE)* yaitu dengan mengembangkan teknologi, transportasi, pembangkit listrik untuk memberikan kontribusi menurunkan CO².

Selanjutnya adalah ekonomi, pangan dan geopolitik dunia yang menggambarkan risiko kelangkaan pangan yang berkepanjangan akibat dampak krisis Covid-19, perang dagang, pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini harus disikapi dengan berbagai pendekatan mitigasi. Ada beberapa hal sebagai hasil pada persidangan ini, diantaranya;



- Komitmen terhadap *Net Zero Emission (NZE)* antara lain dengan mengurangi penggunaan PLTU untuk menurunkan emisi CO₂ sebesar 198 juta ton pada 2025 turun, lalu pada 2030 turun ke 314 juta ton turun lagi menjadi 1.526 juta pada 2060. Pengurangan emisi CO₂ juga melalui pengembangan teknologi transportasi, efisiensi penggunaan energi di rumah tangga, industri, pembangkit listrik. Tiap sektor nantinya akan memberikan kontribusi menurunkan emisi tersebut.
- Peluang dan tantangan integrasi EBET terkait teknologi, ekonomi, dan sosial seperti sudah ada, yang sementara dalam proses pembahasan dan pendalaman. Bad news-nya adalah perbandingan penggunaan teknologi antara negara maju telah achievement sementara di negara berkembang perbandingan ini masih rendah.
- Pemerintahan penting untuk konsisten dan secara berkelanjutan dalam menerapkan kebijakannya secara strategis dan taktis dalam mengelola dan menggunakan EBET yang sesuai arah panduan ketentuan UUD 1945.
- Kondisi sumber daya minyak, gas, dan batubara yang kian menipis mengharuskan EBET untuk diintegrasikan. Faktanya fosil adalah kekayaan negara sehingga dengan ini belum bisa menjadi jaminan kesinambungan penyediaan sumber energi bagi Indonesia.
- Posisi energi fosil sekarang adalah adanya gap antara produksi dan konsumsi. Kebutuhan BBM diperkirakan di kisaran 72-77 juta kiloliter (KL) pada 2021-2022, tembus di level 80-87 juta KL pada 2024-2027, dan mencapai 90-96 juta KL pada 2028-2030. Sedangkan produksi BBM domestik di 2021-2023 di kisaran 44-47 juta KL. Produksi BBM baru mulai meningkat di 2023, yakni menjadi 57,46 juta KL dan bertahan pada level yang sama sampai 2025. Selanjutnya, mulai 2026 produksi BBM melejit menjadi 84,27 juta KL hingga 2030, hal ini membebani keuangan negara.
- Cadangan migas nasional, minyak bumi 4.17 miliar barel, proven 2.4 miliar barel. Ketersediaan minyak di Blok Cepu berdasarkan hasil riset merupakan lokasi tambang tertinggi lifting-nya atau setara dengan cadangan minyak hingga 9 tahun. Riset tersebut juga mengkonfirmasi bahwa ketersediaan ini tidak mencukupi kebutuhan lagi (dengan asumsi kebutuhan perhari 1 juta perbarel hanya 700 barel perhari), sehingga perlu pengaturan BBM dan pengaturan masa pakai kendaraan berbasis BBM untuk disubstitusikan dengan kendaraan listrik.
- Minyak dan gas sudah menjadi masalah bagi kemampuan keuangan negara dalam mensubsidi, sehingga kebutuhan untuk mengintegrasikan EBET sangat mendesak.
- Upaya menurunkan emisi karbon di Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi, meliputi penataan land use dan ketenagalistrikan. Sehingga masalah terkait batubara dapat sedikit diminimalisir.

- Indonesia tidak boleh lagi menggunakan energi fosil, walaupun bahan baku fosil yang menjadi penopang ekonomi. Mau tidak mau, harus masuk menggunakan EBET, misalnya dengan panel surya, panas matahari, rumah roof top solar farm. Potensi tersebut sangat besar, utamanya pada wilayah timur yang sangat cocok menggunakan panel surya karena tingkat radiasi panas dan curah hujan rendah.
- Pada konteks investasi, sektor energi yang selama ini cenderung kearah yang merugikan khususnya mengarah pada arbitrase, sehingga perlu perhatikan kepentingan publik untuk keberlanjutan kehidupan di masa depan.
- Terkait regulasi di daerah, pemerintah telah menyediakan otonomi daerah sehingga terdapat dana bagi hasil bagi pengelolaan EBET. Kondisi saat ini, pemerintah pusat yang membagi hasil kembali ke daerah, tetapi yang terkadang bermasalah adalah *trickle down effect*-nya, sehingga dana bagi hasil ke depan harus dilakukan audit. Untuk itu operasionalisasi perlu diperhatikan untuk fokus mengawasi penyelenggaraannya.



D. Kesiapan Menuju Pemilu 2024; Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi

Persidangan ini dipimpin oleh Ahmad Ali, Donny Imam Priambodo, Dedy Ramanta, Sri Sajekti Sudjunadi, Atang Irawan, Muchtar Lutfi Andi Mutty, Latifa Al Ansori, dengan narasumber Donny Imam Priambodo dan Dedy Ramanta. Persidangan ini terkait pembahasan Ideologi dan kaderisasi dalam membangun organisasi. Pengurus, baik dari tingkat DPP hingga pengurus tingkat desa, harus dapat merekrut kader agar dapat memenangkan pemilu. Bagaimana kesiapan Partai NasDem menuju pemilu 2024? Ini harus dijawab dengan memastikan perkembangan jumlah e-KTA hingga kesiapan mengisi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di KPU. Adapun hasil dari persidangan ini, diantaranya;

- Kesekjenan DPP telah merangkum seluruh laporan dari DPW yang akan menjadi petunjuk kesiapan partai menuju pemilu 2024. Berupaya menyelesaikan pengunggahan data dan dokumen yang menjadi syarat pendaftaran parpol peserta pemilu melalui Sipol.
- Pada pemilu 2024, Partai NasDem harus menargetkan peningkatan perolehan suara sehingga dapat naik kelas untuk menjadi finalis. Jika kerja politik seluruh pengurus di tingkat kabupaten bisa lebih bekerja keras, maka hasil yang akan diraih pada tingkat provinsi juga akan hebat.
- DPP akan menyiapkan kurikulum kaderisasi agar kader di seluruh Indonesia dapat memiliki kesadaran yang sama.
- Perlu dilakukan pelatihan secara khusus untuk petugas teknis Sipol untuk tingkat DPP, DPW dan DPD.

E. Branding & Platform Campaign; Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi

Sesi ini membahas bagaimana caranya dapat membangun komunikasi lewat Medsos baik FB, Twitter, untuk meningkatkan elektabilitas diri dan partai sebagai kesiapan menuju pemilu 2024. Partai NasDem tidak boleh sunyi senyap. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka memperkuat organisasi kepartaian dan dapat meningkatkan elektabilitas adalah melakukan branding partai di media sosial seperti Youtube Chanel, Facebook dan WA dengan menggunakan nilai-nilai nasdem sebagai bahan kampanye. Meningkatkan elektabilitas melalui NasDem Channel sangat diperlukan.

Pimpinan sidang pada pertemuan ini ialah Donny Imam Priambodo, Dedy Ramanta, Atang Irawan, sedangkan narasumber terdiri dari Yunarto Wijaya, Zulfan Lindan, Lathifa Al Anshori, dan Ahmad Baidowi. Persidangan ini melahirkan beberapa hal penting, diantaranya;

- Kader NasDem harus bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan media sosial baik FB, Twitter, dan sebagainya hingga NasDem Channel dapat meningkatkan elektabilitas diri dan partai, serta optimalisasi Facebook dan WhatsApp diperlukan sebab banyak orang berinteraksi di sana.

- Nilai-nilai Partai Nasdem perlu disosialisasikan sebagai bahan kampanye partai.
- Partai NasDem perlu memperjuangkan dan memenangkan suara pemilih kelas menengah. Jika kelas menengah sudah berpihak ke Partai NasDem, mereka akan bergerak dengan sendirinya menjadi influencer karena mereka punya jejaring dan logistik yang mumpuni.
- Dalam hal branding , NasDem perlu memunculkan sumber daya kader yang lebih banyak untuk didorong menjadi kekuatan partai. Misalnya kader yang memiliki latar belakang aktivis atau yang lain.
- Menghadapi pemilu 2024 dengan penuh suka cita, dengan gembira”. Jadi kita bisa melihat masalah kepemimpinan, organisasi, kebijakan, dan representasi ada disitu. Bagaimana cara mem-branding Surya Paloh sebagai negarawan, orator, pengamal Pancasila, pendidik, pengayom, dan pelindung.

F. Skema Pemenangan Pemilu 2024 Partai Nasdem

Para narasumber memandang, Partai NasDem selalu menggunakan data dan survei atau berbasis data sehingga disebut partai yang paling *scientific*. Setiap data dan hasil survei digunakan sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas dengan memperhatikan sistem pemilu. Ini penting agar Partai NasDem cerdas menentukan strategi kampanye partai dan kampanye figur sehingga bisa membuahkan hasil maksimal, baik untuk partai maupun untuk figur caleg dan calon kepala daerah.



Rachmat Gobel bersama Pengurus DPP Partai NasDem sebagai Pimpinan Sidang dalam salah satu agenda Rakernas Partai NasDem

Pimpinan sidang pada pertemuan ini diantaranya Effendy Choiri, Rachmat Gobel, Julie Sutrisno Laiskodat, dan Fauzi Amro, sedangkan narasumbernya yaitu Dr. Burhanuddin Muhtadi, Gun Gun Herianto, dengan hasil persidangan sebagai berikut:

- Harus dipetakan kondisi masing-masing wilayah/daerah pemilihan, pemilih yang memilih sesuai idiologi partai, serta kinerja partai dan figur yang baik.
- Pemanfaatan digital melalui penetrasi ke media internet sangat mempengaruhi sehingga perlu diisi dengan konten yang komunikatif sesuai kebutuhan pemilih/kepentingan publik dengan menysasar ke pemilih pemula dan lintas generasi.
- Komunikasi politik dalam membangun hubungan yang terus-menerus akan memperkuat partai. Marketing partai dalam kampanye sangat penting untuk memperkuat dan menentukan keterpilihan figur kandidat dan partai.
- NasDem merupakan partai yang scientific, dengan alasan selalu melihat dan menggunakan data hasil survei untuk dijadikan *tools* dalam meningkatkan elektabilitas.
- *Political campaign* lebih penting dari *election campaign*. *Political campaign* berdampak jangka panjang. Misalnya ke pasar, sekolah, gereja merupakan politik yang tidak ada batasan waktu, tidak hanya ketika saat kampanye.
- *Candidate marketing map* sangat penting. Dalam hal ini memperhatikan isu-isu lokal penting yaitu isu apa yang paling dekat dan relevan untuk memperkuat partai. Mengelola komunikasi politik pemilu, yaitu intensitas kampanye, manajemen isu dan krisis, *political publicity*, *political PR*. Reputasi partai dapat tercederai karena beberapa hal, misal adanya konflik internal. Mapping caleg dan capres, serta riset dan pemetaan.
- Protokol komunikasi harus diteliti dan kerja-kerja yang perlu dilakukan adalah FCR (*Finding, Conclusion, and Recommendation*). Perlu menguasai basis data yang memadai. Personal direction kurang, sehingga perlu dimiliki oleh partai. Berbicara tentang *marketing* politik, harus dimulai dari riset dan pemetaan, penyusunan strategi komunikasi, manajemen birokrasi, komunikasi dan data, *pull marketing*, *push marketing*, *pass marketing*.



G. Meningkatkan Popularitas & Elektabilitas

Pimpinan sidang pada forum ini adalah Dossy Iskandar Prasetyo, dan H. Syarif Abdullah Alkadrie, sedangkan narasumbernya yaitu Saiful Mujani, Hanta Yuda AR. Semua narasumber sama-sama meyakini, Partai NasDem memiliki peluang menjadi partai dua besar pada Pemilu 2024. Namun untuk mencapai hal ini ada beberapa catatan yang dapat dilihat atau dipelajari dari pola kinerja Partai NasDem dalam dua pemilu terakhir, yaitu;

- Pada pemenangan Pemilu 2024, Partai NasDem harus fokus terhadap beberapa hal. Pertama, harus sudah mulai bekerja tanpa menunggu waktu mendekati pemilu. Kedua, menyusun strategi yang lebih matang untuk mempengaruhi voters.
- Untuk meningkatkan suara, pola kerja Partai NasDem harus diubah, yaitu paling tidak sudah bekerja sejak akhir tahun 2022, bukan hanya saat mendekati Pemilu 2024.
- Mobilisasi partai harus ditingkatkan, seperti sosialisasi atribut partai secara masif
- Untuk menang dalam pemilu, Partai NasDem harus berpegang pada data hasil survei, logistik dan mesin politik, serta strategi pemenangan;
- Dalam menentukan figur capres, Partai NasDem harus melihat peluang kemenangan dan dampak untuk Partai NasDem sendiri.
- Strategi pemenangan dapat dilakukan melalui jalur udara (media sosial) dan darat (kampanye).
- Media sosial penting digarap karena menjadi sumber informasi mengenai kandidat setelah stasiun TV (Medsos 15,9%; TV 39,3%) dan membentuk persepsi 38,5% publik.
- NasDem terlihat bekerja hanya pada ketika mendekati pemilu, hal ini merupakan fakta di lapangan. Sebelum 2014 berada di 3% dan ketika mendekati mulai merangkak dan juga ketika mendekati 2019.
- Untuk mencapai dua besar, maka akhir tahun 2022 NasDem harus meningkatkan cara untuk meningkatkan suara. Pola kerja harus diubah untuk mencapai target menuju dua besar pada pemilu 2024.
- Kompetisi politik adalah memenangkan persepsi voters, oleh karena itu para caleg harus memenangkan itu. Yang harus dipegang adalah data, hasil survei, logistik dan mesin politik, serta strategi pemenangan.
- *Top of mind* figur NasDem, yaitu Surya Paloh yang memiliki pemikiran politik kebangsaan yang visioner, Kingmaker Capres 2024, sosok negarawan, disegani oleh elit partai, narasi, dan mesin partai.

- Faktor penentu kemenangan Partai NasDem adalah kekuatan *branding* dengan menggunakan data, kekuatan mesin politik dengan memanfaatkan sosial media, target segmentasi atau *micro targeting*. Misalnya *me-mapping* pemilih, dari segi gender dan lainnya yang mana tiap daerah memiliki strategi berbeda, sesuai karakteristik pemilih.
- Strategi *electoral* era disrupsi: Strategi personal issue, program *branding* dengan mensurvei dan *me-mapping* bagaimana kondisi masyarakat;
- Sistem kerja media sosial, harus bertahan jika ada serangan dari lawan, pencitraan, dan menyerang lawan namun tidak boleh kampanye hitam. Meningkatkan pemilih dengan *men-down grade* lawan;
- Strategi pemenangan darat, basis TPS dengan *door to door*, pengorganisasian komunitas, dan jaringan masa, relawan muda, dan kandidat tatap muka langsung (*blusukan*).

H. Tata Kelola Keuangan Partai

Pembahasan Tata Kelola Keuangan Partai ini bertujuan untuk menyiapkan penguatan kapasitas Partai Nasdem termasuk dalam pengetahuan pembendaharaan kepartaian, sebagai partai gagasan yang memiliki kader berwawasan luas.

Satu-satunya institusi selain lembaga negara dan disebut dalam konstitusi itu adalah partai politik. Partai politik adalah sendi utama dan darahnya negara demokrasi. Negara harus memberi proteksi kepada partai politik dengan mengalokasikan anggaran dari keuangan negara untuk partai politik melakukan pembangunan, khususnya pembangunan dalam sistem kepartaian. Karena tidak semua partai memiliki sumber pembiayaan yang cukup, secara alamiah partai politik mudah digerogeti oleh kekuatan pemodal sehingga ide dasar membentuk sistem kepartaian yang modern, mandiri, akuntabel akan sulit terjadi.

Perjalanan sistem bantuan keuangan partai politik Indonesia diawali dengan alokasi keuangan negara sebesar Rp 1 000 per suara pada tahun 1999-2004. Kemudian pada periode 2004-2009 diubah menjadi bukan berdasarkan suara, tetapi berdasarkan kursi yaitu Rp 21 juta per kursi. Pada 2009-2018 nilai bantuan diubah lagi berdasarkan suara persuara dan turun menjadi Rp 108 per suara. Dinamika pemberian bantuan keuangan partai politik tingkat pusat pada periode 1999-2004 dan periode 2018-2022 memiliki kesamaan nilai besaran keuangan partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah, hal ini perlu menjadi perhatian stakeholder terkait.

Pimpinan sidang pada forum ini diantaranya, Lestari Moerdijat, Fatmawati Rusdi, Joice Triatman, Ahmad Syahrani, sedangkan narasumber adalah Dr. Drs. Bahtiar, M.Si dengan hasil diskusi sebagai berikut;

- Partai NasDem diharap bisa merubah sistem pendanaan kepartaian di Indonesia ke arah yang lebih baik. Sistem aturan hukum yang tersedia saat ini belum cukup kuat untuk membuat partai lebih eksis dalam menjalani aktivitas kepartaiannya.

- Tata kelola keuangan partai dengan mengedepankan prinsip tata kelola keuangan sehingga dapat menjalankan organisasi yang baik dan bertanggung jawab dengan baik dan benar.
- Tidak semua partai memiliki sumber pembiayaan yang cukup, maka secara alamiah partai politik mulai digerogeti oleh kekuatan pemodal sehingga ide dasar membentuk sistem kepartaian yang modern, mandiri, akuntabel tidak terjadi.
- Jika sumber keuangan anggota tidak cukup kuat, sumber lain harus dari negara. Negara harus memberi proteksi (perlindungan) kepada partai politik, seperti yang dilakukan negara lain seperti Kanada, Perancis, Jerman, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Sejumlah negara memberikan proteksi kepada partainya minimal 30% dari kebutuhan.
- Semestinya yang diberikan bukan bantuan, namun alokasi keuangan negara untuk partai politik melakukan pembangunan, khususnya pembangunan dalam sistem kepartaian.
- Partai NasDem diharapkan bisa merubah sistem pendanaan kepartaian di Indonesia, karena hukum yang tersedia hari ini tidak cukup kuat untuk membuat partai lebih eksis dalam menjalani hidupnya. Dalam tataran teknis, tidak semua kabupaten, kota, provinsi mengambil uang bantuan partai karena pertanggungjawabannya lebih besar dari uangnya.
- Karena iuran anggota tidak cukup, tidak semua nasib partai sama. Bagaimana dengan partai yang tidak cukup kuat iuran anggotanya, uang negara juga sangat sedikit, bantuan keuangan dari publik juga tidak ada. Untuk partai yang memiliki akses yang cukup, pengurusnya akan tumbuh berkembang menjadi sehat. Namun partai yang tidak punya akses akan mati perlahan dan musnah.

I. Bimtek E-Iuran

Pimpinan sidang pada forum ini adalah Siar Anggretta Siagian, dengan narasumber Fatmawati Rusdi, dan Karyo. Forum ini membahas sistem *electronic* iuran (E-Iuran) dalam iuran keanggotaan partai. Semua akun anggota yang terdaftar akan terhubung berdasarkan E-KTA. Di dalam E-Iuran terdapat beberapa pilihan menu seperti: Nomor E-KTA, payment ID pembayaran, jumlah nominal tagihan dan nomor unit sehingga tidak akan terjadi salah *in-put*.

Panduan tata cara pembayaran sudah tersedia dalam E-Iuran dengan metode pembayaran yang bermacam-macam seperti kartu kredit, bank transfer, Indomaret dan lain sebagainya. Jika anggota sudah membayar iuran bulanan berjalan, laporan pembayaran akan otomatis masuk kedalam *history*, sehingga tidak perlu melapor dan mengkonfirmasi ke bendahara.

Namun jika anggota lupa melakukan pembayaran iuran pada bulan berjalan maka tagihan iuran akan secara otomatis terakumulasi pada bulan berikutnya sehingga tidak akan terjadi *miss* iuran. Beberapa hal penting pada pembahasan ini, diantaranya;

- Harapannya Partai NasDem menjadi partai yang dipercaya baik oleh publik maupun oleh pemerintah;
- Jenis bantuan keuangan berasal dari tiga sumber yaitu bantuan keuangan pemerintah pusat dari APBN atau APBD, sumbangan perorangan atau badan usaha yang bukan kader partai, dan iuran anggota.
- Terkait iuran anggota, masih banyaknya permasalahan tunggakan akibat dari tidak auto debit dalam pembayaran dan miss komunikasi. Jika tagihan tidak autodebit maka pembayaran harus dilakukan secara manual dan harus melapor kepada bendahara.
- Permasalahan terkait tunggakan tidak akan terjadi lagi karena DPP sudah mempunyai sistem *electronic* iuran (E-Iuran) dan akan disosialisasikan kepada para anggota.
- Iuran anggota akan dikaitkan dengan sistem *electronic* iuran (E-Iuran). Dalam E-Iuran tercantum nomor E-KTA, payment ID pembayaran, dan nomor unit sehingga tidak terjadi salah input dan jumlah nominal tagihan;

J. Laporan Kegiatan Badan dan Sayap Partai

Forum sayap dan badan adalah forum berkumpulnya para ketua serta jajaran dari seluruh sayap dan badan Partai NasDem untuk menyatukan persepsi, kekuatan, dan memastikan kemenangan Partai NasDem di Pemilu 2024.

Forum sayap dan badan juga merupakan satu-satunya ruang diskusi yang dibuatkan secara khusus guna merangkai acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai NasDem. Sayap dan badan merupakan elit partai yang akan membantu membesarkan dan mensukseskan Partai NasDem. Dibutuhkan sinergi demi kemenangan Pemilu 2024. Karena itu, peran daripada sayap dan badan sangat dibutuhkan untuk kebesaran Partai NasDem.

Pimpinan sidang pada forum ini adalah Ivanhoe Robert Semen, Hillary Brigita Lasut, Rama Datau, Roberth Rouw, Andi Ramadhan Nai, Hanna G. Mitra, Rika Amelia, Shinta Melodiana, Fendi Jonathan, dengan narasumber diantaranya Indira Chunda Tita Syahrul, Moh. Hairul Amri/Garda Pemuda NasDem, Vicky Shu/Garnita Malahayati NasDem, M. Hariyadi Anwar/Rescue NasDem, Noak Banjarnahor/Gemuruh NasDem, Dedi Haryanto/Liga Mahasiswa NasDem, Regginaldo Sultan Tampubolon/Bahu NasDem, Syaiful Bahari/Petani NasDem.

Beberapa hal penting pada pertemuan ini, diantaranya;

- Sayap dan badan adalah elemen penting partai, dapat memberikan kontribusi besar dan energi positif untuk kemenangan Pemilu 2024. Sayap dan badan fokus pada konsolidasi pemenangan NasDem;
- Badan dan Sayap sangat penting dan strategis, makanya partai memberikan ruang untuk sayap dan badan begitu luas;

- Partai NasDem adalah partai yang masih tergolong partai baru, sehingga masih melihat ketokohan. Makanya kehadiran anak-anak muda diharapkan dapat menjadi harapan baru dan dapat melahirkan tokoh-tokoh baru yang memiliki kualifikasi dan kualitas mumpuni;
- Sayap dan badan harus menjadi ujung tombak untuk mengangkat dan lebih mengenalkan partai di masyarakat luas;
- Sayap dan badan adalah tulang punggung dan supporting system dalam membesarkan sebuah partai ;
- Untuk memenangkan Pemilu 2024, semua harus bekerja sama, baik sayap, badan dan fraksi;
- Ketika terjadi bencana, partai dan Badan Rescue mesti hadir di tengah masyarakat terdampak, sehingga mampu mengurangi penderitaan masyarakat;
- Garda Pemuda NasDem memiliki tujuan terwujudnya kader muda yang progresif sebagai garda terdepan yang menggerakkan perubahan kehidupan bangsa dan negara melalui jalan Restorasi Indonesia;
- Beberapa rekomendasi dari Garda Pemuda NasDem antara lain; Pertama, aktivasi seluruh kepengurusan DPW dan DPD, khususnya bagi yang belum berjalan secara maksimal; dan Kedua, optimalisasi penerapan sistem konsolidasi dari tingkat pusat sampai di tingkat basis, menguatkan koordinasi antar jenjang kepengurusan di lingkungan kepengurusan Garda Pemuda NasDem. Menyusun database anggota dan kader di tiap tingkatan kepengurusan yang akuntabel berbasis sistem informasi;
- Petani NasDem melaksanakan kegiatan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) sebagai upaya pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas petani. PPS akan berdampak pada elektoral NasDem;
- Partai NasDem sudah merekrut di tingkat desa dengan cara penyuluh pertanian yaitu PPL dan Swadaya dari anak muda maupun petani setempat. Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) berangkat dari kesadaran Petani NasDem untuk meningkatkan kualitas hidup petani serta juga berdasarkan pada UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Kedepan Garnita Malahayati NasDem akan melakukan pembentukan DPC Malahayati NasDem di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia;
- Beberapa program unggulan Garnita Malahayati NasDem diantaranya; pendidikan politik perempuan dan kondolidasi untuk pengurus Garnita Malahayati NasDem di seluruh DPW dan DPD dan pembekalan kader perempuan dalam organisasi, etika dan komunikasi;
- BAHU Partai NasDem aktif dalam pendampingan hukum pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai program unggulan;

- Harapannya BAHU agar membentuk BAHU di tingkat kab/kota, hal yang tidak mudah tapi tongkat estafet harus segera terbentuk;
- Target besar (Visi) Gemuruh adalah memperjuangkan terwujudnya masyarakat pekerja/buruh menjadi pemimpin politik nasional dan daerah. Program penting Gemuruh NasDem adalah melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perburuhan dan penciptaan lapangan kerja untuk buruh putus kerja terdampak Covid-19;
- Berkaitan dengan kepengurusan Liga Mahasiswa, NasDem tidak mengikuti struktur pemerintahan, sehingga strukturnya hanya berada di tingkat Provinsi, Koordinator Komisariat/Korkom di tingkat Kampus, Komisariat di Tingkat Fakultas. Sayap kader khususnya kader Liga Mahasiswa NasDem diharapkan mampu menjadi Kader Partai yang menjaga kemurnian Restorasi Indonesia.

K. Cakap Berselancar di Dunia Digital

Pimpinan sidang pada forum ini adalah Rama Datau, Kevin Rouw, Andi Ramadhan, Hanna G. Mitra, Rika Amelia, Shinta Melodiana, Fendi Jonathan, Indira Chunda Tita Syahrul, Moh. Haerul Amri, dan Narasumbernya terdiri dari Dedi Permadi, Ph.D, M. Farhan, Hillary Brigitta Lasut, Marsha Aruan, Indra Jegel, Fajar Nugros, Dr. M. Zainal Arifin, S.Hut, M.Si/Kementerian Lingkungan Hidup, Marcelia Zalianty, S. Sos., M.H/Actions Speak Louder Than Words, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDAS) Barito, Dr. M. Zainal Arifin, S.Hut., M.Si, Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yessy Melania.

Forum ini membahas tentang gerakan “membangun kebersamaan, kepedulian, dan merawat bumi”, serta dunia digital. Ini merupakan sebuah gerakan yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk merawat bumi. Jika tidak merawat bumi dari sekarang maka akan berdampak pada terjadinya perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kerugian pada kesehatan manusia.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sumber-sumber berita, ancaman kerusakan bumi dapat menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim, seperti terjadinya bencana maupun cuaca ekstrem global yang saat ini dirasakan oleh manusia.

Ada beberapa poin penting dalam menjaga lingkungan, yaitu: pertama, melalui sosialisasi lewat media sosial; kedua, menjadi grand leader atau localhero; ketiga, membuat inovasi dan kreativitas gerakan sosial serta lingkungan; keempat, melakukan mobilisasi gerakan cinta lingkungan hidup dan kehutanan; kelima, melakukan edukasi kepada masyarakat maupun keluarga untuk mencintai kebersihan lingkungan; keenam, menjadi pelopor gaya hidup berkelanjutan, mengurangi sampah dan makan sesuai musim; dan ketujuh, melakukan gerakan menanam pohon ke seluruh Indonesia.

Pelaksanaan konsen penataan lahan, konsen pemantapan sumber daya alam dengan konsep keberlanjutan, keberlangsungan sumber daya alam terutama untuk meningkatkan fungsi-fungsi produktifitas masyarakat. Lingkungan harus di jaga seperti lingkungan kebersihan pantai, pembuangan sampah pada tempatnya dan lainnya. Kemudian terkait data pribadi terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu pertama, dunia sedang mengalami tranformasi digital yang begitu cepat; kedua, tantangan yang besar di tengah era transformasi digital berupa perlindungan dalam melindungi data pribadi atau privasi; dan ketiga, merumuskan apa bisa dilakukan sebagai warga negara maupun bangsa dalam menyikapi kemajuan atau transformasi digital yang sangat cepat. Ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan maupun waspadai, yaitu terkait dengan:

- *Misinformation*; atau yang sering disebut penyebaran berita bohong, tetapi dengan terjadi tidak sengaja.
- *Disinformation*; atau yang sering dikatakan penyebaran berita bohong atau tidak sesuai dengan fakta tetapi disengaja. Disinformasi tersebut dinamakan *hoax*. Jadi, *hoax* itu adalah turunan dari disinformasi.
- *Malinformation*; *Malinfomation* yaitu disebut sebagai *saber pungli*, *hate speech*, dan *lips*. *Lips* adalah kebocoran data yang dapat membahayakan semua orang.
- Menkominfo Johnny Plate menjelaskan ada tiga hal penting dalam membenahi sistem perlindungan data pribadi, yaitu: pemberesan tata kelola, pemberesan teknologinya, dan pemberesan sumber daya. Data pribadi bisa terlindungi atau tidak bocor? Solusinya adalah pada tiga poin utama, yaitu pemberesan tata kelola, pemberesan teknologi, dan pemberesan SDM.
- Menjaga data pribadi di era digital merupakan hal yang sulit. Men-download pinjol saja setiap orang harus menyerahkan data pribadi, seperti Foto, KTP, KK, password, nama keluarga. Tidak hanya itu, mau download instagram atau facebook dan lainnya, semuanya harus menggunakan data pribadi. Bahkan kita membuat e-banking pun, harus menyeter NIK, KTP, KK dan lainnya.
- Media sosial dapat membawa berkah maupun petaka. Apalagi data pribadi yang kita miliki tersebar ke yang tidak bertanggung jawab, itu akan menjadi petaka bagi diri sendiri. Foto atau data pribadi yang tersimpan di instagram, diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk menipu. Bijaklah mengkomsumsi informasi yang dibagikan oleh publik, informasi yang dibagikan di medsos belum tentu semuanya benar, ada juga yang *hoax*.



I. Masa Depan Bangsa di Tengah Maraknya Politik Identitas

Materi pembahasan pada sesi ini adalah bagaimana masa depan bangsa di tengah maraknya politik identitas. Acara ini dimoderatori oleh Peter F. Gonta, dengan keynote speaker H.M. Jusuf Kalla, dengan narasumber Prof. Azyumardi Azra, Saur Hutabarat, Prof. Yudi Latief, Dr. Alfian, Abu Yasit, Gomar Gultom dengan narasumber Prof. Azyumardi Azra, Saur Hutabarat, Prof. Yudi Latief, Dr. Alfian, Abu Yasit, Gomar Gultom

Sebagai narasumber Jusuf Kalla merekomendasikan pentingnya meneguhkan politik kebangsaan yang nasionalis demokratis, beridentitas secara jernih, berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, serta melarang keras politisasi identitas.

Menurut Jusuf Kalla, jangan resah dari permasalahan negatif. Politisasi identitas di Indonesia bisa berkembang karena masyarakat Indonesia tidak religius mainstream. Identitas itu sesungguhnya diperlukan, semua partai politik memerlukannya.

Misalkan Partai NasDem, politik identitas itu alamiah saja. Yang jadi persoalan itu adalah politisasi identitas. Yang perlu ikhtiarkan bersama sebagai bangsa adalah berpegang teguh pada Pancasila. Oleh karena itu identitas politik kebangsaan Indonesia adalah politik Pancasila.

Bagaimana menjaga nilai kebangsaan, menjunjung nilai kesatuan bangsa Indonesia. Nilai kesatuan bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, yang terdiri atas tiga, yaitu (1) menjunjung kemanusiaan, (2) persatuan dan (3) kehidupan keadilan (Pancasila). Bagaimana menjaga dan menghormati nilai-nilai kebangsaan. Komitmen bukan saja dilihat dari satu golongan, tetapi seluruh bangsa, menjadi wadah dalam persatuan berbangsa Indonesia.

Politik identitas ini bagaikan pedang bermata dua, satu memberikan kebaikan dan berupaya mengangkat minoritas. Disisi lain, juga dapat melanggar identitas yang lainnya. Yang perlu dikembangkan adalah bagian ekspresi politik identitas yang mampu dikelola dengan baik. Politik identitas itu tidak membahayakan bangsa Indonesia karena adanya Pancasila.

Jusuf Kalla menyampaikan, Bung Karno menjadi Presiden hampir 20 tahun dan . Presiden Soeharto sekitar 30 tahun. Kedua presiden ini jatuh oleh demonstrasi oleh sebagian besar masyarakat karena krisis politik dan ekonomi bersamaan. Jadi presiden itu jatuh karena terjadi krisis, maka dibutuhkanlah suatu perubahan. Itulah yang disebut reformasi. Itu sama saja dengan restorasi sebenarnya.

Yudi Latief mengatakan, politik identitas itu harusnya yang baik karena setiap ideologi membentuk collect identity jika dipahami secara jernih. Orang yang tidak punya identitas itu not exist. Masalahnya ketika identitas itu ada, bagaimana dengan identitas yang lain? Ada politik identitas yang baik, buruk, dan busuk. Politik identitas yang sifatnya buruk, itu adalah tidak adanya gotong royong.

Bagaimana menjaga nilai kebangsaan yang dapat menjunjung nilai kesatuan bangsa Indonesia. Yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini ada 3 yaitu (1) menjunjung kemanusiaan, (2) persatuan dan (3) kehidupan keadilan (Pancasila). Pesannya adalah bagaimana menjaga dan menghormati nilai-nilai kebangsaan dan komitmen bukan satu golongan saja, tapi seluruh bangsa, menjadi wadah dalam persatuan berbangsa Indonesia.

Sebagai narasumber Jusuf Kalla merekomendasikan pentingnya meneguhkan politik kebangsaan yang nasionalis demokratis, beridentitas secara jernih, berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, serta melarang keras politisasi identitas. Menurut Jusuf Kalla, jangan resah dari permasalahan negatif. Politisasi identitas di Indonesia bisa berkembang karena masyarakat Indonesia tidak religius mainstream. Identitas itu sesungguhnya diperlukan, semua partai politik memerlukannya. Misalkan Partai NasDem, politik identitas itu alamiah saja. Yang jadi persoalan itu adalah politisasi identitas. Yang perlu ikhtiarkan bersama sebagai bangsa adalah berpegang teguh pada Pancasila. Oleh karena itu identitas politik kebangsaan Indonesia adalah politik Pancasila.

Bagaimana menjaga nilai kebangsaan, menjunjung nilai kesatuan bangsa Indonesia. Nilai kesatuan bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, yang terdiri atas tiga, yaitu (1) menjunjung kemanusiaan, (2) persatuan dan (3) kehidupan keadilan (Pancasila). Bagaimana menjaga dan menghormati nilai-nilai kebangsaan. Komitmen bukan saja dilihat dari satu golongan, tetapi seluruh bangsa, menjadi wadah dalam persatuan berbangsa Indonesia.

Politik identitas ini bagaikan pedang bermata dua, satu memberikan kebaikan dan berupaya mengangkat minoritas. Disisi lain, juga dapat melanggar identitas yang lainnya. Yang perlu dikembangkan adalah bagian ekspresi politik identitas yang mampu dikelola dengan baik. Politik identitas itu tidak membahayakan bangsa Indonesia karena adanya Pancasila.

Jusuf Kalla menyampaikan, Bung Karno menjadi Presiden hampir 20 tahun dan . Presiden Soeharto sekitar 30 tahun. Kedua presiden ini jatuh oleh demonstrasi oleh sebagian besar masyarakat karena krisis politik dan ekonomi bersamaan. Jadi presiden itu jatuh karena terjadi krisis, maka dibutuhkanlah suatu perubahan. Itulah yang disebut reformasi. Itu sama saja dengan restorasi sebenarnya.

Yudi Latief mengatakan, politik identitas itu harusnya yang baik karena setiap ideologi membentuk collect identity jika dipahami secara jernih. Orang yang tidak punya identitas itu not exist. Masalahnya ketika identitas itu ada, bagaimana dengan identitas yang lain? Ada politik identitas yang baik, buruk, dan busuk. Politik identitas yang sifatnya buruk, itu adalah tidak adanya gotong royong.

Bagaimana menjaga nilai kebangsaan yang dapat menjunjung nilai kesatuan bangsa Indonesia. Yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini ada 3 yaitu (1) menjunjung kemanusiaan, (2) persatuan dan (3) kehidupan keadilan (Pancasila). Pesannya adalah bagaimana menjaga dan menghormati nilai-nilai kebangsaan dan komitmen bukan satu golongan saja, tapi seluruh bangsa, menjadi wadah dalam persatuan berbangsa Indonesia.

Gomar Gultom menyampaikan, munculnya identitas politik tidak dapat dihindarkan. Hal ini tidak hanya menimbulkan konflik horizontal tapi kontestasi politik dalam pemilihan bupati, gubernur, bahkan pemilihan presiden. Politik identitas ini bagaikan pedang bermata dua, satu sisi memberikan kebaikan, berupaya mengangkat minoritas, tapi di sisi lain juga dapat melanggar identitas lain. Yang perlu kita kembangkan bagian ekspresi politik identitas ini mampu dikelola dengan baik di negeri ini. Politik identitas itu tidak membahayakan bangsa Indonesia karena adanya Pancasila.

Johnny G. Plate menyampaikan, Bhineka Tunggal Ika dibakukan dalam pengembangan politik kebangsaan. Politisasi identitas diperkuat dan implikasi melalui semburan kebohongan yang menjadi online atau digitalisasi. Indonesia mempunyai persoalan pers, harusnya mempunyai aturan-aturan. Semburan kebohongan harus dihapus dengan cepat melalui ruang dan waktu juga melalui jaringan cyber system untuk mencegah agar tidak amplifikasi.

Abu Yasit menyampaikan, bangsa yang besar harus menjunjung tinggi kebersamaan kita, persatuan dalam kebhinekaan. NU telah menerapkan prinsip dasar ukhuwah badaniyah, ukhuwah bashariyah, dan ukhuwah Islamiyah dan saudara dalam kemanusiaan, dalam berbangsa dan bernegara, mereka yang berbeda agama adalah saudara bernegara kita.

M. Pers, Partai Politik, Dan Pemilu

Seminar ini membahas tentang Peranan Pers sebagai Pilar Demokrasi dan Pers sebagai industri, serta menggali isu politik gagasan parpol dan residu demokrasi netralisasi. Pada seminar kebangsaan ini hadir Fitri Megantara sebagai moderator, Menkominfo Johnny G. Plate sebagai keynote speaker, serta narasumber antara lain Saur Hutabarat dari Media Indonesia, Uni Zulfiani Lubis dari IDN Times, Budiman Tanuredjo dari Kompas, Iswara Darmayana dari Rakyat Merdeka, Arifin Asdad dari Kumparan dan Ketua Forum Pemred. Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu;

- Substansi kebebasan pers kunci kebebasan memilih. Kebebasan pers, kebebasan berserikat dan kebebasan memilih adalah harkat yang terpokok dari pers, sebagai pendekatan untuk memunculkan diskusi publik.
- Pers berperan menyampaikan kebenaran yang baik dan meskipun ada pahitnya. Untuk itu partai politik harus menyiapkan jubah-jubah yang ahli, bisa menjawab pertanyaan mendasar untuk semua.
- Peranan pers dalam menggali isu politik, media harus mengkomunikasikannya. Partai NasDem bisa mengambil peran itu dengan menciptakan gagasan. Tidak perlu mengambil gagasan suram, tapi mengubah gagasan suram itu menjadi satu harapan
- Pers tidak hanya bicara polarisasi residu politik, tetapi bagaimana mewujudkan berbagai konteks masyarakat adil makmur sejahtera;

- Dibutuhkan konsolidasi, gotong royong, memperjumpakan titik simpul kekuatan, dituntut untuk dapat mentransmisikan, menjaga stabilitas, dan memungkinkan output yang berkualitas sesuai dengan tantangan kebutuhan jaman.
- Pers memiliki sisi untuk menjaga stabilitas. Sebagai industri di era disrupsi harus dapat bertumbuh dengan sehat. Industri media saat ini memiliki tantangan yang besar. Bagaimana pers sebagai industri yang sehat dan dapat berfungsi dengan baik.
- Peranan pers, parpol dalam Pemilu 2024. Dampak situasi domestik yang sensitif. Pers sebagai pilar demokrasi dan pers sebagai industri, serta bagaimana peran pers dari residu demokrasi bisa dinetralisasi.

N. Stadium Generale Tun Dr. Mahathir bin Mohamad

Dalam pidatonya di Rakernas Partai NasDem, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menyampaikan, kepantasan menjadi seorang pemimpin yaitu yang telah terpilih untuk melaksanakan pelayanan serta bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemimpin yang terpilih harus diberi peluang untuk memberi tugas dalam pembangunan nasional dan tidak terganggu dengan isu-isu politik yang lain. Partai maupun pemimpinnya harus membantu dan memastikan kepemimpinan nasional terus berbakti kepada rakyatnya.



Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menyampaikan Pidato dalam Stadium Generale Rakernas Partai NasDem

Kepemimpinan nasional, sistem demokrasi, dan kemajuan negara yang berpihak kepada rakyat, membutuhkan kematangan berpolitik dan menghormati keputusan dan tidak melakukan aksi yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Pemimpin harus bersikap amanah dan mendukung perhatian kepada negara, pemimpin perlu terus mencari ilmu dan menambah pengetahuan dan memberi perhatian. Kepemimpinan nasional memerlukan keberanian membuat keputusan dan tindakan untuk kepentingan rakyat. Tampak kepemimpinan nasional perlu diambil oleh pemimpin yang berpihak pada rakyat. Selama sebagai pemimpin harus terus memperjuangkan keputusan yang merangkul rakyat tanpa memikirkan kelompok atau tidak mementingkan satu kelompok. Pemimpin nasional memerlukan keberanian membuat keputusan dan tindakan untuk kepentingan rakyat.

Selama menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad melihat apapun masalah dari sudut pandang yang berbeda, mengkaji apakah penyakit yang menjangkiti. Setelah itu memahami apakah perlu mencari obatnya supaya penyakit itu dapat diobati dan apakah penyakit itu sudah terlalu lama dan bisa menular? Dan perlu difoto ataupun dicek untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lain. Itu perlu dilakukan dengan mengambil keputusan walaupun penyakitnya amat sukar sembuh dan menyedihkan, begitulah juga kedudukan seseorang.

Pemimpin harus bersikap amanah dan mendukung perhatian kepada negara, perlu terus mencari ilmu dan menambah pengetahuan serta memberi perhatian. Kemajuan dapat dicapai apabila pemimpin ideal memiliki rancangan yang teratur untuk pembangunan negara, baik rancangan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu perlu ditekankan, sebagian besar rancangan untuk memajukan negara tergantung kepada anak muda. Maka perlu diberi ruang yang luas untuk melaksanakan dasar-dasar perencanaan dalam politik.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan bahwa Tun Dr. Mahathir bin Mohamad merupakan tokoh yang sangat menginspirasi. Dalam usia tua, kondisikesehatan kurang baik dan namun tak mengenal lelah, ini menjadi pembelajaran untuk semua warga negara dan bangsa Indonesia. Perjuangan Partai NasDem mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, dengan semangat nasionalisme. Indonesia akan jauh lebih baik di waktu yang akan datang, sebagai perjuangan Partai NasDem, walaupun dalam perjalanannya masih memiliki kekurangan dalam gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia. Tetapi yang terpenting adalah perubahan tentang sikap perilaku.

Hal itu senada dengan kepemimpinan Rachmat Gobel, seorang pemimpin nasional harus memiliki karakter, memiliki sifat tegas dan adaptif; Nilai Budaya yang disiplin, kreatif dan taat asas, serta memahami teknologi informasi. Pemimpin di era mendatang harus dapat memahami pentingnya kemajuan teknologi dalam membangun ketangguhan nasional. Kolaborasi Kepemimpinan Nasional juga sangat diperlukan, budaya dan penguasaan terhadap teknologi memegang kunci penting untuk kesuksesan dalam menghadapi era *disruption*, karena masa depan Indonesia sangat bergantung pada kepemimpinan yang visioner sekaligus berakar kokoh kepada budaya leluhur.

Kepemimpinan nasional, sistem demokrasi, dan kemajuan negara yang berpihak kepada rakyat, membutuhkan kematangan berpolitik dan menghormati keputusan dan tidak melakukan aksi yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Pemimpin harus bersikap amanah dan mendukung perhatian kepada negara, pemimpin perlu terus mencari ilmu dan menambah pengetahuan dan memberi perhatian. Kepemimpinan nasional memerlukan keberanian membuat keputusan dan tindakan untuk kepentingan rakyat. Tampak kepemimpinan nasional perlu diambil oleh pemimpin yang berpihak pada rakyat. Selama sebagai pemimpin harus terus memperjuangkan keputusan yang merangkul rakyat tanpa memikirkan kelompok atau tidak mementingkan satu kelompok. Pemimpin nasional memerlukan keberanian membuat keputusan dan tindakan untuk kepentingan rakyat.

Selama menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad melihat apapun masalah dari sudut pandang yang berbeda, mengkaji apakah penyakit yang menjangkiti. Setelah itu memahami apakah perlu mencari obatnya supaya penyakit itu dapat diobati dan apakah penyakit itu sudah terlalu lama dan bisa menular? Dan perlu difoto ataupun dicek untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lain. Itu perlu dilakukan dengan mengambil keputusan walaupun penyakitnya amat sukar sembuh dan menyedihkan, begitulah juga kedudukan seseorang.

Pemimpin harus bersikap amanah dan mendukung perhatian kepada negara, perlu terus mencari ilmu dan menambah pengetahuan serta memberi perhatian. Kemajuan dapat dicapai apabila pemimpin ideal memiliki rancangan yang teratur untuk pembangunan negara, baik rancangan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu perlu ditekankan, sebagian besar rancangan untuk memajukan negara tergantung kepada anak muda. Maka perlu diberi ruang yang luas untuk melaksanakan dasar-dasar perencanaan dalam politik.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan bahwa Tun Dr. Mahathir bin Mohamad merupakan tokoh yang sangat menginspirasi. Dalam usia tua, kondisi kesehatan kurang baik dan namun tak mengenal lelah, ini menjadi pembelajaran untuk semua warga negara dan bangsa Indonesia. Perjuangan Partai NasDem mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, dengan semangat nasionalisme. Indonesia akan jauh lebih baik di waktu yang akan datang, sebagai perjuangan Partai NasDem, walaupun dalam perjalanannya masih memiliki kekurangan dalam gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia. Tetapi yang terpenting adalah perubahan tentang sikap perilaku.

Hal itu senada dengan kepemimpinan Rachmat Gobel, seorang pemimpin nasional harus memiliki karakter, memiliki sifat tegas dan adaptif; Nilai Budaya yang disiplin, kreatif dan taat asas, serta memahami teknologi informasi. Pemimpin di era mendatang harus dapat memahami pentingnya kemajuan teknologi dalam membangun ketangguhan nasional. Kolaborasi Kepemimpinan Nasional juga sangat diperlukan, budaya dan penguasaan terhadap teknologi memegang kunci penting untuk kesuksesan dalam menghadapi era *disruption*, karena masa depan Indonesia sangat bergantung pada kepemimpinan yang visioner sekaligus berakar kokoh kepada budaya leluhur.



Tun Dr. Mahathir bin Mohamad didampingi oleh Ketua Umum Partai NasDem setelah berpidato pada acara Stadium Genelae

Sebagaimana kepemimpinan Rachmat Gobel di Panasonic, terdapat tujuh Prinsip Perusahaan yang menjadi pedoman perusahaan tersebut tetap berdiri antara lain Berbakti kepada masyarakat melalui industri, Jujur dan Adil, Kerjasama dengan Keselarasan, Berjuang untuk Perbaikan, Ramah Tamah dan Kesatria, Menyesuaikan diri dengan Kemajuan Jaman serta Bersyukur dan Berterima Kasih. (*)



Rakorwil untuk Pemantapan Kader dan Penguatan Struktur Partai

Sebagai bagian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Rachmat Gobel terjun langsung melakukan konsolidasi internal Partai NasDem dengan menghadiri rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) di berbagai daerah. Konsolidasi untuk memperkuat mesin partai di daerah pemilihan (Dapil). Seperti dicanangkan Ketua Umum Surya Paloh, pada pemilihan legislatif 2024, Partai NasDem menargetkan bisa meraih kembali banyak suara, menjadi pemenang untuk merebut posisi ke dua. Sesuai arahan Ketua Umum, pada Pileg 2024 Partai NasDem harus mengisi semua dapil di 34 provinsi yang jumlahnya 80 dapil.

Rakorwil adalah bagian dari upaya pemantapan konsolidasi dalam rangka menguatkan struktur organisasi dan penjangkaran kader-kader. Kegiatan ini diikuti oleh semua tingkatan dalam struktur kepengurusan, mulai dari DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT). Rakorwil akan meningkatkan semangat dan motivasi pengurus melakukan konsolidasi, menaikkan elektabilitas kursi di legislatif. Kegiatan ini merupakan bagian rangkaian untuk meraih kemenangan dengan membahas berbagai strategi dan persiapan verifikasi faktual agar sukses dalam Pemilu 2024.

Sesuai dengan tahapan yang dirancang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai NasDem telah mengikuti pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu 2024 pada 1 Agustus 2022. Verifikasi administratif yang dilakukan KPU secara partai NasDem sudah diterima dengan catatan perlu dilakukan perbaikan antara lain sistem keanggotaan dan kepengurusan partai, khususnya di sejumlah DPC yang belum memenuhi syarat minimal. mSesuai dengan ketentuan dari DPP, masing-masing wilayah segera memperbaiki kekurangan persyaratan itu dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaannya kepada DPP paling lambat 24 September 2022. Selanjutnya DPP akan menyampaikan kepada KPU paling lambat 28 September 2022.

Hasilnya, pada 14 Desember 2022, KPU menyatakan, Partai NasDem memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, anggota dewan perwakilan rakyat, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2024, bersama 16 partai lainnya dan 6 partai lokal Aceh. Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dari 18 partai yang mengikuti verifikasi faktual, 17 partai dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi serta lolos sebagai peserta Pemilu 2024, sedangkan satu partai tidak memenuhi syarat. Untuk memperkuat struktur partai, DPP Partai NasDem telah mengeluarkan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2020 sebagai dasar legal pembentukan struktur organisasi partai dari tingkat wilayah sampai ranting atau desa. Sesuai arahan Ketua Umum, melalui DPRT, setiap desa diharapkan dapat merekrut kader minimal 55 orang untuk pulau Jawa, sedangkan untuk luar pulau Jawa 10 - 20 orang. Kaderisasi di tingkat DPC dan DPRT lebih difokuskan pada ketrampilan merawat party id dan meningkatkan voters id.



A. Rakorwil DPW Sumatera Utara

Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dibuka oleh Ketua Umum Surya Paloh pada 3 Maret 2022 di Kantor DPW Partai NasDem, di Medan. Pada kegiatan ini, Rachmat Gobel mendampingi Ketua Umum sekaligus memimpin konsolidasi partai wilayah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini DPW Sumut menyatakan komitmen untuk memenangkan pemilu serentak 2024. Kegiatan ini diikuti seluruh pengurus DPW Sumut, semua anggota DPRD Fraksi Partai NasDem se-Provinsi Sumatera Utara, pengurus sayap dan badan Partai NasDem wilayah Sumut. Turut hadir, Gubernur Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan kepala daerah lainnya serta para tokoh Provinsi Sumatera Utara.

Rachmat Gobel menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Surya Paloh yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan untuk mendampinginya dalam kegiatan kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Khusus untuk Rakorwil di Sumatera Utara, Surya Paloh memberikan kesempatan kepada Rachmat Gobel untuk menyampaikan gagasan dalam kemenangan Partai NasDem di Sumatera Utara sekaligus menutup acara Rakorwil. Ini merupakan suatu kehormatan bagi Rachmat Gobel berada di tengah-tengah seluruh kader Partai NasDem se-Sumatera Utara.

Pada pidato sekaligus sambutan penutupan acara Rakorwil, Rachmat Gobel menyampaikan, agar kader Partai NasDem terus meningkatkan kontribusinya untuk kemajuan Sumatera Utara, terutama dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebagai Wakil Ketua DPR RI Korinbang, kata Rachmat Gobel, ia akan terus bersinergi dengan Prananda Surya Paloh, Martin Manurung, Rudi Hartono Bangun, dan Delmeria Sikumbang sebagai Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari dapil Sumatera Utara. Bersinergi membangun industri, perdagangan dan perbankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan kader partai di daerah ini.

Rachmat Gobel menegaskan, peserta Rakorwil telah mendapatkan masukan yang sangat berharga dari Ketua Umum dan pembicara lainnya. Masukan ini khususnya terkait dengan program partai untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang seperti proses rekrutmen tokoh untuk Pileg maupun Pilkada di semua tingkatan, penguatan struktur dan infrastruktur partai, terutama pembentukan pengurus partai hingga ke Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) di seluruh Sumatera Utara, serta capaian E-KTA harus memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DPP Partai NasDem.

Untuk itu Rachmat Gobel minta, seluruh kader mempersiapkan diri menyongsong kemenangan pemilu 2024. Dari wilayah Sumatera Utara Partai NasDem menargetkan 7 kursi DPR RI, 20 kursi DPRD Provinsi, 173 kursi DPRD Kabupaten/Kota, serta seorang Gubernur dan memiliki Kepala Daerah di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Rachmat Gobel meyakini, dibawah kepemimpinan Ketua DPW Sumut Iskandar, ST, setiap kader Partai Nasdem mampu menjalani semua program dengan gembira dan penuh cinta, tanpa rasa takut sehingga dapat mencapai target. Membangun persatuan dan kekompakan dengan rasa kekeluargaan, karena politik adalah perwujudan cinta kepada bangsa dan negara, melindungi keluarga dan keturunan, memajukan dan mensejahterahkan seluruh rakyat.



Rachmat Gobel saat menyampaikan Sambutan dan Arah-an pada kegiatan Rakorwil Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara



B. Rakorwil DPW Aceh

Bertempat di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, pada Sabtu 5 Maret 2022, DPW Partai NasDem menggelar Rakorwil. Acara ini dibuka dengan pemukulan alat musik tradisional Aceh yaitu Rapai oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Nova Iriansyah, serta jajaran pengurus DPP Partai NasDem. Rakorwil digelar untuk penguatan struktur partai dan konsolidasi menyeluruh, menuju sebagai partai pemenang nomor satu di Aceh.

Dalam pidatonya Surya Paloh menyampaikan, Partai NasDem lahir untuk meringankan beban masyarakat Aceh, sebab daerah ini merupakan salah satu daerah tertinggal di bidang infrastruktur dan non-infrastruktur. Komitmen Partai NasDem adalah harus mampu mencari jalan memberikan solusi alternatif penyelesaian masalah nasional maupun di Aceh. Oleh karenanya, perhatian besar terhadap kondisi Aceh harus diberikan dengan berbagai cara agar bisa membangkitkan kembali seperti kejayaan masa lalu.



Sebagai anak Aceh, Surya Paloh menyampaikan, dalam sisa hidupnya akan terus berpikir untuk kemajuan Aceh. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kokoh dan fokus pada pikiran yang produktif. Aceh harus bisa menyadari seluruh kapasitas dan potensi yang ada agar dapat ditingkatkan untuk kemajuan Aceh. Surya Paloh meminta seluruh pengurus Partai NasDem Provinsi Aceh di tiap tingkatan bekerja secara total untuk memenangkan Pemilu 2024 agar Aceh kembali berjaya.

“Seluruh pengurus Partai NasDem harus mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di Aceh. Seluruh kader diminta agar tetap menjaga etika dalam berkompetisi saat menghadapi Pemilu 2024 mendatang,” pesan Surya Paloh.

Ia mengajak semua elemen masyarakat, khususnya seluruh pengurus Partai NasDem yang berada di Provinsi NAD, untuk membangun Aceh dengan meningkatkan silaturahmi, bukan dengan saling menjatuhkan dan merusak, berkompetisi dalam etika yang baik dan semangat yang harmonis. Melibatkan dan duduk bersama ulama hingga civitas akademika dalam melakukan kajian pembangunan yang maju. Harapannya, hal ini menjadi corong utama untuk menyampaikan pikiran yang lebih baik kepada masyarakat Aceh. Aceh harus bisa menyadari seluruh kapasitas dan potensi yang ada sehingga dapat ditingkatkan untuk kemajuan yang jauh lebih baik.

Pada Rakorwil ini, Rachmat Gobel bersama Surya Paloh serta jajaran DPP Partai NasDem lainnya juga melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Aceh Periode 2022-2024. Pelantikan bagian dari bentuk konsolidasi menyeluruh menuju partai pemenang nomor satu di Aceh. Sementara itu, Ketua DPW NasDem Aceh, Teuku Taufiqul Hadi mengatakan, Partai NasDem merupakan partai orang Aceh. Karena pendirinya merupakan putra asli Aceh. “Jangan sampai masyarakat dan kader tidak mengerti, bahwa partai ini bukan di dirikan anak Aceh.”



Rachmat Gobel bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menghadiri acara Rakorwil Partai NasDem Provinsi Aceh

C. Provinsi Sulawesi Utara

Selaku salah satu Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai NasDem Rachmat Gobel terus melakukan konsolidasi dengan terjun langsung ke wilayah teritorial yaitu wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Pada 19-26 September 2022 Ia melakukan kunjungan kerja ke 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Pada 19-21 September 2022 Wakil Ketua DPR RI/Korinbang melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara sekaligus mendampingi Ketua Umum Partai NasDem ke Kota Tomohon. Sebagai langkah konsolidasi DPW Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) sebagai upaya memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada tanggal 19 s.d. 21 September 2022.

Konsolidasi Partai NasDem di Sulut dihadiri kader partai dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Selain Rachmat Gobel, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene serta Anggota DPR RI dan Pengurus DPP Partai NasDem, DPW Sulawesi Utara, DPD dan DPC serta seluruh kader-kader partai.

Rakorwil ini mengangkat tema "Sukses Konsolidasi Partai NasDem Guna Sukses Pemilu 2024". Adapun pembahasan dalam konsolidasi antara lain adalah mengenai strategi menata langkah menuju kemenangan Pemilu 2024 yang disusun dalam Panca Sukses. Bersamaan kegiatan ini, juga digelar acara peresmian kantor DPD NasDem Kota Tomohon oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya dan Rachmat Gobel selaku Ketua Teritorial Pemenangan Sulawesi dan sekaligus pelantikan DPD Minahasa Utara.



Dalam Keputusan Rakorsus setiap DPW/DPD/DPC/DPRT harus segera membenahi dan memperkuat Struktur Organisasi dengan e-KTA nya, sesuai target DPP. Program ini sangat strategis untuk mencapai kemenangan Pemilu 2024. Untuk menindaklanjuti keputusan rakorsus ini, capaian e-KTA DPW Partai NasDem Sulawesi Utara sampai September 2022 masih sebesar 38,50 %. DPW dan jajaran dibawahnya perlu kerja keras agar target pencapaian e-KTA mencapai 100%.

Untuk persiapan Pileg 2024 masing-masing wilayah, khususnya Sulawesi Utara telah menyusun target kemenangan yaitu 2 kursi di DPR RI atau tetap seperti hasil pileg 2019, 12 kursi untuk DPRD Provinsi atau naik dibandingkan sebelumnya 9 kursi, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota ditargetkan 65 kursi atau naik dari sebelumnya 55 kursi.

Target kemenangan Pileg ini sepenuhnya usulan dari DPW Partai NasDem Sulawesi Utara kepada DPP, oleh karena itu seluruh pengurus dan kader NasDem Sulawesi Utara harus berjuang untuk kemenangan Pileg 2024 yang akan datang.

Rachmat Gobel bersama Ketua Umum partai NasDem saat meninjau pembangunan kantor DPD NasDem Kota Tomohon dalam rangkaian acara Konsolidasi Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara





D. Provinsi Maluku Utara

Setelah dari Sulawesi Utara, Rachmat Gobel terbang ke Ternate, Maluku Utara dalam rangka mendampingi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk melakukan konsolidasi bersama DPW, DPD, DPC dan DPRt serta para kader Partai NasDem. Rakorwil diselenggarakan 22 -23 September 2022. Juga diselenggarakan peresmian dan penandatanganan prasasti gedung baru DPW NasDem Provinsi Maluku Utara di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Dengan diresmikannya gedung baru ini DPW NasDem Maluku Utara diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan persiapan mencapai kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang. Selain Rachmat Gobel, ikut mendampingi Ketua Umum Surya Paloh adalah Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

Pada peresmian kantor DPW Partai NasDem Ketua Ketua Umum menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terus meningkatkan kematangan dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Terlebih, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Menurutnya, menjaga kehormatan menjadi sesuatu yang lebih membanggakan dibanding menang besar namun diraih dengan cara-cara tidak benar.

Dalam konsolidasi partai, sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sulawesi, Rachmat Gobel menyoroti bagaimana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya seperti cita-cita para pendiri bangsa. Menurutnya, kekuatan Indonesia juga ada pada keramah tamahannya, kesantunannya, keadabannya, saling menghormati perbedaan dan sikap ksatria saling tolong menolong dalam kebaikan.

Hal itu dapat diwujudkan melalui keteladanan para elite pimpinan partai politik dan pemuka agama di Indonesia. Begitu juga kalangan akademisi yang dapat menunjukkan nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai cerminan bangsa. Pada kesempatan tersebut Rachmat Gobel juga menyatakan rasa bangga dan mengapresiasi kinerja dan kegigihan para kader Partai NasDem Maluku Utara di bawah komando Ketua DPW NasDem Maluku Utara, Dr. Achmad Hatari yang sukses membawa NasDem makin mendapat tempat di hati masyarakat. Dan telah mewujudkan impian para pengurus dan kader DPW Partai NasDem Maluku Utara dengan diresmikannya Gedung DPW Partai NasDem Maluku Utara yang begitu megah tersebut.

Dari sederet kunjungan kerja dan konsolidasi yang dilakukan di berbagai wilayah, Rachmat Gobel melihat ada kebangkitan kepercayaan publik terhadap Partai NasDem. Hal itu bukan di Maluku Utara saja, juga hampir menyeluruh hingga ke pulau lain di Indonesia. Satu hal yang amat disyukuri adalah pemahaman masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap Partai NasDem ini kian hari kian baik. Inshaallah pada Pemilu 2024 nanti Maluku Utara bersiap-siap untuk menerima berita ada kenaikan peringkat Partai NasDem.

Untuk persiapan Pileg 2024, DPW Maluku Utara telah menyusun target kemenangan sebagai berikut : 1 kursi untuk DPR RI, 8 kursi untuk DPR provinsi dari sebelumnya 4 kursi, 441 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota atau naik dari sebelumnya 27 kursi. Target kemenangan ini sepenuhnya usulan dari DPW Partai NasDem Maluku Utara kepada DPP, oleh karenanya seluruh pengurus dan kader NasDem Maluku Utara harus berjuang untuk kemenangan Pileg 2024 yang akan datang.



Rachmat Gobel bersama Lestari Moerdijat dan Julie Laiskodat dalam acara Bincang Santai dalam rangkaian kegiatan Konsolidasi Partai NasDem Provinsi Maluku Utara



E. Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tenggara (Sultra) Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melakukan konsolidasi dengan DPW, DPD, DPC dan DPRT Partai NasDem pada 23 September 2022 di Hotel Claro, Kendari. Konsolidasi juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH selaku Ketua DPW Partai NasDem Sultra Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM selaku Anggota Majelis Tinggi Partai, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo. Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, Wakil Sekretaris Jenderal DPP NasDem, Hermawi F. Taslim, SH., Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Lucy Liu Suwandi; dan Pengusaha Indonesia Peter Frans Gonta.

Selain itu juga hadir DPD NasDem Bupati Konawe, Wakil Walikota Kendari, Wakil Bupati Wakatobi, Ketua DPW Garnita Malahayati NasDem Sulawesi Tenggara, dan seluruh Pengurus DPW dan DPD Partai Nasdem se-Sultra; Garda Pemuda Nasdem, Gerakan Masa Buruh, Garnita Malahayati, Bahu Nasdem, Petani Nasdem, serta segenap fungsionaris dan kader Partai Nasdem.

Gubernur Ali Mazi selaku Ketua DPW, melaporkan kesiapan Partai NasDem dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Kader Partai NasDem di Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini berada diangka 74.000, sudah hampir mengunci satu kursi DPR RI. Sedangkan, Pengurus DPD dari 17 kabupaten/kota dalam kondisi fit dan telah merampungkan 100% dari total 219 DPC dan 2.292 desa dan kelurahan. Struktur inilah yang akan menjadi “pasukan khusus” yang akan menjadi andalan dan ujung tombak dalam memenangkan hati rakyat di seluruh TPS di Sulawesi Tenggara.

Seluruh DPC dan DPRt agar terus menjaga kekompakan, menjalin silaturahmi kepada masyarakat. Ulurkanlah tangan kepada yang datang, jadilah penjaga rumah yang ramah agar semua yang datang merasa nyaman tinggal bersama dalam Rumah Besar Restorasi ini. Sayap partai yang disiapkan untuk menjadi rumah bagi para Kaum Milenials dan Kaum Professional telah terbentuk diantaranya: Garda Pemuda NasDem, Gerakan Masa Buruh (Gemuruh), Garnita Malahayati, Bahu NasDem, Petani NasDem. Semua aktif menjalankan kegiatannya dan 100% telah terbentuk di 17 kabupaten/kota.

Dengan kekuatan struktur partai yang solid, secara optimis dan penuh percaya diri DPW Sulawesi Barat telah menyusun target Pemilu 2024 yaitu 2 kursi untuk DPR RI dari sebelumnya 1 kursi, 12 kursi di DPRD provinsi dari 5 kursi dan 106 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota dari sebelumnya 55 kursi.

Target ini rata-rata mengalami kenaikan 100% ari perolehan sebelumnya dan ini disusun oleh DPW Sultra harus tercapai di 2024. Dan jika target ini tercapai diangka 82% saja, NasDem masih pada posisi pimpinan DPRD di semua Kabupaten/Kota, serta mandiri dalam mengusung kader terbaik daerah pada Pilkada Serentak 2024 yang akan datang.



Rapat Konsolidasi Wilayah Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara

Rachmat Gobel bersama Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi dalam acara konsolidasi Partai NasDem

F. Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka konsolidasi partai, Rachmat Gobel selaku Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 24-26 September 2022. Rapat konsolidasi tersebut dilaksanakan di Hotel Claro Makassar dan dihadiri ribuan kader (\pm 5.500 kader) dari 24 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan serta pengurus DPW, DPD, DPC dan DPRt.

Rapat konsolidasi yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Anggota Dewan Pakar), anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan Rusdi Masse Mapasessu dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, para Pengurus DPD, DPC dan DPRt seluruh Sulsel serta kader-kader Partai NasDem Sulsel. Disamping itu juga mengundang artis-artis ibu kota yang sudah bergabung dengan partai NasDem.

Dalam rapat konsolidasi ini DPW Sulawesi Selatan menyebutkan, perolehan kursi partai 2024 bisa naik sekitar 50,19% menjadi 220 kursi di kabupaten/kota. Untuk meraih target tersebut para kader harus berjuang dari DPW, DPD, DPC dan DPRt untuk mewujudkan dan menyatukan visi kedepan dalam meraih kemenangan. Untuk persiapan Pileg Sulawesi Selatan DPW, DPD, DPC telah menyusun target kemenangan yaitu 8 kursi untuk DPR RI dari sebelumnya 4 kursi, DPRD Provinsi dari semula 12 kursi menjadi 16 kursi, DPRD Kabupaten/Kota dari semula 105 kursi menjadi 172 kursi. Target kemenangan Pileg ini sepenuhnya usulan dari DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan kepada DPP, oleh karenanya seluruh pengurus dan kader NasDem Sulawesi Selatan harus berjuang untuk kemenangan Pileg 2024 yang akan datang.

Rachmat Gobel bersama Rusdi Masse Mappasessu saat acara Jalan santai Bersama kader dan simpatisan Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan



G. Provinsi Gorontalo

Selaku Ketua Teritorial Pemenangan Partai NasDem Wilayah Sulawesi dan anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Gorontalo Rachmat Gobel mengajak semua kader untuk bertekad kuat untuk membawa Partai Nasdem Menang Besar di Gorontalo. Ini hanya akan terwujud jika semua kader, pengurus dan simpatisan partai bekerja bersama secara terukur dan professional. Desain pemenangan berbasis struktur partai menjadi salah satu solusi tunggal untuk mewujudkan target NasDem di Gorontalo. Struktur partai harus menjadi pusat kendali pemenangan.

Rachmat Gobel juag menekankan agar kader partai meningkatkan hubungan baik kepada masyarakat agar komunikasi di wilayah masing-masing terjalin baik. Ini sangat penting untuk mewujudkan gagasan besar NasDem tentang Gerakan Perubahan semakin mendapatkan dukungan rakyat Gorontalo.

Raihan suara Partai Nasdem naik pesat setelah Rachmat Gobel turun menjadi Caleg Gorontalo. Pada Pemilu 2014 Partai Nasdem Gorontalo hanya memiliki satu kursi di DPRD Kab. Gorontalo, Pemilu 2019 Ia turun menjadi Caleg, perolehan suara naik pesat sehingga Partai NasDem memperoleh 24 kursi legislatif yang terdiri dari satu kursi DPR RI, enam kursi DPRD Provinsi dan 17 (tujuh belas) kursi di Kabupaten/Kota.

“Pada Pemilu 2024 yang akan datang Partai NasDem Gorontalo akan meningkatkan target capaian kursi legislatif dengan perolehan kursi menjadi 3 (tiga) kursi DPR RI, 13 (tiga belas) kursi DPRD Provinsi dan 48 (empat puluh delapan) kursi DPRD Kabupaten/Kota.”

Rachmat Gobel saat menyampaikan sambutan dan arahan dalam acara konsolidasi Partai NasDem Provinsi Gorontalo





Rachmat Gobel juga menekankan bahwa pembentukan DPRT sangatlah penting dan dapat dijadikan duta partai untuk menampung aspirasi masyarakat di desa-desa, untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang mulai DPC, ke DPD dan selanjutnya ke DPW. Ia meminta agar aspirasi itu disampaikan kepadanya selaku Ketua Teritorial Pemenangan Sulawesi untuk disampaikan kepada DPP agar dapat ditindak lanjuti oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

Konsolidasi Partai NasDem Gorontalo dilaksanakan menjadi tiga tahap. Pertama, Konsolidasi Pengurus di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, yang dihadiri sebanyak 1.350 orang pengurus DPRT Kabupaten Gorontalo dan 750 orang pengurus DPRT Kabupaten Gorontalo Utara pada 19 Oktober 2022. Arahan Rachmat Gobel pada konsolidasi tersebut antara lain:

- Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan target kemenangan pada Pemilu 2024. NasDem ingin suara dan kursinya lebih besar dari Pemilu 2019;
- Mengajak kepada seluruh kader NasDem untuk makin mendekatkan diri kepada masyarakat agar komunikasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing terjalin baik;
- Rachmat Gobel menginginkan gagasan besar NasDem Gerakan Perubahan semakin mendapat hati dan dukungan di masyarakat Indonesia, khususnya Gorontalo;
- DPRT adalah duta partai yang ada di desa, harus mengelola aspirasi masyarakat di desa, selanjutnya disampaikan secara berjenjang mulai DPC - DPD - DPW atau ke Anggota DPRD Provinsi dari Partai NasDem untuk diperjuangkan ;
- Apabila aspirasi tersebut mengalami kendala atau permasalahan, maka Pengurus DPW dapat menyampaikan kepada Rachmat Gobel sebagai Wakil Rakyat yang ada DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut kepada kementerian terkait.



- Semenjak menjadi wakil rakyat dari Gorontalo, Rachmat Gobel telah membuktikan perjuangan, misalnya mengawal aspirasi untuk BSPS (Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat), alsintan/traktor (alat dan mesin untuk pertanian), pupuk, bibit, demplot dan masih banyak lagi;
- Semangat perjuangan Partai NasDem harus tegak lurus dengan Koordinator Pemenangan;
- Misi besar Rachmat Gobel bersama Partai NasDem adalah Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia menjadi Gorontalo daerah yang makmur dan sejahtera;

- Rachmat Gobel membagikan beras bervitamin pada seluruh Pengurus DPW, DPD, DPC dan DPRt serta para kader yang hadir pada acara konsolidasi Partai NasDem.

Kedua, Konsolidasi Pengurus DPRt Kota Gorontalo bersama Kabupaten Bone Bolango, dihadiri sebanyak 930 orang pengurus DPRt Kota Gorontalo dan 950 orang pengurus DPRt Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 21 Oktober 2022. Rachmat Gobel dalam konsolidasi tersebut memberikan arahan sebagai berikut;

- Memberikan penguatan bagi para pengurus DPC dan DPRt untuk memenangkan Partai NasDem di Gorontalo.
- Sebagai putra daerah Gorontalo, Rachmat Gobel prihatin dengan kondisi kemiskinan yang ada di Gorontalo, untuk itu melalui Partai NasDem kita harus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan Gorontalo ke depan;
- Partai NasDem harus rebut kekuasaan ini. NasDem harus berkuasa. Untuk apa? mengejar ketertinggalan, memajukan Gorontalo. Bukan hanya sekedar berkuasa, tetapi untuk memakmurkan rakyat Gorontalo dari kemiskinan;
- Rachmat Gobel menilai ada manajemen yang salah sehingga kondisi tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu, Rachmat Gobel meminta Partai NasDem merebut pemerintahan di Gorontalo untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Ketiga, Konsolidasi pengurus Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dihadiri sebanyak 670 orang pengurus hingga DPRt Kabupaten Boalemo dan 550 orang pengurus DPRt Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2022 di Kecamatan Monano, Kabupaten Boalemo. Rachmat Gobel dalam konsolidasi tersebut memberikan arahan sebagai berikut;

- Menyamakan visi dalam membangun tanah leluhur dengan hati dalam mensejahterakan dan membangun Gorontalo ke depan;
- Tujuan berpartai bukan hanya untuk membesarkan NasDem, namun bagaimana rakyat bisa merasakan manfaat dari Partai NasDem pada tatanan kehidupan mereka;
- Mengapresiasi keseriusan dan semangat Pengurus Partai NasDem Gorontalo dari tingkat DPW, DPD, DPC dan DPRt yang begitu antusias dalam mengikuti kegiatan konsolidasi;
- Pengurus Partai di tingkat ranting ataupun desa merupakan ujung tombak perjuangan Partai NasDem di Gorontalo dalam membawa perubahan yang lebih baik;
- Para Pengurus dan kader agar bisa menyerap aspirasi masyarakat, serta selalu peka terhadap apa yang menjadi masalah di desa masing-masing.

Kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk “menyapa” kembali konstituen atau pemilih Partai NasDem pada Pemilu 2019 yang lalu. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai NasDem kepada masyarakat.

Memenangkan kontestasi Pemilu 2024 mendatang, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menghimbau kepada seluruh kader dari pusat sampai ranting, agar bekerja sama dan jangan saling menjatuhkan. NasDem hadir untuk memberi nuansa politik yang berbeda dari partai lain, hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya, menciptakan masalah sebagai esensi dari Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. (*)



Rachmat Gobel bersama Gubernur ABN IGK Manila dan Fungsi Naris Partai NasDem Provinsi Gorontalo dalam acara Konsolidasi Partai NasDem Provinsi Gorontalo

Peresmian Kantor DPW NasDem Bali

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Bali menggelar upacara adat budaya Bali untuk mensucikan kantor DPW NasDem Bali yang baru selesai dibangun. Kantor DPW Bali ini akan diresmikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada Minggu (17/7/2022).

Upacara Melaspas dihadiri seluruh pengurus mulai dari Ketua DPW NasDem Bali, Juli Sutrisno Laiskodat hingga pengurus ranting dan para kader NasDem Bali. Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW NasDem Bali, Nyoman Winatha menyatakan adanya Kantor DPW Partai NasDem Bali sebagai bentuk keseriusan NasDem untuk membangun Bali yang lebih baik. Kantor ini terbuka untuk siapa saja, termasuk masyarakat umum.



Ketua Umum Surya Paloh disambut oleh ribuan kader saat hadi di acara Peresmian Kantor DPW Bali

Begitu tiba dilokasi, Surya Paloh dan rombongan disambut hangat ribuan kader dan simpatisan dari seluruh Bali dengan berbagai atraksi kesenian. Selanjutnya didampingi Ketua DPW Partai NasDem Bali, Julie Sutrisno Laiskodat dan Sekretaris DPW Partai NasDem Bali Nyoman Winatha, beserta jajaran pengurus lainnya, tampak Surya Paloh dan rombongan DPP NasDem berkeliling untuk melihat sejumlah ruangan di kantor megah tersebut.

Menurut Surya Paloh, hadirnya kantor NasDem Bali yang merupakan salah satu kantor terbaik NasDem di seluruh Indonesia setelah NasDem Tower di Jakarta, patut disyukuri karena ini akan menjadi modal semangat dalam kegiatan politik partai menjelang Pemilu 2024 dan Pemilu selanjutnya.

“Selamat kita telah memiliki kantor ini, dan di Bali khususnya saya rasa kantor partai politik terbaik, pembangunan ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, akan tetapi menghasilkan gedung yang sangat mewah dan megah, hal ini harus menjadi pemicu semangat terhadap kader NasDem di Bali,” ujar Surya Paloh.



Ketua Umum Surya Paloh, bersama IGGK Manila, Ahmad H. Ali, Rachmat Gobel Prananda Surya Paloh, Roberth Rouw, dan Lestari Moerdijad saat Pemotongan Pita Peresmian Kantor DPW Bali

Gedung baru yang berdiri di atas tanah seluas 10 Are tersebut berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Bali. Surya Paloh menyebut, gedung baru DPW Partai NasDem Provinsi Bali diharapkan sebagai modal dan semangat baru para kader dalam menyongsong pemilu tahun 2024.

Rachmat Gobel mengapresiasi kantor baru DPW Bali ini yang diharapkan dapat menjadi momentum bagi NasDem Bali untuk segera bangkit menuju pemilu 2024. "Peresmian rumah baru ini nanti menjadi momentum penting bagi Partai NasDem di Bali dan akan menjadi rumah pergerakan, rumah berkegiatan bagi siapa pun, tidak hanya untuk kader NasDem saja, tetapi juga seluruh masyarakat Bali.



■ *Ketua Umum Surya Paloh, saat menyampaikan sambutan dalam Peresmian Kantor DPW Bali*

Catatan dari Peringatan Hari Ulang Tahun ke 11 Partai NasDem



Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem pada pidatonya menyampaikan berbagai pesan pada acara HUT Partai NasDem ke-11 di JCC Jakarta pada Jumat, 11 November 2022. Ia mengatakan, sejak awal didirikan Partai NasDem telah menancapkan satu tekad dan semangat bersama yaitu untuk memberikan kontribusi yang tidak hanya berhenti kepada kepentingan partai saja, tetapi jauh dan lebih luas daripada itu yaitu memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi perjalanan kehidupan bangsa yang amat tercinta. Harapannya, seluruh kader meneguhkan terus-menerus *spirit* bersama, meneguhkan semangat, memberikan keyakinan bahwasanya Partai NasDem membawa sebuah misi yang mulia.

Surya Paloh mengajak semua para kader agar tetap menjaga dignity dirinya, kejujuran dirinya sebagaimana dia bertekad untuk membawa misi gerakan perubahan merestorasi bangsa ini. Pada saat momentum yang tepat pada HUT Partai NasDem ke-11, Surya Paloh menyampaikan wajib dan patut mensyukuri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang selalu membesarkan hati masyarakat. Arti kehadiran Joko Widodo sebagai Presidensi G20 yang dilaksanakan di Pulau Dewata Bali, harapannya agar *event* yang amat penting dan mulia ini sukses dan membawa keberhasilan kebanggaan bagi masyarakat sebagai satu bangsa.



Rachmat Gobel Bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Anies Rasyid Baswedan saat perayaan Ulang Tahun ke-11 Partai NasDem bersama fungsionaris dan kader Partai NasDem

Pada pidatonya Surya Paloh menegaskan terkait dukungan kepada Anies Baswedan, bahwa dengan mencalonkan Anies Baswedan menjadi calon presiden dari Partai NasDem bukan berarti hubungan NasDem dengan pemerintah harus retak, harus berpisah, namun lebih kepada bagaimana spirit untuk tetap mengembangkan spirit rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Menempatkan calon Presiden Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya pembangunan yang sedang berjalan sampai hari ini, keberhasilan yang sedang dan telah dicapai.

Partai NasDem tetap mengajak kerja sama dan menjaga suasana kondusif penuh rasa harmoni dan kekeluargaan. Kompetisi dalam Pemilu sekali dalam lima tahun bukanlah berarti harus bermusuhan satu sama lain. Surya Paloh sebagai ketua umum Partai NasDem meminta kepada seluruh kader untuk menjaga dan memperjuangkan niat murni Partai NasDem untuk tetap menjaga semangat konsolidasi dan spirit persatuan kebangsaan harus bisa bersatu diantara satu sama lain, harus mempunyai kesadaran bersama untuk saling membesarkan sesama, harus mengedepankan *positive thinking*, harus merasakan dan merangkul semua komponen dan kekuatan elemen masyarakat dan harus nyatakan ikut bersama-sama bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kemajuan berbangsa dan bernegara. Surya Paloh bersama seluruh kader Partai NasDem turut mendoakan agar kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan dengan baik dan sukses. Presiden Joko Widodo bagi Partai NasDem merupakan sebagai seorang sahabat yang lebih daripada sekedar sahabat, harapannya agar Joko Widodo tetap menjadi sebagai sahabat bagi Partai NasDem.

A. NasDem UMKM Trade Show (NUTS)

Dalam rangka HUT ke-11, Partai NasDem menggelar kegiatan NasDem UMKM Trade Show (NUTS) di JCC Jakarta, Rabu, 9 November 2022. Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad H. Ali.

Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi kepada pelaku UMKM yang hadir memeriahkan acara tersebut yaitu sekitar 300 UMKM pilihan dari berbagai wilayah di Indonesia. Partai NasDem komitmen bahwa UMKM lebih berkembang dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, pangan serta budaya Indonesia. Dalam rangka HUT ke-11, Partai NasDem menggelar kegiatan

NasDem UMKM Trade Show (NUTS) di JCC Jakarta Pusat, Rabu, 9 November 2022. Acara ini dibuka oleh Rachmat Gobel. Pada sambutannya, Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi kepada pelaku UMKM yang hadir memeriahkan acara tersebut yaitu sekitar 300 UMKM pilihan dari berbagai wilayah di Indonesia. Partai NasDem komitmen bahwa UMKM lebih berkembang dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, pangan serta budaya Indonesia.





Rachmat Gobel saat berkunjung di salah satu gerai UMKM peserta NUTS

Mendukung pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk, *packaging*, branding hingga membantu perizinan dan pemasaran. Hal ini dilakukan menuju ketahanan pangan nasional untuk menghadapi ancaman krisis pangan di tengah kondisi geopolitik internasional yang kurang stabil, dengan memproduksi bahan pangan yang menjadi keunggulan daerah masing-masing (seperti jagung, sagu, dll). Mengembangkan budaya nasional melalui produk-produk UMKM, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai budaya, yang dapat dikembangkan seperti produk kerajinan, produk batik, produk herbal, dll.

Partai NasDem terus mendorong agar eksistensi UMKM dapat naik kelas dan semakin maju mengembangkan cakupannya, berkomitmen untuk memajukan UMKM dalam negeri untuk bisa menembus pasar ekspor. Sehingga dapat meningkatkan pemasukan bagi devisa negara. Dalam kegiatan NUTS kali ini, Partai NasDem juga mengundang perwakilan negara sahabat atau atase perdagangan untuk melihat produk-produk UMKM yang ikut dalam program NUTS dalam rangka HUT ke-II Partai NasDem.

Melalui kegiatan NUTS ini, Partai NasDem berharap UMKM dapat meraih potensi pemasaran baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kegiatan ini Partai NasDem juga mengundang kelompok buyer internasional dan pengunjung secara umum, diharapkan dengan hadirnya beberapa kelompok buyer khususnya dari Internasional tersebut dapat membantu pengembangan, pemasaran dan peningkatan kualitas UMKM di Indonesia.

B. Bimtek Anggota DPRD

Masih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-11, Partai NasDem melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada Kamis 10 November 2022.

Bimtek ini dilaksanakan dengan tiga sesi, yaitu sesi pertama dengan tema “sinergi kampanye pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres)” dengan narasumber Willy Aditya sebagai Ketua DPP Partai NasDem/Pimpinan Badan Legislatif DPR RI. Moderator Ratih Megasari Singkaru sebagai Ketua DPP Partai NasDem/Pimpinan Kelompok Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

Sesi yang kedua adalah “menang pemilu dengan media sosial” dengan narasumber Pangeran Siahaan dan Randy Arbiyantama yang dimoderatori oleh Ivanhoe Semen sebagai Ketua DPP Partai NasDem bidang hubungan sayap dan badan. Kemudian sesi ketiga dengan tema “overview dapil” dengan narasumber Fajar S. Tamin dari Jaringan Survey Indonesia (JSI) yang dimoderatori oleh Jakfar Sidik sebagai Wasekjen DPP Partai NasDem.



Rachmat Gobel saat mendampingi Wakil Ketua Partai NasDem Ahmad H. Ali membuka secara resmi acara bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Pada Bimtek ini ditegaskan kembali agar semua Anggota DPRD berjuang untuk memenangkan Partai NasDem dan memberikan keyakinan kepada publik dengan membawa harapan. Melaksanakan seluruh arahan, instruksi, dan keputusan partai, baik dalam pemenangan legislatif, pemenangan presiden, dan pemengan kepala daerah. Perlu dipahami beberapa tipologi orang memilih pada pemilu. Seperti di daerah Sulawesi dan Sumatera rata-rata 76 % orang memilih capresnya kemudian calegnya, sedangkan di daerah Jawa rata-rata 45% memilih partainya kemudian capresnya.

Partai NasDem telah mengadakan program NasDem Memanggil, sehingga seluruh kader diminta untuk merekrut orang-orang terbaik menjadi caleg Partai NasDem. Saat ini partai telah menetapkan daftar bakal calon legislatif sementara (bacaleg), dan komunikasi dengan struktur dalam penyusunan caleg harus secara terbuka dan kompetitif.

Seluruh kader diminta untuk meningkatkan elektabilitas melalui *brand* tokoh terhadap partai, memperbanyak figur, memasang peraga sebanyak-banyaknya, menempatkan pada posisi strategis. Struktur harus solid dan terbuka bagi relawan, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi relawan. Menjadikan kantor menjadi sekretariat bersama (sekber), buka pintu selebar-lebarnya kepada relawan, ambil peran sebelum diambil alih oleh partai lain. Terkait pilkada, bagi kader yang ingin maju, maka harus memenangkan pileg terlebih dahulu sebagai ukuran kinerja. Efek ekor jas dapat dirasakan apabila dapat dioptimalkan.

Menang pemilu dengan media sosial, pemilih 2024 hampir 60% dari Gen-Z dan millennial. Dari 61,8 % dari 275 juta warga Indonesia menggunakan media sosial. Cara mengoptimalkan media sosial dapat dilakukan melalui empat konten yang pasti berhasil, diantaranya dengan mengedukasi, meyakinkan, menginspirasi, dan menghibur.



■ Capres Partai NasDem Anies Rasyid Baswedan saat hadir dalam acara Bimtek dalam rangkaian acara HUT ke -11 Partai NasDem

Semua orang yang memiliki *follower* yang banyak pasti melakukan empat hal tersebut. Seperti yang dilakukan Ridwan Kamil, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Konten yang baik itu meningkatkan peluang untuk mendapatkan suara, tidak kalah penting adalah menyesuaikan dengan jati diri. Untuk menghadapi berita hoax dan serangan *buzzer*, jangan terlalu sering menjawabnya, cukup sekali sampai dua kali, kemudian dilakukan *counter* dengan cepat sehingga *counter* isunya lebih tepat, sebagaimana disampaikan oleh narasumber.

Dalam hal *overview* Dapil, NasDem sebagai partai yang terhitung baru sangat rentan untuk diolok-olok. Partai NasDem memang selalu paling rendah apabila dilihat dari hasil survey sebelum pemilihan, tetapi begitu selesai pemilihan, Partai NasDem selalu melebihi *presidential threshold*.

Misalnya pada tahun 2014, pada waktu itu, survei Partai NasDem di bawah *presidential threshold*, begitu pemilihan berlangsung dan selesai penghitungan suara, Partai NasDem melewati ambang batas pada saat itu yakni 3.5 %. Kemudian pada pileg 2019 dimana *presidential threshold* naik menjadi 4%, Partai NasDem mampu melampauinya dengan kenaikan suara yang paling signifikan diantara partai-partai lain.



■ Rachmat Gobel bersama Wakil Ketua Partai NasDem Ahmad H. Ali, Gubernur ABN IGK Manila dan Julie Laiskodat dalam acara Bimtek dalam rangkaian acara HUT ke -11 Partai NasDem



Melalui kerja-kerja cerdas, maka memungkinkan Partai NasDem untuk mendapatkan suara sebanyak \pm 20 juta suara. Dengan melihat dua pemilihan sebelumnya, dimana Partai NasDem memiliki suara dari \pm 8 juta suara pada 2014 menjadi \pm 12 juta suara pada 2019. Meningkatkan menjadi \pm 4 juta, maka harus optimis untuk mencapai suara \pm 20 juta suara pada 2024. Untuk bekerja lebih efektif dan efisien, dengan mencermati suara-suara yang ada di setiap daerah masing-masing.

Partai NasDem adalah partai yang mendukung moral politik yang baik. Partai NasDem tetap konsisten mendukung Presiden Jokowi sampai 2024 sebagai pertanggung jawaban moral politik yang baik. Hak moral etik sebagai partai politik, Partai NasDem berhak mengusung nama calon Presiden di 2024 nanti, tanpa mengabaikan hak moral etik yang lain, dalam hal ini mendukung Presiden Jokowi sampai akhir periode jabatannya.

Partai NasDem telah mengadakan program NasDem Memanggil, sehingga seluruh kader diminta untuk merekrut orang-orang terbaik menjadi caleg Partai NasDem. Saat ini partai telah menetapkan daftar bakal calon legislatif sementara (bacaleg), dan komunikasi dengan struktur dalam penyusunan caleg harus secara terbuka dan kompetitif.

Seluruh kader diminta untuk meningkatkan elektabilitas melalui *brand* tokoh terhadap partai, memperbanyak figur, memasang peraga sebanyak-banyaknya, menempatkan pada posisi strategis. Struktur harus solid dan terbuka bagi relawan, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi relawan. Menjadikan kantor menjadi sekretariat bersama (sekber), buka pintu selebar-lebarnya kepada relawan, ambil peran sebelum diambil alih oleh partai lain. Terkait pilkada, bagi kader yang ingin maju, maka harus memenangkan pileg terlebih dahulu sebagai ukuran kinerja. Efek ekor jas dapat dirasakan apabila dapat dioptimalkan.

Menang pemilu dengan media sosial, pemilih 2024 hampir 60% dari Gen-Z dan millennial. Dari 61,8 % dari 275 juta warga Indonesia menggunakan media sosial. Cara mengoptimalkan media sosial dapat dilakukan melalui empat konten yang pasti berhasil, diantaranya dengan mengedukasi, meyakinkan, menginspirasi, dan menghibur.

Semua orang yang memiliki *follower* yang banyak pasti melakukan empat hal tersebut. Seperti yang dilakukan Ridwan Kamil, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Konten yang baik itu meningkatkan peluang untuk mendapatkan suara, tidak kalah penting adalah menyesuaikan dengan jati diri. Untuk menghadapi berita *hoax* dan serangan *buzzer*, jangan terlalu sering menjawabnya, cukup sekali sampai dua kali, kemudian dilakukan *counter* dengan cepat sehingga *counter* isunya lebih tepat, sebagaimana disampaikan oleh narasumber.

Dalam hal *overview* Dapil, NasDem sebagai partai yang terhitung baru sangat rentan untuk diolok-olok. Karena partai id yang sangat lemah. Partai NasDem memang selalu paling rendah apabila dilihat dari hasil survey sebelum pemilihan, tetapi begitu selesai pemilihan, Partai NasDem selalu melebihi *presidential threshold*.





Menuju Pemilu 2024, Partai Nasdem Deklarasi Calon Presiden

Partai NasDem resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh di Ballroom NasDem Tower, DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, pada Senin, 03 Oktober 2022.

Deklarasi yang dihadiri langsung Anies Baswedan beserta seluruh jajaran fungsionaris DPP NasDem itu diawali dengan mengheningkan cipta terhadap musibah Stadion Kanjuruhan Malang yang dipimpin Surya Paloh.

Surya Paloh mengatakan, deklarasi Anies Baswedan merupakan lanjutan rangkaian kegiatan Rakernas NasDem 15-17 Juni 2022 yang menghasilkan tiga nama yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Partai NasDem menghargai anak-anak bangsa siapapun dan darimanapun itu yang mempunyai niat baik untuk mendharma baktikan dirinya memimpin negeri ini dan sangat meyakini kemampuan dan integritas putra-putri terbaik bangsa tersebut. Partai NasDem konsisten melakukan dialog kebangsaan antar semua kalangan untuk menempatkan elaborasi pemikiran-pemikiran mencapai tujuan bersama yaitu “Indonesia Maju Rakyat Sejahtera” khususnya dalam mempersiapkan kemenangan Pemilu 2024 yang akan datang.

Partai NasDem telah melihat pribadi Anies Baswedan secara utuh memiliki kesamaan jalan dan tujuan NasDem dalam mengawal perjalanan Bangsa Indonesia ke depan. NasDem ingin mencari anak-anak bangsa terbaik dari yang baik-baik. NasDem meminta Anies untuk mendalami dan melihat kembali sejauh mana nilai-nilai, harkat dan martabat Bangsa Indonesia, apa yang sudah berhasil untuk diteruskan serta yang belum berhasil dicapai agar dapat diperbaiki. Seluruh keluarga besar NasDem diminta untuk mengawal proses pencalonan Anies Baswedan tersebut.

“Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best,” Surya Paloh

Surya Paloh menegaskan kepada Anies Baswedan, jika terpilih menjadi presiden nanti, maka pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu juga untuk membangun karakter sejatinya, menawarkan pemikiran yang moderat. Proses membangun bangsa diperlukan pembangunan fisik sekaligus pembangunan *national and character building*, membangun karakter anak-anak bangsa. Walaupun NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi Capres namun NasDem tetap berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Maruf Amin sampai akhir masa jabatan pada tahun 2019-2024 yang akan datang.

Dalam sambutannya, Anies Baswedan menebarkan semangat dalam membangun cita-cita Indonesia bersama dengan proses kolaborasi yang baik. Ia juga menyebutkan pribahasa Aceh yang kurang lebih memiliki arti begitu niat langsung jadi dan apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Menyambut baik keinginan luhur yang menjadi cita-cita bersama yaitu membangun Indonesia ke depan bersama-sama dengan keluarga besar NasDem. “Sekali lagi dengan segala kerendahan hati dengan memohon doa dari semua dengan berharap Ridho dan petunjukNya, Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh keringanan dari-Nya,” katanya. Anies Baswedan mengajak untuk meniatkan seluruh ikhtiar sebagai rangkaian ibadah dalam rangka meraih Ridho Yang Maha Kuasa.



Surya Paloh juga meminta seluruh kader NasDem, seluruh anggota Fraksi NasDem agar memahami dan memaklumi kondisi perubahan yang dirasakan saat NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan. Kinerja harus ditingkatkan, dari bekerja biasa-biasa saja menjadi kerja luar biasa sebagai bagian dari konsekuensi kebijakan Partai. Kader NasDem akan semakin diuji ketangguhannya dan kemampuannya.

Surya Paloh juga menegaskan, salah besar ketika Partai NasDem dianggap oposisi pemerintahan. Sebagai pendukung bahkan pengusung calon Presiden Jokowi pada 2014 dan 2019, Partai NasDem tetap konsisten dengan komitmen profesionalisme dan moralitas sebagai makna terpenting dari perjuangan bersama gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa Indonesia. Partai NasDem berharap diakhir jabatan pemerintahan Jokowi mampu melahirkan *legacy* sebagai bagian dari investasi Partai NasDem.

Kepercayaan diri dan komitmen Partai NasDem tetap terjaga, meski saat ini dipersepsikan sebagai lawannya pemerintahan walaupun belum tentu itu merupakan kebijakan resmi pemerintahan—dengan berbagai hal yang menyudutkan NasDem walaupun itu di luar kontekstual.

Sampai saat ini Partai NasDem masih menjadi Partai koalisi Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Partai NasDem secara konsisten akan tetap memberikan dukungan hingga akhir jabatan 2024 nanti, hal ini sudah berulang kali disampaikan Surya Paloh. Ia selalu berupaya menempatkan pikiran untuk kepentingan nasional harus mengalahkan kepentingan subjektivitas, baik partai politik individu. Mencalonkan Anis sebagai calon Presiden merupakan kepentingan nasional, sehingga jangan ada praduga buruk yang didasari ketidaksukaan karena Anies Basweda punya dukungan yang jauh signifikan. Kepentingan nasional, stabilitas nasional harus dijaga bersama dan melawan polarisasi seperti pada pemilu yang lalu. Dengan komitmen kebangsaannya, NasDem menjamin polarisasi tidak terjadi.

Pada kesempatan deklarasi Surya Paloh menyampaikan bahwa sedang berproses untuk menempatkan sebagai koalisi resmi dengan siapapun di luar NasDem sendiri. Ini bisa saja terjadi, tetapi bisa juga tidak terjadi karena proses tersebut masih dalam perencanaan, dengan duduk bersama Demokrat, PKS, dan lainnya.

Partai NasDem sendiri sampai saat ini belum memiliki 20% PT (*presiden threesold*). Harapannya pada Pemilu 2024 yang akan datang, NasDem mampu memperoleh 20% PT (*presiden threesold*). Apabila koalisi perubahan (NasDem, Demokrat, PKS) terbentuk untuk mencalonkan Anis maka kita akan berjuang untuk menang, dan apabila koalisi tidak berlanjut setidaknya NasDem sudah pernah berniat baik dan berusaha.

Rachmat Gobel menyampaikan bahwa NasDem harus mendukung anak-anak bangsa terbaik. Sosok Anies Baswedan dimata Rachmat Gobel, merupakan pribadi yang sesuai dan mempunyai tujuan untuk mengawal bangsa Indonesia. Ia juga menyampaikan selamat untuk Anies Rasyid Baswedan, semoga visi dan misi dalam gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik bisa tercapai.



Launching NasDem Memanggil

Pada 17 Oktober 2022, di NasDem Tower, DPP Partai NasDem meluncurkan program “NasDem Memanggil” yang dirancang untuk menjaring putra-putri terbaik Indonesia berpartisipasi melalui fungsi dewan atau lembaga parlemen. Berkontestasi secara sehat dan bermartabat, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai politik.

Program ini diluncurkan sebagai salah satu langkah politik menuju kemenangan Pemilu 2024, dengan menargetkan perolehan suara untuk 100 kursi DPR RI, serta meningkatkan perolehan kursi DPRD Provinsi, Kab/Kota.

Launching Program NasDem Memanggil dibuka langsung Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dihadiri bakal calon presiden Anies Baswedan, seluruh pengurus DPP NasDem dan Anggota Fraksi NasDem DPR RI hingga sejumlah perwakilan pengurus DPW NasDem berbagai provinsi. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Surya Paloh menegaskan NasDem sebagai partai politik tetap berkomitmen menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai politik, komitmen itu tidak akan bertentangan dengan ambisi politik Partai NasDem untuk memperoleh hasil terbaik pada Pemilu 2024.

Dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024, Partai NasDem tidak akan mempertentangkan satu sama lainnya, tetapi bagaimana kontestasi tersebut bisa berjalan secara paralel. Satu sisi kepentingan nasional di atas kepentingan partai, tetapi di sisi lain NasDem juga ingin besar, memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya. Partai NasDem telah menempatkan berbagai strategi politik untuk menjemput kemenangan di 2024. Salah satu langkah yang telah diambil ialah menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, meski langkah ini mendapat banyak tantangan, godaan, dan hambatan.

Terkait komitmen koalisi bersama pemerintahan Presiden Jokowi, Surya Paloh menegaskan, tidak ada yang berubah, tetap seperti sejak pertama kali mengukung Jokowi. Komitmen Partai NasDem tetap sama, mengawal dan bersama Presiden Jokowi pada periode 2019-2024. NasDem selalu menempatkan posisinya sebagai sahabat sejati koalisi pemerintahan Jokowi.

Ketua Umum Surya Paloh konsisten memantau perkembangan setiap dapil. Sebagaimana diketahui, pada Pileg 2014 Partai NasDem memperoleh 36 kursi di DPR RI, naik menjadi 59 kursi pada Pileg 2019 dan menargetkan 100 kursi pada Pileg 2024. Surya Paloh menegaskan kepada seluruh kader untuk mencapai target yang harapan tersebut dengan soliditas khususnya diantaranya para elit NasDem yang merupakan ujung tombak utama.

Untuk itu Surya Paloh meminta seluruh anggota Fraksi NasDem mempertahankan kursinya masing-masing, mempersiapkan diri sendiri agar terpilih kembali pada Pileg 2024. Ini mengharuskan mereka untuk menguasai/memahami kondisi masyarakat atau konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari waktu ke waktu, baik setiap minggu, setiap bulan. Optimisme memperoleh 100 kursi DPR RI target untuk mengisi dapil yang tidak memperoleh kursi pada pemilu 2019 yang lalu dan tambahan dari beberapa dapil dengan memperoleh dua kursi pada dapil-tertentu diantara 84 dapil di seluruh pelosok Indonesia.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP NasDem, Prananda Surya Paloh (PSP) menerangkan, bahwa “NasDem Memanggil” adalah sebuah program yang digagas Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem dalam upaya menjaring para calon anggota legislatif, baik di level DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk berkontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang.

NasDem Memanggil adalah sebuah ruang bagi segenap anak bangsa yang memiliki atensi serta ketertarikan dalam dunia politik praktis guna memperjuangkan kepentingannya. Siapapun boleh ambil bagian dalam program ini baik tua-muda, lak-laki atau perempuan, di kota maupun di desa, asalkan memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dipilih dalam mekanisme Pemilu. Program ini juga merupakan sebuah panggilan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berkehendak membangun Indonesia yang lebih baik melalui *platform* Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.





Anies Baswedan yang turut hadir dalam peluncuran program “NasDem Memanggil” dalam sambutannya mengatakan, mengapresiasi Partai NasDem yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menjadi bakal calon presiden (Bacapres) dalam Pemilu 2024. Anies mengajak semua kalangan ikut ambil bagian, mengambil tanggung jawab, yang punya karya, yang punya gagasan jangan tinggal diam.

Anies sangat mengapresiasi dan mendukung gagasan Partai NasDem sebagaimana yang disampaikan Prananda Surya Paloh (Ketua Koord. Bappilu) yaitu politik tanpa mahar. Anies Baswedan meminta kepada seluruh kader untuk mengimplementasikan ide atau gagasan, tanpa syarat, tanpa mahar sebagai komitmen untuk kemenangan Partai NasDem dalam Pemilu 2024.

Selaku wakil rakyat dari dapil Gorontalo, Rachmat Gobel menyambut baik target DPP Partai NasDem yaitu 100 kursi DPR RI. Rachmat Gobel menargetkan tiga kursi DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo yang sebelumnya memperoleh satu kursi DPR RI yaitu Rachmat Gobel yang juga diamanatkan untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang). NasDem harus menang besar di Gorontalo sekaligus merebut jabatan Gubernur, dan jabatan Bupati/Wali Kota sebanyak mungkin.

Keyakinan Rachmat Gobel itu antara lain didasari capaian Partai NasDem yang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2014, Partai NasDem hanya memenangkan 1 kursi DPRD satu kursi di DPRD Kab. Gorontalo. Dalam Pemilu 2019, Rachmat Gobel turun menjadi Caleg Gorontalo dan perolehan kursi meningkat signifikan yaitu memperoleh 24 kursi legislatif yang terdiri dari 1 (satu) kursi DPR RI, 6 (enam) kursi DPRD Provinsi dan 17 (tujuh belas) kursi di Kabupaten/Kota. Untuk Pemilu 2024 yang akan datang Partai NasDem Gorontalo akan meningkatkan target capaian kursi legislatif dengan perolehan kursi menjadi 3 (tiga) kursi DPR RI, 13 (tiga belas) kursi DPRD Provinsi dan 48 (empat puluh delapan) kursi DPRD Kabupaten/Kota.

“Dengan membangun sinergi
dari hulu sampai hilir,
kekuatan rakyat akan bangkit.
berbagai masalah seperti kemiskinan dan
ketimpangan akan teratasi,
kedaulatan dan martabat bangsa terjaga.”

- **Rachmat Gobel** -



10
BAB

**KEMBALI
MENYAPA KONSITUEN
DI AKAR RUMPUT**



Membangun Sinergi Kekuatan Ekonomi Rakyat

Seperti tidak pernah lelah, Rachmat Gobel selalu bersemangat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (reses) ke berbagai pelosok provinsi Gorontalo. Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif, mengetahui dan memahami aspirasi rakyat untuk kemudian di perjuangkan agar bisa terwujud. Sebagai tokoh dan sekaligus representatif masyarakat Gorontalo di DPR RI, visi Rachmat Gobel adalah membawa wilayah ini dari posisi lima termiskin di Indonesia menjadi ke posisi lima wilayah termakmur.

Mempunyai pengalaman panjang di bidang ekonomi dan industri, Rachmat Gobel melihat, peluang untuk mewujudkan visi itu sangat terbuka. Namun diakui, semua itu membutuhkan kerja keras dan kerjasama semua pihak. Kuncinya, tidak hanya merumuskan visi dengan jelas, tapi juga harus mampu menerjemahkannya kedalam berbagai program nyata yang betul-betul menyentuh sendi kehidupan masyarakat. Inilah yang dilakukan Rachmat Gobel, melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat, merancang berbagai program nyata, dan kemudian mewujudkan dalam membangun sinergi dengan semua pihak.

Jadwal reses Rachmat Gobel selalu dipenuhi agenda kunjungan keberbagai pelosok, menemui petani, nelayan, UMKM, melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh, termasuk mengajak pejabat dari pusat untuk melihat langsung potensi ekonomi Gorontalo. Harus diakui, salah satu kelebihan Rachmat Gobel adalah kemampuannya menyampaikan aspirasi rakyat Gorontalo ke pemerintah pusat, sehingga mampu menggerakkan bantuan ke provinsi ini.

Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, Rachmat Gobel selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait melalui program pemerintah di berbagai sektor yaitu pertanian, peternakan, pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, UMKM, koperasi, Sosialisasi Jasa Keuangan, perekonomian, mengentaskan kemiskinan, menghilangkan stunting serta memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat Gorontalo.

Rachmat Gobel yakin, dengan membangun sinergi dari hulu sampai hilir, kekuatan ekonomi rakyat akan bangkit, berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketimpangan akan teratasi, kedaulatan dan martabat bangsa terjaga. Bukankah ini yang dicita-cita oleh kemerdekaan bangsa pada 1945? Inilah semangat restorasi yang menjadi energi Rachmat Gobel, mendedikasikan setiap langkahnya untuk membangun kedaulatan dan martabat bangsa dengan kekuatan ekonomi rakyat.

Untuk itu, sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dalam setiap tahun Rachmat Gobel selalu memaksimalkan kunjungan kerjanya ke dapil Gorontalo. Dalam Tahun Sidang 2021-2022 Ia melakukan kunjungan kerja reses sebagai anggota DPR ke Provinsi Gorontalo sebanyak 5 kali, menghadiri sekitar 100 titik pertemuan di berbagai pelosok.

A. Dasar Kunjungan Kerja

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai tugas dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, selain tugas tersebut dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) juga mempunyai fungsi menyerap aspirasi, dimana Anggota DPR RI membangun daerah pemilihannya (dapil) dengan menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di DPR RI melalui rapat-rapat dengan Pemerintah maupun dengan pihak lainnya. Dalam menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya, Rachmat Gobel telah berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Kegiatan-kegiatan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat di dapil Gorontalo tersebut dilaksanakan oleh Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Industri dan Pembangunan dilakukan pada saat Reses DPR RI. Kegiatan Reses DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diperjuangkan oleh Rachmat Gobel untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Gorontalo melalui program-program kerja pemerintah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dalam tahun sidang 2021-2022 dengan mengunjungi 5 (lima) kabupaten dan satu kota di Gorontalo antara lain Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo.

Melihat permasalahan-permasalahan di dapil yang telah dikunjungi tersebut, Rachmat Gobel telah memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat berkoordinasi dengan kementerian terkait melalui program pemerintah di berbagai sektor yaitu pertanian, peternakan, pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, UMKM, Koperasi, Sosialisasi Jasa Keuangan, perekonomian, mengentaskan kemiskinan, menghilangkan stunting serta memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat Gorontalo.

Dalam Tahun Sidang 2021-2022 Rachmat Gobel telah melakukan kunjungan kerja Reses Anggota DPR ke daerah pemilihan Provinsi Gorontalo sebanyak 5x sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

B. Tujuan Kunjungan Kerja Reses

Kunjungan Kerja Reses Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI ke Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Penyerapan aspirasi masyarakat di daerah-daerah pemilihan dari wilayah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota guna untuk mendengarkan permasalahan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan publik;
- Pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat dan pejabat daerah antara lain Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Akademisi, Organisasi Mahasiswa, Pelaku UKM, para Kelompok Tani dan Nelayan serta Ketua dan Pengurus serta Anggota DPW dan DPD Partai NasDem dan Organisasi dibawah partai NasDem di Gorontalo;
- Pertemuan dengan Pejabat dan Dinas-dinas Pemerintah Daerah serta Instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dalam melaksanakan program pemerintah;



- Sebagai forum silaturahmi antara Anggota DPR RI dengan masyarakat dan warga setempat serta konstituen di daerah pada umumnya dan di daerah pemilihan pada khususnya;
- Membentuk kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPR RI karena semakin menipisnya kepercayaan ditengah masyarakat dan membangun citra DPR RI;
- Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Tugas dan Fungsi Anggota DPR RI sebagai Anggota Legislatif yang bertugas membuat Undang-undang, menetapkan Anggaran dan Pengawasan terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Penyerapan aspirasi yang terkait dalam bidang Keuangan dan Perbankan sesuai dengan tugas sebagai Anggota Komisi XI DPR RI;
- Selain Anggota Komisi XI, juga sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan yang membawahi Komisi IV, Komisi V, Komisi VI dan Komisi VII, maka perlu juga mendengarkan aspirasi yang terkait dengan empat bidang Komisi tersebut (Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Infrastruktur, Perhubungan, Industri, Investasi, Persaingan Usaha, Energi dan Ristek dan Koperasi);
- Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pengurus dan Anggota Partai NasDem terkait kepartaian ditingkat DPW, DPD dan DPC serta DPRT di daerah pemilihan Gorontalo;
- Sosialisasi tentang Kegiatan dan Kebijakan serta Program Kerja DPP Partai NasDem;
- Melaksanakan Konsolidasi dan koordinasi pada para pejabat Pemerintah Daerah, SKPD serat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan Gorontalo.



Melihat permasalahan-permasalahan di dapil yang telah dikunjungi tersebut, Rachmat Gobel telah memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat berkoordinasi dengan kementerian terkait melalui program pemerintah di berbagai sektor yaitu pertanian, peternakan, pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, UMKM, Koperasi, Sosialisasi Jasa Keuangan, perekonomian, meringankan kemiskinan, menghilangkan stunting serta memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat Gorontalo.

Dalam Tahun Sidang 2021-2022 Rachmat Gobel telah melakukan kunjungan kerja Reses Anggota DPR ke daerah pemilihan Provinsi Gorontalo sebanyak 5x sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

B. Tujuan Kunjungan Kerja Reses

Kunjungan Kerja Reses Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI ke Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Penyerapan aspirasi masyarakat di daerah-daerah pemilihan dari wilayah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota guna untuk mendengarkan permasalahan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan publik;
- Pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat dan pejabat daerah antara lain Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Akademisi, Organisasi Mahasiswa, Pelaku UKM, para Kelompok Tani dan Nelayan serta Ketua dan Pengurus serta Anggota DPW dan DPD Partai NasDem dan Organisasi dibawah partai NasDem di Gorontalo;
- Pertemuan dengan Pejabat dan Dinas-dinas Pemerintah Daerah serta Instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dalam melaksanakan program pemerintah;



C. Kegiatan Kunjungan Reses di Daerah Pemilihan Gorontalo

Dalam Tahun Sidang 2021-2022 Kunjungan Reses Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI ke daerah pemilihan Gorontalo dilakukan sebanyak 5 (lima) kali masa reses yaitu sebagai berikut :

Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022

Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Dapil Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 secara berturut-turut dengan agenda;

1. Kota Gorontalo

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Oktober 2021

Waktu : 10.00 WITA

Bentuk Kegiatan Peresmian Rumah Karowo Gorontalo, dilanjutkan dengan berdialog dengan pendiri Rumah Karowo dan Para Pengrajin di Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;

Peserta CEO Rumah Karowo, Anggota DPRD dan Beberapa Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Kota Gorontalo dan Pengrajin Rumah karowo.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmad Gobel, mengapresiasi kehadiran gedung baru Rumah Karawo sebagai tempat yang representatif yang menghadirkan produk kerajinan khas Gorontalo Karawo. Dengan begitu ketika turis ataupun tamu dari luar daerah datang ke Gorontalo, bisa diperkenalkan produk karawo.

“Saya berharap tidak berhenti di sini. Ke depan perlu ada upaya-upaya untuk menyemangati para pelaku UMKM di Gorontalo. Terutama pelaku UMKM yang bergerak pada kerajinan dan produk khas Gorontalo,” ujar Rachmad Gobel. Untuk itu, Rachmad Gobel, *men-challenge* Agus Lahinta untuk membuat kegiatan yang bisa menghidupkan geliat perajin lokal dan pelaku UMKM di Gorontalo.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi CEO Rumah Karawo, Agus Lahinta menyaksikan proses penyulaman karawo

Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel mendorong pengembangan rumah Karawo di Gorontalo sebagai tujuan pariwisata dan representasi rakyat Gorontalo baik bagi turis mancanegara dan turis lokal.
- Tahun 2022 Rachmat Gobel ingin mengkampanyekan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) rakyat Gorontalo, salah satunya ingin memperkenalkan produk rumah Karawo di Gorontalo mulai dari produk kain karawo, kue Karawo, kerajinan dan juga hasil pertanian.
- Kondisi pandemi Covid-19 yang sudah mulai membaik, Rachmat Gobel mengharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih mengenalkan hasil produk asli dari Gorontalo yang ada di rumah Karawo.
- Rachmat Gobel berkomitmen untuk terus memperkenalkan produk-produk dari Gorontalo yang merupakan hasil dari karya putra daerah Gorontalo.

- Rachmat Gobel mengapresiasi langkah pimpinan rumah Karawo, Agus Lahinta, yang telah memperkenalkan produk asli Gorontalo bukan saja di kancah nasional namun juga hingga ke mancanegara.

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Oktober 2021

Waktu : 13.00 WITA

Bentuk Kegiatan **Pembukaan “Training Of Trainers” Pedoman Dasar Kader Dan Platform Profiling Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Gorontalo oleh Rachmat Gobel; dilanjutkan dialog bersama kader Partai NasDem.**

Peserta **Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Gorontalo beserta Kader**



Pada hari yang sama, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmad Gobel juga hadir untuk membuka secara resmi kegiatan “*Training Of Trainers*” Pedoman Dasar Kader dan *Platform Profiling* Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Gorontalo oleh Rachmat Gobel yang dilanjutkan dialog bersama kader NasDem.

Pada kegiatan itu, Rachmat Gobel memberikan pesan-pesan kepada kader, diantaranya:

- Rachmat Gobel melontarkan kembali visinya bagi Gorontalo pada 2051 kepada para kader Partai NasDem se Provinsi Gorontalo agar mempersiapkan diri membangun daerahnya dalam 30 tahun mendatang.
- Menurut Rachmat Gobel untuk membangun Gorontalo beliau memiliki gagasan yang lebih fokus kepada tiga sektor. Sektor pertama adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor kedua usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sektor ketiga adalah pangan dan herbal.
- Rachmat Gobel, mengajak para kader dan pengurus DPW Partai NasDem Provinsi Gorontalo agar serius membawa pertumbuhan ekonomi dan dapat mengatasi Provinsi Gorontalo keluar dari kemiskinan sehingga yang sebelumnya dari provinsi termiskin kelima menjadi lima provinsi termakmur di Indonesia.
- Untuk mencapai semuanya itu Rachmat Gobel mengajak para kader untuk bekerja keras dan berjuang sungguh-sungguh serta melalui politik pembangunan, Rachmat Gobel, juga mengajak kader Partai NasDem melakukan praktik politik yang memberi manfaat pada masyarakat melalui pembangunan provinsi Gorontalo.
- Rachmat Gobel mengatakan Gorontalo nantinya akan menjadi pintu ke Kawasan Timur Jauh dan menjadi bagian dari penyangga ibukota negara yang baru di Kalimantan.

- Untuk efektivitas dalam mensejahterakan masyarakat Gorontalo, Rachmat Gobel mengatakan bahwa masyarakat harus menjadi bagian dari Visi 2051 tersebut.
- Rachmat Gobel juga menekankan Visi 2051 Gorontalo akan dihela oleh dua lokomotif ekonomi, yaitu pembangunan pelabuhan internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus Halal. Dengan konsep pembangunan dua lokomotif ekonomi tersebut, akan tumbuh infrastruktur jalan dan perumahan serta industri pangan dan jasa.
- Dengan posisi strategis Gorontalo saat ini, Rachmat Gobel yakin visi 2051 merupakan jawaban bagi provinsi tersebut keluar dari kemiskinan.

2. Kabupaten Bone Bolango

Hari : Rabu	Tanggal : 13 Oktober 2021	Waktu : 10.00 WITA
Bentuk Kegiatan	Menghadiri pertemuan Kredit Usaha Rakyat kluster pertanian, peternakan, dan perikanan bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Didampingi Bupati Gorontalo dan Bupati Bone Bolango di Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dilanjutkan dialog.	
Peserta	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou dan Jajaran terkait, warga dan petani Desa Yosonegoro, Kec. Limboto kabupaten Gorontalo serta Tim RG	

Hasil Pertemuan dan Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel menjelaskan visinya dalam membangun Gorontalo 2051.
- Rachmat Gobel mengajak perbankan nasional turut mendukung upayanya membangun provinsi Gorontalo dari lima provinsi termiskin menjadi lima provinsi termakmur.
- Rachmat Gobel menyampaikan fokus utama dalam membangun Provinsi Gorontalo 2051 mendatang dengan tiga sektor utama yaitu :
 - Sektor pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.
 - Sektor kedua, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan
 - Sektor ketiga adalah pangan dan herbal.
- Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, Rachmat Gobel, menceritakan kerjasamanya dengan Petrokimia Gresik di lahan Gorontalo yang subur untuk percepatan pembangunan Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional bagian timur dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.
- Menurut Rachmat Gobel, pangan sebagai kebutuhan dasar rakyat harus tersedia cukup dan ini bisa terlaksana jika program yang disusun pemerintah efektif bagi rakyat.

- Rachmat Gobel, menjelaskan salah satu upaya menuju Visi Gorontalo 2051 dia lakukan upaya *demonstration plot (demplot)* antara lain demplot jagung, cabai, dan tomat dimana menghasilkan panen hingga dua kali lipat.
- Untuk membangun konsep Gorontalo keluar dari lima termiskin di Indonesia, perlu membangun ekosistem yang baik, salah satunya dengan cara gunakan pupuk nonsubsidi dan kembalikan konsep pengembangan Koperasi. Dimana yang mengelola koperasi adalah petani sendiri.
- Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mendukung Visi Gorontalo 2051. Menurut Wimboh tanah di Gorontalo lebih subur daripada tanah di Jawa dan memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan.
- Wimboh Santoso mengajak Rachmat Gobel terus melakukan peningkatan produktivitas tiga sektor utama Visi Gorontalo 2051 yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat.
- Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi Provinsi Gorontalo disebabkan karena belum terbentuknya ekosistem usaha yang baik secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

3. Kabupaten Gorontalo

Hari : Selasa Tanggal : 13 Oktober 2021 Waktu : 10.00 WITA

Bentuk Kegiatan Menghadiri pertemuan Kredit Usaha Rakyat kluster pertanian, peternakan, dan perikanan bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Didampingi Bupati Gorontalo dan Bupati Bone Bolango di Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, dilanjutkan dialog.

Peserta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou dan Jajaran terkait, warga dan petani Desa Yosonegoro, Kec. Limboto kabupaten Gorontalo serta Tim Rachmat Gobel

Hasil Pertemuan dan Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel mengusulkan kepada OJK agar kredit macet usaha mikro di bawah Rp10 juta diputihkan.
- Menurut Rachmat Gobel, banyak rakyat mengeluh akibat pandemi Covid-19, banyak usaha yang tutup sehingga tak sanggup bayar hutang.

- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel mengatakan, akibat kredit macet itu, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil dan menengah lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- Dalam dialog tersebut, Rachmat Gobel, menambahkan, SLIK sendiri merupakan pengganti dari BI *Checking* dimana pengawasan perbankannya kini berada di OJK bukan lagi di Bank Indonesia (BI).
- Menurut Rachmat Gobel, kini banyak pelaku usaha lari ke rentenir dan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Ini membuat mereka jadi makin miskin.
- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang minta kepada OJK agar ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan serta memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional.
- Rachmat Gobel mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM agar usaha mereka sehat dan kualitas produk usaha juga bagus.
- Pembinaan yang dimaksud Rachmat Gobel adalah termasuk kemampuan UMKM untuk memasuki ekonomi digital. Sehingga produk UMKM juga harus bisa menjadi produk global.
- Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, proses pemutihan buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi tidak bagi bank negara. Prosesnya menjadi rumit karena sudah menjadi isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara dan akan menjadi kerugian negara. Menurut Wimboh, aturannya dihapus dulu dari undang-undang.
- Ketua Dewan Komisioner OJK menambahkan mengatakan sebetulnya bisa mendapat top up kredit jika usaha mikro terkena dampak pandemi Covid 19 atau bencana. Untuk KUR pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 6%. Selain itu juga ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3% untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



Bentuk Kegiatan	Pertemuan dan Dialog Bersama Ketua Dewan Komisiner OJK dengan warga dan petani tentang Program Ekosistem Pembiayaan KUR, dilanjutkan menanam padi di kompleks persawahan Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.
Peserta	Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou dan Jajaran terkait, warga dan petani Desa Yosonegoro, Kec. Limboto kabupaten Gorontalo serta Tim RG

Hasil Pertemuan dan Arahan Rachmat Gobel :

- Program Ekosistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan di Desa Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo;
- Bimbingan teknis pemeliharaan dan pengoperasian Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) traktor roda empat oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Gorontalo.
- Rachmat Gobel mengatakan, bahwa salah satu konsep membangun Gorontalo adalah membangun ekosistem yang baik, dengan cara menggunakan pupuk non subsidi dan kembalikan konsep koperasi.
- Rachmat Gobel mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar kredit macet usaha mikro di bawah Rp.10.000.000 diputihkan;
- Rachmat Gobel mendorong kampanye produk usaha mikro kecil dan menengah dari Provinsi Gorontalo seperti: kain karawo, kue karawo, kuliner, kerajinan, dan juga hasil pertanian lainnya.
- Rachmat Gobel menekankan Visi Gorontalo 2051 membangun dalam waktu 30 tahun mendatang, dari lima termiskin menjadi lima termakmur di Indonesia.



Bentuk Kegiatan	Menghadiri acara Bimbingan Teknis Pemeliharaan dan Pengoperasian Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda Empat Kredit Usaha Rakyat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dilanaajutkan dengan dialog dengan warga dan petani di kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Peserta	Jajaran Ditjen Prasaranan dan Sarana Pertanian Kementan, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou dan Jajaran terkait, warga dan petani Desa Yosonegoro, Kec. Limboto kabupaten Gorontalo serta Tim RG



Hasil Pertemuan dan Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel mengatakan pentingnya penggunaan dan perawatan alat traktor agar dapat menghasilkan Produk pertanian yang baik;
- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang menambahkan bantuan berupa traktor roda empat dan traktor tangan, merupakan aspirasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Gorontalo, baik jagung maupun padi;
- Dalam kesempatan itu Rachmat Gobel mengingatkan produksi pertanian tidak bisa lagi menggunakan cara-cara tradisional. Namun harus menggunakan peralatan modern agar lebih mudah dan cepat, agar hasilnya lebih banyak, dan juga lebih baik;
- Bantuan alat dan mesin pertanian yang diserahkan kepada kelompok tani di Limboto, Gorontalo, merupakan bagian dari aspirasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian;

- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menekankan, membutuhkan koperasi sebagai wadah untuk mengelola dan pembinaan agar petani tak direpotkan untuk merawat alat-alat mesin dan pertanian traktor;
- Direktur Alsintan Kasubdit Kelembagaan dan Alsintan Kementerian Pertanian Erna Riyanti Wardani mengatakan, bantuan traktor yang telah diberikan itu harus dikelola dengan baik dan dapat dipinjamkan ke kelompok lain sehingga mendapat penghasilan;
- Erna Riyanti Wardani menambahkan kelompok tani memiliki kewajiban merawatnya. Jika tidak dimanfaatkan maksimal, bantuan bisa ditarik dan dipindahkan ke kelompok lain;
- Rachmat Gobel mengingatkan pentingnya penggunaan dan perawatan alat traktor agar dapat menghasilkan produk pertanian yang baik.

Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022

Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Dapil Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 secara berturut-turut dengan agenda:

No	Hari, Tgl	Waktu	Kegiatan	Lokasi
1.	Sabtu, 18 Des 2021	13.00	Penyelenggaraan vaksinasi untuk masyarakat Gorontalo oleh Partai NasDem di Rumah Perjuangan Rachmat Gobel	Kota Gorontalo
2.	Minggu, 19 Des 2021	10.00	Rapat Koordinasi Persiapan Tim dalam kunjungan reses Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel	Kab. Bone Bolango
3.	Senin, 20 Des 2021	10.00	Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi	Kab. Bone Bolango
4.	Selasa, 21 Des 2021	12.00	Pertemuan dengan Konsultan dan Panitia Pembangun Sekolah/Taman Bermain Anak bertaraf Internasional bantuan Rachmat Gobel	Kota Gorontalo
		14.00	Dialog dengan Orang Tua dan Anak-anak Gorontalo	
5.	Rabu, 22 Des 2021	10.00	Penyerahan Bantuan Bea Siswa (Program Indonesia Pintar) kepada Siswa SD dan SMP Kab. Gorontalo Utara	Di SMPT 2 Kwandang Gorontalo Utara
		12.00	Meninjau Masjid yang mendapat bantuan	
		13.00	Peresmian Bantuan Rumah BPS sebanyak 250 unit untuk Kab. Gorontalo Utara	Kab. Gorontalo Utara
		15.00	Sosialisasi Implementasi QRIS "Menuju Masyarakat Non Tunai" oleh BI dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.	
6.	Kamis, 23 Des 2021	10.00	Pertemuan dan Dialog dengan Para Petani di Sekitar Pabrik RMU Di Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
		12.00	Bantuan Beras Provit di Limboto	
		13.00	Peninjauan Bantuan Rumah Penggilingan Padi di Limboto	
		14.00	Membuka Sosialisasi QRIS (BI)	
		15.00	Mengunjungi Koperasi Pengolahan Gula Aren	
		19.00	Pertemuan dengan Dinas-dinas Provinsi Gorontalo di Tapa	

No	Hari, Tgl	Waktu	Kegiatan	Lokasi
7.	Jumat, 24 Des 2021	09.00	Pertemuan dan Dialog dengan Komunitas Bentor Kota Gorontalo di RM. Tepi Sawah	Kota Gorontalo
		11.00	Pemberian Bantuan Beras Protivit dan jaket dari Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel utk Pengemudi Bentor Kota Gorontalo	
		12.00	Sholat Jumat Bersama Masyarakat Kota Gorontalo	
		14.00	Rapat Koordinasi DPW dan DPD partai NasDem di Grand Q Kota Gorontalo	
		16.00	Meninjau Kotaku di Desa Tamendao Kota Gorontalo dan berdialog dengan Para nelayan	
		19.00	Pertemuan dengan Masyarakat Kota Gorontalo	
8.	Sabtu, 25 Des 2021	10.00	Pertemuan dan Dialog dengan Para Nelayan Kampung Tanjung Keramat	
		12.00	Pemberian Bantuan Pelampung dan Beras Fortivit dari Rachmat Gobel pribadi untuk para Nelayan	
		19.00	Menghadiri Undangan dalam rangka Peringatan Natal	
9.	Minggu, 26 Des 2021	07.00	Olah Raga Bersama masyarakat sekitar	
		11.00	Kembali ke Jakarta	

Adapun kunjungan reses tersebut dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Hari : Sabtu Tanggal : 18 Desember 2021 Waktu : 13.00 WITA

1. Kota Gorontalo

Bentuk Kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi dan vaksinasi untuk masyarakat Kota Gorontalo dalam pencegahan penularan Covid-19 yang diselenggarakan di Rumah Perjuangan Rachmat Gobel.

Peserta Masyarakat Kota Gorontalo

Hari : Jumat Tanggal : 24 Desember 2021 Waktu : 10.00 WITA

Bentuk Kegiatan Pertemuan silaturahmi dan dialog dengan Komunitas Bentor Kota Gorontalo;
Pemberian bantuan secara pribadi berupa jaket dan beras Fortivit kepada Pengemudi Bentor Kota Gorontalo

Peserta Pengemudi Bentor Kota Gorontalo, Sekda Kota Gorontalo, dan Beberapa Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Kota Gorontalo

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel akan memperhatikan kesejahteraan pengemudi bentor dengan memberikan bantuan jaket anti air dan beras fortivit untuk keluarga pengemudi bentor;

- Rachmat Gobel menyampaikan bahwa Bentor adalah bagian dari sistem dan tatanan masyarakat Gorontalo. Tanpa bapak/ibu pengemudi Bentor maka sistem dan tatanan itu akan terganggu, dikarenakan kendaraan Bentor merupakan alat transportasi untuk mengantarkan bekerja, bersekolah, pergi ke pasar, dan beragam keperluan lainnya. Tanpa Pengemudi Bentor produktivitas Gorontalo akan terganggu, dan semua aktivitas akan terganggu. Jadi posisi pengemudi Bentor sangat strategis, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pengemudi bentor, dikarenakan bentor merupakan bagian dari sistem dan tatanan masyarakat pada transportasi Gorontalo;
- Rachmat Gobel mengatakan bahwa para pengemudi bentor pada saat bekerja hujan, maka para pengemudi harus aman dan perlu jaket penahan hujan agar tidak sakit, untuk menjaga kesehatan kesehatan tersebut, maka Rachmat Gobel memberikan bantuan jaket anti hujan dan para pengemudi bentor harus ikuti protokol kesehatan;
- Dalam pertemuan tersebut Rachmat Gobel telah menyiapkan bantuan sekitar 2.000 jaket anti air dengan hoodie (tudung kepala) yang diberikan kepada seluruh pengemudi bentor Kota Gorontalo, jaket tersebut dapat digunakan pada musim hujan saat pengemudi bentor bekerja agar tidak kena hujan dan sakit;
- Memberikan bantuan beras bervitamin (Fortivit) kepada pengemudi bentor, beras tersebut baik untuk ibu hamil, balita, khususnya untuk melawan stunting ;
- Setiap Reses Rachmat Gobel akan memberikan bantuan 30 ton beras Fortivit kepada masyarakat Gorontalo yang perlu dibantu, untuk menurunkan stunting dan mensejahterakan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



❖ Hari : Jumat Tanggal : 24 Desember 2021 Waktu : 14.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Rapat Koordinasi Pengurus DPW dan DPD Kabupaten/Kota Partai NasDem Gorontalo di Grand Q Hotel
Peserta	Pengurus DPW dan DPD partai NasDem serta Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten Gorontalo dan Kader Partai NasDem Provinsi Gorontalo

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Perlu konsolidasi Pengurus DPW/DPD dengan kader Partai NasDem dalam mendukung program kerja;
- Program kerja Pemda yang telah diperjuangkan oleh kader Partai NasDem melalui DPRD perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai NasDem di Gorontalo;
- Partai NasDem harus mengedepankan Politik Pembangunan dangagasan dalam memajukan Gorontalo ke depan, dan jangan terjebak politik praktis ataupun politik adu domba;
- Partai NasDem hadir untuk memberikan perubahan kepada masyarakat dan daerah kearah yang lebih baik, karena NasDem adalah agen perubahan bagi tatanan politik di tanah air.

Hari : Jumat Tanggal : 24 Desember 2021 Waktu : 16.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Peresmian Obyek Wisata Tamendao Beach di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo didampingi oleh Wakil Walikota Gorontalo
Peserta	Wakil Walikota Gorontalo (Ryan Kono), Dinas-dinas terkait, Ketua DPD Kota Gorontalo, Pengurus DPW Gorontalo dan Masyarakat Kota Gorontalo

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Diketahui, wisata Tamendao Beach sebelumnya tidak memiliki akses jalan. setelah menyerap aspirasi masyarakat di kelurahan tersebut. Rachmat Gobel kemudian memperjuangkan agar dibangunnya akses jalan ke lokasi itu melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di kelurahan Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
- Rachmat Gobel, didampingi Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan Kono, meresmikan Objek Wisata Tamendao Beach, yang berada di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya;

- Selain meresmikan wisata Rachmat Gobel juga menemui masyarakat yang ada di sana, dan menyampaikan beberapa pesan, khususnya bagi para nelayan bahwa beliau sangat mengapresiasi pekerjaan para nelayan. Bayangkan jika tidak ada nelayan, gizi kita pasti jelek semua, imunitas kita rendah. Karena gizi dari ikan itu tinggi, jadi kita harus apresiasi ;
- Rachmat Gobel berpesan agar terus menjaga lingkungan, khususnya lokasi pantai, atau seminggu sekali harus dibersihkan agar dapat tertata rapi, dan bisa menarik wisatawan datang ke pantai Tamendao;
- Untuk menurunkan stunting, Rachmat Gobel memberikan bantuan beras Fortivit kepada masyarakat nelayan di Tamendao;



Hari : Sabtu

Tanggal : 25 Desember 2021

Waktu : 10.00 WITA

- Bentuk Kegiatan**
- Pertemuan dan Dialog dengan Kelompok Nelayan Tanjung Keramat di Desa Tanjung Keramat, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
 - Pemberian Bantuan Pelampung dari Rachmat Gobel;
 - Pemberian Bantuan Beras Fortivit dari Rachmat Gobel

Peserta Walikota Gorontalo, Kepala Dinas, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem , Kelompok Nelayan

Isu dan Permasalahan:

- Para nelayan merasa alat tangkap ikan untuk para nelayan sangat kurang, sehingga para nelayan sehingga perolehan hasil tangkapan ikan berkurang.

- Rencana pembangunan dermaga/sandaran kapal di Tanjung Kramat 2018 sampai sekarang belum terwujud, karena anggaran tersebut alihkan untuk Covid-19;
- Kampung nelayan Tanjung Keramat ini mengalami kesulitan air bersih;
- Desa nelayan tersebut kurang penerangan listrik di jalan atau di perumahan;
- Para nelayan kerap diterjang ombak besar, di antara mereka tak selamat dan hilang karena kurangnya pengamanan waktu melaut;

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Permasalahan ini telah disampaikan kepada Kementerian terkait agar mendapatkan bantuan peralatan perikanan; pembangunan yang tertunda tersebut akan disampaikan kepada Kementerian PUPR;
- Rachmat Gobel telah mewujudkan aspirasi masyarakat nelayan pada saat melaut, dengan memberikan bantuan pelampung sebagai alat pengamanan bagi para nelayan pada saat kelaut mencari ikan ;
- Dalam penanganan kesulitan mendapatkan air bersih di kampung nelayan tersebut, Rachmat Gobel meminta Dinas terkait berkoordinasi dengan PDAM untuk segera dikaji apakah dikarenakan faktor alam, pemakaian air di desa tersebut apa memerlukan tandon dalam penyimpanan air untuk masyarakat umum;
- Rachmat Gobel memberikan arahan apa perlu rancangan bagaimana air laut diolah yang nantinya bisa digunakan oleh para nelayan;
- Meminta pihak Dinas terkait berkoordinasi dengan PLN setempat, agar dapat diberi penerangan di jalan menuju Kampung Nelayan Tanjung Kramat;
- Mencoba akan mendesai kampung nelayan tersebut sebagai daerah wisata Kota Gorontalo (perlu penataan ulang untuk daerah nelayan dan wisata di Tanjung Kramat) membuat Desa Wisata Pantai Kota Gorontalo;
- Rachmat Gobel memberikan bantuan beras bervitamin (Fortivit) untuk menambah gizi bagi anak-anak dan orang tua, untuk mengurangi stunting
- Pada 2019, Rachmat Gobel pernah membantu penampungan air bersih dan air bersih dibawa dengan mobil tanki.
- Para nelayan kerap diterjang ombak besar, di antara mereka tak selamat dan hilang.
- Dalam membantu Para nelayan untuk melaut agar tidak diterjang ombak dan hilang, maka untuk melindungi para nelayan Rachmat Gobel memberikan bantuan rompi pelampung untuk pelindung para nelayan waktu melaut.

Hari : Sabtu Tanggal : 25 Desember 2021 Waktu : 20.00 WITA

Bentuk Kegiatan Menghadiri Undangan Peringatan Natal Persatuan Umat Nasrani Gorontalo, di Kota Gorontalo

Peserta Pengurus Umat Nasrani, Anggota DPRD dan Pengurus DPD partai NasDem Kota Gorontalo

2. Kabupaten Bone Bolango

Hari : Senin Tanggal : 20 Desember 2021 Waktu : 10.00 WITA

Bentuk Kegiatan Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo di Tapa, Kabupaten Bone Bolango

Peserta Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Jajaran

❖ Hari : Kamis Tanggal : 23 Desember 2021 Waktu : 19.00 WITA

Bentuk Kegiatan Pertemuan dengan Dinas-Dinas Provinsi Gorontalo di Tapa

Peserta Kepala-kepala Dinas, Kepala Kanwil, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Permasalahan dan Isu

- Banyak pembangunan infrasyruktur yang terkendala penyelesaiannya dikarenakan anggaran daerah banyak yang dipotong dan dialihkan untuk menangani Covid 19 (*direfocusing*);
- Kurangnya alsintan, pupuk dan bibit oleh para kelompok tani;
- Banyaknya UMKM dan Koperasi yang gulung tikar dikarenakan adanya pandemi;
- Agar pembangunan infrastruktur sesuai rencana, perlu ditangani secara profesional;

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Pemerintah sedang membutuhkan anggaran untuk penanganan covid-19, maka seluruh anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemda *direfocusing* dalam upaya penanganan kesehatan (khususnya covid-19) jaringan pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi;

- Kendala-kendala dalam penyelesaian program kerja pembangunan dikarenakan kurangnya anggaran akan disampaikan kepada Kementerian terkait untuk dapat dicarikan solusi agar program kerja daerah tersebut tetap berjalan;
- Program Padat Karya Kabupaten/Kota agar dapat dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menyerap tenaga kerja daerah;
- Balai BP2JK (Balai Lelang) harus profesional dalam penanganan tugas dan dapat mengevaluasi hasil-hasil lelang apabila menyimpang/tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Pekerjaan atau program pemerintah yang ditangani oleh Balai Sungai maupun dinas-dinas terkait harus selektif dan sesuai aturan yang berlaku;
- Program ke depan, agar dapat meningkatkan pembangunan pertanian, ekonomi, infrastruktur, SDM dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kabupaten Gorontalo

Hari : Selasa	Tanggal : 21 Desember 2022	Waktu : 11.00 WITA
Bentuk Kegiatan	Meminjau lahan pembangunan Taman Bermain/sekolah bertaraf Internasional bantuan Rachmat Gobel di Kelurahan Datulana, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo	
Peserta	Konsultan dan Kontraktor serta Jajaran Tim RG	

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Banyaknya masyarakat Gorontalo yang kurang peduli terhadap pendidikan anak-anak usia dini, hal ini tidak boleh dibiarkan, dan perlu memulai dengan membangun kualitas SDM dengan memfasilitasi sekolah-sekolah untuk sarana pendidikan, terutama anak usia dini;
- Masyarakat kurang mampu, akhirnya tidak sekolah dan putus sekolah, Rachmat Gobel tergerak dan telah merencanakan membangun sekolah untuk mengurangi anak putus sekolah dan kurang mampu dalam meraih pendidikan;
- Dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dipandang perlu untuk mempunyai sekolah yang berdaya saing;
- Rachmat Gobel mewujudkan impian tersebut dengan membantu secara pribadi membangun sekolah bertaraf internasional dalam memajukan pendidikan dan rakyat Gorontalo;

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Desember 2022

Waktu : 14.00 WITA

Bentuk Kegiatan Pertemuan dan dialog dengan anak-anak yang membutuhkan pendidikan bersama orang tuanya di Taman Bermain/Sekolah bertaraf internasional di Kelurahan Datulana, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Peserta Anak-anak yang ingin sekolah dan orang tuanya.



Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Salah satu janji politik yang disampaikan Rachmat Gobel, terhadap upaya mempersiapkan generasi penerus masa depan Gorontalo yang dinilai perlu ditingkatkan. Upaya itu sangat penting dilakukan, mengingat masa depan Gorontalo akan sangat ditentukan oleh generasi anak bangsa dalam membangun kualitas pendidikan bagi anak-anak Gorontalo depan.
- Rachmat Gobel akan mewujudkan dengan memberikan bantuan membangun sekolah untuk anak-anak Gorontalo yang kurang mampu;
- Konsep pembangunan sekolah dan taman bermain anak ini, selain di disain untuk menunjang pendidikan, juga memiliki fasilitas taman bermain guna memacu kemampuan motorik anak-anak ke depan;
- Untuk bangunan sekolah/taman bermain tersebut terdiri dari ruang kelas untuk proses belajar mengajar, dan bagian luarnya area outdoor yang memiliki area bermain dengan menggunakan material yang aman bagi anak-anak;
- Rachmat Gobel memberi target agar tahun 2022 sekolah tersebut sudah selesai dan diaktifkan segera;
- Memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak Gorontalo dalam melanjutkan sekolah untuk masa depan bangsa;
- Akan mengusahakan tenaga pengajar yang baik dan alat alat permainan untuk mendidik anak anak.

Bentuk Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan dan Dialog dengan Kelompok Tani dilanjutkan Sosialisasi QRIS kerjasama dengan Bank Indonesia;• Pemberian bantuan beras Fortivit dari Rachmat Gobel kepada Para Petani ;• Kunjungan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam rangka meninjau Bantuan RMU (Rice Milling Unit) dari Kementerian Pertanian RI dan dilanjutkan peresmian penggunaan RMU oleh Rachmat Gobel di Limboto
Peserta	Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten, Direktur Keuangan PT. Pupuk Kaltim, Dinas Pertanian Gorontalo, Danramil, Kapolsek, Jajaran Bank Indonesia, Bank Mandiri, Keluarga Petani Pejuang



Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Menyerap aspirasi para petani pada saat musim panen, hasil panennya harus dibawa ke rumah untuk dijemur terlebih dahulu sebelum dikeringkan (apabila tidak beras akan hancur), hal ini membuat banyak petani yang rugi. Aspirasi para petani telah ditindak lanjuti oleh Rachmat Gobel dengan memberikan bantuan alat RMU dari Kementerian Pertanian kepada Kelompok Tani yang digunakan untuk pengering gabah agar produktivitas petani meningkat;
- Rachmat Gobel menyampaikan bahwa kualitas rice milling unit (RMU) atau penggilingan padi dapat menghasilkan beras kualitas premium sehingga beras produk Gorontalo bisa naik kelas ekspor.
- Pada reses kali ini Rachmat Gobel mengharapkan agar RMU yang telah diberikan kepada kelompok tani, dapat meningkatkan kualitas yang dihasilkan oleh petani , sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional bahkan dapat menembus pasar ekspor.
- Peningkatan kualitas padi yang dihasilkan petani tentunya dilakukan dengan benih unggul yang sesuai, dan dengan pupuk non subsidi tentu akan menghasilkan produktivitas padi yang maksimal (berlipat ganda).

- Untuk menunjang produksi sektor pertanian dari hulu hingga hilir di Kabupaten Gorontalo harus segera diwujudkan dimulai dari budi daya benih, dilanjutkan panen, pengelolaan hasil, *packing* hingga penentuan *market place* harus terus dikembangkan guna memasarkan produk hasil pertanian yang berdaya saing ekspor.
- Rachmat Gobel meminta agar proses hulu sampai hilir dapat dikelola oleh koperasi dengan baik, untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan permintaan makin tinggi;
- Rachmat Gobel ingin melihat bagaimana hasil pertanian Gorontalo setelah budidaya tanam padi dan hasil panen.
- Dalam membantu petani pada aspek permodalan, Rachmat Gobel meminta agar pihak perbankan juga diminta untuk terus menggulirkan dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani.
- Rachmat Gobel memberikan bantuan penanaman pohon untuk kelompok tani 1000 pohon, dalam mewujudkan foodstate 6000 ha dan membutuhkan kolaborasi antara pusat dan daerah;
- Rachmat Gobel akan mendorong program pertanian yang bersinergisitas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait;

❖ Hari : Kamis	Tanggal : 23 Desember 2021	Waktu : 14.00 WITA
Bentuk Kegiatan	• Meninjau Lokasi Pelaku UMKM (Koperasi Pengelolaan Gula Aren) PT. Sentra Mulia Sejahtera di Limboto	
Peserta	Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, Pengurus DPW/DPD Partai NasDem dan Anggota Koperasi Gula Aren Gorontalo	

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Petani aren mendapat bantuan khusus dari Rachmat Gobel karena dipandang perlu memberikan motivasi untuk bisa mengembangkan usaha mereka demi menyanggupi kebutuhan petani.
- Petani aren sendiri mampu menghasilkan sehari 25 buah dalam proses 5 jam dengan keuntungan mencapai Rp. 100 ribu perhari untuk 1 petani gula aren. Rachmat Gobel berkomitmen terhadap petani aren akan menaungi mereka lewat petani Nasdem bersama Rachmat Gobel.
- Mendorong para petani aren dapat membentuk Koperasi, agar produksi gula aren dapat dipasarkan melalui Koperasi, sehingga dapat membangun perekonomian di sekitar;

- Para petani aren, berterima kasih atas bantuan Rachmat Gobel yang peduli untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengembangkan koperasi untuk pengelolaan hasil petunia tersebut khususnya gula aren.
- Dalam membantu petani pada aspek permodalan, pihak perbankan juga diminta untuk terus menggulirkan dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani.

4. Kabupaten Gorontalo Utara

Hari : Rabu	Tanggal : 22 Desember 2021	Waktu : 10.00 WITA
Bentuk Kegiatan	Penyerahan bantuan Dana Bea Siswa (Program Indonesia Pintar) kepada siswa SD dan SMP Kabupaten Gorontalo Utara oleh Rachmat Gobel didampingi oleh Bupati Gorontalo Utara di SMP 2 Kwandang	
Peserta	Bupati Gorontalo Utara, Wakil Ketua DPRD Kab. Gorontalo Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru serta Para siswa/siswi SD dan SMP Kab. Gorontalo Utara	

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Melihat kurangnya dana pendidikan bagi siswa di daerah, maka Rachmat Gobel melalui Kementerian Pendidikan memberikan bantuan bea siswa kepada para siswa SD dan SMP Kabupaten Gorontalo Utara yang berprestasi;
- Program Indonesia pintar yang dicanangkan oleh Presiden RI, harus didukung untuk dimanfaatkan bagi siswa-siswa daerah dalam memajukan pendidikan, khususnya di Indonesia Bagian Timur;
- Rachmat Gobel menyampaikan perlu adanya pelajaran budi pekerti bagi siswa-siswi agar melatih etika anak-anak dan saling menghormati sesama sejak dini;
- Banyaknya siswa/siswi yang takut untuk divaksin (orang tuanya banyak yang melarang anaknya divaksin), maka perlunya sosialisasi mengenai vaksin, agar para siswa/siswi mengetahui manfaatnya setelah di vaksin dan menjadi termotivasi untuk ikut divaksin;
- Rachmat Gobel berharap untuk memajukan pendidikan Gorontalo ke depan, perlu peningkatan pemberian bea siswa serta kegiatan-kegiatan yang menunjang para siswa untuk berprestasi yang nantinya dapat membangun Gorontalo kedepan

Hari : Rabu **Tanggal : 22 Desember 2021** **Waktu : 12.00 WITA**

Bentuk Kegiatan **Peninjauan progress pembangunan masjid bantuan Rachmat Gobel**

Peserta **Panitia Masjid, Anggota DPR, Pengurus DPD Partai NasDem**

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Mewujudkan penyerapan aspirasi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara untuk membangun tempat ibadah (masjid);
- Memberikan bantuan secara pribadi pembangunan masjid untuk rakyat Gorontalo, khususnya kabupaten Gorontalo Utara dan berharap agar dirawat karena nantinya digunakan untuk beribadah bagi rakyat Gorontalo



Hari : Rabu **Tanggal : 22 Desember 2021** **Waktu : 14.00 WITA**

Bentuk Kegiatan **Peresmian Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR untuk Rumah Masyarakat di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.**

Peserta **Jajaran Pemda Gorontalo Utara, Kementerian PUPR, Anggota DPRD dan masyarakat Gorontalo Utara.**

Hasil pertemuan dan arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk segera melakukan pendataan masyarakat yang belum mempunyai rumah dan sanitasi yang kurang layak, untuk diberikan BSPS dari pemerintah;

- Dalam menyerap aspirasi Rachmat Gobel telah mengusahakan memberikan bantuan renovasi rumah Program BSPS dari Kementerian PUPR kepada masyarakat Gorontalo Utara.
- Rachmat Gobel meresmikan pemberian bantuan Program BSPS dari Kementerian PUPR sebanyak 250 unit kepada masyarakat Gorontalo Utara.
- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mampu mengatasi masalah perumahan yang dihadapi masyarakat di daerah. Ini wujud dari perhatian pemerintah khususnya pak Presiden Joko Widodo terhadap masalah perumahan yang dihadapi masyarakat, termasuk di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Pembangunan sanitasi satu paket dengan BSPS, yang nantinya akan bekerja sama dengan Desa menggunakan dana desa;
- Dengan adanya bantuan pembangunan rumah, pemerintah akan mendorong pertumbuhan perekonomian Gorontalo Utara.
- Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah mendorong masyarakat dapat menempati rumah yang layak.



Hari : Rabu

Tanggal : 22 Desember 2021

Waktu : 15.30 WITA

Bentuk Kegiatan	Sosialisasi Implementasi QRIS "Menuju Masyarakat Non Tunai" kerjasama dengan Bank Indonesia yang dibuka oleh Rachmat Gobel di Kecamatan Hotigola (Perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo).
Peserta	Masyarakat Gorontalo Utara (300 orang terdiri dari 6 BUMDES, 100 UKM, Tokoh Masyarakat), Anggota DPRD dan DPD Partai NasDem dan jajaran Bank Indonesia.

Arahan Rachmat Gobel:

- Rachmat Gobel meminta Bank Indonesia dapat mensosialisasikan untuk pembayaran non tunai atau disebut QRIS;
- Bank Indonesia perlu terobosan untuk mengganti uang tunai menjadi uang digital;
- Perlunya QRIS, untuk menghindari resiko pengambilan uang dalam jumlah besar yang dibawa langsung oleh nasabah ;
- Uang digital, untuk menghindari peredaran uang palsu di masyarakat;
- Memberi kemudahan berdagang dan mengontrol keuangan;
- Setiap berdagang selalu perlu uang kecil, apabila sudah memakai QRIS tidak perlu bingung tukar-tukar uang kecil lagi;
- Dengan terjadinya pandemi ini, masyarakat terhindar dari virus yang bisa menempel pada uang kertas atau logam;
- Untuk memberikan keyakinan, keamanan dan kemudahan bagi masyarakat;
- Perlunya sosialisasi dari Bank Indonesia terkait penggunaan QRIS



Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022

Kunjungan kerja pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 sebagai Anggota DPR RI ke Dapil Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2022 dengan agenda:

No	Hari, Tgl	Waktu	Kegiatan	Lokasi
1.	Sabtu, 5 Maret 2022	13.30	Tiba di Gorontalo	Kota Gorontalo
2.	Minggu, 6 Maret 2022	06.00	Olah Raga bersama Partai NasDem	Kab. Bone Bolango
		10.00	Pertemuan dengan Jajaran DPW dan DPD Partai NasDem.	
3.	Senin, 7 Maret 2022	10.00	Rapat Koordinansi Tim RG dan EO membahas persiapan Peluncuran Buku Kinerja RG tahun kedua.	Kab. Bone Bolango
4.	Selasa, 8 Maret 2022	14.00	Peresmian Pembangunan Sarana Infrastruktur Program Kotaku, Kampung Bugis.	Kota Gorontalo
		19.00	Kegiatan doa bersama masyarakat Gorut untuk Alm Bupati Gorut	Kab. Gorontalo Utara
5.	Rabu, 9 Maret 2022	05.30	Menuju Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Pohuwato
		10.00	Peresmian Pembangunan Lapak UMKM Program Sosial Bank Indonesia mendukung Pariwisata Toroseaje	
		13.00	Peresmian Jembatan Gantung Polohungo	
		14.00	Peresmian Rumah Lansia di Desa Botubilotu, Kec. Marisa dilanjutkan peninjauan	
		16.00	Pertemuan dan dialog dengan Anggota DPRD, Jajaran Pemda, para Camat dan Lurah .	
6.	Kamis, 10 Maret 2022	10.00	Pembukaan launching Buku Kinerja Tahun ke-2 Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di DPR RI dengan Judul : Menyerap Aspirasi, Menciptakan Solusi);	Kabupaten Gorontalo
		12.00	Pembukaan Sosialisasi QRIS bersama Bank Indonesia.	
7.	Jumat, 11 Maret 2022	09.00	Pertemuan dengan Bank Indonesia, Bank Mandiri, BNI, BRI dan EO Persiapan Festival Halal Food	Kab. Bone Bolango
		14.00	Memberi sambutan dan arahan pada Sosialisasi Otorita Jasa Keuangan	Kabupaten Gorontalo
		16.00	Peresmian Infrastruktur Lingkungan Program Kotaku melalui Rumah Aspirasi RG di Desa Polhungo	
8.	Sabtu, 12 Maret 2022	10.00	Olah Raga bersama masyarakat Kecamatan Tapa	Kab. Bone Bolango
		14.00	Pertemuan dan dialog dengan masyarakat Tapa	
9.	Minggu, 13 Maret 2022	11.00	Kembali ke Jakarta	

Dalam kunjungan reses tersebut Rachmat Gobel mengunjungi ke 4 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bone Bolango; Kota Gorontalo; Kabupaten Gorontalo Utara; Kabupaten Pohuwato; dan Kabupaten Gorontalo.

1. Kabupaten Bone Bolango

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Maret 2022

Waktu : 19.00 WITA

Bentuk Kegiatan Pertemuan dengan Bank Indonesia, Bank Mandiri, BNI, BRI dan Event Organizer untuk membahas Persiapan Festival UMKM Milenial Halal Food di Tapa, Kabupaten Bone Bolango.

Peserta Bupati Bone Bolango, Tim RG, Jajaran Bank Indonesia, Bank Mandiri, BNI, BRI, EO.

Hasil Pertemuan dan arahan Rachmat Gobel:

- Untuk menumbuhkan kembali perekonomian khususnya di Gorontalo setelah masa pandemi banyak UMKM yang gulung tikar dan tidak lagi bisa memproduksi, untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan bagi UMKM rencana akan diadakan Festival Halal di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo;
- Festival tersebut rencana akan diikuti oleh 125 UMKM;
- Rencana akan mengkoordinir pelaku UMKM, khususnya potensi generasi muda, dalam membangkitkan perekonomian Gorontalo;
- Pelaksanaan Festival Halal Food, rencana akan bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Pemda setempat terkait perijinan dan keamanan serta ketertiban penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat terkait festival halal tersebut.
- Harapan diadakan Festival Halal Food tersebut, untuk meningkatkan UMKM di Gorontalo dan dapat dijadikan momentum mengembangkan ekonomi daerah dan produk UMKM;



2. Kota Gorontalo

❖ Hari : Selasa Tanggal : 8 Maret 2022 Waktu : 14.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Peresmian Pembangunan Sarana Infrastruktur BPM Skala Lingkungan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2022 di Kampung Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.
Peserta	Wakil Walikota Gorontalo, Masyarakat Kota Gorontalo, Pengurus DPD Kota Gorontalo.

Hasil Pertemuan dan arahan Rachmat Gobel:

- Dalam menyerap aspirasi masyarakat Kota Gorontalo tersebut Rachmat Gobel mewujudkan dengan menata sarana dan infrastruktur melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku);
- Penataan lingkungan wisata yang kurang bersih, akan membuat kota menjadi kumuh, maka perlunya dibangun kawasan pariwisata menjadi kota wisata di Kota Gorontalo dan dapat menarik wisatawan dalam dan luar provinsi Gorontalo;
- Tempat wisata yang sudah tertata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, dan membuka lapangan kerja di daerah tersebut sehingga perekonomian menjadi baik dan meningkat untuk membangun masyarakat dan kota Gorontalo.
- Sebagai salah satu kota di Gorontalo perlu adanya pembenahan dan penataan lingkungan agar tidak kelihatan kumuh. Selain di kotanya juga adanya pembenahan di daerah wisata agar dapat menarik para wisatawan datang ke Kota Gorontalo.
- Dalam penataan kota Gorontalo, Rachmat Gobel telah mendorong Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Gorontalo yang ditargetkan 206,77 ha, pada tahun 2020 terealisasi 95,85 ha, sedangkan masih terdapat sisa seluas 111,24 ha yang akan dilakukan tahun depan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Gorontalo.



3. Kabupaten Gorontalo Utara

❖ Hari : Selasa Tanggal : 8 Maret 2022 Waktu : 18.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Menghadiri acara Doa Bersama Masyarakat Gorontalo Utara untuk Almarhum Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, di Masjid Agung Baiturrahim, Desa Moluo, Kwandang, Kab. Gorut.
Peserta	Wakil Bupati (Plt. Bupati Gorontalo Utara), Sekda Gorut, Anggota DPRD Kab. Gorut, Para Pejabat Pemda Kab. Gorut, Masyarakat Kab. Gorut, Pengurus DPD Kab. Gorut.

Arahan Rachmat Gobel:

- Rachmat Gobel menyampaikan bahwa Almarhum Indra Yasin mempunyai pemikiran untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Gorontalo Utara;
- Program Rachmat Gobel, yang diberikan kepada masyarakat Gorontalo Utara merupakan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai cita-cita Almarhum Indra Yasin;
- Saling mendukung dalam memajukan daerah, khususnya mengentaskan kemiskinan;
- Almarhum Indra Yasin, selalu aktif dalam mendampingi kunjungan kerja Rachmat Gobel ke provinsi Gorontalo.

4. Kabupaten Pohuwato

Hari : Rabu Tanggal : 9 Maret 2022 Waktu : 10.00 WITA

Bentuk Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Peresmian Jembatan Rachmat Gobel dilanjutkan Peresmian Pembangunan Lapak UMKM Program Sosial Bank Indonesia di Toroseaje, Kabupaten Pohuwato oleh Rachmat Gobel Wakil Ketua DPR/Korinbang• Pertemuan dan dialog dengan Masyarakat petani dan nelayan Desa Toroseaje
Peserta	Jajaran Pemda, Kakanwil BI dan Jajaran, Kepala Desa, Kapolres, Kapolsek, Tokoh Masyarakat, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem.

Arahan Rachmat Gobel:

- Rachmad Gobel meyakini, dengan potensi yang ada, Desa Torosiaje, Gorontalo bisa menjadi destinasi wisata unggulan dan mendatangkan turis untuk menikmati keindahan alam dan hasil lautnya.



- Untuk menjadi desa wisata unggulan, masih banyak yang tahapan yang perlu dibenahi atau diperbaiki untuk mewujudkannya. Kita berharap satu atau dua tahun lagi bisa diwujudkan. Saya terus mendorong Pemerintah Pusat maupun daerah untuk terus memperhatikan secara berkelanjutan. Karena desa ini menyimpan hasil laut yang luar biasa dan pemandangan yang indah;
- Rachmat Gobel mengapresiasi kepada Bank Indonesia (BI) yang sudah mendukung program pembangunan Garontalo di desa Torosiaje, dengan membangun jembatan dan lapak UMKM agar masyarakat dapat mempunyai pendapatan yang lebih baik (bekerjasama dengan BI).
- Pembangunan Jembatan tersebut diberi nama “Jembatan Rachmat Gobel” dibangun dengan menggunakan dana Corporate Society Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI). Pemberian nama tersebut dari masyarakat Desa Torosiaje, sebagai bentuk penghargaan masyarakat kepada Rachmat Gobel. Dengan terbangunnya jembatan dan lapak UMKM tersebut dapat menghidupkan perekonomian masyarakat Toroseaje sebagai wujud kepedulian Rachmat Gobel untuk membangun daerah pinggiran Gorontalo terutama untuk para nelayan dan petani desa Toroseaje;
- Dengan adanya program tersebut diharapkan bisa untuk menjadi daya tarik turis untuk berkunjung, menikmati wisata laut dan membantu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk menumbuhkan UMKM Desa Toroseaje serta dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pohuwato;
- Memberikan bantuan lampu penerangan jalan yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat;
- Membantu memberikan pelampung kepada para nelayan untuk melaut mencari ikan agar selamat dan aman, serta membantu beras Fortivit beras bervitamin untuk para nelayan Toroseaje;
- Rachmat Gobel juga meminta kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, guna mewujudkan konsep wisata halal ke depannya. Ia yakin, potensi laut yang ada, dalam hal ini ikan pun akan hidup sehat tanpa mengonsumsi sampah.

Bentuk Kegiatan	Peresmian Rumah Masyarakat Lansia Desa Botubilotahu, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, dilanjutkan peninjauan ke lokasi Rumah Lansia
Peserta	Bupati dan Jajaran Pemda, Kakanwil Bank Indonesia, Kepala Balai, Kepala Desa, Kapolres, Kapolsek, Tokoh Masyarakat, Jajaran PUPR, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem

Isu / Permasalahan :

- Banyak lansia terlantar tidak terurus karena hunian tidak layak

Solusi dan Arahan Rachmat Gobel :

- Membangun Rumah Lansia bantuan dari PUPR melalui program reses Rachmat Gobel;
- Pemda (Dinas Sosial) agar berkoordinasi dengan Kementerian Sosial atau BUMN untuk mendapatkan bantuan program sosial;
- Perlu ada penataan lingkungan sekitar Rumah Lansia tersebut bisa terjaga kebersihannya;
- Para lansia bisa diberi pelatihan misal menanam hidroponik dan lainnya didampingi oleh para penyuluh;
- Rumah Lansia harus menjadi role model untuk para penghuni Rumah Lansia;
- Rachmat Gobel sedang konsen terhadap anak dan orang tua;



Hari : Rabu **Tanggal : 9 Maret 2022** **Waktu : 16.00 WITA**

Bentuk Kegiatan	Pertemuan dan dialog dengan Anggota DPRD, Jajaran Pemda, para Camat dan para Lurah Kabupaten Pohuwato.
Peserta	Anggota DPRD, Sekda, Pejabat Pemda dan Jajaran, para Camat dan para Kepala Desa/Lurah Kabupaten Pohuwato, Kapolres, Kapolsek, Tokoh Masyarakat, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem.

Isu / Permasalahan :

- Kurang tertatanya infrastruktur dan lingkungan di kabupaten Pohuwato;
- Kurangnya anggaran untuk daerah Toroseaje sebagai daerah wisata
- Program pariwisata belum maksimal dikenal oleh masyarakat
- Perlu adanya program penngkatan pendidikan

Arahan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

- Akan mengembangkan Toroseaje menjadi daerah wisata, agar Pohuwato dapat dikenal dengan wisata lautnya;
- Rachmat Gobel ingin membangun peradaban baru dengan membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat Gorontalo;
- Menata lingkungan di Pohuwato, agar menjadi daerah wisata andalan bagi Gorontalo.

5. Kabupaten Gorontalo

Hari : Jum'at **Tanggal : 10 Maret 2022** **Waktu : 10.00 WITA**

Bentuk Kegiatan	Peluncuran Buku Kinerja Tahun Kedua Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI dengan Judul "Menyerap Aspirasi : Menciptakan Solusi National Interest dan Agenda Pembangunan" dengan menghadirkan Pakar dan Akademisi serta Ormas untuk dapat membedah Buku Kinerja Rachmat Gobel Tahun Kedua di DPR RI. Dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo
Peserta	Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Rektor Univ. Gorontalo, Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM, Mahasiswa, Tim RG, Pengurus DPD NasDem.

Isu Buku Kinerja Tahun ke 2 RG :

- Buku National Interest dan agenda Pembangunan ini adalah bagian laporan pelaksanaan kegiatan Rachmat Gobel sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem dan sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan dalam periode Oktober 2020 – September 2021;
- Sebagai Wakil Ketua DPR RI selalu menekankan bahwa setiap agenda pembangunan ekonomi harus mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan perekonomian dan menjaga kepentingan nasional dan bangsa Indonesia;
- Isu besar yang masih membayangi perekonomian bangsa adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan distribusi pembangunan baik secara fisik maupun non fisik.
- Buku "Menyerap Aspirasi : Menciptakan Solusi, Interest Pembangunan Nasional" tersebut di bedah oleh 9 orang (Tokoh Masyarakat/Adat, Pakar, Akademisi dan LSM).

Arahan Rachmat Gobel :

- Selain berisikan laporan kinerja, Rachmat Gobel juga mempunyai tiga gagasan besar untuk memajukan Gorontalo 50 tahun kedepan yaitu sektor *pertama* pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan; *Kedua*, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan; *Ketiga*, sektor pangan dan herbal;
- Pertanggung jawaban saya sebagai wakil rakyat dapil Gorontalo, hal ini saya lakukan semata-mata untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam membangun Gorontalo saat ini dan ke depan;
- Rachmat Gobel akan menindaklanjutan masukan-masukan terkait Buku kedua RG dari Pemda dan kalangan akademisi, tokoh adat, LSM, mahasiswa dan masyarakat.



Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Maret 2022

Waktu : 10.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Pembukaan Sosialisasi QRIS bersama Bank Indonesia di Limboto, Kabupaten Gorontalo oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Peserta	Dinas terkait, Tim RG, Jajaran OJK, DPRD Kabupaten, Pengurus DPD NasDem, Kelompok Koperasi UKM Cahaya RG.

Isu / Permasalahan :

- Masyarakat banyak yang belum mengetahui dan paham apa itu QRIS;
- Banyak masyarakat yang kurang memahami digitalisasi;
- Masyarakat Gorontalo belum tahu penggunaan QRIS;
- Belum memahami pembayaran non-tunai

Arahan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

- Perlu adanya sosialisasi dari pihak perbankan kerjasama dengan BUMN;
- Memberikan pemahaman mekanisme kepada UMKM dan masyarakat;
- Perbankan harus aktif dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Gorontalo;
- Pembayaran melalui QRIS lebih aman dan tidak direpotkan oleh pengambilan uang cash melalui Bank.



Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Maret 2022

Waktu : 14.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Pembukaan Sosialisasi Otorita Jasa Keuangan (OJK) di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Peserta	Dinas terkait, Tim RG, Jajaran OJK, DPRD Kabupaten, Pengurus DPD NasDem, Kelompok Koperasi UKM.

Isu / Permasalahan :

- Maraknya *money trading* /penipuan terkait *trading* terhadap masyarakat;
- Masyarakat yang membutuhkan uang *cash*, banyak yang memakai pinjol dikarenakan ketidak pahaman terhadap system pinjaman;
- *Money Game* yang menggiurkan masyarakat; serta Gadai Swasta yang ilegal

Arahan Rachmat Gobel :

- Perlu mengetahui pihak jasa keuangan mempunyai dasar hukum dan tempat tinggal yang sudah didaftarkan;
- Pihak OJK perlu mengawasi jasa keuangan/*trading-trading* yang ilegal;
- Perlunya sosialisasi masyarakat terkait dengan pinjol, *trading* dan *crypto* ;
- Rachmat Gobel sangat prihatin kepada masyarakat, karena tujuan utama Rachmat Gobel untuk membangun perekonomian Gorontalo agar dapat keluar dari kemiskinan dan dapat membangun dengan mengubah wajah Gorontalo lebih makmur, berkualitas dalam menghadapi pasar global.



Hari : Rabu

Tanggal : 9 Maret 2022

Waktu : 12.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Peresmian Jembatan Gantung Polohungo, Jembatan SEHATI "Mopotuwau Lo Hilawo To'u Beresi" Oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel bantuan dari PUPR.
Peserta	Bone Bolango, Sekda Pohuwato, Jajaran Pemda, Kepala Desa, Kapolres, Kapolsek, Tokoh Masyarakat, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem.

Isu / Permasalahan :

- Jembatan sudah rusak antara desa yang satu dengan lainnya yang rawan untuk dilewati
- Perekonomian masyarakat desa terganggu sehingga diperlukan bantuan untuk jembatan

Arahan Rachmat Gobel :

- Pembangunan jembatan untuk masyarakat setempat bantuan dari PUPR melalui Rachmat Gobel untuk kelancaran transportasi sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kendala transportasi dapat teratasi;
- Pemda perlu merawat sarana dan prasarana daerah setempat.



Bidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana

- Selain Penataan lingkungan, juga adanya jembatan yang rusak dan putus di Desa Polohungo, Kabupaten Pohuwato, yang berakibat terkendalanya transportasi dan perekonomian daerah sekitar. Untuk pembangunan jembatan yang rusak, melalui bantuan Rachmat Gobel, maka PUPR telah menindaklanjuti pembangunan jembatan gantung Polohungo, kabupaten Pohuwato penghubung dari desa satu ke lainnya.
- Banyaknya lansia yang kurang terurus, dan perlu adanya panti social yang mengelola beradaannya. Program Kotaku dengan skema padat karya, dengan total anggaran tahun 2022 sebesar Rp.13 M.
- Dengan program kotaku untuk dapat merubah potret Kota Gorontalo menjadi kota yang memberikan masa depan dan terus membangun diawali dari pinggiran (desa); Solusi Rachmat Gobel agar para lansia Gorontalo terurus, maka telah dibangun 25 unit Rumah Khusus Masyarakat Lansia di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Pohuwato. Rumah lansia tersebut merupakan program aspirasi Rachmat Gobel dari Kementerian PUPR.

Bidang Ekonomi, UMKM dan Pariwisata

- Dampak Covid-19 mengakibatkan menurunnya perekonomian di Gorontalo dan para Anggota UMKM banyak yang gulung tikar. Pariwisata juga mengalami penurunan yang sangat drastic, bahkan banyak restoran, toko dan tempat-tempat wisata yang tutup dikarenakan tidak adanya pengunjung, maka perlu membangun kembali perekonomian yang lesu tersebut, menjadi lebih fight/kuat.
- Dalam reses masa persidangan III ini, Rachmat Gobel menindaklanjuti program yang telah diajukan untuk menangani kondisi masyarakat karena pandemic Covid-19 di Gorontalo dengan mewujudkan bantuan dari Program Sosial Bank Indonesia dengan membangun Lapak UMKM di Desa Toroseaje, Kab. Pohuwato, dan juga nantinya mendapatkan program bantuan untuk pembangunan jalan transportasi menuju kota wisata Toroseaje, Kab. Pohuwato;
- Dengan situasi yang sama Rachmat Gobel juga meminta BI dan OJK dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Gorontalo terkait dengan pinjaman dan investasi yang benar, agar dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan UMKM yang lebih baik. ngat sulit setelah pandemic Covid-19, masyarakat dilanda investasi bodong dan pinjol melalui jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab.
- Kota Wisata Toroseaje, kurang penerangan dan jalan banyak yang rusak. Untuk meningkatkan daerah wisata Toroseaje, Rachmat Gobel akan memberikan bantuan perahu wisata, lampu untuk penerangan agar menarik para wisatawan datang ke Desa tersebut. Dan juga masyarakat harus menjaga lingkungan agar tertata dan bersih.

Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022

Kunjungan kerja Anggota DPR RI perorangan dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Dapil Gorontalo dilaksanakan pada bulan Ramadhan (bulan puasa) tanggal 22 April 2022 sampai dengan 27 April 2022 dengan agenda:

No	Hari, Tgl	Waktu	Kegiatan	Lokasi
1.	Sabtu, 23 April 2022	17.00	Buka Puasa Bersama Dengan DPW NasDem Provinsi Gorontalo	Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.
2.	Minggu, 24 April 2022	17.00	Buka Puasa Bersama Dengan Ustad dan Ustazah Pesantren Hubulo	Rumah adat Tapa, Kabupaten Bone Bolango
3.	Senin, 25 April 2022	15.00	Meninjau Bendungan Bulango Ulu	Kabupaten Bone Bolango
		17.00	Buka Puasa Dengan Mitra Komisi XI dan Komisi V	Rumah adat Tapa, Kabupaten Bone Bolango
4.	Selasa, 26 April 2022	17.00	Buka Puasa Bersama Dengan Partai Politik se-Provinsi Gorontalo	Rumah adat Tapa, Kabupaten Bone Bolango Kab. Bonebolango

Daerah yang dikunjungi oleh Rachmat Gobel pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke satu Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.

1. Kota Gorontalo

❖ Hari : Sabtu Tanggal : 23 April 2022 Waktu : 17.00 – 21.00 WITA

Bentuk Kegiatan Buka puasa dan pertemuan dengan Pengurus DPW Partai NasDem Gorontalo dilanjutkan dialog, di Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.

Peserta Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Gorontalo

Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel meminta kepada seluruh para kader partai NasDem untuk terus bahu membahu mewujudkan cita perjuangan partai NasDem dalam membangun peradaban baru di Gorontalo;
- Peradaban baru yang ingin diwujudkan bersama itu adalah sebafei momen atau faktor penentu dalam mewujudkan tekad Partai NasDem mengubah potret Gorontalo dari provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar menjadi salah satu provinsi yang makmur di Indonesia;
- Rachmat Gobel akan terus membangun kolaborasi dengan sejumlah kementerian yang berada dibawah lingkup mitra kerja Wakil Ketua DPR RI/Korinbang;

- Kolaborasi dengan kementerian ini adalah guna mendorong berbagai program dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur maupun penguatan ekonomi masyarakat Gorontalo;
- Beragam program yang tengah dan telah berjalan itu dalam upaya mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat menuju peradaban baru di provinsi Gorontalo.



2. Kabupaten Bone Bolango

Hari : Minggu	Tanggal :24 April 2022	Waktu :17.00 WITA
Bentuk Kegiatan	Buka puasa bersama dan pertemuan dengan Ustad dan Ustazah di rumah adat Tapa Kabupaten Bone Bolango.	
Peserta	Para Ustad dan Ustazah serta Pengurus Pesantren Hubulo kabupaten Bone Bolango.	

Arahan Rachmat Gobel :

- Pembangunan pesantren Hubulo awal tahun depan 2023 dan diperkirakan akan selesai 2024.
- Maksud dan tujuan pembangunan pesantren ini adalah untuk membangun harkat dan martabat bagi masyarakat Gorontalo.
- Selain itu, menurut Wakil Ketua DPR RI/Korinbang pembangunan pesantren ini adalah membangun iman, taqwa dan peradaban baru. Hal ini penting karena pembangunan bukan saja melalui pembangunan infrastruktur maupun ekonomi namun perlu juga membangun dan memperdalam ilmu agama khususnya agama Islam bagi masyarakat di provinsi Gorontalo.

- Rachmat Gobel menekankan bahwa membangun sebuah pesantren jangan dilihat secara fisik namun juga melihat isi dan makna dari kehadiran pesantren itu sendiri.
- Rachmat Gobel mengharapkan kehadiran pesantren modern ini merupakan wujud bagi turut mendorong masyarakat di Gorontalo lebih memperdalam ilmu agama yang nantinya disumbangkan untuk masyarakat Provinsi Gorontalo.



Hari : Senin

Tanggal : 25 April 2022

Waktu :15.00 – 17.00 Wita

Bentuk Kegiatan **Meninjau pembangunan bendungan Bulango Ulu, di Kabupaten Bone Bolango.**

Peserta **Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat**

Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel menggarisbawahi bahwa bendungan ini merupakan proyek strategis nasional yang akan memiliki dampak besar bagi masyarakat Gorontalo. Bahkan menurutnya akan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional;
- Bendungan yang telah dimulai pembangunannya pada 2021 ini diharapkan selesai pada 2024. Nantinya bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi bagi pertanian Gorontalo, Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA), memasok air bersih 2,2 meter kubik per detik dan juga mengurangi banjir



- Rachmat Gobel menekankan bahwa bendungan Bulango Ulu akan menjadi bagian dari masa depan Gorontalo. Mengharapkan dengan pembangunan bendungan ini untuk menyiapkan masyarakat Gorontalo menuju peradaban baru yang maju dan makmur melalui pendekatan budaya dan teknologi yang berakar pada adat istiadat warisan leluhur;
- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang mendapat laporan dari pimpinan proyek pembangunan bendungan bahwa masih adanya hambatan dalam pembebasan lahan, untuk itu ia meminta sengketa pembebasan lahan ini harus segera dicari solusinya agar tidak menghambat *progress* dari pembangunan bendungan tersebut;
- Menurut Rachmat Gobel dengan selesainya pembangunan bendungan ini, nantinya akan memperkuat ekonomi pangan dan ekonomi kreatif serta menyerap tenaga kerja yang besar dan menciptakan pemerataan ekonomi. Tentunya akan menjadi bagian dari masa depan Gorontalo.

Hari : Senin

Tanggal : 25 April 2022

Waktu : 17.00 WITA

Bentuk Kegiatan

Buka Pusa dan Pertemuan/berdialog dengan Mitra Komisi XI dan Komisi V, di Tapa Kabupaten Bone Bolango

Peserta

Mitra kerja dari Komisi XI dan Komisi V

Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel apresiasi akan kerja sama yang telah terjalin dengan mitra kerja dari Komisi XI dan Komisi V yang telah banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Gorontalo dalam pembangunan ekonomi;
- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang menjelaskan bahwa salah satu manfaatnya adalah bagaimana kerja sama ini telah dirasakan dan membawa dampak bagi masyarakat Gorontalo untuk mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lainnya di Indonesia;
- Rachmat Gobel dalam dialog yang penuh kehangatan tersebut menambahkan bagaimana untuk melihat progres dari kerja sama dengan mitra dari Komisi XI dan V itu, ia rajin berkunjung ke Gorontalo baik dalam masa reses maupun setiap kunjungan ke daerah pemilihannya di Gorontalo;
- Menjadi politisi demikian kata Rachmat Gobel lebih berat dari pada sebagai pengusaha. Mengapa demikian, menurut ia politisi harus memperjuangkan keinginan rakyat yang telah memilihnya dan harus memperbaiki kehidupan mereka;
- Hal ini merupakan sumpahnya sebagai wakil rakyat dalam membangun optimisme rakyat di provinsi Gorontalo;
- Dalam keterangan selanjutnya, dijelaskan oleh Rachmat Gobel bahwa berbagai proyek kerja sama tersebut seperti infrastruktur, air bersih, bendungan air, dan lainnya sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;
- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang melihat ada suatu harapan bagi masyarakat Gorontalo dengan kerja sama dengan mitra dari Komisi XI dan Komisi V. Manfaatnya adalah membangkitkan semangat masyarakat Gorontalo untuk terus maju membangun ketertinggalan menuju masa depan yang lebih baik.

❖ Hari : Selasa Tanggal : 26 April 2022 Waktu : 17.00 WITA

Bentuk Kegiatan	Buka puasa bersama serta dialog dengan partai politik se-Provinsi Gorontalo, di rumah adat Tapa, Kabupaten Bone Bolango Kab. Bonebolango.
Peserta	Partai Nasdem, PDIP, PKS, PKB, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PPP Provinsi Gorontalo.

Arahan Rachmat Gobel :

- Rachmat Gobel mengatakan pertemuan dengan pimpinan partai politik lainnya merupakan wujud dari silaturahmi keluarga besar rakyat Gorontalo bukan

dengan keluarga lain dan menekankan bahwa dalam kehidupan yang terpenting adalah keluarga. Untuk itu silaturahmi ini sangat tepat sebagai wujud pertemuan keluarga besar masyarakat Gorontalo;

- Mengapa disebut sebagai keluarga besar masyarakat Gorontalo, karena semua yang hadir di sini adalah perwakilan dari berbagai marga yang ada di Gorontalo, sebut saja marga Gobel, Wartabone, Pou, Pomalingo, Ismail, Dambea serta marga lainnya. Ini kata Rachmat Gobel, merupakan identitas keluarga Gorontalo;
- Para pimpinan partai politik juga harus ikut berpartisipasi dan turut bertanggungjawab akan kelangsungan hidup masyarakat Gorontalo guna meraih dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan tentunya menyiapkan dirinya menuju ke peradaban baru.
- Keekerabatan masyarakat Gorontalo sangat erat satu sama lainnya apalagi dipererat dalam silsilah yang berkaitan satu sama lainnya seperti perkawinan dan lain-lain;
- Perbedaan politik yang ada di provinsi Gorontalo jangan menjadikan hubungan antar partai politik menjadi renggang apalagi menimbulkan perpecahan dan menjadikan masyarakat Gorontalo terkotak-kotak. Semua menurut Rachmat Gobel adalah satu visi dan misi memajukan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya di Indonesia;

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022

Kunjungan kerja sebagai Anggota DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Dapil Gorontalo dilaksanakan tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2022 dengan agenda:

No	Hari, Tgl	Waktu	Kegiatan	Lokasi
1.	Rabu, 13 Juli 2022	08.00	Buka Puasa Bersama Dengan DPW NasDem Provinsi Gorontalo	Kab. Bone Bolango
		11.00	• Acara Adat penyambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti • Pertemuan dan Silaturahmi dengan Deputy Senior Bank Indonesia dan Kepala KPW-BI Gorontalo dan Jajaran • Presentasi Rencana Festival Ikan Tuna	
		14.00	- Menghadiri acara "Hulonthalo Art and Craft Festival (HACF)" oleh Bank Indonesia dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Deputy Senior BI	
		19.00	- Pertemuan dengan Jajaran OJK	Kab. Bone Bolango
2.	Kamis, 14 Juli 2022	07.00	Berangkat menuju Kabupaten Boalemo	Kab. Boalemo
		10.00	Membuka dan memberikan arahan pada Sosialisasi OJK	
		13.00	Peresmian Pembangunan Pondok Pesantren Al Khoirat bantuan dari PUPR	Kab. Gorontalo
		16.00	Kunjungan ke Sekolah dan Taman Bermain Internasional di Limboto	
		16.30	Pertemuan dengan anak-anak dan Orang Tua Siswa serta Guru	

No	Hari, Tgl	Waktu	Kegiatan	Lokasi
2.	Kamis, 14 Juli 2022	17.30	Pertemuan dengan Pj. Gubernur Gorontalo dan Jajaran	Kab. Bone Bolango
		20.00	Pertemuan dan Silaturahmi dengan Pengurus DPW, DPD dan DPRT serta Pengurus Bapilu Partai NasDem	
3	Jum'at, 15 Juli 2022	07.00	Olah Raga Bersama kader Partai NasDem	Kab. Bone Bolango
		11.00	Kembali ke Jakarta	

Dalam kegiatan Reses tersebut, Rachmat Gobel melakukan kunjungan ke 3 (tiga) Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo; Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo, yaitu :

1. Kabupaten Bone Bolango

Hari : Rabu	Tanggal : 13 Juli 2022	Waktu : 11.00 WITA
Bentuk Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Acara Adat penyambutan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti oleh Rachmat Gobel; • Pertemuan dan Silaturahmi dengan Deputi Senior Bank Indonesia dan Kepala KPW-BI Gorontalo dan Jajaran; • Presentasi Rencana Festival Ikan Tuna 	
Peserta	Deputi Senior Gubernur BI, Bupati Bone Bolango, Kakanwil Bank Indonesia Gorontalo dan Jajaran, OJK.	

Sambutan dan Arahan Rachmat Gobel:

- Rachmat Gobel memperkenalkan kepada Deputi Senior Gubernur BI Adat Istiadat dan Kebudayaan Gorontalo untuk menyambut Tamu Kehormatan. Hal inilah yang menjadi kepedulian Rachmat Gobel beserta keluarga terus menanamkan rasa cinta terhadap pelestarian adat dan budaya di tanah leluhurnya ;
- Rachmat Gobel juga menyampaikan bahwa "Menjaga adat dan budaya Gorontalo bagi kami adalah kewajiban dan amanah yang dititipkan para leluhur kami. Prinsip menjaga adat dan budaya Gorontalo oleh keluarga Gobel tidak hanya di Gorontalo. Dimanapun kami tinggal, adat dan budaya Gorontalo harus dilestarikan;
- Daerah Gorontalo masih menghargai, menjaga, melestarikan adat dan budaya. Hal ini juga bisa menjadi potensi wisata daerah tersebut;

Pembicaraan dengan Deputy Gubernur BI :

- Seiring dengan kemajuan teknologi, Rachmat Gobel ingin mengembangkan produk Koperasi dengan memakai ke pasar nasional dan internasional;

- Rachmat Gobel mendorong kemitraan pengelolaan peternakan dengan Koperasi melalui bantuan pinjaman KUR oleh Bank pemerintah/swasta dalam pengembangan produksinya;
- Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara dapat meningkatkan perekonomian, UMKM dan penyerapan tenaga kerja di Gorontalo;

Rencana akan diselenggarakan Festival Ikan Tuna :

- Tujuan penyelenggaraan festival Ikan Tuna, untuk meningkatkan perekonomian dan produksi UMKM khususnya nelayan di Gorontalo, sekaligus mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Gorontalo;
- Kegiatan Festival Ikan Tuna akan melibatkan para nelayan dan UMKM Gorontalo, maupun luar Gorontalo, untuk memperdayakan obyek lokal dengan harapan bisa membangkitkan serta menjadi roda penggerak ekonomi para pelaku usaha ikan tuna dan kuliner serta sebagai ajang untuk peningkatan pariwisata Gorontalo;
- Pengelolaan ikan tuna dapat dijadikan kuliner khas Gorontalo dalam berbagai menu serta ikon kuliner ikan tuna khas Gorontalo;
- Festival Ikan Tuna dapat mendorong kemajuan sektor pariwisata maupun meningkatkan produktivitas UMKM dan ekonomi kreatif sesuai anjuran Pemerintah.



Bentuk Kegiatan Pertemuan dengan Jajaran OJK Kanwil Sulawesi

Peserta Jajaran OJK dan Tim Reses RG Gorontalo.

Isu / Permasalahan :

- Banyaknya masyarakat yang tergiur dan terjebak investasi bodong dengan iming-iming imbalan yang menggururkan dan pinjaman *online*;
- Kurangnya informasi masyarakat Gorontalo terhadap mekanisme keuangan;
- Lesunya produktivitas UMKM setelah Pandemi Covid-19;
- Kurang pengetahuan terhadap teknologi dalam pengelolaan peternakan dalam pemasarannya.

Arahan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

- Rachmat Gobel minta agar OJK dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat terkait investasi yang benar;
- Mendorong agar dapat dibangun Koperasi untuk meningkatkan produktivitas UMKM bekerjasama dengan pihak Bank Pemerintah maupun Swasta;
- Untuk pengembangan peternakan ayam, perlu adanya bantuan dalam menggunakan teknologi terkait pemeliharaan misalkan pencahayaan, kebisingan serta suhu agar ayam tidak stress;
- Pengelolaan peternakan perlu adanya kerja sama Koperasi untuk pemasaran baik pasar nasional maupun internasional;
- Perlu danya strategi marketing bagi Koperasi untuk kontribusi export peternak ke depan.
 - Pekonomian bertahap bangkit dan meningkatnya sebageian besar didukung dari hasil produktivitas UMKM sekitar \pm 60% dan selain itu juga banyak menyerap tenaga kerja;
 - Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pihak Bank Swasta (BRI dan Bank Daerah menawarkan kredit dengan penandatanganan kesepakatan antara pihak Bank dengan Kelompok UMKM;
 - Cara untuk mengentaskan kemiskinan dari desa maka program UMKM agar dapat pembinaan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas bagi daerah untuk menembus pasar Global. .

Bentuk Kegiatan	Pertemuan dengan Pj. Gubernur Gorontalo dan jajaran
Peserta	Pj. Gubernur Gorontalo dan jajaran, Anggota DPRD Partai NasDem

Isu / Permasalahan :

- Pembenahan dalam membangun ekosistem pertanian Gorontalo;
- Perlunya ada pengelolaan limbah yang lebih baik;
- Belum adanya Islamic Center sebagai wadah dalam membangun kualitas SDM Gorontalo ke depan;
- Pembenahan Danau Limboto yang terbengkalai;
- Penataan lingkungan yang selama ini kurang diperhatikan;
- Pembenahan dan pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara;
- Mengatasi tingkat putus sekolah untuk peningkatan pendidikan;
- Peningkatan pariwisata dan nilai-nilai budaya Gorontalo.

Arahan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

- Rachmat Gobel sangat konsen terhadap pembangunan Gorontalo kedepan, untuk itu perlu adanya sinergisitas dengan Pemda (Dinas-dinas terkait);
- Rachmat Gobel memberikan masukan dan saran agar permasalahan dan kendala pembangunan di Gorontalo dapat diinventarisir untuk menyelesaikan berdasarkan skala prioritas;
- Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama Rachmat Gobel dalam membangun Gorontalo ke depan dapat keluar dari 10 besar peringkat kemiskinan di Indonesia;
- Membangun kualitas SDM dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas untuk memajukan Gorontalo ke depan;
- Pembangunan infrastruktur Gorontalo dalam mendukung program kerja pemerintah dan lingkungan sekitar.

Bentuk Kegiatan	Pertemuan dan Silaturahmi dengan Pengurus DPW, DPD dan DPRT serta Pengurus Bapilu Partai NasDem Gorontalo.
Peserta	Pengurus DPW, DPD dan DPRT serta Pengurus Bapilu Partai NasDem.

Isu / Permasalahan :

- Penyelesaian e-KTA Partai NasDem di tingkat DPD dan DPRT;
- Pemenangan Pemilu 2024 baik legislative maupun pemimpin daerah;
- Persiapan Pencalegkan Partai NasDem untuk Provinsi Gorontalo;
- Target 3 (tiga) kursi legislatif untuk Gorontalo;
- Banyak program kerja pemda yang masih tertunda dan perlu dukungan ;
- Koordinasi perlu ditingkatkan untuk membangun soliditas partai.

Arahan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

- Bekerja keras, berjuang dan memberikan motivasi serta semangat kepada kader partai NasDem Gorontalo, dan dapat menginventarisir dan menyelesaikan e-KTA Partai NasDem untuk persiapan 2024;
- Para Pengurus DPW, DPD, DPC dan DPRT rencana akan dibuatkan asuransi kesehatan ;
- Pengurus DPW dan DPD serta kader Partai NasDem Gorontalo harus sudah mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024 yang akan datang;
- Partai NasDem mempunyai visi besar yang harus diperjuangkan, hal ini merupakan momentum bagi NasDem dalam membangun bangsa, khususnya Gorontalo menuju Indonesia yang hebat dimata internasional;
- Partai NasDem mempunyai tanggung Jawab terhadap bangsa Indonesia dalam memperjuangkan program kerja/pembangunan yang sudah dibangun Presiden Jokowi selama 10 tahun;
- Program-program yang akan diwujudkan dalam membangun Gorontalo antara lain: (a) Bidang Pertanian meningkatkan ketahanan pangan; (b) Membangun Kawasan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara; (c) Menyelenggarakan Festival Halal Ikan Tuna Gorontalo; (d) Meningkatkan Program BSPS untuk masyarakat Gorontalo; (e) Peningkatan Pariwisata dan produk-produk UMKM; (f) Membentuk Koperasi dengan modal Rp.500.000.000,- dan akan bekerja sama dengan Bank BRI.

- Target yang akan dicapai 3 kursi untuk legislatif, agar nantinya dapat memperjuangkan kebijakan dan mengentaskan kemiskinan melalui program pemerintah dalam membangun provinsi Gorontalo ke depan;
- Sebagai kader Partai NasDem harus bisa mengejar ketertinggalan pembangunan provinsi Gorontalo selama ini;
- Koordinasi antara Pengurus dengan kader-kader harus ditingkatkan untuk membangun soliditas Partai NasDem.

2. Kota Gorontalo

Hari : Rabu	Tanggal : 13 Juli 2022	Waktu : 13.00 WITA
Bentuk Kegiatan	Membuka dan memberikan Sambutan pada Pembukaan dan Peresmian acara <i>"Hulonthalo Art and Craft Festival (HACF)"</i> yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Deputy Senior BI dan Pj. Gubernur Gorontalo	
Peserta	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputy Senior BI, Pj. Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Walikota Gorontalo, Kakanwi BI Sulawesi dan Gorontalo, OJK, Polda Gorontalo, Kapolres, Bank Swasta, Dinas terkait, Pengurus DPW dan DPD Partai NasDem Gorontalo, Para UKM Binaan BI dan Masyarakat.	

Poin-poin Sambutan dan Arahan Rachmat Gobel:

- Festival Seni dan Kerajinan Gorontalo, *"Hulonthalo Art and Craft Festival (HACF)"* adalah sarana bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan produk, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong produk UMKM Gorontalo memasuki pasar global, ditengah pemulihan ekonomi, pasca pandemi COVID-19 diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan UMKM Gorontalo binaan BI. .
- Rachmat Gobel menilai HACF dapat memberikan semangat para pelaku UMKM untuk menghasilkan produk-produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar global;
- Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Gorontalo Rachmat Gobel berusaha untuk mendorong industri kreatif para pelaku UMKM, industri kreatif yang mampu bersaing dalam pasar nasional maupun internasional yang nantinya akan berdampak positif bagi masyarakat khususnya di Gorontalo.
- Acara HACF juga dihadiri Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatis (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan Deputy Gubernur Senior BI Destry Damayanti;
- Rachmat Gobel menyampaikan Gorontalo memiliki produk-produk unggulan seperti kain karawo, produk-produk olahan hasil pertanian, dan produk-produk hasil kelautan.

- Rachmat Gobel, memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM di Gorontalo yang tetap gigih dan tangguh menghadapi situasi global yang sulit, sehingga tetap terus produktif dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo maupun nasional
- UMKM merupakan kekuatan Indonesia dan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Adapun kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai lebih dari 60%;
- Produk UMKM tidak sekadar bisa ditampilkan di ajang pameran (produk lokal) tetapi dapat menjadi produk nasional dan bagaimana produk-produk UMKM itu bisa menjadi produk global yang diminati pasar internasional;
- Indonesia punya momentum sekarang ini, bagaimana menjadikan produk kerajinan dari daerah khususnya Gorontalo dengan produk unggulannya kain karawo untuk menjadi produk global;
- Presiden Jokowi memiliki keberpihakan pada UMKM, diantaranya pemberian dana desa yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM;
- UMKM masih perlu dukungan semua pihak agar bisa berkompetisi di level internasional;
- Salah satu pintu untuk bisa menaikkan kontribusi ekspor, maka UMKM harus mampu menggunakan system dengan teknologi digitalisasi.
- Penguatan dan pemajuan UMKM merupakan jalan untuk membangun daerah dan mengentaskan kemiskinan terutama sektor pangan yang merupakan sektor strategis dalam ketahanan pangan;
- Rachmat Gobel juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memiliki perhatian yang luar biasa terhadap UMKM, karena sektor pertanian, kelautan, dan lainnya merupakan pondasi perekonomian ekonomi Indonesia.
- Pada pelaksanaan HACF 2022, Bank Indonesia Gorontalo berkolaborasi dan bersinergi dengan Dinas Pariwisata Provinsi, Diskumperindag Provinsi, Dekranasda Provinsi, Pemerintah Kota Gorontalo, NSLIC, Kadin, dan Jurusan Seni Rupa dan Desain Fakultas Teknik UNG yang menghadirkan serangkaian kegiatan.
- Pameran produk unggulan UMKM, business matching pembiayaan dan penjualan, peningkatan kapasitas UMKM, seminar nasional, fasilitasi QRIS, perlombaan bertema pariwisata dan ekonomi kreatif, edukasi QRIS, dan Cinta Bangsa Paham Rupiah, serta hiburan *stand-up comedy* dari komika papan atas Indonesia.

- Target yang akan dicapai 3 kursi untuk legislatif, agar nantinya dapat memperjuangkan kebijakan dan mengentaskan kemiskinan melalui program pemerintah dalam membangun provinsi Gorontalo ke depan;
- Sebagai kader Partai NasDem harus bisa mengejar ketertinggalan pembangunan provinsi Gorontalo selama ini;
- Koordinasi antara Pengurus dengan kader-kader harus ditingkatkan untuk membangun soliditas Partai NasDem.

3. Kabupaten Boalemo

❖ Hari : Kamis	Tanggal : 14 Juli 2022	Waktu : 10.00 WITA
Bentuk Kegiatan	Membuka Sosialisasi pada Penyuluhan Jasa Keuangan dengan tema "Waspada Investasi" dilanjutkan dengan dialog diselenggarakan oleh OJK.	
Peserta	Kepala Wilayah OJK Sulawesi, Kakanwil OJK Gorontalo, Forkopemda Kabupaten Boalemo, Para Kelompok UMKN, Kelompok Tani dan Nelayan serta kader Partai NasDem.	

Isu / Permasalahan :

- Masyarakat Gorontalo banyak yang tertipu investasi bodong dan pinjaman *online*, tergiur dengan iming-iming bunga tinggi hal ini sangat memprihatinkan. Pinjaman *online* yang berkedok Investasi tersebut telah membuat masyarakat Gorontalo tertipu seperti masyarakat Kabupaten Pohuwato hampir ± 1 trilyun dan Kabupaten Boalemo ± 800 milyar belum kabupaten lainnya. Hal ini berdampak pada masyarakat yang mengalami kerugian besar; dikarenakan kurang tahunya masyarakat Gorontalo dalam berinvestasi yang benar;
- Investasi melalui trading membuat masyarakat tertarik dengan iming-iming bonus besar lebih dari 30% yang ditawarkan secara online, membuat masyarakat tergiur dikarenakan kurangnya memahami cara berinvestasi;
- Banyaknya perekonomian keluarga yang menjadi goncang, dikarenakan korban investasi bodong dan pinjaman online.

Arahan Rachmat Gobel terhadap Isu dan Solusi :

- Dengan maraknya *trading* yang berkedok investasi dan pinjaman *online* banyak masyarakat tertipu, tak terkecuali Gorontalo, maka Rachmat Gobel sangat prihatin dan meminta kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana berinvestasi yang benar dan menguntungkan bagi masyarakat;
- Rachmat Gobel menyampaikan bahwa dengan banyaknya *trading* berkedok investasi, OJK telah menutup 634 *platform* yang selama ini tidak mempunyai payung hukum (illegal);

- OJK telah menindaklanjuti permintaan Rachmat Gobel agar melakukan sosialisasi masyarakat di kabupaten Boalemo dan Pohuwato dalam memberikan informasi mengenai regulasi dan berinvestasi yang benar
- Rachmat Gobel memberikan arahan kepada masyarakat baik untuk UMKM, Kelompok Tani, PNS dan Aparat serta masyarakat umum lainnya jangan mudah tergiur dengan tawaran bunga tinggi dan tidak jelas regulasinya, yang nantinya dapat merugikan masyarakat itu sendiri;
- Diperlukan kebijakan dan regulasi bagi masyarakat untuk pinjaman *online*, tujuannya untuk menjaga masyarakat agar tidak tertipu;
- Rachmat Gobel berharap agar masyarakat berhati-hati dalam berinvestasi dan sangat penting informasi yang disampaikan oleh OJK bagaimana cara berinvestasi yang benar;
- Dengan adanya sosialisasi dan informasi, maka masyarakat menjadi terbuka dalam melangkah untuk berinvestasi dan melakukan pinjaman.
- Rachmat Gobel ingin meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan rakyat Gorontalo menjadi masyarakat Gorontalo yang mandiri, maka perlu adanya sosialisasi dan informasi yang benar dalam pengelolaan keuangan untuk mendorong meningkatkan ekonomi masyarakat.



Bentuk Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren "Al Khaeraat" Boalemo bantuan dari Kementerian PUPR melalui Rachmat Gobel;• Memberikan bantuan BPS bantuan PUPR kepada masyarakat Boalemo melalui Bank Mandiri
Peserta	Plt. Bupati Boalemo, Sekda, Pimpinan dan Pengurus Pesantren Al Khaerat Kapolres, Jajaran Kanwil PUPR, Guru dan para Santri/santriwati.

Arahan Rachmat Gobel:

- Rachmat Gobel telah mewujudkan program aspirasi masyarakat Gorontalo, khususnya kabupaten Boalemo untuk membangun Pondok Pesantren Al Khaeraat; Maka Pengurus dan para santri/wati harus menjaga dan merawat/membersihkan Pondok Pesantren yang telah dibangun oleh PUPR agar bangunan tersebut bersih lingkungan dan tidak cepat rusak; sehingga Pengurus Ponpes harus mengelola dengan benar dan disiplin;
- Pihak Balai BWS harus mengecek kembali bangunan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah layak untuk dihuni;
- Bangunan Pondok Pesantren mempunyai 56 kamar beserta *furniture*-nya, tempat tidur, dilengkapi dengan lemari. Juga dilengkapi oleh kamar mandi dan ruang sosialisasi serta ruang belajar, dan ruang sosialisasi yang diwujudkan karena perjuangan Rachmat Gobel kepada Kementerian PUPR;
- Pemda Boalemo juga harus membantu dan mendukung peningkatan kemajuan pendidikan pada Ponpes tersebut;
- Rachmat Gobel juga menegaskan pembangunan fasilitas Pondok Pesantren Al Khaeraat wujud perjuangan membangun SDM yang berkualitas; Ada filosofi, sebelum membuat produk berkualitas, maka buat manusia yang berkualitas, Rachmat Gobel berharap pesantren ini bisa mempersiapkan SDM yang kelak bisa menjadi para pejuang-pejuang ekonomi dan membangun NKRI;
- Selain bantuan pembangunan pondok pesantren Rachmat Gobel juga pemberian bantuan BPS dari PUPR sebanyak 200 unit untuk kabupaten Boalemo.
 - Rachmat Gobel minta kepada Jajaran Pondok Pesantren Al Khaerat agar dapat merawat dan merawat serta disiplin dalam mengelola bantuan dari PUPR tersebut dengan baik.

4. Kabupaten Gorontalo

Hari : Kamis	Tanggal : 14 Juli 2022	Waktu : 15.00 WITA
Bentuk Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Meninjau Sekolah Taman Bermain Internasional bantuan pribadi Rachmat Gobel di Limboto;• Pertemuan dengan Guru dan anak-anak/siswa sekolah.	
Peserta	Pengajar/Guru, Siswa/Anak didik dan para kader Partai NasDem Gorontalo	



Arahan Rachmat Gobel :

- Dalam membangun bangsa ke depan Rachmat Gobel sangat konsen terhadap kemajuan anak bangsa dan masyarakat khususnya Gorontalo dalam meningkatkan pendidikan ;
- Rachmat Gobel ingin membangun visi anak Gorontalo ke depan, dengan membangun taman bermain dan sekolah bertaraf internasional ;
- Impian Rachmat Gobel ingin membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Gorontalo, sebagai upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk masa depan Gorontalo;
- Rachmat Gobel memberikan fasilitas untuk anak-anak Gorontalo agar mengenal pendidikan yang berkualitas untuk kedepan;

- Rachmat Gobel selain membangun sekolah juga memberikan bantuan inventaris sekolah berupa :
 - Robot karakter yaitu 5 unit Robot Besar karakter (yang dipasang di halaman sekolah) dan 2 unit Robot Kecil karakter (yang dipasang di dalam kelas);
 - Arena bermain (prootan untuk anak, mandi bola, alat bermain, dsb);
 - Alat-alat bermain untuk anak-anak (*in door*).
 - *Furniture* (meja, kursi, lemari, dll), AC, *sound system*, dispenser dan listrik;
- Optimisme membangun Gorontalo yang lebih baik dari segi Pendidikan menuju peradapan ke depan;
- Rachmat gobel membangun taman bermain dan sekolah internasional sebagai wujud keseriusannya untuk membangun SDM Gorontalo;





**“Memotret hal yang kecil
yang dilakukan dengan cara yang benar
lebih baik daripada
memotret hal besar
yang masih direncanakan.”**

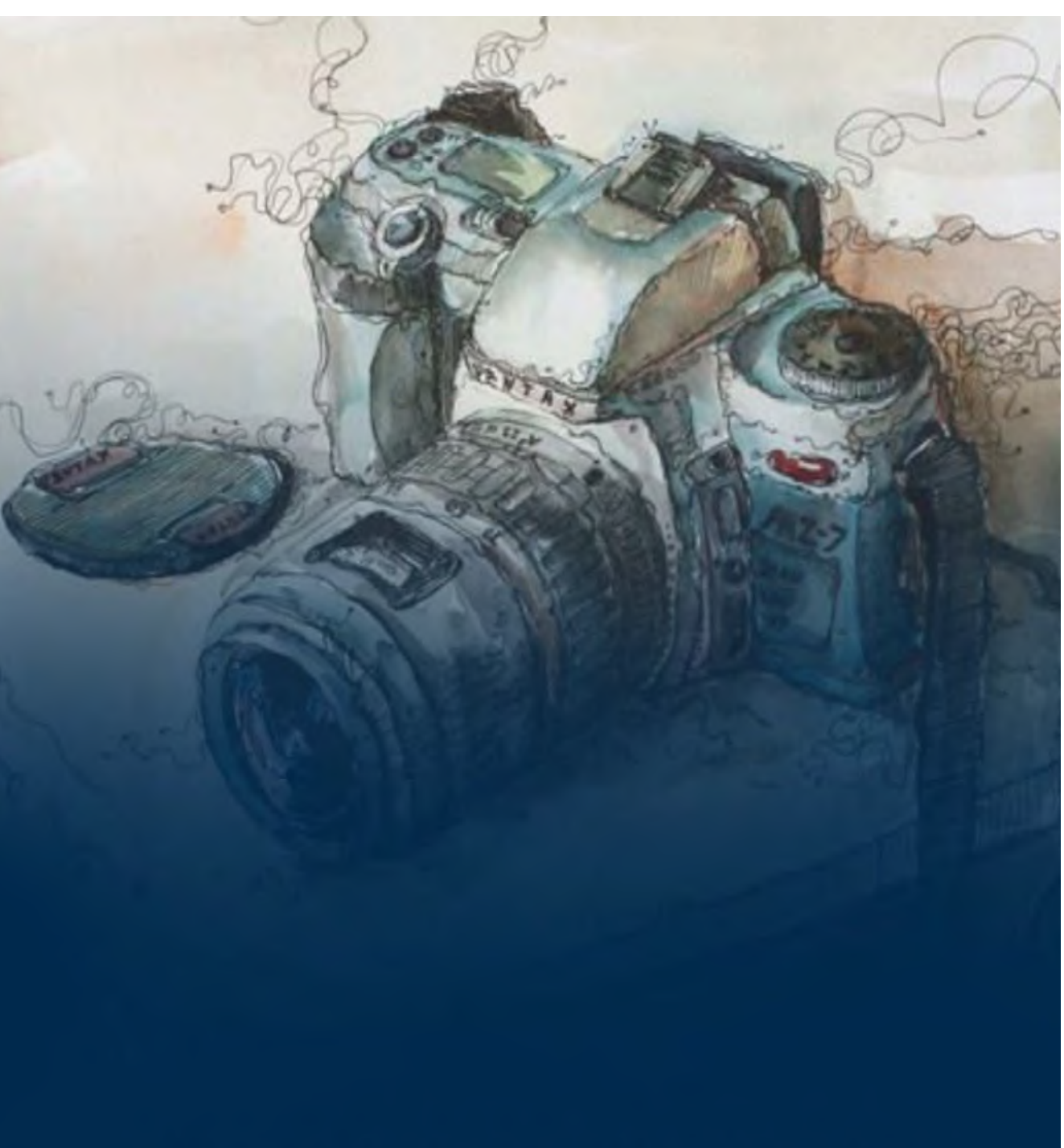
- Galih Sedayu -



**KALEIDOSKOP
KINERJA TAHUN KE-3**



BAB



Kaleidoskop Kinerja Tahun ke-3 adalah rangkaian berbagai peristiwa penting yang dilakukan oleh Rachmat Gobel dalam kapasitasnya dalam menjalankan peran anggota parlemen sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang dan politisi Fraksi Partai NasDem DPR RI sepanjang tahun 2022 yang terabadikan dalam lensa kamera.



visioner

Pemikirannya selalu mengacu dalam kondisi dan tantangan jangka panjang dan karena itulah Rachmat Gobel sangat memperhatikan tahapan target yang harus dicapai dimasa depan untuk menjadikan Gorontalo dari daftar 5 daerah termiskin masuk menjadi 5 daerah termakmur di Indonesia



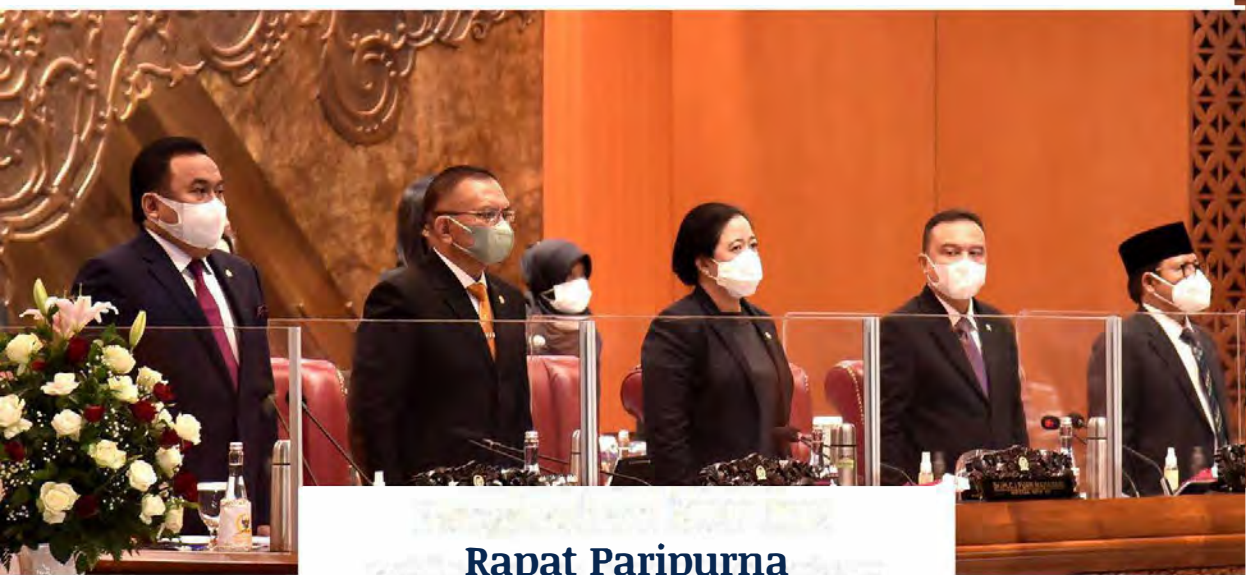
passionate

Rachmat Gobel tidak pernah mengeluh dalam menghadapi tantangan, bahkan secara ikhlas mengorbankan sumber daya milik pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Sosok yang mempunyai passion juga selalu tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi, tanpa harus diminta.



Menghadiri Pembukaan Pasar Saham BEI 2022

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat hadir dalam pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Januari 2022



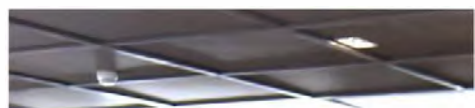
Rapat Paripurna Pengesahan RUU IKN

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Pimpinan DPR RI lainnya saat Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Ibu Kota Negara pada 18 Januari 2022



Rapat tentang Kelangkaan Pupuk dengan Dirut PT. Pupuk Indonesia

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Wakil Ketua Komisi IV Rusdi Masse Mappasessu saat rapat bersama Dirut PT. Pupuk Indonesia bersama jajaran tentang langkah antisipasi kelangkaan pupuk bagi petani, pada 9 Februari 2022



Februari



Rapat Koordinasi Fraksi Partai NasDem DPR RI

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan anggota Fraksi Partai NasDem dalam acara syukuran sewindu usia Fraksi Partai NasDem DPR RI, 18 Februari 2022

Maret



Rapat Kerja Gabungan Terkait Krisis Minyak Goreng

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Rapat Kerja Gabungan yang terdiri dari Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI dengan mengundang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Ruang Badan Musyawarah terkait krisis minyak goreng,
15 Maret 2022



Rapat Kerja Fraksi Partai NasDem DPR RI

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan anggota Fraksi Partai NasDem dalam acara raker Fraksi Partai NasDem DPR RI membahas berbagai agenda strategis dan pemantapan kinerja Anggota Fraksi Partai NasDem di DPR RI, 13 Maret 2022

antapan Ki



April

Meninjau Rencana Pengembangan Kawasan Kanal Tamalate Oluhuta Kabila

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan anggota Fraksi Partai NasDem meninjau rencana pengembangan kawasan Kanal Tamalate Oluhuta Kabila Kabupaten Bone Bolango-Gorontalo didampingi oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, 4 April 2022





Meninjau Rencana Pengembangan Danau Perintis

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel meninjau rencana pengembangan Danau Perintis di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango-Gorontalo didampingi oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, 4 April 2022



Hadir Menemui Para Demonstran

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel bersama Wakil Ketua DPR RI/ Korekku Sufmi Dasco dan Wakil Ketua DPR RI/ Korpolkam Lodewijk F. Paulus menerima aspirasi para demonstran yang berasal dari BEM SI seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI tentang isu penolakan penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi 3 periode, 11 April 2022

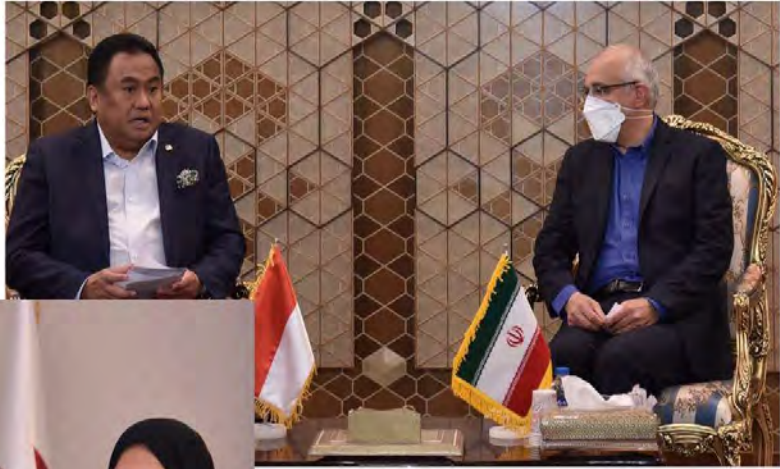


Meninjau Progres Pembangunan Waduk Bolango Ulu - Gorontalo

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat melakukan peninjauan progres pekerjaan
pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Desa Tuloa,
Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango,
25 April 2022



Mei



Lawatan ke Luar Negeri

Selama bulan Mei 2022 Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel telah melakukan lawatan luar negeri ke negara sahabat diantaranya, Iran, Qatar, Turki, Jepang



Rapat Internal Fraksi Partai NasDem DPR RI Rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam rangka untuk mempersiapkan kegiatan masa sidang di DPR RI, 5 Mei 2022



Menghadiri Milad PKS

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mewakili Partai NasDem dalam acara Milad ke-20 PKS, 29 Mei 2022



Juni

Talkshow & Silaturahmi Nasional

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menjadi pembicara dalam acara *talk show* Silaturahmi Nasional 2022 bertajuk "Kita Pancasila; Pancasila Menjawab Tantangan Zaman" 2 Juni 2022





Audiensi dengan KPU RI

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel dan Pimpinan DPR RI lainnya dalam audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, 6 Juni 2022



Menerima Kunjungan Pengurus DPW & DPD Partai NasDem Gorontalo

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima kunjungan 180 kader DPW, DPD, DPC, DPRT, Bacaleg serta anggota DPRD se-Provinsi Gorontalo dalam rangka persiapan pemenangan Pemilu 2024 tanggal 15 juni 2022 di gedung DPR RI.





Apel Siaga Partai NasDem

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat mengikuti acara Apel Siaga Partai NasDem dalam rangkaian kegiatan Rakernas Partai NasDem, 16 Juni 2022





**Rakernas
Partai NasDem
Tahun 2022**

Rachmat Gobel saat mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Partai NasDem dalam rangka konsolidasi partai dan pengumuman bakal calon presiden pemilu 2024 , 15 Juni 2022



Bertemu dengan Dr. Tun Mahatir Muhammad

**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
bertemu dengan Dr. Tun Mahatir Muhammad
setelah menjadi pembicara pada acara Stadium Generale
dalam rangkaian kegiatan Rakernas Partai NasDem
pada 17 Juni 2022**



Pelantikan Pimpinan MPR

**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri Pelantikan Yandri Susanto Menggantikan Zulkifli Hasan Sebagai Wakil Ketua MPR RI
30 Juni 2022**





Juli



Menghadiri HUT ke-76 Bhayakara

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-76 dan menyempatkan diri menyapa Mantan Presiden dan Wakil Presiden yang juga hadir pada acara tersebut, diantaranya Megawati Soekarno Putri, Try Soetrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla, pada 5 Juli 2022.



Audiensi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima kunjungan perwakilan IPHI, untuk ikut serta mempromosikan produk makanan berbahan dasar singkong, antara lain “Mie Haji” yang telah di produksi secara langsung oleh IPHI pada 7 Juli 2022



Berbelasungkawa atas Wafatnya Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe

**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
turut mengucapkan belasungkawa atas wafatnya
Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe di Kedutaan Besar
Jepang di Jakarta pada 8 Juli 2022**



Menghadiri Pelantikan Dewan Komisioner OJK

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri acara Pelantikan Sembilan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2022-2027 pada 20 Juli 2022.





Menghadiri Penganugerahan Doktor Kehormatan Surya Paloh

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menghadiri acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan orasi ilmiah bertema "MENEGUHKAN POLITIK KEBANGSAAN" di Universitas Brawijaya, Malang pada 25 Juli 2022

Agustus



Safari Politik PDI Perjuangan

Rachmat Gobel saat acara silaturahmi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan jajaran pengurus PDI Perjuangan di NasDem Tower pada 8 Agustus 2022





Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani
membahas realisasi APBN 2022 pada 8 Agustus 2022



Pidato Kenegaraan HUT 77 Republik Indonesia

Sidang MPR mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke 77 di Gedung DPR/MPR, 16 Agustus 2022





Pidato Presiden Tentang APBN Tahun Anggaran 2023

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya



Menerima Kontingen Pramuka Gorontalo

Pada 22 Agustus 2022 Rachmat Gobel menerimi peserta Jambore Nasional XI 2022 sebanyak 96 siswa dan 54 orang pembina pramuka provinsi Gorontalo yang di pimpin oleh Sofyan Puhii Ketua Kontingen Pramuka Provinsi Gorontalo.



Monolog Negeri Sarung

Rachmat Gobel saat acara Monolog Negeri Sarung oleh Inayah Wahid dan Pameran Lukisan di auditorium Makara Art Center UI pada 27 Agustus 2022.



September



Wawancara dengan RRI Gorontalo

Rachmat Gobel saat diwawancarai oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Gorontalo, tentang pandangannya terhadap pembangunan masa depan Gorontalo, pada 3 September 2022





Menerima Alumni Parlemen Remaja 2019, 2020 dan 2021

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel menerima alumni parlemen remaja 2019, 2020 dan 2021 dengan mengharapkan kelak akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen yang akan datang, pada 6 September 2022





Rapat Kerja Bersama Kemenhub, KemendesPDT dan Kepala Basarnas

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menghadiri acara rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Desa dan PDT Abdul Halim Iskandar serta Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, pada 9 September 2022



Pergantian Pimpinan Komisi V

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat menghadiri acara pergantian Pimpinan
Komisi V DPR RI pada 13 September 2022



Pergantian Pimpinan MKD DPR RI

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat memimpin Rapat pergantian Pimpinan MKD
DPR RI pada 27 September 2022





Oktober

Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan P20

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel mendampingi Ketua DPR Puan Maharani saat rapat koordinasi persiapan kegiatan P20 bersama Setjen DPR RI, pada 1 Oktober 2022





Pembukaan Kegiatan P20

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menghadiri acara pembukaan kegiatan P20 bersama pada 6 Oktober 2022





Penutupan Kegiatan P20

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat acara penutupan kegiatan P20 bersama anggota parlemen dari berbagai negara sahabat pada 10 oktober 2022



Peresmian Program P3TGAJ

**Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel
saat acara peresmian Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Gorontalo
pada, 19 Oktober 2022**

November



Papua mekar menjadi 6 Provinsi

Dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di provinsi Papua saat ini DPR dan Pemerintah telah menetapkan Papua menjadi enam provinsi : provinsi Papua (Wilayah Adat Mamta), Papua Barat (Wilayah Adat Bomberai), Provinsi Papua Selatan (Wilayah Adat Ha Anim), Provinsi Papua Tengah (Wilayah Adat Mee Pago), Provinsi Papua Barat Daya (Wilayah Adat Domberai), pada 17 November 2022.





Rapat Pleno DPP Partai NasDem

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang
Rachmat Gobel saat acara Rapat Pleno
Pengurus DPP Partai NasDem yang
dilaksanakan di NasDem Tower
pada, 22 Oktober 2022





Pameran Buku Big Bad Wolf

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel saat menghadiri pameran buku Big Bad Wolf (BBW) di ICE BSD, Tangerang pada 24 November 2022



Desember



Persetujuan Panglima TNI

Wakil Ketua DPR RI bersama Pimpinan DPR RI lainnya berfoto bersama dengan Laksamana TNI Yudo Margono usai ditetapkan sebagai Calon Panglima TNI dalam Rapat Paripurna persetujuan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi I DPR terkait pergantian Panglima TNI pada 13 Desember 2022





Meninjau Kesiapan Menjelang Nataru

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel di dampingi oleh pejabat BASARNAS meninjau moda transportasi udara, darat, jalan tol dan laut dalam menghadapi Nataru pada 22 Desember 2022.



Tim Penulis



Dra. Hj. Nining Indra Shaleh, M.Si lahir di Cirebon, alumnus UGM ini semasa kuliah merupakan salah satu aktivis mahasiswa yang aktif dalam Gerakan Himpunan Mahasiswa Indonesia dan dipercaya untuk memimpin HMI-WATI Cabag Yogyakarta periode 1978-1980. Selain itu aktif di organisasi intra universitas sebagai Pimpinan Senat mahasiswa Fisipol. Pengalamannya sebagai aktivis kampus ini, merupakan modal dasar bagi pengembangan kapasitas pribadinya. Dalam kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara. Nining Indra Shaleh pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR RI periode 2008-2013.

Sejak tahun 2013 Nining Indra Shaleh bergabung dengan Partai NasDem, dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2013-2015) serta menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai NasDem (2015-2017). Kepala Sekolah Legislatif Partai NasDem (2014-2019). Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP Partai NasDem. Dengan berbekal segudang pengalaman Nining Indra Shaleh juga di percaya oleh Partai NasDem untuk menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Rachmat Gobel 2019-sekarang.

Drs. Budi Jatnika, M.Si lahir di Jakarta, 25 November 1969. Menyelesaikan Strata-1 tahun 1993 di Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dan Tahun 2005 menyelesaikan Strata-2 program studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Saat ini sebagai Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.



Mempunyai pengalaman sebagai tim pendukung penyusunan dan pembahasan UU diantaranya UU tentang Kementerian Negara; UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden; UU tentang Resi Gudang; UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; UU tentang Perkoperasian; UU tentang Lembaga Keuangan Mikro; UU tentang Perindustrian; UU tentang Perdagangan. Membantu penyusunan buku berjudul "Pengembangan dan Pengelolaan Panas Bumi di Indonesia: Kondisi Terkini, Tantangan dan Alternatif Solusi; Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Skala Kecil: Alternatif Solusi di Indonesia; Kendaraan Bermotor Listrik Nasional: Pokok-Pokok Pemikiran Dr. Agus Hermanto; dan Menyerap Aspirasi Menciptaka Solusi : Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Dr. (H.C.) Rachmat Gobel.



Nasihin Masha lahir Cirebon dan kini tinggal di Jakarta. Selama 25 tahun berkarier sebagai wartawan di Republika, dengan posisi terakhir sebagai pemimpin redaksi. Setelah itu menjadi Staf Ahli Direksi BPJS Kesehatan. Sarjana Sisiologi Unsoed Purwokerto itu kini Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang.

Dra. Rini Koentarti, M.Si, Lahir di Kota Kediri, Jawa Timur. Lulus S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) tahun 1987, lulus S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tahun 2004, dan S3 Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta (masih desertasi). Saat ini adalah sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Sebelum menjadi tenaga ahli pernah menjadi Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI tahun 2004, Kepala Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, sebagai Tim Teknis penyusunan awal terbentuknya Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2010. Pada tahun 2014 sebagai Kepala Sekretariat Komisi VII DPR RI yang membidangi Energidan Lingkungan Hidup, yang sekarang menjadi Energi dan Perindustrian. Tahun 2016 di Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system tugas Dewan dalam bidang keahlian perancangan undang-undang, analisa kebijakan APBN, pemantauan peraturan perundangan dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan. Tim Penyusun Buku Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel.



Andreas Ambesa, lahir di kota Ende, Flores. Meraih gelar S1 dari Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Mengawali karirnya sebagai jurnalis dan pernah sebagai koresponden Kantor Berita Jepang, Kyodo News Service, Biro Jakarta, 1990. Lebih banyak mengamati masalah hubungan internasional, komunikasi politik dan hubungan masyarakat. Sebelum memasuki dunia politik, terakhir menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk (Perusahaan Induk Indosiar Visual Mandiri) 2010. Karirnya di bidang politik menjabat sebagai Sekretaris Dewan

Pertimbangan DPP Partai NasDem 2013-2019 dan Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI 2015-2019. Kini bekerja sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.



Dr. (Cand) T. Eriko Silaban, S.Pd., M.Pd lahir di Lumban Sihombing, Baringin - Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Dia menyelesaikan pendidikan dasar sampai sekolah menengah pertama di Humbang Hasundutan, kemudian sekolah menengah atas di Kab. Karo. Pendidikan Magister (S-2) Teknologi Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED), saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (IPDN - KEMENDAGRI). Aktif menulis beberapa artikel, jurnal,

dan buku bidang pendidikan dan pemerintahan. Saat ini bertugas di Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Tenaga Ahli Fraksi bidang Komisi X DPR RI. Pernah bekerja sebagai Guru SMK di Kota Medan. Menjadi kader Partai NasDem sejak 2014 dan Alumni I Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, kemudian menjadi Ketua Komisi Saksi NasDem (KSN) Provinsi Sumatera Utara. Juga bertugas di DPP Partai NasDem sebagai Koordinator Departemen Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipercaya sebagai Waketum Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (PEKNAS) dan Wasekjen DPP HP3KI (Himpunan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia).

Muh. Ardiansah Laitte, lahir di Makassar 19 Januari 1987 menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) pada tahun 2011 dan melanjutkan Program Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2017. Saat ini tengah bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem yang bertugas pada Badan Anggaran. Selain itu, penulis aktif di dalam aktivitas riset dan kemasyarakatan. Sampai saat ini penulis tercatat menjadi peneliti di Suropati Syndicate. Penulis juga aktif menulis di berbagai media baik itu cetak maupun elektronik bahkan menjadi founder



dari Locita.co yang merupakan platform digital bagi para penulis pemula. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi intra maupun ekstra kampus. Pernah menjadi Ketua I Ikatan Mahasiswa Akuntansi dan Direktur Ekonomi Pusat Studi Demokrasi Unhas. Pada organisasi eksternal penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan pernah menjabat sebagai Direktur Badan Pengelola Pelatihan HMI cabang Makassar Timur dan Ketua Balitbang PB HMI periode 2015-2017.

Hafizurrahman lahir di Binjai Sumatera Utara, pada 1987, Menyelesaikan Pendidikan Magister (S2) pada 2013 di departemen Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bekerja sebagai Tenaga Ahli anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem 2014-2019 dan sekarang sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI/Korinbang. Tim Penyusun Buku Menyerap Aspirasi Menciptakan Solusi Satu Tahun Kiprah Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Rachmat Gobel.



Rismunandar lahir di Bima NTB, 10 September 1990. Menyelesaikan Program Magister (S2) di Fakultas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University tahun 2018. Saat ini, penulis tengah bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem DPR RI yang ditugaskan di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup, serta Kelautan & Perikanan. Sebelum bekerja sebagai Tenaga Ahli, penulis pernah bekerja sebagai konsultan bidang lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen lingkungan dan *carbon stock/trade* di beberapa daerah di Indonesia. Saat masih di kampus,

masih di kampus, penulis juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Sosial, Politik dan Budaya PB HMI periode 2016-2018. Selain itu, penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Ecologica PSL IPB pada periode 2015-2016.

Editor

Herman Effendi lahir di Bukit tinggi, Sumatera Barat. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Padang, Sumatera Barat, dan menamatkan sekolah lanjutan atas di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan strata 1 (S1) diperoleh di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mengawali karir sebagai wartawan Harian Ekonomi Neraca pada 1990, dipercaya mengasuh rubrik wawancara khusus dengan pejabat, pengusaha dan akademisi pada masa itu. Dalam perjalanannya kemudian, pemegang sertifikat Fund Manager dari



Masyarakat Pasar Modal Indonesia ini, diminta untuk menggawangi rubrik Ekonomi Makro dan Finansial ini lebih dari 10 tahun. Pada saat bersamaan juga aktif sebagai penulis di Jurnal Pasar Modal yang diterbitkan Economic Financial Research (ECFIN), dan jurnal Strategic Intelligence, buletin bulanan yang diterbitkan lembaga asing yang bergerak di bidang konsultan investasi. Pada 2005, mengundurkan diri dari Harian Ekonomi Neraca, untuk mendirikan dan mengelola lembaga yang bergerak di bidang strategic communication bersama sejumlah teman. Lembaga ini sampai sekarang bermitra dengan sejumlah klien, perusahaan dalam negeri maupun multinasional, serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Sejak tahun 2019 dia juga tercatat sebagai salah seorang Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Dr. (H.C.) Rachmat Gobel. (*)

Design & Layout



La Ode Atri Sarjani Munanta lahir di Watuputih, Muna-Sulawesi Tenggara pada 29 September 1989. Pendidikan strata 1 (S1) diperoleh di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin dan Magister pada jurusan yang sama di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 2016. Saat ini, bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai NasDem DPR RI yang ditugaskan di Komisi V yang membidangi infrastruktur, transportasi, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta pencarian dan pertolongan.

RACHMAT GOBEL

Restorasi untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa

KIPRAH TAHUN KE-3 KINERJA WAKIL KETUA DPR RI/KORINBANG

RESTORASI adalah kata kunci bagi pergerakan Partai NasDem yang lahir dari kegelisahan Surya Paloh atas perjalanan situasi dan kondisi bangsa. Gerakan reformasi yang semula diniatkan dan diharapkan sebagai langkah untuk melakukan koreksi terhadap praktik dan kebijakan yang dianggap salah atau tidak tepat pada rezim masa lalu, dalam faktanya tidak berlangsung sebagaimana yang dicita-citakan.

Gerakan reformasi yang diharapkan menghilangkan berbagai praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, dalam kenyataannya tidak terlalu mengembirakan malah marak dan tumbuh subur, merasuk ke dalam kehidupan kemasyarakatan. Demokrasi juga berjalan gamang dan menghasilkan kompetisi yang bersifat transaksional yang berakhir dengan transaksional pragmatis itu sendiri.

Restorasi adalah gerakan perubahan yang menatap masa depan dengan landasan cara pikir, nilai filosofi kearifan, adat istiadat yang hidup di tengah bangsa serta konstitusi UUD 45. Gerakan untuk memperkuat kembali jati diri bangsa yang diwariskan para pahlawan, *founding fathers*, semangat berdaulat untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Semangat inilah yang membangkitkan solidaritas, kebersamaan, dan gotong royong para *founding father* sehingga mampu memerdekakan bangsa ini, mendobrak belenggu penjajahan yang bercokol lebih dari 3 abad.

Semangat restorasi inilah yang tentunya menjadi salah satu alasan keputusan Rachmat Gobel bergabung dan menjadi bagian kader Parta NasDem pada 2016. Ia meninggalkan dunia bisnis yang sudah digelutinya lebih dari 30 tahun, sejak usia muda ketika menerima tanggung jawab sebagai pewaris grup usaha National Gobel dari ayahnya Thayeb Mohammad Gobel yang wafat pada 1984.

Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia yang diusung Partai NasDem sangat mengenai dalam hati dan pikiran Rachmat Gobel. Partai NasDem merumuskan gerakan restorasi ini dalam visi “Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.” Ada tiga kata kunci penting dalam visi ini yaitu merdeka, kedaulatan ekonomi, dan martabat budaya.

Sejalan dengan amanat partai yang mempercayainya sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinasi Pembangunan dan Industri (Korinbang), mewujudkan visi kedaulatan ekonomi adalah fokus utama dari agenda kerja Rachmat Gobel. Visi ini menjadi landasan baginya dalam menjalankan fungsi politik sebagai anggota dan pimpinan DPR RI, baik itu dalam kegiatan bidang legislasi, pengawasan, termasuk dalam diplomasi parlemen.

BAGIAN PENERBITAN BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN SETJEN DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5687
Email: bag_penerbitan@dpr.go.id



EBOOK



dpr.go.id